



PEMERINTAH KABUPATEN BULUKUMBA

**LAPORAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH**

TAHUN 2023



L P P D

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu 'alaikum Wr. Wb .

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT, atas limpahan rahmat dan hidayah - NYA sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Bulukumba Tahun 2023.

Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) adalah salah satu kewajiban bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah untuk menjalankan amanah Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

LPPD merupakan salah satu kewajiban yang harus dipenuhi dalam rangka mendukung transparansi dan akuntabilitas pemerintahan. Tersusunnya Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2023 selanjutnya digunakan sebagai dasar Pemerintah Pusat melakukan pembinaan dalam rangka peningkatan kapasitas pemerintahan daerah dan juga sebagai dasar Pemerintah Pusat memberikan penghargaan kepada Pemerintah Daerah yang dinilai berkinerja tertinggi terhadap hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) terhadap LPPD.

Demikian LPPD (Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah) Kabupaten Bulukumba Tahun 2023 ini disusun, semoga dapat menjadi gambaran capaian kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kabupaten Bulukumba Tahun 2023 sekaligus sebagai bahan perumusan kebijakan Pemerintah dan pembangunan daerah tahun berikutnya .

Wassalamu 'alaikum Wr .Wb .

BULUKUMBA, MARET 2024



MUCHTAR ALI YUSUF

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
Daftar Tabel	iii
Daftar Gambar	v
Daftar Grafik	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Penjelasan Umum.....	1
1.3 Sejarah Singkat Kabupaten Bulukumba	4
1.4 Data geografis wilayah;	9
1.5 Jumlah penduduk;	13
1.6 Potensi Unggulan.....	22
1.7 Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.....	41
1.8 Perencanaan Pembangunan Daerah.....	48
1.9 Visi dan Misi Kepala Daerah;	59
1.10 Program Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Jangka Menengah;	64
1.11 Penerapan Standar Pelayanan Minimal	115
BAB II CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH 122	
2.1 Capaian Kinerja Makro	122
2.2 Capaian Kinerja Penyelenggaran Urusan Pemerintahan.....	122
2.3 Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	210
BAB III CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN ..	351
3.1 Tugas Pembantuan Pusat yang Dilaksanakan oleh Daerah	351
BAB IV PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL.....	374
4.1 Latar Belakang.....	374
4.2 Kebijakan Umum.....	378
4.3 Arah Kebijakan	379
4.4 Capaian SPM.....	380
BAB V PENUTUP	442

Daftar Tabel

Tabel 1. 1	Tinggi Wilayah dan Jarak ke Ibukota Kabupaten/Kota	11
Tabel 1. 2	Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin	15
Tabel 1. 3	Rasio Jenis Kelamin Kabupaten Bulukumba tahun 2018-2022	16
Tabel 1. 4	Pembagian Wilayah Administrasi Kabupaten Bulukumba	16
Tabel 1. 5	Jumlah PNS Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan Tahun 2023	20
Tabel 1. 6	Jumlah PNS Berdasarkan Jabatan dan Jenis Kelamin Tahun 2023	21
Tabel 1. 7	Jumlah PNS Berdasarkan Tingkat Kepangkatan Tahun 2023..	21
Tabel 1. 8	Luas Lahan Sawah (Ha) Tahun 2019-2023	22
Tabel 1. 9	Luas Lahan Sawah Menurut Irigasi Tahun 2019-2023.....	23
Tabel 1. 10	Luas Lahan Bukan Sawah Tahun 2023	24
Tabel 1. 11	Luas Tanam, Luas Panen dan Produksi Padi Sawah (GKP) Tahun 2019-2023	25
Tabel 1. 12	Luas Tanam, Luas Panen dan Produksi Jagung (Pipilan Kering) Tahun 2019-2023	25
Tabel 1. 13	Luas Tanam, Luas Panen dan Produksi Ubi Kayu Tahun 2019-2023.....	26
Tabel 1. 14	Luas Tanam, Luas Panen dan Produksi Ubi Jalar Tahun 2019-2023.....	27
Tabel 1. 15	Luas Lahan, Luas Panen dan Produksi Kacang Tanah (Biji Kering) Tahun 2019-2023.....	28
Tabel 1. 16	Luas Tanam, Luas Panen dan Produksi Kacang Hijau Tahun 2019-2023.....	28
Tabel 1. 17	Luas Tanam, Luas Panen dan Produksi Kedelai (Biji Kering)	29
Tabel 1. 18	Luas Areal dan Produksi dan Banyaknya Petani Komoditi Kelapa Dalam	30
Tabel 1. 19	Luas Areal dan Produksi Komoditi Kelapa Hibrida Menurut Kecamatan di Kabupaten Bulukumba Tahun 2019-2023	31
Tabel 1. 20	Luas Areal, Produksi dan Banyaknya Petani Komoditi Kopi Robusta Menurut Kecamatan di Kabupaten Bulukumba Tahun 2019-2023	31
Tabel 1. 21	Luas Areal, Produksi dan Banyaknya Petani Komoditi Kopi Arabika	32
Tabel 1. 22	Luas Areal, Produksi dan Banyaknya Petani Komoditi Cengkeh Menurut Kecamatan di Kabupaten Bulukumba Tahun 2019 – 2023	33
Tabel 1. 23	Luas Areal, Produksi dan Banyaknya Petani Komoditi Kakao Menurut Kecamatan di Kabupaten Bulukumba Tahun 2019-2023	34
Tabel 1. 24	Luas Areal, Produksi dan Banyaknya Petani Komoditi Jambu Mete	34

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2023

Tabel 1. 25	Luas Areal, Produksi dan Banyaknya Petani Komoditi Pala Menurut Kecamatan di Kabupaten Bulukumba Tahun 2019 – 2023	35
Tabel 1. 26	Luas Areal, Produksi dan Banyaknya Petani Komoditi Lada Menurut Kecamatan di Kabupaten Bulukumba Tahun 2019-2023	36
Tabel 1. 27	Luas Areal, Produksi dan Banyaknya Petani Komoditi Karet Menurut Kecamatan di Kabupaten Bulukumba Tahun 2019 – 2023	37
Tabel 1. 28	Produksi Perikanan Tangkap/Laut di 7 Kecamatan Pesisir Tahun 2019-2023	37
Tabel 1. 29	Perkembangan Populasi Ternak di Kabupaten Bulukumba Tahun 2019-2023	39
Tabel 1. 30	Realisasi Pendapatan Menurut Jenis Pendapatan	41
Tabel 1. 31	Realisasi Belanja Menurut Jenis Belanja Kabupaten Bulukumba Tahun 2023.....	47
Tabel 1. 32	Realisasi Pembiayaan Kabupaten Bulukumba Tahun 2023 .	48
Tabel 1. 33	Penjelasan Visi RPJMD Kabupaten Kepulauan Bulukumba 2021-2026.....	60
Tabel 1. 34	Perumusan Penjelasan Misi RPJMD Kabupaten Bulukumba 2021-2026.....	62
Tabel 1. 35	Kegiatan Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen RKPD Tahun Anggaran 2023.....	70
Tabel 1. 36	Integrasi SPM Ke Dalam Arah Kebijakan Pembangunan Berdasarkan RPJMD Kabupaten Bulukumba Tahun 2021-2026.....	117
Tabel 2. 1	Indikator Kinerja Makro Kabupaten Bulukumba Tahun 2023	122
Tabel 2. 2	Interval Nilai dan Predikat Penilaian Realisasi Kinerja	212
Tabel 3. 1	Matriks Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan Bidang Urusan Pertanian	354
Tabel 3. 2	Matriks Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan Bidang Urusan Perdagangan	372

**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2023**

Daftar Gambar

Gambar 1. 1 Lambang Daerah Kabupaten Bulukumba.....	7
Gambar 1. 2 Peta Administratif Kabupaten Bulukumba	9
Gambar 1. 3 Peta Topografi Bulukumba.....	10
Gambar 1. 4 Peta Geologi Bulukumba	11
Gambar 1. 5 Peta Daerah Aliran Sungai (DAS) di Bulukumba	12

**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2023**

Daftar Grafik

Grafik 1. 2 Jumlah dan Kepadatan Penduduk Kabupaten Bulukumba	13
Grafik 1. 3 Jumlah Penduduk dan Pertumbuhan Penduduk.....	14
layah dan Jarak ke Ibukota Kabupaten/Kota Menurut Kecamatan di Kabupaten Bulukumba, 2022	I-11
Grafik I-2 Jumlah dan Kepadatan Penduduk Kabupaten Bulukumba Menurut Kecamatan Tahun 2022	I-13

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perbaikan kinerja pemerintah daerah menduduki posisi penting dalam strategi pemberdayaan pemerintah daerah untuk pelaksanaan otonomi daerah dan mewujudkan desentralisasi yang luas, nyata dan bertanggung jawab. Perbaikan kinerja pemerintah daerah dapat menciptakan pelaksanaan otonomi daerah yang bersih, bertanggung jawab serta mampu menjawab tuntutan tata pemerintahan yang baik. Perbaikan kinerja pemerintah daerah tersebut mewajibkan kepala daerah wajib melaporkan pertanggungjawaban pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan guna mencapai good governance.

Hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta mengacu ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Bupati/Walikota berkewajiban menyampaikan LPPD kabupaten/kota kepada Menteri melalui Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat yang dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. LPPD disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah digunakan sebagai dasar Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD), penilaian, perumusan kebijakan, dan pembinaan yang dilakukan oleh kementerian/lembaga pemerintah non kementerian. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah menyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan format yang ditetapkan oleh Menteri. Laporan ini disusun dengan pengumpulan data yang diperlukan sesuai dengan indikator kinerja berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, akurasi dan objektif.

1.2 Penjelasan Umum

1 Undang- Undang Pembentukan Daerah;

Pemerintah Kabupaten Bulukumba dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi, Pemerintah Kabupaten bulukumba

**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2023**

periode 2021-2026 adalah hasil pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2020 yang disahkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.73- 356 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota pada Provinsi Sulawesi.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat LPPD adalah laporan yang disampaikan oleh pemerintah daerah kepada pemerintah pusat yang memuat capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelaksanaan tugas pembantuan selama 1 (satu) tahun anggaran. Peraturan perundang-undangan yang melatar belakangi penyusunan Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan

**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2023**

- Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 11. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 288);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 178);
 14. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008–2028 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008–2028 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 Nomor 7);
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 7 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2023

Kabupaten Bulukumba Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2010 Nomor 7);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 14 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2021 Nomor 1);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2021 Nomor 4);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2023 Nomor 3);
19. Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2023 Nomor 15);
20. Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 69 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2021 Nomor 69);
21. Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Perubahan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2023 Nomor 35);

1.3 Sejarah Singkat Kabupaten Bulukumba

Selamat datang di "**Butta Panrita Lopi**" Kabupaten Bulukumba, Ikon perahu pinisi terletak tepat di jantung kota dan telah menjadi *landmark* kota Kabupaten Bulukumba.

Kalimat "Butta Panrita Lopi" mempunyai arti yang jika dipenggal perkalimat dari setiap kata adalah : **Butta** artinya Tanah sedangkan **Panrita** artinya Ahli membuat, sementara **Lopi** mempunyai arti Perahu. Sehingga kalimat tersebut jika digabungkan mempunyai arti: Bulukumba adalah tempat ahlinya pembuat perahu, yakni pembuat perahu tradisional Pinisi. Disamping sebagai ahli pembuat perahu, juga ahli

**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2023**

berlayar yang berani menantang kerasnya ombak di lautan; "**takkujunga bangunturu lakugunciri gulingku kualleangi tallanga na toalia "** (*bila tekadku sudah bulat kupasang kemudiku kukembangkan layarku lebih baik tenggelam daripada kembali ke daratan*) Bulukumba berasal dari kata Bulukumupa dan pada tingkatan dialeg tertentu mengalami perubahan menjadi Bulukumba. Mitologi penamaan "*Bulukumba*", konon bersumber dari dua kata dalam bahasa Bugis yaitu "*Bulu'ku*" dan "*Mupa*" yang dalam bahasa Indonesia berarti "masih gunung milik saya atau tetap gunung milik saya". Mitos ini pertama kali muncul pada abad ke-17 Masehi ketika terjadi perang saudara antara dua kerajaan besar di Sulawesi yaitu kerajaan Gowa dan kerajaan Bone. Di pesisir pantai yang bernama "*Tanahkongkong*", disitulah utusan Raja Gowa dan Raja Bone bertemu, mereka berunding secara damai dan menetapkan batas wilayah pengaruh kerajaan masing-masing. "Bangkeng Buki" (secara harfiah berarti kaki bukit), yang merupakan barisan lereng bukit dari Gunung Lompo Battang diklaim oleh pihak kerajaan Gowa sebagai batas wilayah kekuasaannya mulai dari Kindang sampai ke wilayah bagian Timur. Namun pihak kerajaan Bone berkeras mempertahankan Bangkeng Buki sebagai wilayah kekuasaannya mulai dari Barat sampai ke Selatan.

Berawal dari peristiwa tersebut kemudian tercetuslah kalimat dalam bahasa Bugis "*Bulukumupa*", yang kemudian pada tingkatan dialek tertentu mengalami perubahan proses bunyi menjadi "*Bulukumba*". Konon sejak itulah nama Bulukumba mulai ada dan hingga saat ini resmi menjadi sebuah kabupaten.

Peresmian Bulukumba menjadi sebuah nama kabupaten dimulai dari terbitnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi, yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 5 Tahun 1978 tentang Lambang Daerah. Akhirnya setelah dilakukan seminar sehari pada tanggal 28 Maret 1994 dengan narasumber Prof. Dr. H. Ahmad Mattulada (ahli sejarah dan budaya), maka ditetapkanlah hari jadi Kabupaten Bulukumba, yaitu tanggal 4 Februari 1960 melalui Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 1994 tentang Hari Jadi Kabupaten Bulukumba. Secara yuridis formal Kabupaten Bulukumba resmi menjadi daerah tingkat II setelah ditetapkan Lambang Daerah Kabupaten Bulukumba oleh DPRD Kabupaten Bulukumba pada tanggal 4 Februari 1960 dan selanjutnya dilakukan pelantikan Bupati Pertama yaitu Andi Patarai pada tanggal 12 Februari 1960.

a. Slogan Kabupaten Bulukumba

"Mali' siparappe, Tallang sipahua", Ungkapan yang mencerminkan perpaduan dari dua dialek bahasa Bugis-Makassar tersebut merupakan gambaran sikap batin masyarakat Bulukumba untuk mengembang amanat persatuan di dalam mewujudkan keselamatan bersama demi terciptanya tujuan pembangunan lahir dan batin, material dan spritual, dunia dan akhirat. Paradigma kesejarahan, kebudayaan, dan keagamaan memberikan nuansa moralitas dalam sistem pemerintahan yang pada tatanan tertentu menjadi etika bagi struktur kehidupan bermasyarakat. Nuansa moralitas ini pula yang mendasari lahirnya slogan pembangunan "Bulukumba Berlayar" yang mulai disosialisasikan pada bulan September 1994 dan disepakati penggunaannya pada tahun 1996. Konsepsi "Berlayar" sebagai moral pembangunan lahir batin mengandung filosofi yang cukup dalam serta memiliki kaitan kesejarahan, kebudayaan dan keagamaan dengan masyarakat Bulukumba. *"Berlayar"*, merupakan sebuah akronim dari kalimat kausalitas yang berbunyi *"Bersih Lingkungan Alam Yang Ramah"*. Filosofi yang terkandung dalam slogan tersebut dilihat dari tiga sisi pijakan yaitu:

b. Sejarah (Historis)

Bulukumba lahir dari suatu proses perjuangan panjang yang mengorbankan harta, darah, dan nyawa. Perlawanan rakyat Bulukumba terhadap Kolonial Belanda dan Jepang menjelang Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 1945 diawali dengan terbentuknya *"Barisan Merah Putih"* dan *"Laskar Brigade Pemberontakan Bulukumba Angkatan Rakyat"*.

Organisasi yang terkenal dalam sejarah perjuangan ini, melahirkan pejuang yang berani mati menerjang gelombang dan badai untuk merebut cita-cita kemerdekaan sebagai wujud tuntutan hak asasi manusia dalam hidup berbangsa dan bernegara.

c. Kebudayaan (Kultural)

Dari sisi budaya Bulukumba telah tampil menjadi sebuah "legenda modern", dalam kancah percaturan kebudayaan nasional. Bahkan melalui industri budaya dalam bentuk perahu baik itu perahu jenis pinisi, padewakkang, lambo, pajala, maupun jenis lepa-lepa yang telah berhasil mencuatkan nama Bulukumba di dunia internasional. Kata layar memiliki pemahaman terhadap adanya subyek yang bernama perahu sebagai suatu refleksi kreativitas masyarakat Bulukumba.

d. Keagamaan (Religius)

Masyarakat Bulukumba telah bersentuhan dengan ajaran agama Islam sejak awal abad ke-17 Masehi, yang diperkirakan tahun 1605 M. Ajaran Agama Islam ini dibawa oleh 3 (tiga) ulama besar (waliyullah) dari Pulau Sumatera yang masing-masing bergelar Dato Tiro (Bulukumba), Dato Ribandang (Makassar) dan Dato Patimang (Luwu). Ajaran Agama Islam yang berintikan tasawwuf ini menumbuhkan kesadaran religius bagi penganutnya dan menggerakkan sikap keyakinan mereka untuk berlaku zuhud, suci lahir batin selamat dunia dan akhirat dalam kerangka tauhid "*Appasewang*" (meng Esakan Allah SWT).

e. Lambang Daerah

Gambar 1. 1
Lambang Daerah Kabupaten Bulukumba



Lambang Daerah Kabupaten Bulukumba ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 13 Tahun 1987, Lambang Daerah mempunyai beberapa makna yakni :

1. Perisai Persegi Lima
Melambangkan sikap batin masyarakat Bulukumba yang teguh mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia.
2. Padi & Jagung
Melambangkan mata pencaharian utama dan merupakan makanan pokok masyarakat Bulukumba.
3. Bulir Padi
Melambangkan tanggal 17 sebagai tanggal kemerdekaan Republik Indonesia.
4. Daun Jagung
Sejumlah 8 menandakan bulan Agustus sebagai bulan kemerdekaan Republik Indonesia.
5. Kelopak buah jagung
Berjumlah 4 dan bunga buah jagung berjumlah 5 menandakan tahun 1945 sebagai tahun kemerdekaan Republik Indonesia.
6. Perahu Pinisi

**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2023**

Sebagai salah satu mahakarya ciri khas masyarakat Bulukumba, yang dikenal sebagai "Butta Panrita Lopi" atau daerah bermukimnya orang yang ahli dalam membuat perahu.

7. Layar Perahu Pinisi

Berjumlah 7 buah melambangkan jumlah kecamatan yang ada di Kabupaten Bulukumba saat logo tersebut dibuat tapi sekarang sudah dimekarkan menjadi 10 kecamatan.

8. Tulisan aksara lontara di sisi perahu "*Mali Siparappe, Tallang Sipahua*"

Mencerminkan perpaduan dari dua dialek Bugis Makassar yang melambangkan persatuan dan kesatuan dua suku besar yang ada di Kabupaten Bulukumba.

9. Dasar Biru

Mencerminkan bahwa Kabupaten Bulukumba merupakan daerah maritim.

**f. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(DPRD) Kabupaten Bulukumba dari Periode Ke Periode;**

1. LETDA. H. M. KASIJO
2. Drs. ANDI MA'MUR JAMA
3. ANDI MAPPANYULLE
4. KAPTEN. POL. AS. KOTTENG
5. MAYOR. A. BASO SYAM DAUD
6. KOLONEL H. ANDI M. AMIRUDDIN, BA
7. LETKOL. H. M. SYAMSUDDIN MASSA
8. H. ANDI AMIR KARIM
9. Drs. H. ANDI HARDI PANGKI, MM
10. H. ANDI ADNAN MANAF, BA
11. H. M. ARIF, SE
12. Drs. H. ANDI MUTTAMAR MATTOTORANG
13. ANDI HAMZAH PANGKI, S.Pi
14. H. RIJAL, S.Sos

g. Bupati Bulukumba Dari Periode Ke Periode;

1. ANDI PATARAI (12 Februari 1960 – 1966)
2. Drs. ANDI BAKRI TANDARAMANG (1966 – 1978)
3. Drs. AMIN SITURU (1978 – 25 Nopember 1978, PjS)
4. Drs. H. A. HASANUDDIN (25 Nopember 1978 – 4 Maret 1980, PjS)
5. Drs. H. ABD. MALIK HAMBALI (4 Maret 1980 – 4 Maret 1985)
6. Drs. H. ANDI KUBE DAUDA (4 Maret 1985 – 4 Maret 1990)
7. Drs. A. THAMRIN (4 Maret 1990 – 4 Maret 1995)
8. Drs. H. A. PATABAI PABOKORI (1995 - 2005)
9. A. M. SUKRI A. SAPPEWALI (6 September 2005 – 6 September 2010)

**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2023**

10. DR. H. AZIKIN SOLTHAN, M.Si (6 September 2010 – 9 November 2010, Pj)
11. H. ZAINUDDIN HASAN, SE, MBA (9 November 2010 – 9 November 2015)
12. Drs. H. MUH. YUSUF SOMMENG, M.Si (13 November 2015 – 17 Februari 2016, Pj)
13. A. M. SUKRI A. SAPPEWALI (17 Februari 2016 – 17 Februari 2021)
14. Ir. MISBAWATI A. WAWO, MM (17 Februari 2021 – 26 Februari 2021, Plh)
15. MUCHTAR ALI YUSUF (26 Februari 2021 – sekarang)

1.4 Data geografis wilayah;

Kabupaten Bulukumba adalah salah satu Daerah di Provinsi Sulawesi Selatan. Ibu kota kabupaten ini terletak di Kota Bulukumba. Kabupaten Bulukumba memiliki luas wilayah 1.154.58 km².

Adapun dengan batas -batas wilayah Kabupaten Bulukumba sebagai berikut :

1. Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Sinjai
2. Sebelah timur berbatasan dengan Teluk Bone
3. Sebelah selatan berbatasan dengan Kepulauan Selayar
4. Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Bantaeng

Gambar 1. 2
Peta Administratif Kabupaten Bulukumba



Sumber : Perda RTRW Kabupaten Bulukumba Tahun 2012-2032

1.1 Letak dan Kondisi Geografis

Secara Geografis, Kabupaten Bulukumba berada terletak diantara 05°20' - 05°40' Lintang Selatan (LS) dan 119°58' - 120°28' Bujur Timur (BT) dan secara wilayah, Kabupaten Bulukumba berada pada kondisi empat dimensi, yakni dataran tinggi pada kaki Gunung Bawakaraeng – Lompobattang, dataran rendah, pantai dan laut lepas. Kabupaten Bulukumba terletak di ujung bagian selatan ibu kota Provinsi Sulawesi

**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2023**

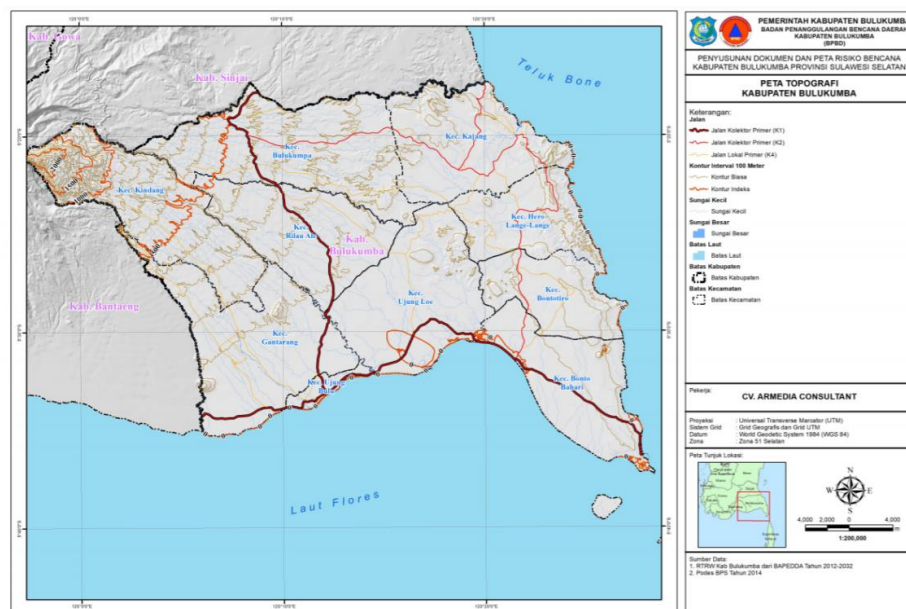
Selatan, terkenal dengan industri perahu pinisi yang banyak memberikan nilai tambah ekonomi bagi masyarakat dan Pemerintah Daerah.

1.2 Topografi

Kabupaten Bulukumba memiliki daerah dataran rendah dengan ketinggian antara 0 s/d 25 meter di atas permukaan laut meliputi tujuh kecamatan pesisir yaitu: Kecamatan Gantarang, Kecamatan Ujungbulu, Kecamatan Ujung Loe, Kecamatan Bonto Bahari Kecamatan Bontotiro, Kecamatan Kajang dan Kecamatan Herlang. Disamping itu. Kabupaten Bulukumba memiliki Daerah bergelombang dengan ketinggian antara 25 s/d 100 meter dari permukaan laut meliputi bagian dari Kecamatan Gantarang, Kecamatan Kindang, Kecamatan Bonto Bahari, Kecamatan Bontotiro, Kecamatan Kajang, Kecamatan Herlang, Kecamatan Bulukumpa dan Kecamatan Rilau Ale. Dan juga terdapat Daerah perbukitan di Kabupaten Bulukumba terbentang mulai dari Barat ke utara dengan ketinggian 100 s/d di atas 500 meter dari permukaan laut meliputi bagian dari Kecamatan Kindang, Kecamatan Bulukumpa dan Kecamatan Rilau Ale.

Wilayah Kabupaten Bulukumba lebih didominasi dengan keadaan topografi dataran rendah sampai bergelombang. Luas dataran rendah sampai bergelombang dan dataran tinggi hampir berimbang. yaitu jika dataran rendah sampai bergelombang mencapai sekitar 50.28% maka dataran tinggi mencapai 49.72%. Untuk lebih jelasnya topografi di Kabupaten Bulukumba dapat dilihat pada gambar dibawah ini.

**Gambar 1. 3
Peta Topografi Bulukumba**



Sumber : Perda RTRW Kabupaten Bulukumba Tahun 2012-2032

Wilayah Kabupaten Bulukumba hampir 95.4 persen berada pada ketinggian 0 sampai dengan 500 meter Di Atas Permukaan Laut (DPL) dengan tingkat kemiringan tanah 0-400. Sementara itu, untuk

kecamatan dengan jarak terjauh dari Ibukota Kabupaten adalah Kecamatan Kajang sekitar 62 km. Selengkapnya pada tabel berikut.

Tinggi Wilayah dan Jarak ke Ibukota Kabupaten/Kota

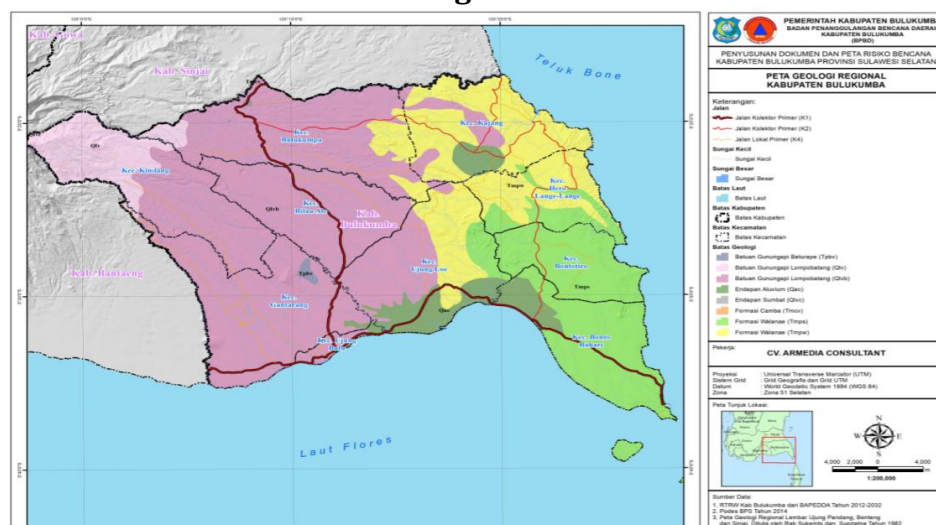
No	Kecamatan	Tinggi Wilayah (mdpl)	Jarak ke Ibukota Kabupaten (km)
1	Gantarang	25	5
2	Ujung Bulu	0	1
3	Ujung Loe	26	11
4	Bonto Bahari	26	27
5	Bontotiro	100	35
6	Kajang	80	42
7	Herlang	80	62
8	Bulukumpa	100	31
9	Rilau Ale	100	24
10	Kindang	500	33

Sumber : Kabupaten Bulukumba Dalam Angka 2024

1.3 Geologi

Keberadaan satuan batuan yang menyusun geomorfologi Bulukumba mempunyai dimensi yang berbeda-beda. Batuan tertua berumur Miosen tengah (Bedrock) berada pada pemekaran dasar laut Teluk Bone sementara batuan termuda berumur Plistosen berada pada sesar Walanae di daratan Bulukumba (Formasi Lompobattang). Hal ini menandakan sistem tektonik yang bekerja tidak selalu sama. Untuk lebih jelasnya geologi di Kabupaten Bulukumba dapat dilihat pada gambar dibawah ini.

Gambar 1. 4
Peta Geologi Bulukumba



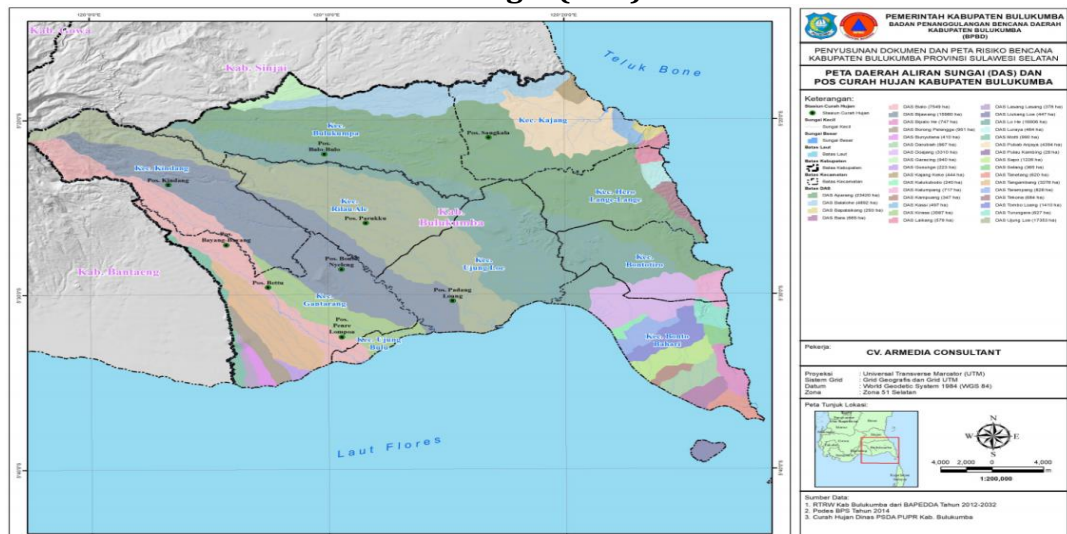
**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2023**

Sumber : Perda RTRW Kabupaten Bulukumba Tahun 2012-2032

1.4 Hidrologi

Sungai di Kabupaten Bulukumba ada 43 aliran yang terdiri dari sungai besar dan sungai kecil. Sungai-sungai ini mencapai panjang 772,5 km dan yang terpanjang adalah sungai Balangbessi yakni 65.30 km, sedangkan yang terpendek adalah sungai Balibo yakni 5 km. Sungai-sungai ini mampu mengairi lahan sawah seluas 23.365 Ha. Untuk lebih jelasnya hidrologi di Kabupaten Bulukumba dapat dilihat pada gambar II-4 dan Tabel II-2 dibawah ini.

Gambar 1. 5
Peta Daerah Aliran Sungai (DAS) di Bulukumba



Sumber : Perda RTRW Kabupaten Bulukumba Tahun 2012-2032

1.5 Klimatologi

Kabupaten Bulukumba mempunyai suhu rata-rata berkisar antara 23.82 °C – 27.68 °C. Suhu pada kisaran ini sangat cocok untuk pertanian tanaman pangan dan tanaman perkebunan. Berdasarkan analisis Smith – Ferguson (tipe iklim diukur menurut bulan basah dan bulan kering) maka klasifikasi iklim di Kabupaten Bulukumba termasuk iklim lembab atau agak basah.

Pemerintah Kabupaten Bulukumba memiliki 14 (empat belas) stasiun penakar hujan yang tersebar di 10 (sepuluh) Kecamatan. Intensitas curah hujan cukup tinggi di periode pertengahan desember sampai dengan pertengahan bulan maret. Dan sepanjang tahun Kabupaten Bulukumba mendapatkan curah hujan berada di atas 1000 mm/ tahun di seluruh kecamatan. Hampir sebagian besar Daerah dengan curah hujan tertinggi terdapat pada wilayah barat laut dan sebagian bagian selatan sedangkan pada daerah tengah memiliki curah hujan sedang, sedangkan pada sebagian bagian selatan curah hujannya rendah.

**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2023**

Curah hujan di Kabupaten Bulukumba sebagai berikut:

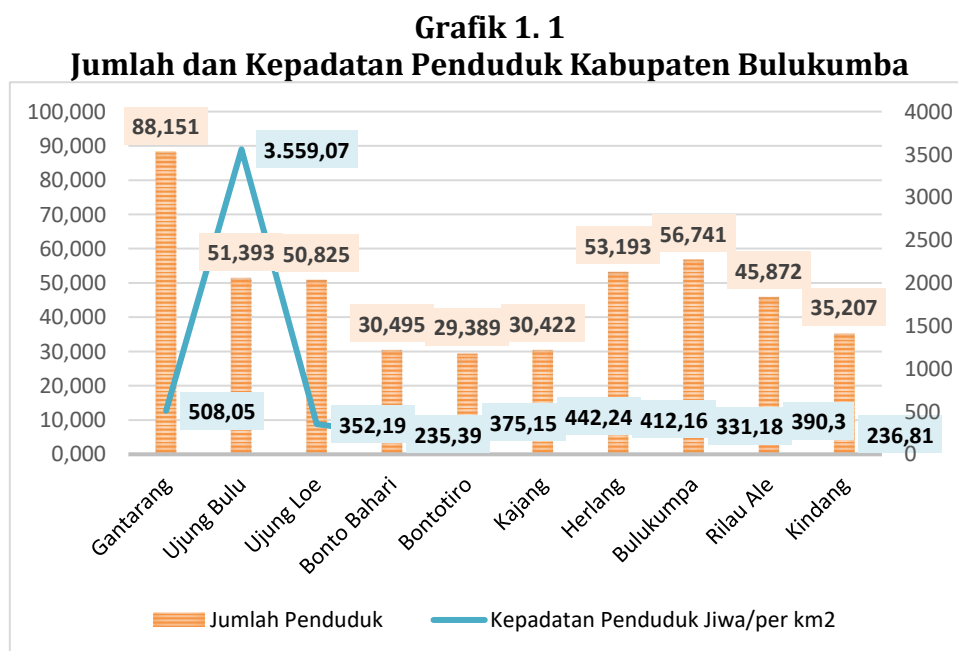
- 1 Curah hujan antara 1000 – 1500 mm/tahun, meliputi Kecamatan Gantarang dan Bulukumpa.
- 2 Curah hujan antara 1500 – 2000 mm/tahun, meliputi Kecamatan Ujung Loe, Ujung Bulu, Bonto Tiro, Rilau Ale dan Kajang.
- 3 Curah hujan di atas 2000 mm/tahun meliputi Kecamatan Kindang, dan Kecamatan Bonto bahari.

1.5 Jumlah penduduk;

Penduduk Kabupaten Bulukumba berdasarkan data BPS penduduk tahun 2024 adalah 471.688 jiwa, yang terdiri atas 230.557 jiwa penduduk laki-laki dan 241.131 jiwa penduduk perempuan. Dibandingkan dengan hasil sensus penduduk tahun 2023, penduduk di Kabupaten Bulukumba mengalami pertumbuhan penduduk sebesar 2,76 persen. Sementara itu besarnya rasio jenis kelamin tahun 2023 penduduk laki-laki terhadap perempuan sebesar 96 persen, selengkapnya pada gambar berikut.

1.1.1 Kepadatan Penduduk

Kepadatan penduduk di Kabupaten Bulukumba tahun 2023 mencapai 403,12 jiwa/km². Kepadatan Penduduk di 10 kecamatan cukup beragam dengan kepadatan penduduk tertinggi terletak di Kecamatan Ujung Bulu dengan kepadatan sebesar 3.559,07 jiwa/km² dan terendah di Kecamatan Bonto Bahari sebesar 235,39 jiwa/Km².



Sumber : BPS Kabupaten Bulukumba. 2024

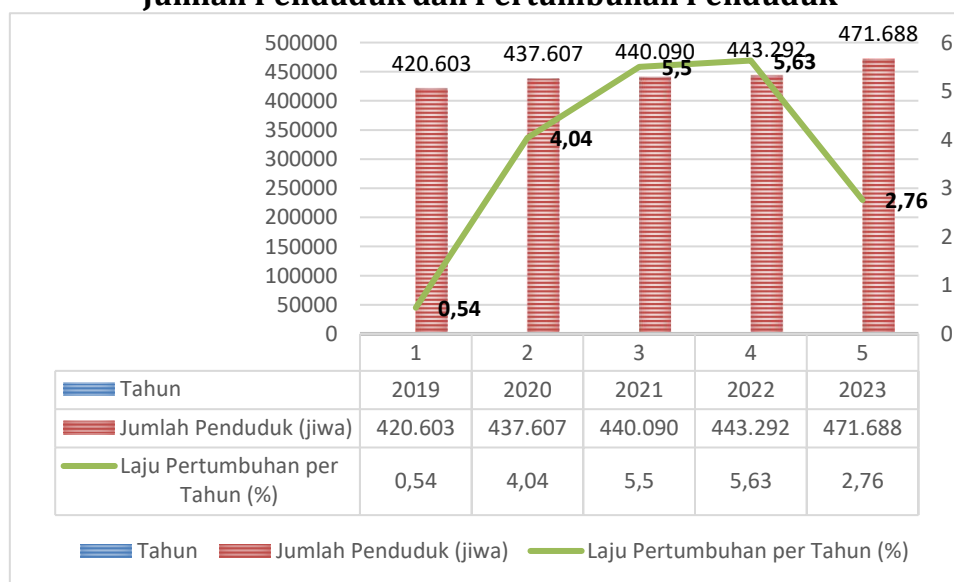
Sebagaimana Tabel diatas menunjukkan bahwa Kecamatan yang memiliki jumlah penduduk terbesar ialah Kecamatan Gantarang, dengan

**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2023**

jumlah penduduk sebesar 88.151 jiwa dan kecamatan yang memiliki jumlah penduduk terkecil adalah Kecamatan Bontotiro dengan jumlah penduduk sebesar 29.389 jiwa. Komposisi penduduk Kabupaten Bulukumba tahun 2023 jika dilihat dari piramida penduduk menunjukkan jenis ekspansif dimana jumlah penduduk usia muda merupakan jumlah yang dominan dan pada tahun 2020 dilakukan Sensus Penduduk (SP2020) pada September 2020 sehingga terjadi peningkatan jumlah penduduk pada tahun tersebut.

Berdasarkan data pada Tabel di bawah, pada tahun 2019 jumlah penduduk Kabupaten Bulukumba sebanyak 420.603 jiwa. Jumlah tersebut terus mengalami peningkatan hingga pada tahun 2023 mencapai 471.688 jiwa. Artinya selama lima tahun terakhir, jumlah penduduk Kabupaten Bulukumba bertambah sekitar 51.085 jiwa atau 10,83 persen. Selengkapnya pada tabel berikut

Grafik 1. 2
Jumlah Penduduk dan Pertumbuhan Penduduk



Sumber : BPS Kabupaten Bulukumba. 2024

1.1.2 Komposisi Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur

Komposisi penduduk menurut kelompok umur dapat menggambarkan tinggi/ rendahnya tingkat kelahiran. jumlah penduduk lansia serta dapat mencerminkan angka beban tanggungan. Angka beban tanggungan atau yang sering disebut Dependency Ratio adalah perbandingan antara jumlah penduduk usia tidak produktif (umur di bawah 15 tahun & 65 tahun ke atas) dengan penduduk usia produktif (umur 15-64 tahun). Dependency ratio dapat digunakan sebagai indikator yang secara kasar dapat menunjukkan keadaan ekonomi suatu negara apakah tergolong negara maju atau negara yang sedang berkembang. Dependency ratio merupakan salah satu indikator

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2023

demografi yang penting. Semakin tingginya persentase dependency ratio menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Sedangkan persentase dependency ratio yang semakin rendah menunjukkan semakin rendahnya beban yang ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Selengkapnya pada tabel berikut.

Tabel 1. 2
Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin

Kelompok Umur	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-Laki	Perempuan	
0–4	14.662	13.807	28.469
5–9	19.869	18.431	38.300
10–14	21.833	20.447	42.280
15–19	16.734	17.029	33.763
20–24	20.143	20.991	41.134
25–29	17.197	17.530	34.727
30–34	16.108	16.504	32.612
35–39	17.079	17.924	35.003
40–44	18.124	19.121	37.245
45–49	16.666	17.748	34.414
50–54	16.489	17.378	33.867
55–59	11.300	13.290	24.590
60–64	8.588	10.484	19.072
65–69	6.005	7.394	13.399
70–74	4.299	5.379	9.678
75+	5.461	7.674	13.135
Bulukumba	230.557	241.131	471.688

Sumber : Kabupaten Bulukumba Dalam Angka 2024

Selanjutnya, untuk mengetahui komposisi penduduk di Kabupaten Bulukumba menurut jenis kelaminnya. Rasio Jenis Kelamin (RJK) tahun 2019-2023 dapat dilihat pada Tabel, Informasi mengenai Rasio Jenis Kelamin dapat digunakan untuk perencanaan pembangunan terutama yang berkaitan dengan perimbangan pembangunan laki-laki dan perempuan secara adil. Selengkapnya pada tabel berikut.

**Tabel 1. 3 Rasio
Jenis Kelamin Kabupaten Bulukumba tahun 2019-2023**

Kelompok Umur	2019	2020	2021	2022	2023
0 - 14	102,06	104,59	104,48	104,35	106,98
15 - 64	87,31	93,79	93,96	94,12	94,30
65 +	69,15	81,13	81,14	81,18	77,10
Total	89,54	95,22	95,24	95,26	95,61

Sumber : BPS Kabupaten Bulukumba. 2024

Pada tahun 2023, Rasio Jenis Kelamin di Kabupaten Bulukumba sebesar 95,61. Artinya, setiap 100 penduduk perempuan ada sebanyak 65 penduduk laki-laki. Dengan kata lain, penduduk perempuan di Kabupaten Bulukumba lebih banyak dibandingkan dengan penduduk laki-laki. Jika dilihat menurut kelompok umur, komposisi penduduk usia 0-14 tahun justru menunjukkan perempuan lebih sedikit dibandingkan laki-laki. Pada Tahun 2023, Rasio Jenis Kelamin untuk penduduk usia 0-14 tahun adalah sebesar 106,98. Sementara itu, untuk penduduk usia 15-64 tahun dan usia 65 tahun keatas komposisinya menunjukkan lebih banyak perempuan dibandingkan laki-laki. Rasio Jenis Kelamin penduduk usia 15-64 tahun sebesar 94,30 pada tahun 2023. Untuk penduduk usia 65 tahun keatas Rasionya sebesar 77,10.

a. Jumlah Kecamatan dan Desa/Kelurahan (Untuk Kabupaten/Kota);

Kabupaten Bulukumba memiliki kecamatan dengan luas wilayah terbesar adalah Kecamatan Gantarang dan Bulukumpa, yang masing-masing seluas 173.51 km² dan 171.33 km² . Sementara, Kecamatan Ujung Bulu yang merupakan pusat kota memiliki luas wilayah terkecil hanya sekitar 14.44 km². Kabupaten Bulukumba secara administratif terdiri dari 10 kecamatan, 27 kelurahan dan 109 desa. Adapun luas wilayah pada masing-masing kecamatan dapat dilihat pada tabel II-1 berikut.

**Tabel 1. 4
Pembagian Wilayah Administrasi Kabupaten Bulukumba**

No.	Kecamatan	Kelurahan	Desa	Lingk.	Dusun	Luas Wilayah (km ²)	% Luas Kecamatan Terhadap Luas Kabupaten
1.	Gantarang	3	18	8	82	173,51	15,03
2.	Ujung Bulu	9	0	31	-	14,44	1,25
3.	Ujung Loe	1	12	4	42	144,31	12,50
4.	Bontobahari	4	4	13	13	108,6	9,41

**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2023**

No.	Kecamatan	Kelurahan	Desa	Lingk.	Dusun	Luas Wilayah (km ²)	% Luas Kecamatan Terhadap Luas Kabupaten
5.	Bontotiro	1	12	5	45	78,34	6,79
6.	Herlang	2	6	10	27	68,79	5,96
7.	Kajang	2	17	11	100	129,06	11,18
8.	Bulukumpa	3	14	7	76	171,33	14,84
9.	Rilau Ale	1	14	5	58	117,53	10,18
10.	Kindang	1	12	4	47	148,67	12,88
Kabupaten Bulukumba		27	109	98	490	1.154,58	100.00

Sumber : Perda RTRW Kabupaten Bulukumba Tahun 2012-2032

b. Jumlah Perangkat Daerah, Unit Kerja Perangkat Daerah

Struktur Organisasi dan Tata Kerja di Tingkat Kabupaten Bulukumba berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 1 Tahun 2021 Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

BUPATI

WAKIL BUPATI

SEKRETARIAT DAERAH :

STAF AHLI :

- a. Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia
- b. Bidang Ekonomi dan Pembangunan
- c. Bidang Politik, Hukum dan Pemerintahan

ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

- a) Bagian Pemerintahan
- b) Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia
- c) Bagian Kesejahteraan Rakyat

ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN

- a) Bagian Ekonomi dan Administrasi Pembangunan
- b) Bagian Pengadaan Barang/Jasa

ASISTEN ADMINISTRASI UMUM

- 1) Bagian Organisasi
- 2) Bagian Umum
- 3) Bagian Perencanaan dan Keuangan
- 4) Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan

SEKRETARIAT DPRD

- Bagian Umum
- Bagian Persidangan dan Perundang-undangan
- Bagian Keuangan

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2023
INSPEKTORAT DAERAH

SKPD BERBENTUK DINAS

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pendidikan dan urusan pemerintahan bidang Kebudayaan;
2. Dinas Kesehatan tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kesehatan;
3. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan tipe B yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan urusan bidang Pertanahan;
4. Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan tipe A yang menyelenggarakan sub urusan pemerintahan bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta bidang Kebakaran;
5. Dinas Sosial tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Sosial;
6. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
7. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
8. Dinas Perikanan tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kelautan dan Perikanan;
9. Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pariwisata;
10. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pertanian dan Ketahanan Pangan
11. Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Koperasi dan UKM tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perdagangan dan urusan pemerintahan bidang Perindustrian;
12. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup dan urusan pemerintahan bidang kehutanan;
13. Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian tipe B yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi, Informatika dan Persandian;
14. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah tipe B yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kearsipan dan urusan pemerintahan bidang Perpustakaan;
15. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;

**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2023**

16. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tipe B yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
17. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ;
18. Dinas Perhubungan tipe B yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perhubungan;

SKPD BERBENTUK BADAN

1. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah tipe A yang melaksanakan fungsi penunjang Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
2. Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah tipe A yang melaksanakan fungsi penunjang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah serta Pendapatan;
3. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia tipe B yang melaksanakan fungsi Penunjang Kepegawaian, Pendidikan dan Latihan;
4. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

KECAMATAN

1. Kecamatan Gantarang dengan tipe A
2. Kecamatan Kindang dengan tipe A
3. Kecamatan Ujung Bulu dengan tipe A
4. Kecamatan Ujung Loe dengan tipe A
5. Kecamatan Bonto Bahari dengan tipe A
6. Kecamatan Bonto Tiro dengan tipe A
7. Kecamatan Herlang dengan tipe A
8. Kecamatan Kajang dengan tipe A
9. Kecamatan Bulukumpa dengan tipe A
10. Kecamatan Rilau Ale dengan tipe A

KELURAHAN

Kelurahan di Kabupaten Bulukumba sebanyak 27 Kelurahan.

BADAN USAHA MILIK DAERAH (BUMD)

Di Kabupaten Bulukumba terdapat perusahaan daerah yaitu Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM).

Perangkat Dekonsentrasi (Instansi Vertikal)

Selain lembaga yang berada di bawah pemerintahan daerah juga terdapat perangkat dekonsentrasi (instansi vertikal) dan UPT pusat yang terdiri dari :

**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2023**

1. KODIM 1411 Bulukumba, KORAMIL di 7 Kecamatan, DANPOS di 3 Kecamatan;
2. POLRES Bulukumba dan POLSEK di 10 Kecamatan;
3. Pengadilan Negeri Bulukumba;
4. Kejaksaan Negeri Bulukumba dan Cabang Kejaksaan Negeri di Kajang;
5. Pengadilan Agama Bulukumba;
6. Badan Pusat Statistik (BPS) Bulukumba;
7. Badan Pertanahan Nasional (BPN) Bulukumba;
8. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bulukumba;
9. Administrator Pelabuhan Bulukumba;
10. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bulukumba;
11. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba;
12. Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Bulukumba

c. Pegawai Pemerintah

Berdasarkan data yang dihimpun dari Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bulukumba untuk Data Tahun 2023, Sekitar 5.573 PNS dari instansi nonvertikal bekerja di Kabupaten Bulukumba. Berdasarkan pendidikan sebanyak 5.534 PNS memiliki pendidikan SMA keatas. Untuk persebaran Golongan Kepangkatan, 28 PNS berada di golongan I, sebanyak 717 PNS berada di golongan II, dan 3.035 PNS berada di golongan III serta 1.793 PNS berada di golongan IV. Berikut jumlah PNS di Kabupaten Bulukumba berdasarkan kualifikasi pendidikan digambarkan pada tabel berikut :

Tabel 1. 5
Jumlah PNS Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan Tahun 2023

No	Tingkatan Pendidikan	Laki-Laki	Perempuan	Total
1	Sekolah Dasar	19	0	19
2	SMP Sederajat	19	1	20
3	SMA Sederajat	397	218	615
4	D.I	2	4	6
5	D.II	28	64	92
6	D.III	83	450	533
7	D.IV	34	79	113
8	S1	1.238	2.349	3.587
9	S2	286	294	580
10	S3	6	2	8
JUMLAH		2.112	3.461	5.573

Sumber: Bulukumba Dalam Angka Tahun 2024

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2023

Adapun Jumlah PNS berdasarkan eselon digambarkan pada tabel berikut ini :

Tabel 1. 6
Jumlah PNS Berdasarkan Jabatan dan Jenis Kelamin Tahun 2023

No	Jabatan	Laki-Laki	Perempuan	Total
1	Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama	25	7	32
2	Administrator	99	39	138
3	Pengawas	175	107	282
4	Jabatan Fungsional Guru	708	1.642	2.350
5	Jabatan Fungsional Medis	151	778	929
6	Jabatan Fungsional Teknis	258	346	604
7	Jabatan Fungsional Umum/Pelaksana	696	542	1.238
JUMLAH		2.112	3.461	5.573

Sumber: Bulukumba Dalam Angka Tahun 2024

Berdasarkan Tingkat Kepangkatan Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Bulukumba tergambarkan pada tabel berikut :

Tabel 1. 7
Jumlah PNS Berdasarkan Tingkat Kepangkatan Tahun 2023

No	Pangkat/gol./ruang	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Juru Muda, I/A	1	-	1
2	Juru Muda Tingkat I, I/B	2	-	2
3	Juru, I/C	5	1	6
4	Juru Tk.I, I/D	19	-	19
Jumlah		27	1	28
5	Pengatur Muda,II/A	21	4	25
6	Pengatur MudaTk.I, II/B	32	11	43
7	Pengatur, II/C	127	230	357
8	Pengatur Tk.I,II/D	174	118	292
Jumlah		354	363	717
9	Penata Muda,III/A	202	450	652
10	Penata MudaTk.I, III/B	141	273	414
11	Penata, III/C	302	505	807
12	Penata Tk.I,III/D	417	745	1.162
Jumlah		1.062	1.973	3.035

**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2023**

No	Pangkat/gol./ruang	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
13	Pembina, IV/A	246	394	640
14	Pembina Tk.I,IV/B	362	690	1.052
15	Pembina UtamaMuda, IV/C	56	34	90
16	Pembina UtamaMadya, IV/D	3	2	5
17	Pembina Utama,IV/E	2	4	6
Jumlah		669	1.124	1.793
TOTAL		2.112	3.461	5.573

Sumber: Bulukumba Dalam Angka Tahun 2024

1.6 Potensi Unggulan

1.6.1 Pertanian

Sektor pertanian merupakan salah satu potensi unggulan yang memberikan kontribusi paling besar terhadap perekonomian Kabupaten Bulukumba. Hal ini didukung dengan sumberdaya lahan yang luas, iklim yang sesuai dan keanekaragaman genetika sumberdaya hayati yang besar.

Luas potensi pertanian yang terdiri dari lahan sawah dan bukan sawah Tahun 2023 yakni **101.622,95Ha**.

a. Potensi lahan sawah

Potensi lahan sawah yang diusahakan sampai tahun 2023 seluas **22.991,33 Ha**. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 1. 8
Luas Lahan Sawah (Ha) Tahun 2019-2023

No	Kecamatan	Diusahakan untuk Pertanian	Sementara Tidak Diusahakan	Jumlah
1	2	3	4	5
1	Gantarang	8.049,69	6,00	8.055,69
2	Ujungbulu	308	27	335,00
3	Ujung Loe	2.906	182	3.088,00
4	Bontobahari	53	10	63,00
5	Bontotiro	25	143	168,00
6	Herlang	170	373,64	543,64
7	Kajang	1.667	783	2.450,00
8	Bulukumpa	3.069	50	3.119,00
9	Rilau Ale	2.814	397	3.211,00
10	Kindang	1.855,00	103	1.958,00

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2023

No	Kecamatan	Diusahakan untuk Pertanian	Sementara Tidak Diusahakan	Jumlah
BULUKUMBA	2023	20.916,69	2.074,64	22.991,33
	2022	22.991,33	-	22.991,33
	2021	22.991	-	22.991,33
	2020	22.985	-	22.985,00
	2019	22.985	-	22.985,00

Sumber : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Tahun 2023

Dari luas lahan sawah tersebut di atas menurut jenis irigasi atau pengairannya, terdiri dari : lahan sawah Irigasi seluas 20.916,69 Hektar atau sekitar 90,97 % dari total lahan sawah menurut irigasi dan jenis lahan sawah tadah hujan sebesar 2.074,64 Hektar, atau 9,02 %. Mayoritas lahan sawah di Kabupaten Bulukumba mampu memproduksi 2 kali dalam setahun. Selanjutnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 1. 9
Luas Lahan Sawah Menurut Irigasi Tahun 2019-2023

No	Kecamatan	Irigasi	Tadah hujan	Rawa pasang surut	Rawa lebak	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7
1.	Gantarang	8.049,69	6,00	-	-	8.055,69
2.	Ujungbulu	308	27	-	-	335,00
3.	Ujung Loe	2.906,00	182	-	-	3.088,00
4.	Bontobahari	53	10	-	-	63,00
5.	Bontotiro	25	143	-	-	168,00
6.	Herlang	170	373,64	-	-	543,64
7.	Kajang	1667	783	-	-	2.450,00
8.	Bulukumpa	3.069	50	-	-	3.119,00
9.	Rilau Ale	2.814	397	-	-	3.211,00
10.	Kindang	1.855	103	-	-	1.958,00
BULUKUMBA	2023	20.916,69	2.074,64	-	-	22.991,33
	2022	20.916,69	2.074,64	-	-	22.991,33
	2021	20.916,69	2.074,64	-	-	22.991,33
	2020	20.923	2.035	-	-	22.958,00
	2019	20.923	2.035	-	-	22.958,00

Sumber : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Tahun 2023

Potensi lahan bukan sawah Tahun 2023 di Kabupaten Bulukumba yang terdiri dari Tegal/Kebun, Ladang/ Huma, PerKebunan, Hutan Rakyat/ Ditanami Pohon, Padang/ Pengembalaan/Padang rumput, Sementara Tidak Diusahakan, Lain-lain, seluas **78.631,62 Ha.** Selanjutnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 1. 10
Luas Lahan Bukan Sawah Tahun 2023

NO	Kecamatan	Lahan bukan sawah								
		Tegal/Kebun	Ladang/ Huma	Perkebunan	Hutan Rakyat/ Ditanami Pohon	Padang/ Pengembalaan /Padangrumput	Sementara Tidak Diusahakan	HUTAN NEGARA	Lain-lain	Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Gantarang	3.177,00	-	4.327,00	62,00	12,00	20,00	181,99	522,01	8.302,00
2	Ujungbulu	1,00	-	-	-	-	-	-	217,00	218,00
3	Ujung Loe	2.758,00	-	112,00	888,00	-	-	-	2.350,00	6.108,00
4	Bontobahari	3.741,70	-	2.187,80	2.289,83	-	20,00	761,82	643,85	9.645,00
5	Bontotiro	3.950,00	-	2.060,50	1.151,50	-	-	-	27,00	7.189,00
6	Herlang	2.555,19	-	2.805,17	500,00	-	-	-	13,29	5.873,65
7	Kajang	4.971,00	-	2.444,09	345,55	-	-	323,45	603,00	8.687,09
8	Bulukumpa	1.253,37	-	10.741,68	612,59	-	-	687,41	19,42	13.314,47
9	Rilau Ale	3.150,00	458,00	3.150,00	471,41	-	-	509,59	182,00	7.921,00
10	Kindang	1.802,09	-	5.758,86	-	-	-	3.795,01	17,45	11.373,41
	Bulukumba	27.359,35	458,00	33.587,10	6.320,88	12,00	40,00	6.259,27	4.595,02	78.631,62

Sumber : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Tahun 2023

1.6.2 Tanaman Pangan

Tanaman pangan yang sangat potensial yakni tanaman padi dan merupakan bahan pangan utama masyarakat, disamping padi, terdapat pula tanaman bahan pangan lainnya seperti Jagung, Ubi Kayu, Ubi Jalar, Kacang Tanah, Kacang Ijo dan Kedelai, yang merupakan tanaman sela atau tanaman antara yang ditanam oleh petani setelah sekali/dua kali panen tanaman padi, khususnya di lokasi lahan persawahan sedangkan pada lokasi lahan non persawahan tanaman tersebut diantaranya merupakan tanaman utama.

1. Padi

Produksi Padi di Kabupaten Bulukumba Tahun 2023 sebesar **285.215,43 Ton** dengan rata-rata produksi **6,37 Ton/Ha**. Produksi tersebut mengalami penurunan dibandingkan tahun 2022 yang mampu menghasilkan **286.679,51 Ton** dengan rata-rata produksi **6,36 Ton/Ha**. Penurunan produksi ini disebabkan karena berkurangnya luas panen akibat puso. Musim kemarau yang cukup Panjang mengakibatkan gagal panen, luas puso tahun 2023 seluas **635,77 Ha**. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1. 11
Luas Tanam, Luas Panen dan Produksi Padi Sawah (GKP) Tahun 2019-2023

No	Kecamatan	Luas Tanam (ha)	Luas Panen (ha)	Produksi (ton)	Rata-rata Produksi (ton/ha)
1	2	3	4	5	6
1	Gantarang	14.158,92	15.746,52	108.640,22	6,90
2	Ujungbulu	551,00	670,00	4.470,96	6,67
3	Ujung Loe	6.221,00	6.250,00	41.294,15	6,61
4	Bontobahari	100,00	126,00	760,29	6,03
5	Bontotiro	303,00	304,00	1.527,22	5,02
6	Herlang	1.005,00	1.013,50	5.823,58	5,75
7	Kajang	4.866,00	4.631,03	27.939,15	6,03
8	Bulukumpa	6.175,00	6.246,00	33.584,79	5,38
9	Rilau Ale	6.076,00	6.449,00	42.642,91	6,61
10	Kindang	2.995,75	3.313,75	18.523,02	5,59
BULUKUMBA	2023	42.451,67	44.750,40	285.206,27	6,37
	2022	44.664,54	45.089,69	286.679,51	6,36
	2021	44.907,93	45.450,74	288.475,79	6,35
	2020	47.714,05	43.869,66	263.749,66	6,01
	2019	45.507,00	42.698,20	277.266,84	6,49

Sumber : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Tahun 2023

2. Jagung

Produksi Jagung tahun 2023 mengalami Penurunan dibandingkan tahun 2022. Pada tahun 2023, produksi jagung mencapai **148.916,27 Ton** atau rata-rata produksi **5,56 Ton/Ha** sedangkan pada tahun 2022 mencapai **175.914,26 Ton/Ha** atau rata-rata produksi **5,74 Ton/Ha**. Hal ini dikarenakan pengaruh iklim/kemarau yang berkepanjangan sehingga penanaman juga berkurang. Disamping itu, faktor serangan hama tikus dan babi juga menjadi keluhan bagi petani. Selanjutnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 1. 12
Luas Tanam, Luas Panen dan Produksi Jagung (Pipilan Kering) Tahun 2019-2023

NO	KECAMATAN	LUAS TANAM (Ha)	LUAS PANEN (Ha)	PRODUKSI (Ton)	RATA-RATA PRODUKSI (Ton/Ha)
1	2	3	4	5	6
1	Gantarang	748,00	1.039,00	7.232,20	6,96
2	Ujungbulu	-	-	-	
3	Ujung Loe	5.346,40	5.402,40	27.302,62	5,05
4	Bontobahari	3.278,00	3.408,00	15.221,47	4,47
5	Bontotiro	3.612,00	7.277,00	39.093,76	5,37
6	Herlang	4.494,00	3.999,00	26.834,55	6,71
7	Kajang	4.313,25	5.538,00	32.305,55	5,83
8	Bulukumpa	25,00	10,00	55,99	5,60
9	Rilau Ale	119,00	128,00	821,89	6,42

**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2023**

NO	KECAMATAN	LUAS TANAM (Ha)	LUAS PANEN (Ha)	PRODUKSI (Ton)	RATA- RATA PRODUKSI (Ton/Ha)
10	Kindang	28,00	8,50	48,25	5,68
Bulukumba	2023	21.963,65	26.809,90	148.916,27	5,55
	2022	30.753,14	30.670,16	175.914,26	5,74
	2021	31.315,83	30.065,39	162.571,88	5,41
	2020	24.319,00	27.440,00	152.702,96	5,56
	2019	21.323,00	27.572,00	140.006,78	5,08

Sumber : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Tahun 2023

3. Ubi Kayu

Produksi ubi kayu tahun 2023 mengalami Penurunan dibandingkan dengan tahun 2022 tetapi mengalami peningkatan produktivitas. Produksi ubi kayu tahun 2023 mencapai **1.158,61 Ton** dengan rata-rata produksi sebesar **20,51 Ton/Ha** sedangkan pada tahun 2022 produksi ubi kayu sebesar **1.419,58 Ton** dan produksi rata-rata sebesar **13,29 Ton/Ha**. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 1. 13
Luas Tanam, Luas Panen dan Produksi Ubi Kayu Tahun 2019-2023

NO	KECAMATAN	LUAS TANAM (Ha)	LUAS PANEN (Ha)	PRODUKSI (Ton)	RATA- RATA PRODUKSI (Ton/Ha)
1	2	3	4	5	6
1	Gantarang	2,00	15,00	316,50	21,10
2	Ujungbulu	-	-	-	-
3	Ujung Loe	-	-	-	-
4	Bontobahari	-	-	-	-
5	Bontotiro	1,00	3,00	35,40	11,80
6	Herlang	-	-	-	-
7	Kajang	32,00	38,50	806,71	20,95
8	Bulukumpa	-	-	-	-
9	Rilau Ale	-	-	-	-
10	Kindang	-	-	-	-
Bulukumba	2023	35,00	56,50	1.158,61	20,51
	2022	95,75	106,75	1.419,58	13,30
	2021	82,85	51,75	698,26	13,49
	2020	245,00	244,00	3.235,48	13,26
	2019	6,00	43,00	891,78	20,74

Sumber : Sumber : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Tahun 2023

**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2023**

4. Ubi Jalar

Produksi Ubi Jalar (Ketela Rambat) tahun 2023 sebanyak **437,90 Ton**, dengan rata-rata produksi sebesar **11,84 Ton/Ha**. Produksi tersebut mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2022 yang mencapai **443,12 Ton** dengan rata-rata produksi sebesar **12,84 Ton/Ha**. Selanjutnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1. 14
Luas Tanam, Luas Panen dan Produksi Ubi Jalar Tahun 2019-2023

NO	KECAMATAN	LUAS TANAM (Ha)	LUAS PANEN (Ha)	PRODUKSI (Ton)	RATA-RATA PRODUKSI (Kw/Ha)
1	2	3	4	5	6
1	Gantarang	19,00	19,00	224,20	11,80
2	Ujungbulu	-	-	-	-
3	Ujung Loe	-	-	-	-
4	Bontobahari	-	-	-	-
5	Bontotiro	-	-	-	-
6	Herlang	-	-	-	-
7	Kajang	9,50	12,50	147,47	11,80
8	Bulukumpa	-	-	-	-
9	Rilau Ale	1,00	5,00	60,12	12,02
10	Kindang	9,50	0,50	6,12	12,24
Bulukumba	2023	38,00	37,00	437,90	11,84
	2022	43,50	34,50	443,12	12,84
	2021	15,50	21,25	272,90	12,84
	2020	92,00	87,50	1.095,70	12,52
	2019	15,00	16,00	200,44	12,53

Sumber : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Tahun 2023

5. Kacang Tanah

Produksi Kacang Tanah di Kabupaten Bulukumba Tahun 2023 sebesar **2.514,59 Ton** dengan rata-rata produksi sebesar **2,32 Ton/Ha**. Produksi Kacang Tanah di Kabupaten Bulukumba tersebar pada 10 (sepuluh) Kecamatan dan terbesar pada **Kecamatan Bontotiro** dengan produksi sebesar **2.023,42 Ton**. Secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1. 15
Luas Lahan, Luas Panen dan Produksi Kacang Tanah (Biji Kering)
Tahun 2019-2023

NO	KECAMATAN	LUAS TANAM (Ha)	LUAS PANEN (Ha)	PRODUKSI (Ton)	RATA-RATA PRODUKSI (Ton/Ha)
1	2	3	4	5	6
1	Gantarang	93,00	93,00	197,12	2,12
2	Ujungbulu	9,00	9,00	15,30	1,70
3	Ujung Loe	30,00	30,00	54,00	1,80
4	Bontobahari	42,00	27,00	50,48	1,87
5	Bontotiro	396,50	849,00	2.023,42	2,38
6	Herlang	-	4,00	9,12	2,28
7	Kajang	-	-	-	-
8	Bulukumpa	-	-	-	-
9	Rilau Ale	-	53,00	113,95	2,15
10	Kindang	-	21,00	51,20	2,44
Bulukumba	2023	570,50	1.086,00	2.514,59	2,32
	2022	1.327,80	953,30	2.207,72	2,32
	2021	620,50	1.079,50	2.464,18	2,28
	2020	2.227,75	1.621,75	3.659,98	2,26
	2019	1.183,00	2.114,00	4.895,61	2,32

Sumber : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Tahun 2023

6. Kacang Hijau

Produksi kacang hijau tahun 2023 mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2022 , yakni mencapai **735,79 Ton** dengan rata-rata produksi sebesar **1,77 Ton/Ha**. Sementara untuk tahun 2022 sebesar **487,89 Ton** dengan rata-rata produksi sebesar **1,36 Ton/Ha**. Produksi Kacang Hijau di Kabupaten Bulukumba terbesar terdapat di Kecamatan **Ujung Loe**. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 1. 16
Luas Tanam, Luas Panen dan Produksi Kacang Hijau Tahun 2019-2023

NO	KECAMATAN	LUAS TANAM (Ha)	LUAS PANEN (Ha)	PRODUKSI (Ton)	RATA-RATA PRODUKSI (Ton/Ha)
1	2	3	4	5	6
1	Gantarang	3,00	3,00	6,00	2,00
2	Ujungbulu	-	-	-	-
3	Ujung Loe	397,00	397,00	702,00	1,77

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2023

NO	KECAMATAN	LUAS TANAM (Ha)	LUAS PANEN (Ha)	PRODUKSI (Ton)	RATA-RATA PRODUKSI (Ton/Ha)
4	Bontobahari	-	-	-	-
5	Bontotiro	-	3,00	5,66	1,89
6	Herlang	11,00	11,00	22,18	2,02
7	Kajang	-	-	-	-
8	Bulukumpa	-	-	-	-
9	Rilau Ale	-	-	-	-
10	Kindang	-	-	-	-
BULUKUMBA	2023	411,00	414,00	735,84	1,78
	2022	325,00	360,00	487,89	1,36
	2021	128,25	88,75	196,68	2,22
	2020	671,00	665,50	1.348,39	2,03
	2019	351,00	351,00	817,78	2,33

Sumber : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Tahun 2023

7. Kedelai

Produksi kacang kedelai tahun 2023 sebesar **2,24 Ton** dengan rata-rata produksi sebesar **1,03 Ton/Ha**. Kondisi tersebut mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2022 yang mencapai **56,09 Ton** dengan rata-rata produksi sebesar **1,04 Ton/Ha**. Sentra produksi kedelai di kabupaten bulukumba terletak di kecamatan Bontobahari. Selanjutnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. 17

Luas Tanam, Luas Panen dan Produksi Kedelai (Biji Kering)

NO	KECAMATAN	LUAS TANAM (Ha)	LUAS PANEN (Ha)	PRODUKSI (Ton)	RATA-RATA PRODUKSI (Ton/Ha)
1	2	3	4	5	6
1	Gantarang	-	-	-	-
2	Ujungbulu	-	-	-	-
3	Ujung Loe	-	-	-	-
4	Bontobahari	100,00	2,00	2,24	1,12
5	Bontotiro	-	-	-	-
6	Herlang	-	-	-	-
7	Kajang	-	-	-	-
8	Bulukumpa	-	-	-	-
9	Rilau Ale	-	-	-	-
10	Kindang	-	-	-	-
Bulukumba	2023	100,00	2,00	2,24	1,12
	2022	54,00	54,00	56,09	1,04
	2021	54,00	54,00	56,09	1,04
	2020	75,00	75,00	121,65	1,62
	2019	8,00	9,00	11,00	1,22

Sumber : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Tahun 2023

**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2023**

1.6.3 Perkebunan

Potensi tanaman perkebunan juga termasuk potensi unggulan seperti : Kelapa Dalam & Hibrida, Kopi Robusta & Arabika, Kakao, Cengkeh, Jambu Mete, Karet, dan Lada.

1. Kelapa Dalam

Potensi Kelapa Dalam Tahun 2023 mencapai **1.966,66 Ton** yang tersebar pada 10 (sepuluh) Kecamatan di Kabupaten Bulukumba dengan jumlah petani mencapai **8.362 KK**. Penurunan Produksi disebabkan oleh kondisi cuaca/iklim/kemarau dengan panas yang cukup tinggi mengakibatkan tanaman kelapa berproduksi rendah dibandingkan tahun sebelumnya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada berikut ini:

Tabel 1. 18
Luas Areal dan Produksi dan Banyaknya Petani Komoditi Kelapa Dalam

NO	KECAMATAN	LUAS AREAL (Ha)	PRODUKSI (Ton)	JUMLAH PETANI (KK)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
1	Gantarang	380	208,65	127
2	Ujungbulu	10	15,44	120
3	Ujung Loe	936	1.500,17	1.827
4	Bontobahari	909	411,66	1.525
5	Bontotiro	959	564,79	1.326
6	Herlang	1.386	0,76	1.180
7	Kajang	1.371	1,30	1.696
8	Bulukumpa	39	26,60	137
9	Rilau Ale	113	23,72	356
10	Kindang	65	2,28	59
Bulukumba	2023	6.168	1.966,66	8.362
	2022	5.623	3.580,02	8.393
	2021	5.627	3.854	9.769
	2020	3.776,50	3.757,12	6.594
	2019	3.909	1.704,32	9.604

Sumber : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Tahun 2023

2. Kelapa Hibrida

Produksi Kelapa Hibrida Tahun 2022 mencapai **1.681,55 Ton** yang tersebar di 7 (tujuh) kecamatan dengan jumlah petani **5.619 KK**. Pada tahun 2023 produksinya mengalami penurunan disebabkan oleh karena adanya cuaca yang ekstrim berupa kemarau yang berkepanjangan (factor iklim). Kecamatan dengan produksi terbesar terdapat di Kecamatan Ujung Loe yakni sebesar **1.173,32 Ton**. Uraian lengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 1. 19
Luas Areal dan Produksi Komoditi Kelapa Hibrida Menurut
Kecamatan di Kabupaten Bulukumba Tahun 2019-2023

NO	KECAMATAN	LUAS AREAL (Ha)	PRODUKSI (Ton)	JUMLAH PETANI (KK)
1	2	3	4	5
1	Gantarang	-	-	-
2	Ujungbulu	-	-	-
3	Ujung Loe	1.267	1.500,17	1.511
4	Bontobahari	67	13,71	36
5	Bontotiro	172	97,03	320
6	Herlang	1.680	1,55	2.425
7	Kajang	982	1,22	1.019
8	Bulukumpa	43	15,08	111
9	Rilau Ale	224	52,78	197
10	Kindang	-	-	-
Bulukumba		2023	4.435	1.681,54
		2022	4.434,50	3.356,44
		2021	4.364	4.374,00
		2020	3.498	4.047,15
		2019	3.533	831,48

Sumber : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Tahun 2023

3. Kopi Robusta

Produksi Kopi Robusta tahun 2023 mencapai **317,74 Ton** yang tersebar pada 6(enam) Kecamatan di Kabupaten Bulukumba. Capaian produksi tersebut mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan produksi tahun 2022 karena pemeliharaan yang intensif terus dilakukan terutama di wilayah Kec.Gantarang. Secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1. 20
Luas Areal, Produksi dan Banyaknya Petani Komoditi Kopi Robusta
Menurut Kecamatan di Kabupaten Bulukumba Tahun 2019-2023

NO	KECAMATAN	LUAS AREAL (Ha)	PRODUKSI (Ton)	JUMLAH PETANI (KK)
1	2	3	4	5
1	Gantarang	1.321	208,65	3.274
2	Ujungbulu	-	-	-
3	Ujung Loe	-	-	-
4	Bontobahari	-	-	-
5	Bontotiro	-	-	-
6	Herlang	-	-	-

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2023

NO	KECAMATAN	LUAS AREAL (Ha)	PRODUKSI (Ton)	JUMLAH PETANI (KK)
7	Kajang	47,40	1,30	37
8	Bulukumpa	617	76,42	2.439
9	Rilau Ale	210	16,29	591
10	Kindang	1.200	16,52	4.163
BULUKUMBA	2023	3.395	319	10.504
	2022	3.409	230,81	10.840
	2021	2.099	327	9.558
	2020	2.632	1.032,43	11.385
	2019	3.649	1.005,43	9.919

Sumber : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Tahun 2023

4. Kopi Arabika

Areal perkebunan kopi arabika berada di tiga Kecamatan yakni Gantarang, Bulukumpa dan Kindang. Produksi Kopi Arabika tahun 2023 mencapai **100,03 Ton**, lebih rendah dari tahun sebelumnya dikarenakan ada penanaman baru dan belum menghasilkan ditambah kondisi iklim yang tidak menentu. Secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 1. 21
Luas Areal, Produksi dan Banyaknya Petani Komoditi Kopi Arabika

NO	KECAMATAN	LUAS AREAL (Ha)	PRODUKSI (Ton)	JUMLAH PETANI (KK)
1	2	3	4	5
1	Gantarang	15	-	39
2	Ujungbulu	-	-	-
3	Ujung Loe	-	-	-
4	Bontobahari	-	-	-
5	Bontotiro	-	-	-
6	Herlang	-	-	-
7	Kajang	-	-	-
8	Bulukumpa	120	5,23	55
9	Rilau Ale	-	-	-
10	Kindang	546	94,80	1.140
Bulukumba	2023	681	100,03	1.234
	2022	669	107,66	1.234
	2021	669	146	1.234
	2020	365	323,99	1.234
	2019	403	54,94	1.238

Sumber : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Tahun 2023

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2023

5. Cengkeh

Produksi cengkeh Tahun 2023 mencapai **435,12 Ton**. Produksi cengkeh tahun ini menurun dibandingkan dengan tahun sebelumnya karena kondisi cengkeh yang memang sudah tua dan tidak menghasilkan ditambah adanya factor cuaca (kekeringan) sehingga tanaman rusak/mati. Secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 1. 22
Luas Areal, Produksi dan Banyaknya Petani Komoditi Cengkeh
Menurut Kecamatan di Kabupaten Bulukumba Tahun 2019 - 2023

NO	KECAMATAN		LUAS AREAL (Ha)	PRODUKSI (Ton)	JUMLAH PETANI (KK)	
1	2		3	4	5	
1	Gantarang		1.436	62,53	1.438	
2	Ujungbulu		-	-	-	
3	Ujung Loe		132	0,78	16	
4	Bontobahari		-	-	-	
5	Bontotiro		45	-	25	
6	Herlang		20	-	17	
7	Kajang		101	0,05	213	
8	Bulukumpa		1.455	263,34	1.421	
9	Rilau Ale		812	8,42	1.573	
10	Kindang		2.911	-	5.449	
BULUKUMBA			2023	6.912	435,12	10.152
			2022	6.917	486,38	10.155
			2021	7.815	702	9.719
			2020	3.766	718,68	10.187
			2019	3.331	551,98	10.712

Sumber : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Tahun 2023

6. Kakao

Produksi Kakao Tahun 2023 mencapai **1.130,74 Ton** yang tersebar di 9 (sembilan) Kecamatan dan terbesar di Kecamatan Bulukumpa. Capaian tersebut mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2022 dikarenakan banyak tanaman kakao yang sudah tua kondisinya dan tidak menghasilkan ditambah faktor iklim sehingga tanaman rusak/mati. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1. 23
Luas Areal, Produksi dan Banyaknya Petani Komoditi Kakao
Menurut Kecamatan di Kabupaten Bulukumba Tahun 2019-2023

NO	KECAMATAN	LUAS AREAL (Ha)	PRODUKSI (Ton)	JUMLAH PETANI (KK)
1	2	3	4	5
1	Gantarang	1.350	397,29	1.115
2	Ujungbulu	-	-	-
3	Ujung Loe	325	116,44	296
4	Bontobahari	55	20,75	131
5	Bontotiro	343	25,44	420
6	Herlang	1.449	0,62	1.791
7	Kajang	1.160	0,71	1.990
8	Bulukumpa	1.136	356,85	2.055
9	Rilau Ale	761	148,79	1.804
10	Kindang	731	63,86	1.481
BULUKUMBA		2023	7.310	1.130,75
		2022	2.560,99	11.087
		2021	8.193	11.231
		2020	4.403,31	10.659
		2019	4.313,61	10.956

Sumber : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Tahun 2023

7. Jambu Mete

Tahun 2023 ini, produksi Jambu Mete belum terlalu banyak dan hanya mencapai **0,03 Ton** di Kecamatan Kajang. Dibandingkan dengan tidak adanya produksi yang dihasilkan selama 2 (dua) tahun berturut-turut, tahun 2023 ini tanaman Jambu Mete baru berproduksi karena cuaca panas yang mendukung proses pembungaan dan pembuahan. Secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1. 24
Luas Areal, Produksi dan Banyaknya Petani Komoditi Jambu Mete

NO	KECAMATAN	LUAS AREAL (Ha)	PRODUKSI (Ton)	JUMLAH PETANI (KK)
1	2	3	4	5
1	Gantarang	54	-	15
2	Ujungbulu	-	-	-
3	Ujung Loe	29	-	31
4	Bontobahari	33	-	30
5	Bontotiro	312	-	228
6	Herlang	103	-	34
7	Kajang	41	0,03	33

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2023

NO	KECAMATAN	LUAS AREAL (Ha)	PRODUKSI (Ton)	JUMLAH PETANI (KK)
8	Bulukumpa	60	-	3
9	Rilau Ale	45	-	18
10	Kindang	80	-	19
Bulukumpa	2023	757	0,03	411
	2022	782	-	411
	2021	760	-	321
	2020	434	128,96	320
	2019	676	170,41	376

Sumber : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Tahun 2023

8. Pala

Produksi Pala hanya ada di 3 (tiga) kecamatan yakni Bulukumpa, Rilau Ale dan Kindang. Produksi Pala Tahun 2023 mencapai **124,69 Ton** pada areal lahan seluas **779 Ha** dimana produksinya menurun dari tahun sebelumnya karena pemeliharaan tanaman pala yang belum maksimal diterapkan oleh petani pala sehingga produksinya juga tidak maksimal. Secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 1. 25
Luas Areal, Produksi dan Banyaknya Petani Komoditi Pala Menurut Kecamatan di Kabupaten Bulukumba Tahun 2019 - 2023

NO	KECAMATAN	LUAS AREAL (Ha)	PRODUKSI (Ton)	JUMLAH PETANI (KK)
1	2	3	4	5
1	Gantarang	16	-	15
2	Ujungbulu	-	-	-
3	Ujung Loe	16	-	38
4	Bontobahari	3	-	15
5	Bontotiro	6	-	5
6	Herlang	19	-	87
7	Kajang	51	-	250
8	Bulukumpa	462	115,10	631
9	Rilau Ale	106	3,46	88
10	Kindang	100	6,12	240
Bulukumpa	2023	779	124,68	1.369
	2022	779	179,49	1.453
	2021	46	37	1.388
	2020	148	29,75	1204
	2019	83	23,10	795

Sumber : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Tahun 2023

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2023

9. Lada

Areal perkebunan lada (merica) di Kabupaten Bulukumba tersebar di 9 (sembilan) Kecamatan dengan luas mencapai **1.459 Ha**. Kecamatan terbesar penghasil lada terdapat pada Kecamatan Bulukumpa. Produksi Lada (merica) tahun 2023 ini mencapai **108,64Ton** dan mengalami penurunan dari tahun sebelumnya dikarenakan banyaknya tanaman lada yang rusak/mati akibat pengaruh iklim (cuaca panas) dan serangan hama dan penyakit. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 1. 26
Luas Areal, Produksi dan Banyaknya Petani Komoditi Lada Menurut Kecamatan di Kabupaten Bulukumba Tahun 2019-2023

NO	KECAMATAN	LUAS AREAL (Ha)	PRODUKSI (Ton)	JUMLAH PETANI (KK)	
1	2	3	4	5	
1	Gantarang	137	12,03	228	
2	Ujungbulu	-	-	-	
3	Ujung Loe	36	1,92	107	
4	Bontobahari	9	-	15	
5	Bontotiro	16	-	181	
6	Herlang	6	-	24	
7	Kajang	55	0,12	428	
8	Bulukumpa	360	49,5	928	
9	Rilau Ale	539	38	879	
10	Kindang	293	7,08	236	
Bulukumba		2023	1.451	108,65	3.026
		2022	1.459	185,50	3.016
		2021	1.530	119	3.853
		2020	976,40	168,25	3.136
		2019	895,00	255,72	3.603

Sumber : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Tahun 2023

10. Karet

Produksi Karet Tahun 2023 yakni **1.017, 86 Ton**. Secara keseluruhan, luas areal produksi perkebunan Karet di Kabupaten Bulukumba mencapai **3.453 Ha**, dengan jumlah Petani sebanyak **1.786 orang**. Karet kurang berproduksi karena faktor iklim sehingga kurang menghasilkan dan kualitas yang dihasilkan juga tidak bagus. Secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 1. 27
Luas Areal, Produksi dan Banyaknya Petani Komoditi Karet Menurut
Kecamatan di Kabupaten Bulukumba Tahun 2019 – 2023

NO	KECAMATAN	LUAS AREAL (Ha)	PRODUKSI (Ton)	JUMLAH PETANI (KK)
1	2	3	4	5
1	Gantarang	-	-	-
2	Ujungbulu	-	-	-
3	Ujung Loe	619	421,83	400
4	Bontobahari	-	-	-
5	Bontotiro	3	-	3
6	Herlang	33	12,79	69
7	Kajang	1.182	1,21	555
8	Bulukumpa	1.276	551	484
9	Rilau Ale	340	31,02	275
10	Kindang	-	-	-
Bulukumba		2023	3.453	1.017,85
		2022	3.453	1.786
		2021	3.453	1.784
		2020	1.619	1.776
		2019	1.316	1.244,57

Sumber : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Tahun 2023

1.6.4 Perikanan & Kelautan

Potensi perikanan di Kabupaten Bulukumba terdiri dari perikanan tangkap (perikanan laut) dan perikanan budidaya (perikanan darat). Dari 10 kecamatan, 7 diantaranya mempunyai potensi kelautan sedangkan potensi perikanan darat terdapat pada hampir semua kecamatan. Potensi perikanan dan kelautan pada Tahun 2023 sebesar **270.410,97** ton atau meningkat dibandingkan dengan tahun 2022 yang mencapai **251.463,1** ton. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 1. 28
Produksi Perikanan Tangkap/Laut di 7 Kecamatan Pesisir Tahun
2019-2023

JENIS PERIKANAN	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6
I. PENANGKAPAN DI LAUT	52.651,6	53.860,1	53.830,3	55.522,6	55.612,0
1. GANTARANG	5.850	5.984	5.988	6.176,6	6.187,0
2. UJUNG BULU	11.056	11.310	11.256	11.610,0	11.628,0
3. UJUNG LOE	2.140	2.189	2.190	2.259,0	2.263,0
4. BONTO BAHARI	9.480	9.698	9.703	10.008,0	10.024,0
5. BONTO TIRO	5.370	5.493	5.496	5.669,0	5.678,0
6. HERLANG	8.252	8.441	8.446	8.711,0	8.725,0

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2023

JENIS PERIKANAN	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6
7. KAJANG	10.504	10.745	10.751	11.089,0	11.107,0
II. BUDIDAYA	183.348	198.556	212.941,1	195.940,5	214.799,0
A. AIR PAYAU (TAMBAK)	6.255	6.286	6.444,7	6.209,2	5.660,0
010. GANTARANG	2.335,20	2.160,10	2.282,40	2.456,90	2.253,10
020. UJUNG BULU	322,00	312,60	329,50	326,30	301,15
021. UJUNG LOE	1.673,60	1.532,00	1.520,40	1.430,80	1.854,65
030. BONTO BAHARI	670,60	988,20	1.045,40	1.072,00	790,36
040. BONTO TIRO	63,30	51,00	50,90	47,40	57,02
050. HERLANG	31,80	31,90	31,60	30,20	35,75
060. KAJANG	1.158,40	1.210,50	1.184,50	845,60	367,99
B. BUDIDAYA LAUT	176.531,0	191.389,0	206.087,6	189.362,3	208.780,5
010. GANTARANG	45.205,00	55.561,00	59.828,1	55.415,5	53.120,33
020. UJUNG BULU	43.758,00	46.554,00	50.129,3	46.490,3	52.137,19
021. UJUNG LOE	45.741,00	50.645,00	54.534,5	50.594,5	52.130,75
030. BONTO BAHARI	41.827,00	38.629,00	41.595,7	36.862,0	51.392,28
040. BONTO TIRO	-	-	-	-	-
050. HERLANG	-	-	-	-	-
060. KAJANG	-	-	-	-	-
C. K O L A M	519,9	841,7	374,3	340,7	337,90
010. GANTARANG	76,70	520,00	231,20	207,80	130,49
020. UJUNG BULU	4,30	1,80	0,80	0,90	0,83
021. UJUNG LOE	36,80	20,70	9,20	8,90	9,36
040. BONTO TIRO	3,00	5,70	2,40	2,10	1,88
050. HERLANG	4,30	3,30	1,50	1,30	1,30
060. KAJANG	9,10	20,90	9,40	8,50	8,24
070. BULUKUMPA	170,10	126,30	56,00	52,20	66,52
080. RILAU ALE	124,60	62,30	27,80	25,70	86,78
090. KINDANG	91,00	80,70	36,00	33,30	32,50
D. S A W A H	42,0	38,6	34,5	28,3	20,50
010. GANTARANG	3,4	1,0	1,0	0,7	3,07
021. UJUNG LOE	-	-	-	-	-
040. BONTO TIRO	0,3	0,7	1,0	0,5	0,64
050. HERLANG	0,5	2,8	2,0	1,6	1,43
070. BULUKUMPA	21,70	3,20	3,0	2,2	2,90
080. RILAU ALE	9,30	15,80	14,0	12,0	6,04
090. KINDANG	6,80	15,10	13,5	11,3	6,42
TOTAL	235.999,4	252.415,7	266.771,4	251.463,1	270.410,97

Sumber : Dinas Perikanan Kabupaten Bulukumba Tahun 2023

1.6.5 Peternakan

Kabupaten Bulukumba merupakan salah satu kabupaten dengan populasi ternak cukup besar pada wilayah Sulawesi Selatan. Komoditas ternak yang dipelihara adalah sapi potong, kerbau, kuda, kambing, ayam buras, ayam ras pedaging, ayam ras petelur dan itik. Sistem

**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2023**

pemeliharaan ternak yang dahulu hanya sebatas skala rumah tangga, mulai beralih menjadi usaha yang berorientasi bisnis yang terbukti dengan meningkatnya populasi ternak setiap tahunnya khususnya pada dua komoditas yaitu sapi potong, ayam ras pedaging dan ayam ras petelur, namun pada tahun 2022 hingga tahun 2023 ini Komoditas Sapi Potong Mengalami Penurunan Populasi dikarenakan mewabahnya penyakit ternak yakni penyakit Mulut dan Kuku (PMK) dan penyakit sapi bali (Jembrana), sedangkan penurunan populasi ayam ras petelur dan pedaging dikarenakan tingginya biaya produksi, dan beberapa perusahaan kemitraan yang berubah system pemeliharaan dari kandang biasa menjadi Kandang Close House sehingga terjadi peningkatan biaya sarana prasarana. Khususnya untuk komoditas sapi potong, secara nasional Kabupaten Bulukumba ditetapkan menjadi salah satu kawasan peternakan sapi potong, sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 472/kpts/RC.040/6/2018. Perkembangan populasi dan produksi ternak di Kabupaten Bulukumba dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1. 29
Perkembangan Populasi Ternak di Kabupaten Bulukumba Tahun 2019-2023

No	Jenis Ternak	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1	Sapi Potong	76.434	76.797	77.658	71.861	67.808
2	Kerbau	1.620	1.505	1.474	1.445	1.435
3	Kuda	28.037	26.304	23.337	20.208	18.248
4	Kambing	35.229	35.463	35.616	31.365	30.823
5	Ayam Buras	745.015	745.015	756.156	758.480	764.534
6	Ayam Ras Pedaging	2.550.438	2.309.930	3.694.020	4.384.830	4.314.880
7	Ayam Ras Petelur	463.793	638.724	1.176.858	839.661	684.048
8	Itik	21.032	21.372	63.001	21.478	21.675

Sumber : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Tahun 2023

1.6.6 Pariwisata

Salah satu daerah tujuan wisata di Sulawesi Selatan setelah Kabupaten Tana Toraja yakni Kabupaten Bulukumba. Wilayah yang terletak di wilayah selatan Sulawesi Selatan ini mempunyai potensi obyek wisata yang bisa dijadikan unggulan di Sulawesi Selatan. Potensi obyek wisata di Kabupaten Bulukumba terdiri dari :

1. Wisata Alam

1. Pantai Bira;
2. Pantai Samboang;
3. Pantai (tebing) Apparalang;
4. Pantai Bara;

**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2023**

5. Pantai Pangalaiyya;
6. Pantai Lemo-Lemo;
7. Pantai Mandala Ria;
8. Pantai Panrang Luhu;
9. Pantai Marumasa;
10. Tebing Pantai Tahiyoiyya;
11. Tebing Pantai Panaikang Birayya;
12. Pantai Kasuso;
13. Pulau Liukang Loe;
14. Pantai Merpati;
15. Pantai Lolisang;
16. Danau Kahayya;
17. Gua Malukua;
18. Gua Pasohara;
19. Gua Liang Panikia;
20. Gua Passea;
21. Permandian Alam Hila-Hila;
22. Permandian Alam Limbua;
23. Permandian Alam Bettu;
24. Air Terjun Gamaccayya;
25. Air Terjun Na'na;
26. Air Terjun Bialo;
27. Air Terjun Bravo 45;
28. Arung Jeram Sungai Balanting;
29. Puncak/ Tanjung Donggala Kahayya;
30. Puncak Karaeng Puang.

2. Wisata Budaya

1. Puncak Pua' Janggo;
2. Makam Dato' Tiro
3. Makam Karaeng Sapu Hatu;
4. Makam Karaeng Ambibia;
5. Kawasan Adat Ammatoa;
6. Pertenunan Tradisional Kajang;
7. Pertenunan Sutra Bira;
8. Kawasan Pembuatan Perahu Pinisi;
9. Pasar Cekkeng;
10. Rumah Adat Bola Lohea.

3. Wisata Buatan (Man Made)

1. Perkebunan Karet;
2. Kawasan Tambak ikan;
3. Banana Boat;
4. Small Boat;
5. Kolam Renang;
6. Taman Kota Pasar Tua;
7. Taman Cekkeng;
8. Cekkeng Nursery
9. Pinisi Park;
10. Flyng Fox

1.7 Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.

a. Realisasi Pendapatan Menurut Jenis Pendapatan

Pendapatan daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Pendapatan daerah dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, akun, kelompok, jenis, objek dan rincian objek serta sub rincian objek pendapatan daerah. Pendapatan daerah terdiri atas pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Ketentuan terkait pendapatan asli daerah mengacu pada Pasal 30 sampai dengan Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Kebijakan pendapatan daerah Tahun Anggaran 2021 dilakukan dengan memperhatikan kebijakan RKPD Tahun 2021 yang diarahkan pada upaya peningkatan pendapatan daerah dari sektor Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan Yang Sah. Selain ditujukan untuk meningkatkan pendapatan daerah juga diarahkan untuk memberikan stimulus dalam mendukung kondisi perekonomian yang lebih berkualitas dengan memperhatikan potensi yang ada guna tercapainya peningkatan kemandirian daerah serta mengurangi tingkat ketergantungan terhadap dana transfer dari Pemerintah Pusat.

Berdasarkan Target Pendapatan APBD Tahun 2023 Kabupaten Bulukumba sebesar Rp.1.557.182.937.302 namun yang terealisasi Rp.1.501.289.216.749,93 atau 96,41 dari target.

Tabel 1. 30
Realisasi Pendapatan Menurut Jenis Pendapatan

Kode	Uraian	APBD 2023	Realisasi	%	Sisa Anggaran
4	PENDAPATAN DAERAH	1.557.182.937.302	1.501.289.216.749,93	96,41	-55.915.819.812
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	239.250.000.000	187.567.739.401,15	78,40	-51.704.359.859
4.1.1	Pajak Daerah	74.320.354.000	44.115.871.619	59,36	-30.204.482.381
4.1.2	Retribusi Daerah	29.229.646.000	19.291.948.373,89	66,00	-9.948.408.728
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.000.000.000	3.693.669.916	73,87	-1.306.330.084
4.1.4	Lain-lain PAD yang Sah	130.700.000.000	120.466.249.492,26	92,17	-10.245.138.666
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.317.332.937.302	1.313.259.477.348,78	99,69	-4.073.459.953
4.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan	1.104.134.706.492	1.096.397.210.005	99,30	-7.737.496.487
4.2.2	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat- Lainnya	109.787.236.000	109.441.647.200	99,65	-345.588.800
4.2.3	Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi	103.410.994.810	107.420.620.143,78	103,88	4.009.625.334
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	600.000.000	462.000.000	77,00	-138.000.000

**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2023**

Kode	Uraian	APBD 2023	Realisasi	%	Sisa Anggaran
4.3.1	Pendapatan Hibah	600.000.000	462.000.000	77,00	-138.000.000

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Bulukumba unaudit BPK RI

b. Realisasi Belanja Menurut Jenis Belanja

Belanja daerah disusun berdasarkan prinsip-prinsip penganggaran yang dilakukan menggunakan pendekatan anggaran berbasis kinerja dengan memperhatikan prioritas dan program strategis pembangunan secara efisien, efektif, selektif, akuntabel dan transparan serta mengacu pada RKPD. Belanja daerah dipergunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah, terdiri dari urusan pemerintah wajib dan urusan pilihan yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah pusat dan daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Peningkatan belanja daerah diprioritaskan pada kepentingan publik terutama dalam pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat melalui program/kegiatan strategis yang memiliki kontribusi terhadap capaian pembangunan jangka menengah daerah melalui sinergitas rencana program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah. Berdasarkan Pasal 55 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, klasifikasi belanja daerah terdiri atas:

a. Belanja Operasi

Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi terdiri dari:

1. Belanja Pegawai

Belanja pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kompensasi diberikan kepada kepala daerah dan wakil kepala daerah, pimpinan dan anggota DPRD, serta belanja pegawai ASN. Belanja pegawai paling sedikit berupa gaji/uang representasi dan tunjangan, tambahan penghasilan pegawai ASN, belanja penerimaan lainnya pimpinan dan anggota DPRD serta kepala daerah, wakil kepala

**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2023**

daerah, honorarium, insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah/jasa layanan lainnya dan honorarium yang selanjutnya terkait belanja pegawai diuraikan dalam peraturan perundang-undangan.

2. *Belanja Barang dan Jasa*

Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dalam rangka melaksanakan program, kegiatan, dan sub kegiatan pemerintahan daerah guna pencapaian sasaran prioritas daerah yang tercantum dalam RPJMD, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak lain.

Belanja barang dan jasa diuraikan dalam:

a. Belanja Barang

Belanja barang digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang berupa barang pakai habis, barang tak habis pakai, dan barang bekas dipakai.

b. Belanja Jasa

Belanja jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan antara lain berupa jasa kantor, asuransi, sewa rumah/gedung/gudang/parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, konsultasi, ketersediaan layanan (*availability payment*), beasiswa pendidikan PNS, kursus, pelatihan, sosialisasi, dan bimbingan teknis PNS/PPPK, insentif pemungutan pajak daerah bagi pegawai non ASN, dan insentif pemungutan retribusi daerah bagi pegawai non ASN.

3. Belanja Pemeliharaan

Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan tanah, belanja pemeliharaan peralatan dan mesin, belanja pemeliharaan gedung dan bangunan, belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi, belanja pemeliharaan aset tetap lainnya, dan belanja perawatan kendaraan bermotor.

4. Belanja Perjalanan Dinas

Belanja perjalanan dinas digunakan untuk menganggarkan belanja perjalanan dinas dalam negeri dan belanja perjalanan dinas luar negeri.

5. Belanja Uang dan/atau Jasa untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat

Digunakan untuk menganggarkan uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat dalam bentuk:

- a. pemberian hadiah yang bersifat perlombaan;
- b. penghargaan atas suatu prestasi;
- c. pemberian beasiswa kepada masyarakat;
- d. penanganan dampak sosial kemasyarakatan akibat penggunaan tanah milik pemerintah daerah untuk pelaksanaan pembangunan proyek strategis nasional dan non proyek strategis nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Transfer ke daerah dan dana desa yang penggunaannya sudah ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. Bantuan fasilitasi premi asuransi pertanian; dan/atau;
- g. Belanja barang dan jasa berupa pemberian uang lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.

6. Belanja Bunga

Belanja bunga digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang tidak berasal pembayaran atas kewajiban pokok utang, yang dianggarkan pembayarannya dalam APBD tahun anggaran berkenaan.

7. Belanja Subsidi

Belanja subsidi digunakan untuk menganggarkan belanja subsidi agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan oleh badan usaha milik negara, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga dapat terjangkau oleh masyarakat.

8. Belanja Hibah

Belanja hibah diberikan kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Belanja hibah berupa uang, barang atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan belanja urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Belanja Hibah diberikan kepada: pemerintah pusat, pemerintah daerah lainnya, BUMN, BUMD, Badan dan lembaga serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia serta partai politik.

9. Belanja Bantuan Sosial

Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan. Belanja bantuan sosial dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

10. Belanja Modal

Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi.

**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2023**

Pengadaan aset tetap memenuhi kriteria:

- a. mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- b. digunakan dalam kegiatan pemerintahan daerah; dan
- c. batas minimal kapitalisasi aset.

Belanja modal terdiri dari: belanja modal tanah, belanja modal peralatan dan mesin, belanja modal gedung dan bangunan, belanja jalan, irigasi dan jaringan, belanja modal aset tetap lainnya dan belanja modal aset lainnya.

11. Belanja Tidak Terduga

Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya dan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya serta untuk bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.

Keadaan darurat meliputi:

- a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
- b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/ atau
- c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

Keperluan mendesak meliputi:

1. kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
2. belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
3. pengeluaran daerah yang berada di luar kendali pemerintah

**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2023**

daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan, dan/atau;

4. pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/ atau masyarakat.

12. Belanja Transfer

Belanja transfer merupakan pengeluaran uang daripemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya dan/ atau dari pemerintah daerah kepada pemerintah desa. Belanja transfer terdiri dari:

- a. Belanja Bagi Hasil, digunakan untuk menganggarkan bagi hasil yang bersumber dari pendapatan provinsi kepada kabupaten/kota atau pendapatan kabupaten/kota kepada pemerintah desa atau pendapatan pemerintah daerah tertentu kepada pemerintah daerah lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- b. Belanja Bantuan Keuangan, diberikan kepada daerah lain dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya.

Berdasarkan Target Belanja APBD 2023 Kabupaten Bulukumba sebesar Rp.1.646.353.865.572,00 namun yang terealisasi Rp. 1.543.903.837.466,51 atau 93,78 dari target.

**Tabel 1. 31
Realisasi Belanja Menurut Jenis Belanja Kabupaten Bulukumba
Tahun 2023**

Kode	Uraian	APBD 2023	Realisasi	%	Sisa Anggaran
5	BELANJA				
5.1	BELANJA OPERASI	1.072.850.880.759,00	1.012.987.899.391,86	94,42	-59.862.981.367
5.1.01	Belanja Pegawai	628.464.327.812,00	616.860.242.592,00	98,15	-11.604.085.220
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	413.691.046.534,00	366.162.982.994,86	88,51	-47.528.063.539
5.1.05	Belanja Hibah	29.222.015.638,00	28.610.389.839,00	97,91	-611.625.799
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	1.473.490.775,00	1.354.283.966,00	91,91	-119.206.809
5.2	BELANJA MODAL	392.686.766.898,00	353.682.271.435,65	90,07	-40.282.545.862
5.2.01	Belanja Modal Tanah	3.615.900.000,00	3.439.865.700,00	95,13	-176.034.300

**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2023**

Kode	Uraian	APBD 2023	Realisasi	%	Sisa Anggaran
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	68.769.372.780,00	63.586.099.794	92,46	-5.202.072.986
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	147.520.737.826,00	142.113.539.674	96,33	-5.508.038.551
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	167.080.565.113,00	138.842.685.088,00	83,10	-29.396.290.025
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	5.618.191.179,00	5.618.145.178,81	100,00	-46.000
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	82.000.000,00	81.936.000,00	99,92	-64.000
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	1.133.752.969,00	66.830.500,00	5,89	-1.066.922.469
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	1.133.752.969,00	66.830.500,00	5,89	-1.066.922.469
5.4	BELANJA TRANSFER	179.682.464.946,00	177.166.836.139,00	98,60	-2.515.628.807
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	8.312.174.942,00	6.182.644.939,00	74,38	-2.129.530.003
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	171.370.290.004,00	170.984.191.200,00	99,77	-386.098.804
	Jumlah Belanja	1.646.353.865.572,00	1.543.903.837.466,51	93,78	103.728.078.505

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Bulukumba unaudit BPK RI

c. Realisasi Pembiayaan Menurut Jenis Pembiayaan

Pembiayaan Daerah pada Tahun Anggaran 2023 terdiri atas 1 komponen yaitu penerimaan pembiayaan yang terdiri atas sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya, penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah dan penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, adapun realisasi pembiayaan daerah pada Tahun Anggaran 2023 berdasarkan kelompok pembiayaan sebagai berikut :

Tabel 1. 32
Realisasi Pembiayaan Kabupaten Bulukumba Tahun 2023

Kode	Uraian	APBD 2023	Realisasi	%	Sisa Anggaran
6	PEMBIAYAAN				
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	89.170.928.270	89.170.928.271,23	100,00	1
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	89.170.928.270	89.170.928.271,23	100,00	1

1.8 Perencanaan Pembangunan Daerah

Bagian ini memuat informasi yang meliputi beberapa hal sebagai berikut:

Permasalahan Strategis Pemerintah Daerah;

Penuntasan permasalahan pembangunan daerah merupakan salah satu esensi dari tujuan pembangunan daerah, sehingga kesejahteraan masyarakat dapat ditingkatkan tahap demi tahap. Permasalahan pembangunan daerah menjadi salah satu rujukan utama dalam merumuskan strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah. Berikut ini diuraikan Permasalahan Untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah:

1. Rendahnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
2. Masih Tingginya Tingkat Kemiskinan
3. Masih Tingginya Tingkat Pengangguran
4. Melambatnya Pertumbuhan Ekonomi
5. Belum optimalnya fungsi infrastruktur wilayah
6. Tata Kelola Pemerintahan Yang Belum Optimal
7. Adanya kerentanan ekologi dalam mendukung keberlanjutan pembangunan

Adapun Permasalahan untuk Penentuan Program Prioritas Daerah (Permasalahan Menurut Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah)

• *Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar*

1. Pendidikan

1. Belum Optimalnya Penduduk Usia 6 – 15 tahun yang termasuk dalam usia penduduk yang berpartisipasi dalam Pendidikan (SPM)
2. Belum optimalnya pencapaian peningkatan angka melek huruf
3. Belum Optimalnya Pemenuhan kebutuhan sarana prasarana sekolah Jenjang PAUD /Kesetaraan dan Pendidikan Dasar
4. Belum Optimalnya Pemenuhan kuantitas dan kualitas Tenaga Pendidik

2. Kesehatan

1. Masih tingginya persentase balita gizi buruk .
2. Masih tingginya prevalensi angka stunting.
3. Masih rendahnya rasio tenaga kesehatan terhadap jumlah penduduk.
4. Masih rendahnya cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan.
5. Masih rendahnya Proporsi Kasus Tuberkulosis yang diobati dan Sembuh.
6. Masih rendahnya cakupan penanganan prevalensi HIV AIDS

3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

1. Masih rendahnya proporsi jaringan jalan dengan kondisi baik
2. Masih rendahnya persentase jalan yang memiliki talud/drainase saluran pembuangan air
3. Belum tersedianya data base talud/drainase
4. Masih rendahnya progres revisi RTRW Kabupaten Bulukumba serta masih terbatasnya rencana rinci tata ruang dengan rencana pembangunan daerah
5. Pelaksanaan kegiatan pemeliharaan maupun peningkatan jaringan irigasi dilakukan setelah masa panen
6. Peningkatan maupun penurunan persentase irigasi dalam kondisi baik sangat dipengaruhi oleh tingkat kerusakan yang biasanya akibat longsor/bencana alam dan tingginya curah hujan
7. Persentase irigasi dalam kondisi baik juga dapat meningkat karena pengerjaan pembenahan jaringan irigasi maupun kegiatan peningkatan jaringan irigasi
8. Pelaksanaan kegiatan dalam rangka peningkatan persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik sangat ditunjang oleh ketersediaan anggaran

4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

1. Masih rendahnya kawasan kumuh dan permukiman kumuh yang tertata
2. Belum optimalnya pemenuhan kebutuhan rumah layak huni khususnya bagi masyarakat miskin dan keterbatasan akses pembiayaan.
3. Belum optimalnya sistem data dan informasi perumahan dan kawasan permukiman
4. Belum terpenuhinya air minum dan sanitasi layak.

5. Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

1. Cakupan petugas perlindungan masyarakat masih kurang
2. Masih terdapat potensi gangguan keamanan dan ketertiban umum
3. Cakupan pelayanan bencana kebakaran terkait sarana prasarana masih belum memadai
4. Perlu penambahan armada mobil pemadam kebakaran untuk memaksimalkan pelayanan waktu tanggap (response time rate)
5. Masih minimnya petugas penyidik pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan fasilitas pendukung lainnya.

6. Sosial

1. Masih rendahnya sarana Sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi yang dikelola pemerintah Daerah
2. Masih rendahnya program mitigasi bencana bagi masyarakat
3. Minimnya PMKS yang menerima program pemberdayaan Sosial melalui kelompok usaha bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya.
4. Jumlah jenis PMKS yang tidak didukung dengan data yang valid dan akurat serta masih terbatasnya jumlah pekerja sosial professional dalam penanganan disabilitas dan lansia.

• ***Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar***

1. Tenaga Kerja

1. Lapangan pekerjaan semakin terbatas
2. Masih tingginya tingkat pengangguran terbuka
3. Rendahnya tingkat pendidikan
4. Terbatasnya alokasi anggaran program dan kegiatan
5. Rendahnya kompetensi pencari kerja
6. Kurangnya sarana dan prasarana aparatur

2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

1. Presentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah masih rendah.
2. Masih tingginya kasus kekerasan dalam rumah tangga.
3. masih rendahnya cakupan layanan kesehatan korban kekerasan anak dan perempuan.
4. Kurangnya tenaga psikiater yang menangani trauma korban kekerasan anak dan perempuan.
5. Tidak adanya kontribusi yang diberikan perempuan dalam pekerjaan non pertanian.

3. Pangan

1. Masih rendahnya tingkat pendapatan masyarakat / Kelompok Tani dan pemenuhan kebutuhan dari budidaya pangan lokal.
2. Kelembagaan usaha pangan masyarakat tidak berjalan dengan maksimal
3. Rendahnya peran serta masyarakat dalam panganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal
4. Kurangnya ketersediaan dan cadangan pangan serta infrastruktur pendukung kemandirian pangan

4. Pertanian

1. Masih minimnya penyelesaian kasus negara
2. Belum optimalnya proses pengadaan tanah karena masih rendahnya dukungan perencanaan pembangunan infrastruktur

yg membutuhkan pengadaan lahan

5. Lingkungan Hidup

1. Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah ,Sarana - Prasarana PPLHD dan PPNS belnm ada dikabupaten/Kota sehingga Pelaksanaan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan ,izin PPLH dan PUULH yang diterbitkan tidak terlaksana dengan baik
2. Kurangnya Tenaga Polisi kehutanan untuk pengamana TAHURA BONTOTAHARI sehingga Lokasi TAHURA BT.BAHARI banyak diklain oleh Masyarakat BONTOTAHARI.

Permasalahan dalam mengurangi dan menangani persampahan :

1. SDM Pengelola belum memenuhi Standar
2. Armada Pengangkutan Persampahan sudah banyak yang tidak layak pakai
3. Prilaku dan Paitisipasi Masyarakat Masih rendah
4. Dimensi Cell landfill TPA Bulukumba seluas 16.208 m² dengan kapasitas 577.512 M3 atau 190.579 ton dan diperkirakan dapat melayani kota bulukumba sampai dengan jangka waku +.6 Tahun. Dimana saat ini TPA Bulukumba sudah beroperasi selama 6 tahun lebih dan total volume sampah yang masuk ke TPA sudah mencapai 109.540 ton. Sehingga luas cell landfill hanya dapat menampung sekitar 81.039 ton lagi. (kota Bulukumba sudah darurat sampah)
5. Tidak adanya alat berat (Buldozer) untuk memadatkan sampah pada cell landfill
6. Lahan untuk penempatan TPS/container yang tidak ada sehingga selama ini hanya memakai lahan kosong/milik masyarakat
7. Tidak ada container yang tetap di TPST untuk dipakai setelah memilah sampah
8. Kurangnya alat dan prasarana alah pengolahan sampah di TPST
9. Kurangnya sarana dan prasarana Laboratorium yang mendukung kineija dal am rangka pemantauan kualitas air sungai dan air limbah di Kabupaten Bulukumba. Sarana dan prasarana utama yang seharusnya tersedia adalah Atomic Absorbtion Spektrofotometer (AAS), Ultra-Violet Visible (UV-Vis), peralatan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3), peralatan sampling, termasuk peralatan kualitas udara ambien dan emisi
10. Belum tersedianya sarana Instalasi Pengolah Air Limbah (IPAL)
11. Instalasi ruang asam tidak berfungsi dengan baik

12. Masih kurangnya kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) personil UPT Laboratorium

6. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1. Kualitas jaringan perekaman biometrik KTP-el yang tidak stabil
2. Ketersediaan blangko KTP-el juga tidak memadai
3. Kesadaran masyarakat yang masih rendah untuk mengurus KTP-el masih rendah.
4. Belum seluruhnya masyarakat memiliki adminduk

7. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

1. Masih rendahnya cakupan sarana dan prasarana perkantoran pemerintahan desa.
2. Belum optimalnya lembaga pemberdayaan masyarakat guna menunjang program pemerintah desa.
3. Belum optimalnya peran lembaga ekonomi masyarakat desa dalam mendukung perekonomian desa.

8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

1. Rendahnya keikutsertaan Keluarga Berencana (KB) yang menggunakan alat kontrasepsi Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)
2. Masih rendahnya SDM kader dan Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana
3. Masih kurangnya sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan tribina di tingkat desa.
4. Belum maksimalnya pembinaan, pembimbingan, dan fasilitasi penguatan ketahanan keluarga balita, remaja, lansia dan peningkatan pendapatan kesejahteraan keluarga.

9. Perhubungan

1. Alat kir sudah tidak beroperasi karena mengalami kerusakan dan diberlakukannya KIR elektronik
2. Menurunnya arus penumpang karena banyaknya kendaraan umum yang rusak
3. Masih kurangnya rambu-rambu di Kabupaten Bulukumba
4. Masih kurangnya pengawasan sehingga isin trayek semakin berkurang dari tahun ketahun

10. Komunikasi dan Informatika

1. Perjanjian kerja sama penyelesaian permasalahan pelayanan publik di Kabupaten Bulukumba
2. Perlunya peningkatan optimalisasi ketersediaan dan pemanfaatan data sektoral
3. Perlunya peningkatan optimalisasi peran keterbukaan badan publik dalam penyediaan informasi
4. Perlunya peningkatan upaya mewujudkan single data

**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2023**

penguatan pengelolaan data statistik sektoral

5. Rendahnya kesadaran dan sistem keamanan informasi berdasarkan hasil assessment.

11. Koperasi dan UKM

1. Para pengelola Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (KUMKM) belum profesional dan akuntabel dalam pengelolaan kelembagaan dan usaha;
2. Kemampuan dalam mengakses teknologi informasi, jaringan produksi dan pemasaran masih sangat rendah
3. Fungsi kelembagaan dan infrastruktur Koperasi dan UMKM belum optimal terutama pembiayaan dan pemasaran;
4. Para pengelola KUKM baik laki-laki dan perempuan belum mampu untuk berinovasi dalam pengembangan produk

12. Penanaman Modal

1. Potensi penanaman Modal di Kabupaten Bulukumba masih rendah.

13. Kepemudaan dan Olahraga

1. Belum optimalnya pembinaan sumber daya kepemudaan.
2. Masih rendahnya peningkatan pelatihan kewirausahaan Muda untuk menunjang pembangunan Daerah
3. Belum optimalnya prestasi atlet termasuk atlet usia Dini dan pelajar
4. Kurangnya sarana dan prasarana olah raga yang sesuai standar yang ditetapkan

14. Statistik

1. Belum adanya data sektoral yang dikelola oleh pemerintah daerah sebagai dasar perumusan kebijakan pemerintah daerah
2. Perlunya peningkatan optimalisasi ketersediaan dan pemanfaatan data sektoral.
3. Perlunya pengelolaan data secara optimal menuju program satu data

15. Persandian

1. Masih rendahnya SDM dan sistem persandian modern yang masih menggunakan sarana dan prasarana manual.
2. Masih rendahnya tingkat keamanan informasi berdasarkan hasil assesment.

16. Kebudayaan

1. Belum Optimalnya Pembinaan pelaku budaya dan kesenian pada satuan pendidikan dan daerah
2. Belum Optimalnya Pelestarian cagar budaya dan adat istiadat
3. Belum Optimalnya Pembinaan dan pelestarian seni budaya daerah

17. Perpustakaan

1. Belum optimalnya pelayanan perpustakaan kepada masyarakat
2. Belum optimalnya jumlah buku dan pengadaan buku setiap tahunnya pada perpustakaan
3. Menurunnya minat baca dan minat pemanfaatan perpustakaan
4. Masih kurangnya jumlah perpustakaan yang ada di Desa dan Kecamatan
5. Belum optimalnya sarana dan prasarana SDM untuk mendukung gerakan literasi masyarakat

18. Kearsipan

1. Belum mencukupinya arsiparis di daerah
2. sarana dan prasarana arsip belum memadai
3. belum adanya landasan hukum untuk arsip Jadwal Retensi Arsip (JRA)
4. Terbatasnya anggaran sarana dan prasarana serta SDM pengelola arsip digital dalam mendukung reformasi birokrasi.
5. Belum optimalnya Penerapan Sistem Kearsipan Daerah Terintegrasi" untuk mendukung Proyek Prioritas Nasional yaitu Penerapan e-arsip terintegrasi.

• ***Urusan Pemerintahan Pilihan***

1. Kelautan dan Perikanan

1. Menjangkitnya penyakit udang dan rumput laut
2. Pencapaian peningkatan produksi terganggu karena kewenangan kelautan diambil alih provinsi sehingga program perlindungan dan pengawasan ekosistem kelautan tidak bisa dilaksanakan
3. Banyaknya negara pesaing yang juga merupakan penghasil udang dan rumput laut.
4. Kurangnya penerapan teknik budidaya yg sesuai dg standar budidaya oleh masyarakat
5. Metode penangkapan ikan yang masih cenderung tradisional
6. Terjadinya fluktuasi harga produk-produk perikanan
7. Usaha dibidang kelautan dan perikanan belum *Bankable* sehingga pihak perbankan sulit untuk menyalurkan kredit.
8. Adanya pencemaran tambak intensif secara masif sehingga mengganggu budidaya rumput laut
9. Lemahnya kelembagaan nelayan, pembudidaya dan pelaku usaha perikanan lainnya.
10. Keamanan pangan produk hasil pengolahan ikan yang belum memenuhi persyaratan mutu
11. Nelayan masih tergolong miskin

2. Pariwisata

1. Kurangnya alokasi anggaran untuk pengembangan pariwisata
2. Rendahnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana pariwisata
3. Rendahnya kuantitas dan kualitas aparatur
4. Rendahnya peran aktif dan sadar wisata dari pelaku pariwisata

3. Pertanian

1. Masih rendahnya produktivitas lahan pertanian
2. Masih rendahnya daya saing produk pertanian
3. Masih rendahnya kualitas SDM penyuluh
4. Belum optimalnya pelayanan pengelolaan keuangan, aset, kepegawaian, perencanaan dan pelaporan
5. Masih rendahnya pemahaman para pelaku utama pembangunan pertanian melakukan registrasi produk sebagai syarat mendapatkan sertifikat Prima
6. Pertumbuhan populasi ternak rendah
7. Sarana prasarana peternakan dan daya saing produk hewan yang belum optimal
8. Skala usaha peternakan, kelembagaan kelompok dan Jejaring pemasaran produk hewan belum optimal
9. Keterlibatan keluarga miskin dalam kegiatan usaha peternakan masih kurang
10. Keterbatasan pengetahuan dan ketampilan petani peternak serta akses untuk memperoleh informasi, teknologi dan sarana Prasarana
11. Ancaman Penyakit Hewan menular Strategis dan Zoonosis (PHMSZ), gangguan reproduksi ternak dan Pematangan ternak ruminansia betina produktif belum terkendali
12. Belum optimalnya produksi ternak

4. Kehutanan

1. Perlunya dibuatkan rekonstruksi palbatas karena sejak Tahun 1991 sampai sekarang belum pernah dilaksanakan rekonstruksi palbatas, seharusnya sekali dalam 5 tahun dilaksanakan Rekonstruksi.
2. Perlunya penambahan tenaga polisi kehutanan karena luas kawasan TAHURA 3.475 Ha tidak sebanding dengan polisi kehutanan yang hanya berjumlah 2 orang saat ini, perbandingan untuk 1 tenaga polisi kehutanan dengan luasan sekitar 50 – 75 Ha /orang polisi hutan, sehingga untuk luas TAHURA 3.475 Ha membutuhkan 47 orang polisi hutan.
3. Perlunya pengganti tanaman penghijauan pada turus jalan yang sudah tua yang sering roboh pada saat hujan dan angin

**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2023**

kencang yang dapat membahayakan masyarakat dan memperbanyak ruang-ruang terbuka Hijau , untuk taman kota tidak adanya lahan pemerintah untuk dijadikan penambahan lahan luasan RTH pembangunan taman, penataan dan pemeliharaan taman , yang sampai saat ini seluas 13,88 % sesuai perda nomor 22 tahun 2012 harus mencapai 20% , sesuai Perbup untuk pemenuhan porsi RTH dikota Kab Bulukumba maka pemerintah harus menyiapkan lahan RTH. karena tanaman pelindung sudah mengawatirkan sudah mengganggu ketenteraman pengguna jalan yang berbatasan perlunya dipikirkan penambahan lokasi pekuburan umum.

5. Perdagangan

1. Rendahnya daya saing pasar tradisional dibandingkan dengan retail moderen karena belum didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai.
2. Belum optimalnya kinerja pelaksanaan dan pengawasan metrologi legal karena rendahnya anggaran pelaksanaan kegiatan serta terbatasnya jumlah sdm kemetrologian (Penera, Pengamat dan PPNS).
3. Terbatasnya sarana metrologi legal.

6. Perindustrian

1. Belum optimalnya pemenuhan standarisasi kualitas produk industri kecil dan menengah.
2. Kurangnya ketersediaan dukungan sarana dan prasarana industri, yang meliputi pengelolaan lingkungan, kawasan industri, lahan industri dan infrastruktur penunjang.
3. Terbatasnya pemberdayaan industri kecil dan menengah khususnya melalui upaya penguatan sentra, unit pelayanan teknis, tenaga penyuluh, konsultan dan penyediaan pusat promosi

• Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan

1. Sekretariat DPRD

1. Kurangnya pemanfaatan kemajuan informasi teknologi (IT).

2. Sekretariat Daerah

1. Peranan Forum kerukunan umat beragama belum berfungsi secara optimal.
2. Kurangnya sarana dan prasarana penunjang dan pendukung pengembangan SDM syiar Al Quran.
3. Kurangnya data akurat terkait pembinaan dan pengembangan SDM keagamaan.
4. Tingkat dukungan pemerintah akan pengembangan keagamaan masih rendah.

• ***Urusan Penunjang Urusan Pemerintahan***

1. Perencanaan

1. Belum optimalnya ketersediaan, akurasi data dan informasi aktual guna penyusunan rencana dan evaluasi program pembangunan.
2. Ketersediaan data terkini yang belum akurat
3. Monitoring dan evaluasi yang belum optimal
4. Koordinasi dan sinkronisasi proses perencanaan daerah belum optimal
5. Belum optimalnya pemanfaatan hasil-hasil penelitian untuk pengambilan kebijakan perencanaan pembangunan daerah

2. Keuangan

1. Belum tersosialisasinya dengan baik tentang pajak dan retribusi kepada wajib pajak dan pelaku usaha. Belum optimalnya pemanfaatan aset daerah untuk mendorong pendapatan asli daerah.

3. Kepegawaian dan Diklat

1. Belum optimalnya sinergitas antara kebutuhan pengembangan kompetensi PNS dengan pelaksanaan pendidikan dan latihan formal dalam rangka peningkatan kapasitas PNS;
2. Belum optimalnya pemetaan kompetensi PNS sebagai dasar pengembangan kompetensi dan karier;

4. Penelitian dan Pengembangan

1. Pemanfaatan hasil litbang belum sepenuhnya mendukung kebutuhan perencanaan pembangunan;
2. Belum optimalnya upaya fasilitasi penerapan inovasi daerah terhadap perangkat daerah.

• ***Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan***

1. Pengawasan

1. belum optimalnya penyelesaian tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan baik internal maupun eksternal.
2. Masih perlunya peningkatan internal para ASN dalam pelaksanaan kegiatan di OPD untuk mengurangi potensi pelanggaran.
3. Opini atas laporan Keuangan BPK-RI menjadi sebagai salah satu indikator dalam penatausahaan dan mempertanggungjawabkan keuangan secara baik harus tetap dipertahankan guna mewujudkan tata kelola keuangan secara akuntabel.

1.9 Visi dan Misi Kepala Daerah;

Visi

Visi adalah rumusan umum mengenai cita-cita yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Visi yang telah dirumuskan, yang diambil dari Visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih, periode 2021-2026 adalah :

"Mewujudkan Masyarakat Produktif, Yang Berkarakter Kearifan Lokal Menuju Bulukumba Maju dan Sejahtera"

Pernyataan visi ini mengandung 5 (lima) makna, yaitu :

- a. **PRODUKTIF** adalah Mendorong seluruh sektor pembangunan. Meliputi ekonomi. SDM. Infrastruktur. sosial kemasyarakatan. lingkungan dan tata kelola pemerintahan dalam mewujudkan masyarakat maju dan sejahtera.
- b. **BERKARAKTER** adalah Identitas diri dalam menjunjung tinggi nilai-nilai moral dan agama untuk berperikehidupan dan kemasyarakatan.
- c. **KEARIFAN LOKAL** adalah Potensi adat, budaya dan sosial yang dimiliki oleh masyarakat Bulukumba sebagai modal dasar pembangunan.
- d. **MAJU** adalah Pembangunan yang dilaksanakan mengarah pada upaya strategis untuk mewujudkan kondisi yang lebih baik secara konkret dan terukur di segala aspek kehidupan masyarakat Bulukumba. Pencapaian kondisi "maju" yang diharapkan dari visi daerah ini adalah upaya untuk Pembangunan yang dilaksanakan mengarah pada upaya strategis untuk mewujudkan kondisi yang lebih baik secara konkret dan terukur di segala aspek kehidupan masyarakat Bulukumba. Pencapaian kondisi "maju" yang diharapkan dari visi daerah ini adalah upaya untuk.
- e. **SEJAHTERA** adalah Hasil pembangunan dapat terwujud secara nyata serta dimiliki, dirasakan, dan dinikmati oleh masyarakat/penduduk terhadap kebutuhan hak dasar hidupnya dalam mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat sehingga dapat tercukupi atau melebihi. Kebutuhan dasar tersebut antara lain: kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, tempat tinggal, air bersih, pertanahan, sumber daya alam, lingkungan hidup, rasa aman, dan hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan social politik baik bagi perempuan maupun laki-laki.

Tabel 1. 33
Penjelasan Visi RPJMD Kabupaten Kepulauan Bulukumba 2021-2026

VISI	Pokok – Pokok Visi	PENJELASAN VISI
Mewujudkan masyarakat produktif. Yang berkarakter kearifan lokal menuju bulukumba maju dan sejahtera	PRODUKTIF	Mendorong seluruh sektor pembangunan. Meliputi ekonomi. SDM. Infrastruktur. sosial kemasyarakatan. lingkungan dan tata kelola pemerintahan dalam mewujudkan masyarakat maju dan sejahtera.
	BERKARAKTER	Identitas diri dalam menjunjung tinggi nilai-nilai moral dan agama untuk berperikehidupan dan kemasyarakatan.
	KEARIFAN LOKAL	Potensi adat, budaya dan sosial yang dimiliki oleh masyarakat Bulukumba sebagai modal dasar pembangunan.
	MAJU	Pembangunan yang dilaksanakan mengarah pada upaya strategis untuk mewujudkan kondisi yang lebih baik secara konkret dan terukur di segala aspek kehidupan masyarakat Bulukumba. Pencapaian kondisi “maju” yang diharapkan dari visi daerah ini adalah upaya untuk mencapai peningkatan ekonomi masyarakat melalui meningkatnya kinerja dan profesionalisme pemerintahan dan meningkatnya kualitas infrastruktur untuk mencapai tujuan pembangunan daerah.
	SEJAHTERA	Hasil pembangunan dapat terwujud secara nyata serta dimiliki, dirasakan, dan dinikmati oleh masyarakat/penduduk terhadap kebutuhan hak dasar hidupnya dalam mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat sehingga dapat tercukupi atau melebihi. Kebutuhan dasar tersebut antara lain: kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, tempat tinggal, air bersih, pertanahan, sumber daya alam, lingkungan hidup, rasa aman, dan hak untuk

**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2023**

VISI	Pokok – Pokok Visi	PENJELASAN VISI
		berpartisipasi dalam kehidupan social politik baik bagi perempuan maupun laki-laki

Misi

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi Kabupaten Bulukumba disusun untuk memperjelas jalan atau langkah yang akan dilakukan dalam rangka mewujudkan masyarakat produktif, yang berkarakter kearifan lokal menuju Bulukumba maju dan sejahtera. Upaya-upaya yang dilakukan adalah dengan mengedepankan peningkatan kesejahteraan masyarakat, kemajuan daerah, peningkatan pelayanan kepada masyarakat, penyelesaian persoalan daerah, penyerasian pelaksanaan pembangunan daerah kabupaten, provinsi dan nasional, serta memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia dan kebangsaan, meliputi :

1. Meningkatkan Kesadaran Toleransi dan Beragama dalam Masyarakat
2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik
3. Mewujudkan Tata Kelola Pertanian yang Berkualitas dan Berdaya Saing untuk Memenuhi Kebutuhan Daerah dan Ekspor
4. Meningkatkan Produktifitas Sumber Daya Kelautan dan Perikanan untuk Memenuhi kebutuhan Daerah, Nasional dan Internasional
5. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia melalui Pendidikan dan kebudayaan yang Berkarakter Kearifan Lokal
6. Meningkatkan Kualitas dan Layanan Kesehatan Masyarakat
7. Mengembangkan Destinasi Wisata untuk Menarik Wisatawan Domestik dan Mancanegara
8. Pembangunan Infrastruktur yang Merata untuk Melancarkan Aktivitas Masyarakat
9. Pembangunan dan Meningkatkan Perdagangan dan Perindustrian untuk Mewujudkan Ekonomi Mandiri berbasis Investasi dan Bantuan Pemerintah
10. Membina Generasi Muda yang Berkarakter dengan Menjunjung Tinggi Sportivitas dan Profesionalisme
11. Membangun Desa Mandiri untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat
12. Penegakan Supremasi Hukum dan Pertahanan dan Keamanan

Tabel 1. 34
Perumusan Penjelasan Misi RPJMD Kabupaten Bulukumba 2021-2026

No	Misi	Penjelasan misi
1	Meningkatkan Kesadaran Toleransi dan Beragama dalam Masyarakat	Memastikan terwujudnya masyarakat Bulukumba yang rukun dan berperilaku sesuai dengan norma agama dan budaya, menjadi syarat untuk mewujudkan manusia Bulukumba yang maju dan sejahtera.
2	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik	Sebagai wilayah administrasi, pembangunan harus ditopang dengan pemerintahan yang dapat memberikan pelayanan yang prima, transparan, akuntabel, efektif dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Pelayanan yang prima dapat diwujudkan apabila Pemerintah Kabupaten Bulukumba memiliki Aparatur Sipil Negara dengan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia yang sesuai dengan kebutuhan serta sarana prasarana penunjang yang memadai menjadi dasar dalam meningkatkan tata kelola pemerintah dan layanan publik yang lebih baik.
3	Mewujudkan Tata Kelola Pertanian yang Berkualitas dan Berdaya Saing untuk Memenuhi Kebutuhan Daerah dan Ekspor	Untuk menjadi kabupaten yang mandiri maka perlu untuk mengembangkan potensi perekonomian Bulukumba. Agar Kabupaten Bulukumba dapat menjadi daerah yang mandiri maka diperlukan peningkatan produktivitas komoditas unggulan di bidang pertanian, pengembangan perdagangan dan industri serta pembangunan pasar. Kabupaten Bulukumba tidak akan bisa menjadi daerah yang mandiri apabila sektor perekonomian tidak berkembang.
4	Meningkatkan Produktifitas Sumber Daya Kelautan dan Perikanan untuk Memenuhi Kebutuhan Daerah, Nasional dan Internasional	Untuk menjadi kabupaten yang mandiri maka perlu untuk mengembangkan potensi perekonomian Bulukumba. Agar Kabupaten Bulukumba dapat menjadi daerah yang mandiri maka diperlukan peningkatan produktivitas komoditas unggulan di bidang kelautan dan perikanan, pengembangan perdagangan dan industri serta pengembangan /pembangunan pasar. Bulukumba tidak akan bisa menjadi daerah yang mandiri apabila sektor perekonomian tidak berkembang.

**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2023**

No	Misi	Penjelasan misi
5	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Melalui Pendidikan dan kebudayaan yang Berkarakter Kearifan Lokal	Memastikan terwujudnya masyarakat Bulukumba yang berpendidikan, rukun, dan berperilaku sesuai dengan norma agama dan budaya. Hal tersebut merupakan salah satu syarat untuk mewujudkan manusia bulukumba yang maju dan sejahtera.
6	Meningkatkan Kualitas dan Layanan Kesehatan Masyarakat	Memastikan terwujudnya masyarakat Bulukumba yang sehat untuk mewujudkan manusia Bulukumba yang maju dan sejahtera. Hal ini juga merupakan lanjutan program pembangunan periode sebelumnya pada misi yang berkaitan dengan pengembangan sumberdaya manusia. Berbagai program dari misi-misi tersebut telah mampu meningkatkan kualitas sumberdaya manusia di Kabupaten Bulukumba namun masih akan terus ditingkatkan.
7	Mengembangkan Destinasi Wisata untuk Menarik Wisatawan Domestik dan Mancanegara	Kabupaten Bulukumba memiliki kondisi alam yang indah, dan asri. Kondisi alam ini memiliki keterkaitan erat dengan kultur dan budaya masyarakat yang perlu dijaga dan dilestarikan untuk diwariskan kepada generasi selanjutnya, sehingga Potensi Bulukumba dapat dijadikan sasaran objek wisata untuk menarik wisatawan domestik dan mancanegara dalam rangka meningkatkan ekonomi masyarakat
8	Pembangunan Infrastruktur yang Merata untuk Melancarkan Aktivitas Masyarakat	Pembangunan daerah pada hakikatnya mengedepankan pentingnya kebutuhan infrastruktur fisik. Belum optimalnya ketersediaan infrastruktur fisik merupakan alasan utama mengapa Kabupaten Bulukumba terus mendorong penyediaan infrastruktur fisik yang lebih memadai. Sarana infrastruktur fisik yang memadai seperti jalan, jembatan, pasar, perumahan, sanitasi, listrik dan telekomunikasi menjadi prasyarat untuk mewujudkan kemajuan wilayah Kabupaten Bulukumba.
9	Pembangunan dan Peningkatan Perdagangan dan erindustrian untuk mewujudkan	Untuk menjadi daerah yang maju dan sejahtera maka diperlukan pengembangan ekonomi terutama peningkatan produktivitas serta pengembangan industri untuk mewujudkan ekonomi mandiri berbasis investasi dan bantuan pemerintah dalam bidang perdagangan dan perindustrian.

**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2023**

No	Misi	Penjelasan misi
	Ekonomi Mandiri Berbasis Investasi dan Bantuan Pemerintah	
10	Membina Generasi Muda yang Berkarakter dengan Menjunjung Tinggi Sportivitas dan Profesionalisme	Meningkatkan sumber daya manusia yang tangguh dan profesional melalui pembinaan generasi muda yang berkarakter dengan menjunjung tinggi sportivitas dan profesionalisme.
11	Membangun Desa Mandiri untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	Untuk menjadi desa yang maju dan sejahtera maka perlu untuk mengedepankan pentingnya peran pemerintah desa di Kabupaten Bulukumba untuk secara aktif mengembangkan potensi perekonomian desa sehingga dapat menjadi desa yang lebih maju dan mandiri. Untuk itu desa perlu meningkatkan potensi dan produktivitas unggulan agar lebih cepat mengurangi kemiskinan serta meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran desa.
12	Penegakan Supremasi Hukum dan Pertahanan dan Keamanan	Mendorong ketercapaian tujuan pembangunan yang tentunya tidak terlepas dari meningkatnya kondisi lingkungan yang nyaman dan tertib sehingga dapat menurunkan konflik-konflik yang akan terjadi di masa yang akan datang yang salah satunya dapat dilihat dari menurunnya tingkat kriminalitas lingkungan

**1.10 Program Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen
Perencanaan Jangka Menengah;**

Program Pembangunan Daerah berdasarkan RPJMD Kabupaten Bulukumba Tahun 2021-2026 dengan uraian program sebagai berikut:

1. Program Pengelolaan Pendidikan
2. Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan
3. Program Pengendalian Perizinan Pendidikan
4. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
5. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan

**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2023**

6. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman
7. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
8. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
9. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
10. Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional
11. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah
12. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase
13. Program Pengembangan Permukiman
14. Program Penataan Bangunan Gedung
15. Program Penyelenggaraan Jalan
16. Program Pengembangan Jasa Konstruksi
17. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
18. Program Pengembangan Perumahan
19. Program Kawasan Permukiman
20. Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)
21. Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum
22. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran
23. Program Penanggulangan Bencana
24. Program Penanggulangan Bencana
25. Program Pemberdayaan Sosial
26. Program Rehabilitasi Sosial
27. Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial
28. Program Penanganan Bencana
29. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan
30. Program Perencanaan Tenaga Kerja
31. Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja
32. Program Penempatan Tenaga Kerja
33. Program Hubungan Industrial
34. Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan
35. Program Perlindungan Perempuan
36. Program Peningkatan Kualitas Keluarga
37. Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak
38. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)
39. Program Perlindungan Khusus Anak
40. Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2023

41. Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat
42. Program Penanganan Kerawanan Pangan
43. Program Pengawasan Keamanan Pangan
44. Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan
45. Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan
46. Program Pengelolaan Izin Membuka Tanah
47. Program Perencanaan Lingkungan Hidup
48. Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup
49. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)
50. Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)
51. Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pplh)
52. Program Peningkatan Pendidikan Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat Lingkungan Hidup
53. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup
54. Program Pengelolaan Persampahan
55. Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA) Kearifan Lokal Dan Hak MHA Yang Terkait Dengan PPLH
56. Program Pendaftaran Penduduk
57. Program Pencatatan Sipil
58. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
59. Program Pengelolaan Profil Kependudukan
60. Program Penataan Desa
61. Program Peningkatan Kerjasama Desa
62. Program Administrasi Pemerintahan Desa
63. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat
64. Program Pengendalian Penduduk
65. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)
66. Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (Ks)
67. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)
68. Program Informasi Dan Komunikasi Publik
69. Program Aplikasi Informatika
70. Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam
71. Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi
72. Program Penilaian Kesehatan Ksp/ Usp Koperasi

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2023

73. Program Pendidikan Dan Latihan perkoperasian
74. Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi
75. Program Pemberdayaan UMKM
76. Program Pengembangan UMKM
77. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
78. Program Promosi Penanaman Modal
79. Program Pelayanan Penanaman Modal
80. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
81. Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal
82. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan
83. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan
84. Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan
85. Program Penyelenggaraan Statistik Sektor
86. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi
87. Program Pengembangan Kebudayaan
88. Program Pengembangan Kesenian Tradisional
89. Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya
90. Program Pengelolaan Permuseuman
91. Program Pembinaan Perpustakaan
92. Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno
93. Program Pengelolaan Arsip
94. Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip
95. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
96. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
97. Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan
98. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
99. Program Pemasaran Pariwisata
100. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif
101. Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian
102. Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian
103. Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian
104. Program Penyuluhan Pertanian
105. Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
106. Program Perizinan Usaha Pertanian
107. Program Konservasi Sumber Daya Hayati Dan Ekosistemnya
108. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
109. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting

**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2023**

110. Program Pengembangan Ekspor
111. Program Standarisasi Dan Perlindungan Konsumen
112. Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri
113. Program Pengendalian Izin Usaha Industri
114. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional
115. Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat
116. Program Perekonomian Dan Pembangunan
117. Program Dukungan Pelaksana Tugas Dan Fungsi DPRD
118. Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah
119. Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
120. Program Pengelolaan Keuangan Daerah
121. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah
122. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah
123. Program Kepegawaian Daerah
124. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia
125. Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah
126. Program Penyelenggaraan Pengawasan
127. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi
128. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik
129. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan
130. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa
131. Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan
132. Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik
133. Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
134. Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya
135. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial
136. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

b. Kegiatan Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahunan.

Berdasarkan kerangka pendanaan tahun 2023, dijabarkan dalam rencana program prioritas daerah seluruh perangkat daerah yang

**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2023**

kemudian dituangkan dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah, adapun kegiatan perangkat dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 1. 35
Kegiatan Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen RKPD Tahun Anggaran 2023

Urusan/Unsur	Bidang Urusan/ Bidang Unsur	Program	Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			1.01.02.2.04 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		1.01.04 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	1.01.04.2.01 Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2023

Urusan/Unsur	Bidang Urusan/ Bidang Unsur	Program	Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		1.01.05 PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	1.01.05.2.01 Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			1.01.05.2.02 Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	2.22.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	2.22.02.2.02 Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			2.22.02.2.03 Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		2.22.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KESANIAN TRADISIONAL	2.22.03.2.01 Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		2.22.05 PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	2.22.05.2.01 Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2023**

Urusan/Unsur	Bidang Urusan/ Bidang Unsur	Program	Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		2.22.06 PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	2.22.06.2.01 Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Kesehatan
			1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Kesehatan
			1.02.02.2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	Dinas Kesehatan
			1.02.02.2.04 Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Kesehatan
		1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA	1.02.03.2.01 Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	Dinas Kesehatan

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2023

Urusan/Unsur	Bidang Urusan/ Bidang Unsur	Program	Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		MANUSIA KESEHATAN		
			1.02.03.2.02 Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Dinas Kesehatan
			1.02.03.2.02 Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Dinas Kesehatan
			1.02.03.2.03 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Kesehatan

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2023

Urusan/Unsur	Bidang Urusan/ Bidang Unsur	Program	Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		1.02.04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	1.02.04.2.01 Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Dinas Kesehatan
			1.02.04.2.02 Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	Dinas Kesehatan
			1.02.04.2.03 Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Dinas Kesehatan

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2023

Urusan/Unsur	Bidang Urusan/ Bidang Unsur	Program	Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			1.02.04.2.04 Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Dinas Kesehatan
			1.02.04.2.05 Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Dinas Kesehatan
			1.02.04.2.06 Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Dinas Kesehatan
		1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	1.02.05.2.01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Kesehatan
			1.02.05.2.02 Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif	Dinas Kesehatan

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2023

Urusan/Unsur	Bidang Urusan/ Bidang Unsur	Program	Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
			1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Kesehatan
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.03.02.2.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
			1.03.02.2.02 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2023

Urusan/Unsur	Bidang Urusan/ Bidang Unsur	Program	Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			1.03.02.2.02 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
		1.03.03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	1.03.03.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
		1.03.04 PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	1.03.04.2.01 Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
		1.03.05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	1.03.05.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2023

Urusan/Unsur	Bidang Urusan/ Bidang Unsur	Program	Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		1.03.06 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	1.03.06.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
		1.03.07 PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	1.03.07.2.01 Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
		1.03.08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	1.03.08.2.01 Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
		1.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
		1.03.11 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	1.03.11.2.01 Penyelenggaraan	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2023

Urusan/Unsur	Bidang Urusan/ Bidang Unsur	Program	Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	
			1.03.11.2.02 Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
		1.03.12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	1.03.12.2.01 Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
			1.03.12.2.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	1.04.02.2.01 Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
			1.04.02.2.03 Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2023

Urusan/Unsur	Bidang Urusan/ Bidang Unsur	Program	Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Relokasi Program Kabupaten/Kota	
		1.04.03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	1.04.03.2.02 Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
			1.04.03.2.03 Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
		1.04.05 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	1.04.05.2.01 Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	2.10.04 PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	2.10.04.2.01 Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
		2.10.05 PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN	2.10.05.2.01 Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2023

Urusan/Unsur	Bidang Urusan/ Bidang Unsur	Program	Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
		2.10.09 PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH	2.10.09.2.01 Penerbitan Izin Membuka Tanah	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1.05.03.2.01 Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
			1.05.03.2.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
			1.05.03.2.03 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
			1.05.03.2.04 Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2023

Urusan/Unsur	Bidang Urusan/ Bidang Unsur	Program	Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1.05.02.2.01 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
			1.05.02.2.02 Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
			1.05.02.2.03 Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
		1.05.04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	1.05.04.2.01 Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
			1.05.04.2.02 Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2023

Urusan/Unsur	Bidang Urusan/ Bidang Unsur	Program	Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Kebakaran dan Penyelamatan
			1.05.04.2.03 Investigasi Kejadian Kebakaran	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
			1.05.04.2.04 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
			1.05.04.2.05 Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	1.06.02.2.03 Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Sosial

**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2023**

Urusan/Unsur	Bidang Urusan/ Bidang Unsur	Program	Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.06.04.2.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Dinas Sosial
			1.06.04.2.02 Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Dinas Sosial
		1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	1.06.05.2.01 Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	Dinas Sosial
			1.06.05.2.02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Sosial
		1.06.06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA	1.06.06.2.01 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Dinas Sosial

**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2023**

Urusan/Unsur	Bidang Urusan/ Bidang Unsur	Program	Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			1.06.06.2.02 Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Dinas Sosial
		1.06.07 PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	1.06.07.2.01 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Dinas Sosial
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.02 PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	2.11.02.2.01 Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
			2.11.02.2.02 Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
		2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	2.11.03.2.01 Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2023

Urusan/Unsur	Bidang Urusan/ Bidang Unsur	Program	Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2.11.03.2.02 Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
			2.11.03.2.03 Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
		2.11.04 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	2.11.04.2.01 Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
		2.11.05 PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	2.11.05.2.01 Penyimpanan sementara Limbah B3	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2023**

Urusan/Unsur	Bidang Urusan/ Bidang Unsur	Program	Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		2.11.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	2.11.06.2.01 Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
		2.11.07 PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	2.11.07.2.02 Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
		2.11.08 PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	2.11.08.2.01 Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2023

Urusan/Unsur	Bidang Urusan/ Bidang Unsur	Program	Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		2.11.10 PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	2.11.10.2.01 Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
		2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	2.11.11.2.01 Pengelolaan Sampah	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	3.28.04 PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	3.28.04.2.01 Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Kabupaten/Kota	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	2.12.02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	2.12.02.2.01 Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			2.12.02.2.02 Penataan Pendaftaran Penduduk	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			2.12.02.2.03 Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			2.12.02.2.04 Pembinaan dan Pengawasan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2023

Urusan/Unsur	Bidang Urusan/ Bidang Unsur	Program	Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	
		2.12.03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL	2.12.03.2.01 Pelayanan Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			2.12.03.2.02 Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			2.12.03.2.03 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		2.12.04 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	2.12.04.2.01 Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			2.12.04.2.02 Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			2.12.04.2.03 Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2023

Urusan/Unsur	Bidang Urusan/ Bidang Unsur	Program	Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		2.12.05 PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	2.12.05.2.01 Penyusunan Profil Kependudukan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	2.13.02 PROGRAM PENATAAN DESA	2.13.02.2.01 Penyelenggaraan Penataan Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		2.13.03 PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	2.13.03.2.01 Fasilitasi Kerja Sama antar Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		2.13.04 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	2.13.04.2.01 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		2.13.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	2.13.05.2.01 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2023

Urusan/Unsur	Bidang Urusan/ Bidang Unsur	Program	Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN	2.14.02 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	2.14.02.2.01 Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
			2.14.02.2.02 Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		2.14.03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	2.14.03.2.01 Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2023

Urusan/Unsur	Bidang Urusan/ Bidang Unsur	Program	Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2.14.03.2.02 Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
			2.14.03.2.03 Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
			2.14.03.2.04 Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2023

Urusan/Unsur	Bidang Urusan/ Bidang Unsur	Program	Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		2.14.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	2.14.04.2.01 Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1.05.03.2.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Dinas Perhubungan
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	2.15.02.2.02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Dinas Perhubungan
			2.15.02.2.03 Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Dinas Perhubungan
			2.15.02.2.05 Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Dinas Perhubungan
			2.15.02.2.09 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar	Dinas Perhubungan

**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2023**

Urusan/Unsur	Bidang Urusan/ Bidang Unsur	Program	Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	RUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2.16.02 PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	2.16.02.2.01 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
		2.16.03 PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	2.16.03.2.01 Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
		2.16.03 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	2.16.03.2.02 Pengelolaan E- government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	2.20.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	2.20.02.2.01 Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2023

Urusan/Unsur	Bidang Urusan/ Bidang Unsur	Program	Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	2.21.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	2.21.02.2.01 Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
			2.21.02.2.02 Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	2.18.02 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	2.18.02.2.01 Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
			2.18.02.2.02 Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
		2.18.03 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	2.18.03.2.01 Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2023

Urusan/Unsur	Bidang Urusan/ Bidang Unsur	Program	Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		2.18.04 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	2.18.04.2.01 Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
		2.18.05 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	2.18.05.2.01 Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
		2.18.06 PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	2.18.06.2.01 Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	2.07.02 PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	2.07.02.2.01 Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
		2.07.03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	2.07.03.2.01 Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2023

Urusan/Unsur	Bidang Urusan/ Bidang Unsur	Program	Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2.07.03.2.02 Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
			2.07.03.2.04 Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
		2.07.04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	2.07.04.2.01 Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
			2.07.04.2.01 Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
			2.07.04.2.03 Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
			2.07.04.2.04 Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja

**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2023**

Urusan/Unsur	Bidang Urusan/ Bidang Unsur	Program	Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		2.07.05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	2.07.05.2.01 Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
			2.07.05.2.02 Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	2.23.02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	2.23.02.2.01 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah
			2.23.02.2.02 Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah
		2.23.03 PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	2.23.03.2.01 Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2023

Urusan/Unsur	Bidang Urusan/ Bidang Unsur	Program	Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2.23.03.2.02 Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang ditemukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	2.24.02 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	2.24.02.2.01 Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah
			2.24.02.2.02 Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah
		2.24.03 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	2.24.03.2.04 Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	3.26.02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	3.26.02.2.01 Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga
			3.26.02.2.02 Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga

**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2023**

Urusan/Unsur	Bidang Urusan/ Bidang Unsur	Program	Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			3.26.02.2.03 Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga
			3.26.02.2.04 Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga
		3.26.03 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	3.26.03.2.01 Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga
		3.26.05 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	3.26.05.2.01 Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	2.19.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	2.19.02.2.01 Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2023

Urusan/Unsur	Bidang Urusan/ Bidang Unsur	Program	Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	
			2.19.02.2.02 Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga
		2.19.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	2.19.03.2.01 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga
			2.19.03.2.02 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga
			2.19.03.2.03 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga
			2.19.03.2.04 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2023

Urusan/Unsur	Bidang Urusan/ Bidang Unsur	Program	Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2.19.03.2.05 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga
		2.19.04 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	2.19.04.2.01 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	3.30.03 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	3.30.03.2.01 Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
			3.30.03.2.02 Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
		3.30.04 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	3.30.04.2.01 Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2023**

Urusan/Unsur	Bidang Urusan/ Bidang Unsur	Program	Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		3.30.05 PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	3.30.05.2.01 Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
		3.30.06 PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	3.30.06.2.01 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	3.31.02 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	3.31.02.2.01 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
		3.31.03 PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	3.31.03.2.01 Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI)	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2023

Urusan/Unsur	Bidang Urusan/ Bidang Unsur	Program	Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Kewenangan Kabupaten/Kota	
		3.31.04 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	3.31.04.2.01 Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	2.17.02 PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	2.17.02.2.01 Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
		2.17.03 PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	2.17.03.2.01 Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
		2.17.04 PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	2.17.04.2.01 Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2023

Urusan/Unsur	Bidang Urusan/ Bidang Unsur	Program	Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			(satu) Daerah Kabupaten/Kota	
		2.17.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	2.17.05.2.01 Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
		2.17.06 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	2.17.06.2.01 Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
		2.17.07 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	2.17.07.2.01 Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
		2.17.08 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	2.17.08.2.01 Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2023

Urusan/Unsur	Bidang Urusan/ Bidang Unsur	Program	Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	SEKRETARIAT DAERAH	4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	4.01.02.2.01 Administrasi Tata Pemerintahan	Sekretariat Daerah
			4.01.02.2.02 Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Sekretariat Daerah
			4.01.02.2.03 Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Sekretariat Daerah
		4.01.03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	4.01.03.2.01 Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Sekretariat Daerah
			4.01.03.2.02 Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Sekretariat Daerah
			4.01.03.2.03 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Sekretariat Daerah
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	SEKRETARIAT DPRD	4.02.02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	4.02.02.2.01 Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Sekretariat DPRD
			4.02.02.2.04 Peningkatan Kapasitas DPRD	Sekretariat DPRD

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2023

Urusan/Unsur	Bidang Urusan/ Bidang Unsur	Program	Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			4.02.02.2.05 Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Sekretariat DPRD
			4.02.02.2.08 Fasilitasi Tugas DPRD	Sekretariat DPRD
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	PERENCANAAN	5.01.02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	5.01.02.2.01 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
			5.01.02.2.02 Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
			5.01.02.2.03 Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
		5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	5.01.03.2.01 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2023**

Urusan/Unsur	Bidang Urusan/ Bidang Unsur	Program	Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			5.01.03.2.02 Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
			5.01.03.2.03 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	5.05.02 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	5.05.02.2.01 Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
			5.05.02.2.02 Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
			5.05.02.2.03 Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2023

Urusan/Unsur	Bidang Urusan/ Bidang Unsur	Program	Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Pengembangan Daerah
			5.05.02.2.04 Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	KEUANGAN	5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	5.02.02.2.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
			5.02.02.2.02 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
			5.02.02.2.03 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
			5.02.02.2.04 Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
			5.02.02.2.05 Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2023

Urusan/Unsur	Bidang Urusan/ Bidang Unsur	Program	Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Daerah Lingkup Keuangan Daerah	
		5.02.03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	5.02.03.2.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
		5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	5.02.04.2.01 Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	KEPEGAWAIAN	5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	5.03.02.2.01 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
			5.03.02.2.02 Mutasi dan Promosi ASN	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
			5.03.02.2.03 Pengembangan Kompetensi ASN	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
			5.03.02.2.04 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Badan Kepegawaian dan Pengembangan

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2023

Urusan/Unsur	Bidang Urusan/ Bidang Unsur	Program	Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Sumber Daya Manusia
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	5.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	5.04.02.2.01 Pengembangan Kompetensi Teknis	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
			5.04.02.2.02 Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	INSPEKTORAT DAERAH	6.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	6.01.02.2.01 Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Inspektorat Daerah
			6.01.02.2.02 Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Inspektorat Daerah
		6.01.03 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	6.01.03.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Inspektorat Daerah
			6.01.03.2.02 Pendampingan dan Asistensi	Inspektorat Daerah

**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2023**

Urusan/Unsur	Bidang Urusan/ Bidang Unsur	Program	Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
UNSUR KEWILAYAHAN	KECAMATAN	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Semua Kecamatan
		7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	7.01.02.2.03 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Semua Kecamatan
		7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Semua Kecamatan
			7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Semua Kecamatan
UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	8.01.02 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	8.01.02.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2023**

Urusan/Unsur	Bidang Urusan/ Bidang Unsur	Program	Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		8.01.03 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	8.01.03.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
			8.01.03.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2023**

Urusan/Unsur	Bidang Urusan/ Bidang Unsur	Program	Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Pemantauan Situasi Politik	
		8.01.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	8.01.04.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		8.01.05 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	8.01.05.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		8.01.06 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	8.01.06.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

1.11 Penerapan Standar Pelayanan Minimal

Strategi dan arah kebijakan untuk pencapaian tujuan dan sasaran pada setiap misi yang mendukung penerapan dan pencapaian SPM yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 4 Tahun 2021 tentang RPJMD Kabupaten Bulukumba Tahun 2021-2026 dijabarkan sebagai berikut:

Misi Kelima Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Melalui Pendidikan dan Kebudayaan yang Berkarakter Kearifan Lokal

1. Tujuan 5

Terwujudnya SDM yang Unggul, dan Berkarakter Kearifan Lokal, dengan Sasaran

a. Meningkatkan Kualitas Pendidikan

Strategi yang mendukung pencapaian SPM yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

b. Peningkatan akses, kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana, dan peningkatan kualitas guru,

Adapun arah kebijakannya sebagai berikut:

1. Peningkatan Moralitas Dan Karakter Peserta Didik Dan Tenaga Kependidikan Dasar Dengan Merancang Dan Menerapkan Integrasi Nilai-Nilai Moral Dan Karakter Dalam Proses Belajar Mengajar
2. "Akselerasi Peningkatan Kualitas Lulusan Pendidikan Dasar Dalam Meluluskan Tamatan"
3. Meningkatkan kapasitas, kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana Pendidikan dan tenaga pendidik yang didukung oleh pemanfaatan TIK;
4. Penguatan pendidikan vokasional untuk menghasilkan tamatan yang bisa menciptakan lapangan kerja
5. Meningkatkan kapasitas, kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana Pendidikan dan tenaga pendidik yang didukung oleh pemanfaatan TIK;

**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2023**

6. Penguatan pendidikan vokasional untuk menghasilkan tamatan yang bisa menciptakan lapangan kerja
7. Peningkatan Sarana Dan Media Komunikasi Antara Masyarakat Dan Pemerintah

Misi Keenam Meningkatkan Kualitas dan Layanan Kesehatan Masyarakat

1. Tujuan 6

Terwujudnya Derajat Kesehatan masyarakat, dengan Sasaran:

- a. Meningkatnya Akses dan mutu Pelayanan Kesehatan Masyarakat
- Strategi yang mendukung pencapaian SPM yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan masyarakat
2. Peningkatan akses, mutu, dan upaya pelayanan kesehatan, peningkatan kuantitas dan kapasitas tenaga medis, dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam Kesehatan
3. Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan masyarakat, khususnya pada ibu, anak, remaja, dan lanjut usia, melalui peningkatan kapasitas, kualitas dan kuantitas tenaga medis;
4. Perbaikan pelayanan kesehatan khususnya perbaikan pada 1.000 hari pertama kehidupan serta upaya preventif penanganan stunting
5. Akselerasi pembangunan rumah sakit, Pengembangan daya saing keolahragaan melalui dukungan sarana dan prasarana olahraga"
6. Peningkatan kapasitas tenaga kesehatan untuk penguatan fungsi pelayanan kesehatan dasar
7. peningkatan keamanan kesehatan dengan sistem yang terintegrasi

Berikut ini disajikan matrik integrasi SPM ke dalam arah kebijakan pembangunan Kabupaten Bulukumba berdasarkan RPJMD Tahun 2021-2026 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 1. 36
Integrasi SPM Ke Dalam Arah Kebijakan Pembangunan Berdasarkan RPJMD Kabupaten Bulukumba Tahun 2021-2026

Prioritas Kabupaten	Indikator Kinerja	Strategi	Arah Kebijakan
Pendidikan	Indeks Pendidikan	Peningkatan akses, kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana, dan peningkatan kualitas guru,	Peningkatan Moralitas Dan Karakter Peserta Didik Dan Tenaga Kependidikan Dasar Dengan Merancang Dan Menerapkan Integrasi Nilai-Nilai Moral Dan Karakter Dalam Proses Belajar Mengajar
			Akselerasi Peningkatan Kualitas Lulusan Pendidikan Dasar Dalam Meluluskan Tamatan
			Meningkatkan kapasitas, kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana Pendidikan dan tenaga pendidik yang didukung oleh pemanfaatan TIK;
			Penguatan pendidikan vokasional untuk menghasilkan tamatan yang bisa menciptakan lapangan kerja
			Meningkatkan kapasitas, kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana Pendidikan dan tenaga pendidik yang didukung oleh pemanfaatan TIK;
			Penguatan pendidikan vokasional untuk menghasilkan tamatan yang bisa menciptakan lapangan kerja
			Peningkatan Sarana Dan Media Komunikasi Antara Masyarakat Dan Pemerintah
Kesehatan	Indeks Kesehatan	Peningkatan akses, mutu, dan upaya pelayanan kesehatan, peningkatan kuantitas dan kapasitas tenaga medis, dan peningkatan partisipasi	Meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan masyarakat
	Angka Harapan Hidup (AHH)		Peningkatan akses, mutu, dan upaya pelayanan kesehatan, peningkatan kuantitas dan kapasitas tenaga medis, dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam Kesehatan

**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2023**

Prioritas Kabupaten	Indikator Kinerja	Strategi	Arah Kebijakan
		masyarakat dalam Kesehatan	Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan masyarakat, khususnya pada ibu, anak, remaja, dan lanjut usia, melalui peningkatan kapasitas, kualitas dan kuantitas tenaga medis; Perbaikan pelayanan kesehatan khususnya perbaikan pada 1.000 hari pertama kehidupan serta upaya preventif penanganan stunting
			Akselerasi pembangunan rumah sakit, Pengembangan daya saing keolahragaan melalui dukungan sarana dan prasarana olahraga
			Peningkatan kapasitas tenaga kesehatan untuk penguatan fungsi pelayanan kesehatan dasar
			peningkatan keamanan kesehatan dengan sistem yang terintegrasi
Penanggulangan Kemiskinan	Kontribusi Sub Sektor Pertanian Terhadap PDRB	3. Mengoptimalkan produksi dan produktifitas pertanian serta peningkatan upaya pendampingan petani oleh penyuluh pertanian	Penguatan SDM Pelaku Usaha Dan Dukungan Sarana Prasarana, Teknologi, Di Bidang Pertanian
	Pertumbuhan PDRB Sub sektor Pertanian		Peningkatan Lapangan Kerja, Investasi Dan Industrialisasi Pengolahan Produk Pertanian
			Peningkatan Dan Pengembangan Sektor Pertanian Yang Potensial
			Meningkatkan sarana dan prasarana pertanian serta kualitas petani yang didukung oleh peningkatan nilai tambah dan pelayanan system informasi komoditas unggulan pertanian;
			Peningkatan ketersediaan dan mutu benih/bibit untuk mendukung produksi pertanian

**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2023**

Prioritas Kabupaten	Indikator Kinerja	Strategi	Arah Kebijakan
			Akselerasi peningkatan nilai tambah dan daya saing produk berbasis sumber daya alam
			Peningkatan Produktivitas Melalui Industrialisasi Berbasis Pengolahan Komoditas Pertanian, Perikanan, Dan Peternakan
			Peningkatan Ekspor Melalui Nilai Tambah Dan Daya Saing Produk Pengolahan Hasil Pertanian, Peternakan, Dan Perikanan Dan Kemaritiman
			Peningkatan Pengolahan Pelabuhan Serta Alat-Alat Penunjang Aktivitas Pelabuhan Dan Menjalin Kerjasama Internasional
	Kontribusi PDRB Sub sektor Perikanan terhadap PDRB	Mengoptimalkan produksi dan nilai tambah produk perikanan,	Peningkatan Promosi Investasi Sektor Perikanan
	Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Perikanan		Mempercepat Pertumbuhan Sektor Perikanan
			Meningkatkan sarana dan prasarana perikanan tangkap dan budidaya yang didukung oleh penerapan teknologi system perikanan tangkap
			peningkatan sektor perikanan menuju hilirisasi industri
			Peningkatan Peran Riset Dan Teknologi Dalam Mengoptimalkan Dukungan Terhadap Peningkatan Pendapatan Pelaku Usaha Kelautan Dan Perikanan
Sarana dan Prasarana Publik	Indeks Daya saing infrastruktur	Peningkatan akses dan kualitas infrastruktur dasar dan konektivitas antar wilayah,	Pemenuhan Kebutuhan Energi listrik Dan Energi Terbarukan, Peningkatan Kualitas Dan kemantapan Jalan Provinsi serta Pembangunan infrastruktur Wilayah Terisolir, Penyediaan Akses Air Minum dan Sanitasi Kawasan permukiman
			Penyediaan Infrastruktur sumberdaya Air
			Peningkatan Layanan Infrastruktur Daerah

**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2023**

Prioritas Kabupaten	Indikator Kinerja	Strategi	Arah Kebijakan
			Penguatan Koordinasi Antar Pemangku Kepentingan Danantar Tingkatan Pemerintahan Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pemanfaatan Jasa Lingkungan Dan Ketaatan Pelaksanaan Pembangunan Rendah Karbon, Optimalisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Di Sekitar Daerah Aliran Sungai (DAS)
			Meningkatkan akses dan kualitas infrastruktur konektivitas antar wilayah, infrastruktur perumahan dan kawasan permukiman, dan infrastruktur sumber daya air dengan mengarusutamakan upaya mitigasi dan penanggulangan bencana
			Peningkatan jangkauan, kualitas dan kemantapan jalan provinsi serta wilayah terisolir, Penyediaan dan pengembangan infrastruktur pendukung pelabuhan, dermaga, terminal dan bandara
			Peningkatan ketahanan bencana dan penanggulangan bencana, Penanganan pencemaran dan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup
			Penyediaan Infrastruktur Pengelolaan Air Limbah Dan Persampahan, Penguatan Upaya Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi Dan Pengendalian Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan Serta Pembangunan Rendah Karbon
Ketenteraman, Ketertiban dan Penanggulangan Bencana	Indeks Rasa Aman	Peningkatan ketaatan hukum dan upaya penegakan hukum	Peningkatan Koordinasi Antar Instansi Terkait
	Persentase Angka Kriminalitas yang tertangani		Peningkatan Sinergitas Untuk Menjaga Kamtibmas
			Terwujudnya Kondisi Aman Dan Tertib
			Meningkatkan kapasitas dan kualitas aparatur pemerintah Kabupaten Bulukumba dalam ketaatan dan penegakan hukum

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2023

Prioritas Kabupaten	Indikator Kinerja	Strategi	Arah Kebijakan
			peningkatan peran dan fungsi kamtibmas sebagai upaya menekan gangguan keamanan
			Terwujudnya proses perlindungan masyarakat yg ber keadilan
			Terwujudnya Kesadaran Saling Melindungi Dalam Masyarakat
			Terwujudnya Perdamaian Dan Ketertiban Masyarakat
			Terwujudnya Tertib Di Daerah Terkait Perlindungan Masyarakat

BAB II

CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

2.1 Capaian Kinerja Makro

Pada aspek kesejahteraan masyarakat, kinerja yang diukur difokuskan pada kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, kesejahteraan sosial dan seni budaya serta olah raga. Pada fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, serta kesejahteraan sosial, ukuran tingkat keberhasilan dan kemajuan pembangunan digunakan indikator yang bersifat umum (makro) yang secara universal sudah biasa di gunakan sebagai salah satu pendekatan ukuran (indikator). Indikator umum (makro) merupakan indikator gabungan (komposit) dari berbagai kegiatan pembangunan ekonomi maupun sosial. Indikator makro pembangunan tersebut terdiri dari pertumbuhan ekonomi, inflasi, pendapatan perkapita, dan penurunan jumlah pengangguran.

Tabel 2. 1
Indikator Kinerja Makro Kabupaten Bulukumba Tahun 2023

No.	Indikator Kinerja Makro	Satuan	Capaian Kinerja 2022	Capaian Kinerja 2023	Perubahan (%)
1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	%	72,75	73,64	0,89
2	Tingkat Kemiskinan	%	7,39	7,22	-0,17
3	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	1,26	1,31	0,05
4	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	3,81	4,11	0,30
5	Pendapatan Per Kapita	Juta Rp.	38,66	41,90	8,38
6	Gini Ratio	Angka	0,361	0,379	4,99

2.2 Capaian Kinerja Penyelenggaran Urusan Pemerintahan

Capaian kinerja urusan pemerintahan merupakan gambaran dari keberhasilan daerah dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang Pemerintahan Daerah. Laporan capaian kinerja urusan pemerintahan daerah memuat data/informasi kinerja setiap urusan pemerintahan sesuai dengan indikator masing-masing urusan pemerintahan dan urusan penunjang.

2.2.1 Indikator Kinerja Kunci Urusan Pendidikan

1. Tingkat partisipasi warga Negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD

No	IKK Outcome	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1.	Tingkat Partisipasi Warga Negara usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	98,59%	Dinas Pendidikan	

No	IKK Output	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	Jumlah Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Terakreditasi	346	Dinas Pendidikan	
2	Jumlah peserta didik PAUD yang menerima perlengkapan Dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	17785	Dinas Pendidikan	
3	Jumlah peserta didik PAUD yang menerima pembebasan biaya pendidikan	17785	Dinas Pendidikan	
4	Jumlah kebutuhan minimal pendidik PAUD	1082	Dinas Pendidikan	
5	Jumlah Pendidik pada PAUD	999	Dinas Pendidikan	
6	Jumlah pendidik PAUD yang Memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) bidang Pendidikan anak usia dini, Kependidikan Lain atau psikologi Dan sertifikat profesi guru pendidikan anak usia dini	833	Dinas Pendidikan	

No	IKK Output	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
7	Jumlah kepala sekolah PAUD yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah Untuk PAUD formal atau sertifikat pendidikan dan pelatihan kepala satuan PAUD non-formal dari lembaga pemerintah yang berwenang	238	Dinas Pendidikan	

2. Tingkat partisipasi warga Negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan dasar

No	IKK Outcome	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	Tingkat Partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yg berpartisipasi dalam pendidikan dasar	99,51%	Dinas Pendidikan	

No	IKK Output	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	Jumlah SD dan SMP Negeri Terakreditasi	417	Dinas Pendidikan	
2	Jumlah peserta didik jenjang sekolah dasar yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	49387	Dinas Pendidikan	
3	Jumlah peserta didik jenjang sekolah menengah pertama yang menerima perlengkapan dasar	25013	Dinas Pendidikan	

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2023

No	IKK Output	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
	peserta didik dari Pemerintah Daerah			
4	Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah dasar yang menerima pembebasan biaya Pendidikan	47980	Dinas Pendidikan	
5	Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah menengah pertama yang menerima pembebasan biaya pendidikan	25013	Dinas Pendidikan	
6	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah dasar	3.164	Dinas Pendidikan	
7	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama	3160	Dinas Pendidikan	
8	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar	3.164	Dinas Pendidikan	
9	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama	1360	Dinas Pendidikan	
10	Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar	785	Dinas Pendidikan	
11	Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama	391	Dinas Pendidikan	
12	Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar	781	Dinas Pendidikan	
13	Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama	391	Dinas Pendidikan	
14	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV)	2.906	Dinas Pendidikan	

No	IKK Output	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
	atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik			
15	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	1.232	Dinas Pendidikan	
16	Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	380	Dinas Pendidikan	
17	Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	69	Dinas Pendidikan	
18	Jumlah tenaga penunjang lainnya Pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah SMA/ sederajat	268	Dinas Pendidikan	
19	Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah SMA/ sederajat	90	Dinas Pendidikan	

3. Tingkat partisipasi warga Negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Menengah Pertama

No	IKK Outcome	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	Tingkat Partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yg berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	98,40%	Dinas Pendidikan	

No	IKK Output	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	Jumlah SD dan SMP Negeri Terakreditasi	417	Dinas Pendidikan	
2	Jumlah peserta didik jenjang sekolah dasar yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	49.387	Dinas Pendidikan	
3	Jumlah peserta didik jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	25.013	Dinas Pendidikan	
4	Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya Pendidikan	47.980	Dinas Pendidikan	
5	Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan	25.013	Dinas Pendidikan	
6	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada	3.164	Dinas Pendidikan	

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2023

No	IKK Output	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
	jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta)			
7	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)	1.360	Dinas Pendidikan	
8	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar	3.164	Dinas Pendidikan	
9	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)	1.360	Dinas Pendidikan	
10	Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta)	785	Dinas Pendidikan	
11	Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)	391	Dinas Pendidikan	
12	Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta)	781	Dinas Pendidikan	
13	Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)	391	Dinas Pendidikan	
14	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	2.906	Dinas Pendidikan	
15	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)	1.232	Dinas Pendidikan	

No	IKK Output	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
	yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan Sertifikat pendidik			
16	Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	380	Dinas Pendidikan	
17	Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	69	Dinas Pendidikan	
18	Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah SMA/ sederajat	268	Dinas Pendidikan	
19	Jumlah tenaga penunjang lainnya Pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah SMA/ sederajat	90	Dinas Pendidikan	

4. Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2023

NO	IKK OUTCOME	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	Tingkat partisipasi warga Negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	98,286 %	Dinas Pendidikan	

NO	IKK OUTPUT	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	Jumlah Satuan Pendidikan Kesetaraan terakreditasi	4	Dinas Pendidikan	
2	Jumlah peserta didik pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	2.094	Dinas Pendidikan	
3	Jumlah peserta didik pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	2094	Dinas Pendidikan	
4	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta)	179	Dinas Pendidikan	
5	Jumlah pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta)	348	Dinas Pendidikan	
6	Jumlah pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S-1	230	Dinas Pendidikan	
7	Jumlah Kepala Sekolah pada jenjang SD ijazah	25	Dinas Pendidikan	

NO	IKK OUTPUT	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
	D-IV,S1,Sertifikat Pendidik			
8	Jumlah kepala sekolah pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1	25	Dinas Pendidikan	

2.2.2 Indikator Kinerja Kunci Urusan Kesehatan

1. Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Rujukan

NO	IKK OUTCOME	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Rujukan	1,202%	Dinas Kesehatan	

NO	IKK OUTPUT	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	Jumlah RS Rujukan kabupaten/kota yang memenuhi sarana, prasarana dan alat kesehatan (SPA) sesuai standar	2	Dinas Kesehatan	

2. Persentase RS Rujukan Tingkat Kabupaten yang terakreditasi

NO	IKK OUTCOME	Capaian Kinerja	Sumber Data		Keterangan
1	Persentase RS Rujukan Tk Kabupaten yang terakreditasi	100%	Dinas Kesehatan		

NO	IKK OUTPUT	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	Jumlah RS dibina dan dipersiapkan akreditasi	1	Dinas Kesehatan	

3. Persentase Ibu Hamil Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil

NO	IKK OUTCOME	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	Persentase Ibu Hamil Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	100%	Dinas Kesehatan	

NO	IKK OUTPUT	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	25.786	Dinas Kesehatan	
2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan antenatal	530	Dinas Kesehatan	

4. Persentase Ibu Bersalin Mendapatkan Pelayanan Persalinan

NO	IKK OUTCOME	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	Persentase Ibu Bersalin Mendapatkan Pelayanan Persalinan	100%	Dinas Kesehatan	

NO	IKK OUTPUT	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	18.922	Dinas Kesehatan	
2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan persalinan sesuai standar	530	Dinas Kesehatan	

5. Persentase Bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir

NO	IKK OUTCOME	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	Persentase Bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	100%	Dinas Kesehatan	

NO	IKK OUTPUT	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	18908	Dinas Kesehatan	
2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan neonatal esensial sesuai standar	554	Dinas Kesehatan	

6. Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar

NO	IKK OUTCOME	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	100%	Dinas Kesehatan	

NO	IKK OUTPUT	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	132475	Dinas Kesehatan	
2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan balita sesuai standar	598	Dinas Kesehatan	

7. Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar

NO	IKK OUTCOME	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	96,004%	Dinas Kesehatan	

NO	IKK OUTPUT	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	89985	Dinas Kesehatan	
2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan anak usia pendidikan dasar sesuai standar	673	Dinas Kesehatan	

8. Persentase Orang Usia 15-59 Tahun mendapatkan Skrining Kesehatan sesuai Standar

NO	IKK OUTCOME	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100%	Dinas Kesehatan	

NO	IKK OUTPUT	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	84	Dinas Kesehatan	
2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	672	Dinas Kesehatan	

9. Persentase Warga Negara Usia 60 Tahun keatas Mendapatkan Skrining Kesehatan sesuai Standar

NO	IKK OUTCOME	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	Persentase warga negara usia 60 tahun keatas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100%	Dinas Kesehatan	

NO	IKK OUTPUT	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	172509	Dinas Kesehatan	
2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	672	Dinas Kesehatan	

10. Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar

NO	IKK OUTCOME	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan kesehatan sesuai standar	100%	Dinas Kesehatan	

NO	IKK OUTPUT	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	93816	Dinas Kesehatan	
2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	84		

11. Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar

NO	IKK OUTCOME	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	Dinas Kesehatan	

NO	IKK OUTPUT	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	409	Dinas Kesehatan	
2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	84	Dinas Kesehatan	

12. Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar

NO	IKK OUTCOME	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	100%	Dinas Kesehatan	

NO	IKK OUTPUT	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	105	Dinas Kesehatan	
2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	81	Dinas Kesehatan	

13. Persentase orang terduga TBC yang mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar

NO	IKK OUTCOME	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	Persentase orang terduga TBC yang mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	100%	Dinas Kesehatan	

NO	IKK OUTPUT	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	8010	Dinas Kesehatan	

NO	IKK OUTPUT	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	456	Dinas Kesehatan	

14. Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar

NO	IKK OUTCOME	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	100%	Dinas Kesehatan	

NO	IKK OUTPUT	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	8751	Dinas Kesehatan	
2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	145	Dinas Kesehatan	

2.2.3 Indikator Kinerja Kunci Urusan Pekerjaan Umum

1. Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan

NO	IKK OUTCOME	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan	41,56%	Dinas PUTR	

NO	IKK OUTPUT	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS kewenangan kab/kota	193.54	Dinas PUTR	
2	Panjang sungai di kawasan permukiman yang rawan banjir di WS kewenangan	354500	Dinas PUTR	
3	Luas kawasan permukiman sepanjang pantai yang rawan abrasi erosi dan akresi di WS kewenangan kab/kota	761.6	Dinas PUTR	
4	Panjang pantai di kawasan permukiman yang rawan abrasi, erosi, akresi di WS kewenangan kab/kota	68684.94	Dinas PUTR	
5	Rencana Tata Pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air WS Kewenangan kabupaten/kota	0	Dinas PUTR	Suket
6	Rencana Teknis tata pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air kewenangan kabupaten/kota	0	Dinas PUTR	Suket
7	Data prasarana dan sarana pengaman pantai dan sungai milik pemerintah kabupaten/kota	19734.73	Dinas PUTR	

2. Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan

NO	IKK OUTCOME	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi,	31,38%	Dinas PUTR	

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2023

NO	IKK OUTCOME	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
	erosi dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan			

NO	IKK OUTPUT	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS kewenangan	193.54	Dinas PUTR	
2	Panjang sungai di kawasan permukiman yang rawan banjir di WS kewenangan	354500	Dinas PUTR	
3	Luas kawasan permukiman sepanjang pantai yang rawan abrasi erosi dan akresi di WS kewenangan	761.6	Dinas PUTR	
4	Panjang pantai di kawasan permukiman yang rawan abrasi, erosi, akresi di WS kewenangan	68684.94	Dinas PUTR	
5	Rencana Tata Pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air WS Kewenangan kabupaten/kota	0	Dinas PUTR	Suket
6	Rencana Teknis tata pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air kewenangan kabupaten/kota	0	Dinas PUTR	Suket
7	Data prasarana dan sarana pengaman pantai dan sungai milik pemerintah kabupaten/kota	19734.73	Dinas PUTR	

3. Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi

NO	IKK OUTCOME	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/Kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	86,79%	Dinas PUTR	

NO	IKK OUTPUT	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	Persentase panjang jaringan irigasi primer dalam kondisi baik	86.55	Dinas PUTR	
2	Persentase panjang jaringan irigasi sekunder dalam kondisi baik	86.54	Dinas PUTR	
3	Pesentase panjang jaringan tersier dalam kondisi baik	100	Dinas PUTR	

4. Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan terlindungi terhadap rumah tangga

NO	IKK OUTCOME	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan terlindungi terhadap rumah tangga	87,178%	Dinas PUTR	

NO	IKK OUTPUT	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	Penetapan dokumen RISPAM kabupaten/kota	Ada	Dinas PUTR	

NO	IKK OUTPUT	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
2	Tersusun dan ditetapkan JAKSTRADA Kab/Kota	Tidak	Dinas PUTR	
3	Jumlah BUMD dan atau UPTD Kab/Kota Penyelenggaraan SPAM	Ada	Dinas PUTR	
4	Jumlah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melakukan penyelenggaraan SPAM	1	Dinas PUTR	
5	Jumlah kerjasama penyelenggaraan SPAM dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah lain.	0	Dinas PUTR	Suket

5. Persentase Jumlah Rumah Tangga yang Memperoleh Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik

NO	IKK OUTCOME	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	Mengukur persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	84,73%	Dinas PUTR	

NO	IKK OUTPUT	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD S	2311	Dinas PUTR	
2	Jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD-T	720	Dinas PUTR	

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2023

NO	IKK OUTPUT	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
3	Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat dan data jumlah rumah dengan akses sambungan rumah Untuk kegiatan pemenuhan pelayanan Dasar menggunakan SPALD S dan SPALD T	3091	Dinas PUTR	
4	Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa penyedotan lumpur tinja	83313	Dinas PUTR	
5	Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan lumpur tinja	83313	Dinas PUTR	
6	Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan air limbah domestik	3031	Dinas PUTR	
7	Kinerja penyediaan pelayanan SPALD S akses dasar	72.62	Dinas PUTR	
8	Kinerja penyediaan pelayanan SPALD S akses aman	2.01	Dinas PUTR	
9	Kinerja penyediaan pelayanan SPALD T akses aman	2.72	Dinas PUTR	
10	Kinerja penyediaan unit pengolahan setempat	72.62	Dinas PUTR	
11	Kinerja penyediaan Sarana pengangkutan lumpur tinja	40	Dinas PUTR	
12	Kinerja penyediaan prasarana pengolahan lumpur tinja	100	Dinas PUTR	
13	Kinerja penyediaan sambungan rumah yang tersambung ke IPALD	2.72	Dinas PUTR	
14	Kinerja penyediaan jasa penyedotan lumpur tinja	72.62	Dinas PUTR	

6. Rasio Kepatuhan IMB Kab/kota

NO	IKK OUTCOME	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	Rasio Kepatuhan IMB	100%	Dinas PUTR	

NO	IKK OUTPUT	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	Rasio bangunan gedung (kecuali rumah tinggal tunggal dan rumah deret sederhana) yang laik Fungsi	100	Dinas PUTR	
2	Jumlah IMB yang diberikan oleh Pemerintah Kab/Kota dalam tahun Eksisting	272	Dinas PUTR	
3	Penetapan Peraturan Daerah tentang Bangunan/Gedung (Ada/Tidak)	Ada	Dinas PUTR	
4	Penetapan Keputusan Bupati/Walikota tentang Tim Ahli Bangunan/Gedung	Ada	Dinas PUTR	
5	Jumlah bangunan gedung yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota untuk di lindungi dan dilestarikan	1	Dinas PUTR	
6	Jumlah bangunan gedung yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota untuk kepentingan strategis daerah provinsi	3	Dinas PUTR	
7	Jumlah bangunan gedung negara milik Pemerintah Kab/Kota	3377	Dinas PUTR	
8	Jumlah bangunan gedung negara milik pemerintah kabupaten/kota yang dipelihara/dirawat	3377	Dinas PUTR	

7. Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten/Kota

NO	IKK OUTCOME	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	Tingkat Kemantapan Jalan	85,99%	Dinas PUTR	

NO	IKK OUTPUT	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	Panjang jalan berdasarkan yang ditetapkan kepala daerah dalam SK jalan kewenangan Kab/Kota	1211.516	Dinas PUTR	
2	Panjang jalan yang dibangun	16050	Dinas PUTR	
3	Panjang jembatan yang dibangun	40.3	Dinas PUTR	
4	Panjang jalan yang ditingkatkan (struktur/fungsi)	0	Dinas PUTR	Suket
5	Panjang jembatan yang diganti/dilebarkan	5.75	Dinas PUTR	
6	Panjang jalan yang direkonstruksi atau Direhabilitasi	641000	Dinas PUTR	
7	Panjang jembatan yang direhabilitasi	0	Dinas PUTR	Suket
8	Panjang jalan yang dipelihara	41830	Dinas PUTR	
9	Panjang jembatan yang dipelihara	9	Dinas PUTR	

8. Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi

NO	IKK OUTCOME	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	86,4%	Dinas PUTR	

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2023

NO	IKK OUTCOME	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	Proyek yang menjadi kewenangan pengawasan tanpa kecelakaan konstruksi	100%	Dinas PUTR	

NO	IKK OUTPUT	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	Jumlah Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi di wilayah kabupaten/Kota	0	Dinas PUTR	Suket
2	Jumlah tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kabupaten/kota	432	Dinas PUTR	
3	Jumlah tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi ahli di wilayah kabupaten/kota	432	Dinas PUTR	
4	Terselenggaranya Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi Cakupan kabupaten/kota yang aktif dengan data termutakhir	0	Dinas PUTR	Suket
5	Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari APBD Kab/Kota	73	Dinas PUTR	
6	Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari APBN	0	Dinas PUTR	Suket
7	Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari	0	Dinas PUTR	Suket

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2023

NO	IKK OUTPUT	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
	pendanaan lainnya			
8	Tersedianya data dan informasi paket pekerjaan jasa konstruksi sesuai kewenangannya yang sudah dan sedang dilaksanakan oleh badan usaha jasa konstruksi yang termutakhir secara berkala	146	Dinas PUTR	
9	Tersedianya data dan profil OPD sub-urusan jasa konstruksi kabupaten/kota	1	Dinas PUTR	
10	Tersedianya data dan informasi pelatihan tenaga operator dan teknisi/analisis konstruksi di wilayah kabuapten/kota yang dilaksanakan sendiri atau melalui kerjasama dengan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kerja (LPPK) yang diregistrasi oleh menteri yang memb	0	Dinas PUTR	Suket
11	Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kabupaten/kota yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknisi/analisis	432	Dinas PUTR	
12	Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi operator/teknisi/analisis di wilayah kab/kota	432	Dinas PUTR	
13	Tersedianya data dan informasi badan usaha	274	Dinas PUTR	

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2023

NO	IKK OUTPUT	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
	yang mendapatkan pembinaan di wilayah kabupaten/kota			
14	Tersedianya data dan informasi pemenuhan komitmen permohonan IUJK badan usaha dan TDUP yang disetujui	0	Dinas PUTR	Suket
15	Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	0	Dinas PUTR	Suket
16	Tersedianya data dan informasi kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya	0	Dinas PUTR	Suket
17	Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	0	Dinas PUTR	Suket
18	Jumlah badan usaha yang memiliki IUJKN di wilayah kab/kota	217	Dinas PUTR	
19	Jumlah usaha perseorangan yang memiliki TDUP di wilayah kabupaten/kota	548	Dinas PUTR	
20	Jumlah badan usaha yang memiliki IUJKN	88	Dinas PUTR	

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2023

NO	IKK OUTPUT	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
	yang terlibat dalam proyek di wilayah Kab/Kota			
21	Jumlah badan usaha yang mendapatkan pembinaan di wilayah Kab/Kota	155	Dinas PUTR	
22	Jumlah pemenuhan komitmen permohonan IUJK badan usaha dan TDUP yang disetujui	133	Dinas PUTR	
23	Jumlah pengawasan terkait ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	0	Dinas PUTR	Suket
24	Jumlah kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya	0	Dinas PUTR	Suket
25	Jumlah pengawasan terkait ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	0	Dinas PUTR	Suket

2.2.4 Indikator Kinerja Kunci Urusan Perumahan Rakyat

1. Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah layak huni bagi korban bencana Kabupaten/Kota

NO	IKK OUTCOME	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana Kabupaten/kota	3,17%	DP3	

NO	IKK OUTPUT	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	Jumlah rumah yang berada pada kawasan rawan bencana dan rencana penanganannya	63	DP3	
2	Jumlah rumah yang terkena bencana alam	63	DP3	
3	Jumlah RT, KK, dan jiwa korban yang rumahnya terkena bencana alam	63	DP3	
4	Jumlah unit rumah korban bencana yang direhabilitasi sesuai rencana aksi	2	DP3	
5	Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun kembali sesuai dengan rencana aksi	2	DP3	
6	Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun baru/relokasi sesuai dengan rencana aksi	6	DP3	
7	Jumlah unit dan lokasi rumah sewa yang akan menjadi tempat tinggal sementara korban bencana	6	DP3	
8	Jumlah rt, kk dan jiwa korban bencana yang terfasilitasi	8	DP3	
9	Jumlah, luasan dan lokasi pencadangan lahan	0	DP3	Suket

2. Fasilitas penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota

NO	IKK OUTCOME	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	Fasilitas penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota	100	DP3	

NO	IKK OUTPUT	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	Jumlah rumah tangga penerima layanan yang telah mendapatkan fasilitas ganti kerugian aset properti berdasarkan rencana pemenuhan SPM	0	DP3	Suket
2	Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang belum nedapatkan fasilitas penggantian hak atas tanah dan/atau bangunan berdasarkan rencana pemenuhan SPM	0	DP3	Suket
3	Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan subsidi uang sewa berdasarkan rencana pemenuhan SPM	0	DP3	Suket
4	Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang telah mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM	8	DP3	
5	Jumlah rumah tangga penerima layanan yang	8	DP3	

NO	IKK OUTPUT	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
	belum mendapatkan penyediaan ruang layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM			
6	Jumlah total luasan (Ha) pengadaan tanah	40333	DP3	

3. Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 Ha Kabupaten/Kota yang ditangani

NO	IKK OUTCOME	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 Ha di kabupaten/kota yang ditangani	17,43%	DP3	

NO	IKK OUTPUT	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	Jumlah luasan (Ha) kawasan permukiman kumuh < 10 Ha	17.09	DP3	
2	Jumlah unit peningkatan kualitas RTRH	5	DP3	
3	Jumlah luasan (Ha) penanganan infrastruktur kawasan kumuh	5.88	DP3	

4. Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)

NO	IKK OUTCOME	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	Berkurangnya jumlah unit RTRL (rumah tidak layak huni)	6,95%	DP3	

NO	IKK OUTPUT	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	Jumlah rumah di kabupaten/kota	116038	DP3	
2	Jumlah unit peningkatan kualitas RTRL	5	DP3	
3	Jumlah rumah tidak layak huni	8087	DP3	
4	Jumlah rumah yang tidak layak huni	0	DP3	Suket
5	Rasio rumah dan kk	75	DP3	
6	Jumlah rumah pembangunan baru	5935	DP3	

5. Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (prasarana, sarana dan utilitas umum)

NO	IKK OUTCOME	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	Jumlah perumahan yang dilengkapi PSU (prasarana, sarana, dan utilitas umum	100%	DP3	

NO	IKK OUTPUT	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	Jumlah perumahan yang terfasilitasi psu	5935	DP3	
2	Jumlah unit rumah yang sudah difasilitasi air minum	101464	DP3	
3	Jumlah unti rumah yang terfasilitasi jalan lingkungan	0	DP3	Suket
4	Jumlah unit rumah yang terfasilitasi akses sanitasi (on site/off site)	98637	DP3	
5	Jumlah perumahan yang terfasilitasi RTNH	0	DP3	Suket
6	Jumlah unit rumah yang terfasilitasi akses PJU	570	DP3	
7	Jumlah pengembang		DP3	

NO	IKK OUTPUT	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
	yang tersertifikasi	25		
8	Jumlah pengembang yang teregistrasi	18	DP3	
9	Jumlah pengembang yang mendapat penyuluhan atau pelatihan	0	DP3	Suket

2.2.5 Indikator Kinerja Kunci Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat

1. Persentase Gangguan Trantibun yang dapat diselesaikan

NO	IKK OUTCOME	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	Persentase pelanggaran Trantibum yang dapat diselesaikan	100%	Satpol PP dan Damkar	

NO	IKK OUTPUT	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	Jumlah Pelanggaran dan Pengaduan trantibum dalam Kab/Kota yang ditangani	105	Satpol PP dan Damkar	
2	Jumlah Satlinmas yang terlatih dan dikukuhkan	1330	Satpol PP dan Damkar	
3	Jumlah Perda dan Perkada yang ditegakkan	11	Satpol PP dan Damkar	
4	Jumlah Polisi Pamong Praja yang memiliki kualitas sebagai PPNS	2	Satpol PP dan Damkar	
5	Tersedianya SOP dalam penegakan Perda dan Perkada serta penanganan gangguan trantibum	7	Satpol PP dan Damkar	
6	Tersedianya sarana dan prasarana minimal	60	Satpol PP dan Damkar	

2. Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan

NO	IKK OUTCOME	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	100%	Satpol PP dan Damkar	

3. Jumlah Warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana

NO	IKK OUTCOME	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100	BPBD	

NO	IKK OUTPUT	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	Persentase Penyelesaian dokumen KRB sampai dinyatakan sah/legal	100	BPDB	
2	Persentase jumlah penduduk dikawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai dengan jenis ancaman bencana	100	BPBD	

4. Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana

NO	IKK OUTCOME	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100	BPBD	

NO	IKK OUTPUT	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	Persentase penyelesaian dokumen RPB sampai	1	BPBD	

NO	IKK OUTPUT	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
	dengan dinyatakan sah/legal			
2	Persentase penyelesaian dokumen Renkon sampai dinyatakan sah/Legal	0	BPBD	Suket
3	Persentase jumlah aparatur dan warganegara yang ikut pelatihan	100	BPBD	
4	Persentase warga negara yang ikut pelatihan	100	BPBD	
5	Persentase warga negara yang mendapat layanan pusdalops penanggulangan bencana dan sarana prasarana penanggulangan bencana	100	BPBD	
6	Persentase warganegara yang mendapat peralatan perlindungan	100	BPBD	

5. Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana

NO	IKK OUTCOME	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi Korban bencana	100%	BPBD	

NO	IKK OUTPUT	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status KLB	0	BPBD	Suket
2	Persentase kecepatan respon kurang dari 24	241.58	BPBD	

NO	IKK OUTPUT	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
	jam untuk setiap status darurat bencana			
3	Persentase jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana	100	BPBD	
4	Persentase jumlah korban berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi terhadap kejadian bencana	100	BPBD	

6. Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran

NO	IKK OUTCOME	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100%	BPBD	

NO	IKK OUTPUT	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	Jumlah Jenis Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (Operasi Darurat Kebakaran) oleh dinas Pemadam kebakaran dan penyelamatan di kabupaten/kota	37	Satpol PP dan Damkar	
2	Tersediannya pos sektor damkar yang di lengkapai sarana prasarana damkar, sarana prasarana penyelamatan di kantor kecamatan	4	Satpol PP dan Damkar	
3	Tersedianya aparatur selama 24 jam yang di laksanakan secara begantian di kantor kecamatan.	42	Satpol PP dan Damkar	

NO	IKK OUTPUT	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
4	Pos damkar yang dilengkapi sarana/prasarana damkar, sarana prasarana penyelamatan dan evakuasi setiap kelurahan/desa	0	Satpol PP dan Damkar	Suket
5	Jumlah dan Jenis Sarana prasarana pemadam, penyelamatan dan evakuasi	12	Satpol PP dan Damkar	
6	Jumlah aparatur pemadam kebakaran yang memenuhi standar kealifikasi pemadam sebagaimana dimaksud peraturan menteri dalam negeri nomor 16 tahun 2009 tentang standar kualifikasi aparat pemadam kebakaran	149	Satpol PP dan Damkar	
7	Jumlah relawan kebakaran dibawa binaan dinas pemadaman kebakaran dan penyelamatan atau perangkat daerah yang menyelenggarakan sub urusan kebakaran.	18	Satpol PP dan Damkar	
8.	Jumlah peningkatan kapasitas aparat pemadam kebakaran	4	Satpol PP dan Damkar	

7. Waktu Tanggap (Response Time) Penanganan kebakaran

NO	IKK OUTCOME	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	Waktu tanggap (Response time) penanganan kebakaran	11,75%	Satpol PP dan Damkar	

2.2.6 Indikator Kinerja Urusan Sosial

1. Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlanta dan gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti.

NO	IKK OUTCOME	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlanta dan gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti	100%	Dinas Sosial	

NO	IKK OUTPUT	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	Jumlah layanan data dan pengaduan yang di miliki	17	Dinas Sosial	
2	Jumlah data penyandang disabilitas, terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan Gepeng yang masuk dalam data terpadu FM dan OTM	19	Dinas Sosial	
3	Jumlah tim reaksi cepat yang dibentuk	1	BPBD	
4	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan Gepeng yang di jangkau	82	Dinas Sosial	
5	Jumlah kendaraan roda empat yang diakses khusus layanan kedaruratan yang di miliki	1	Dinas Sosial	
6	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, yang menerima paket	39	Dinas Sosial	

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2023

NO	IKK OUTPUT	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
	pemakanan sesuai standar gizi			
7	Jumlah rumah singgah/selter/tempat tinggal yang sementara yang dimiliki sesuai standar.	1	Dinas Sosial	
8	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, anak usia terlantar, gepeng yang menerima paket sandang,	40	Dinas Sosial	
9.	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, anak usia terlantar, gepeng yang memanfaatkan alat bantu.	9	Dinas Sosial	
10	Jumlah alat bantu yang tersedia dirumah singgah	2	Dinas Sosial	
11	Jumlah paket pembekalan kesehatan yang tersedia	9	Dinas Sosial	
12	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, anak usia terlantar, gepeng yang memanfaatkan paket pembekalan kesehatan.	9	Dinas Sosial	
13	Jumlah tenaga kesehatan yang disediakan dirumah singgah	21	Dinas Sosial	
14	Jumlah pekerja sosial profesional dan atau TKS dan Atau Relawan, Sosial yang di sediakan.	1	Dinas Sosial	
15	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, anak usia terlantar, gepeng yang mendapatkan	9	Dinas Sosial	

NO	IKK OUTPUT	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
	bimbingan fisik, mental dan sisoal usia sntandar keluarga, masyarakat, dinas sisoal, rumah singgah atau pusat kesejahteraan sosial			
16	Jumlah bimbingan sosial yang di laksanakan oleh keluarga dan masyarakat.	9	Dinas Sosial	
17	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, anak usia terlantar, gepeng yang mendapatkan dokumen kependudukan	6	Dinas Sosial	
18	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, anak usia terlantar, gepeng yang mendapatkan Akses Layanan pendidikan dan kesehatan dasar	9	Dinas Sosial	
19	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, anak usia terlantar, gepeng yang mendapatkan layanan penelusuran keluarga	11	Dinas Sosial	
20	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, anak usia terlantar, gepeng yang reunifikasi dengan keluarga.	11	Dinas Sosial	
21	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, anak usia terlantar, gepeng yang dirujuk.	11	Dinas Sosial	

- Persentase korban bencana alam yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota

NO	IKK OUTCOME	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	Persentase korban bencana alam yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	100%	Dinas Sosial dan BPBD	

NO	IKK OUTPUT	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	Jumlah korban bencana yang mendapatkan makanan	84	BPBD	
2	Jumlah korban bencana yang menerima paket sandang	84	BPBD	
3	Jumlah tempat penampungan pengungsi yang di miliki	6	BPBD	
4	Jumlah paket permakanan khusus bagi kelompok rentang	5	BPBD	
5	Jumlah korban bencana yang menerima pelayanan dukungan psikososial	84	BPBD	
6	Jumlah pekerja sosial yang profesional/tenaga kesejahteraan sosial dan atau relawan sosial yang tersedia	134	BPBD & Dinas Sosial	

2.2.7 Indikator Kinerja Kunci Tenaga Kerja

- Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu kerencana tenaga kerja

NO	IKK OUTCOME	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu kerencana tenaga kerja	100%	Dinas Tenaga kerja	

NO	IKK OUTPUT	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	Dokumen perencanaan tenaga kerja kabupaten/kota	1	Dinas Tenaga Kerja	
2	Persentase akurasi proyeksi indikator dalam rencana tenaga kerja	100	Dinas Tenaga Kerja	
3	Jumlah perusahaan yang menyusun rencana tenaga kerja di kabupaten/kota	0	Dinas Tenaga Kerja	Suket

2. Persentase tenaga kerja bersertifikasi kompetensi

NO	IKK OUTCOME	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	Persentase tenaga kerja bersertifikasi kompetensi	68,96%	Dinas Tenaga Kerja	

NO	IKK OUTPUT	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	Persentase penerapan program PBK dengan kulaifikasi klaster	40	Dinas Tenaga Kerja	
2	Persentase bersertifikat kompetensi	100	Dinas Tenaga Kerja	
3	Rasio jumlah instruktur terhadap peserta pelatihan	3.75	Dinas Tenaga Kerja	
4	Persentase LPK yang terakreditasi	27.77	Dinas Tenaga Kerja	
5	Persentase LPK yang memiliki perizinan	100	Dinas Tenaga Kerja	

NO	IKK OUTPUT	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
6	Jumlah penganggur yang dilatih	160	Dinas Tenaga Kerja	
7	Jumlah lulusan bersertifat pelatihan	100	Dinas Tenaga Kerja	
8	Persentase penyerapan lulusan	100	Dinas Tenaga Kerja	
9	Lulusan bersertifikat kompetensi	91	Dinas Tenaga Kerja	
10	Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesai (CPMI)/Calon tenaga kerja Indonesia CTKI yang diberikan pelatihan	55	Dinas Tenaga Kerja	
11	Jumlah pelatihan calon pekerja migran Indonesia(CPMI)/ Calon tenaga kerja Indonesia CTKI	55	Dinas Tenaga Kerja	

3. Tingkat Produktivitas tenaga kerja

NO	IKK OUTCOME	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	Tingkat produktivitas tenaga kerja	227.059%	Dinas Tenaga kerja	

NO	IKK OUTPUT	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	Persentase perusahaan yang menerapkan program peningkatan produktivitas	0.79	Dinas Tenaga Kerja	
2	Data tingakat produktivitas total	225798	Dinas Tenaga Kerja	

4. Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB,LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan Terdaftar Peserta BPJS Ketenaga Kerjaan)

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2023

NO	IKK OUTCOME	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB,LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan Terdaftar Peserta BPJS Ketenaga Kerjaan)	100%	Dinas Tenaga Kerja	

NO	IKK OUTPUT	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	Persentase perusahaan yang tidak memiliki peraturan perusahaan (PP)	7	Dinas Tenaga Kerja	
2	Persentase perusahaan yang telah memiliki Perjanjian Kerja Bersama (PKB)	7	Dinas Tenaga Kerja	
3	Rekapitulasi tahunan jumlah konfederasi SP/SB yang tercatat, federasi SP/SB yang tercatat, SP/SB diperusahaan yang tercatat, SP/SB diluar perusahaan yang tercatat dan anggota SP/SB diperusahaan	0	Dinas Tenaga Kerja	Suket
4	Persentase perusahaan yang sudah menyusun struktur skala upah	7	Dinas Tenaga Kerja	
5	Persentase perusahaan yang telah terdaftar sebagai peserta BPJS ketenaga kerjaan	468.25	Dinas Tenaga Kerja	
6	Persentase jumlah perusahaan yang berselisih	2	Dinas Tenaga Kerja	
7	Jumlah mogok kerja	0	Dinas Tenaga Kerja	Suket
8	Jumlah penutupan perusahaan	0	Dinas Tenaga Kerja	Suket

NO	IKK OUTPUT	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
9	Jumlah perselisihan kepentingan	0	Dinas Tenaga Kerja	Suket
10	Jumlah perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh (SP/SB) dalam 1 (satu) perusahaan	0	Dinas Tenaga Kerja	Suket
11	Jumlah perselisihan PHK	2	Dinas Tenaga Kerja	
12	Jumlah pekerja/buruh yang ter-PHK	2	Dinas Tenaga Kerja	
13	Jumlah perselisihan yang diselesaikan melalui perundingan bipartite	0	Dinas Tenaga Kerja	
14	Lembaga kerjasama (LKS) tripartite kabupaten/kota yang diberdayakan	0	Dinas Tenaga Kerja	Suket
15	Persentase perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan melalui perjanjian bersama oleh mediaator hubungan industrial	0	Dinas Tenaga Kerja	

5. Persentase tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah kabupaten/kota

No	IKK OUTCOME	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB,LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan Terdaftar Peserta BPJS Ketenaga Kerjaan)	100%	Dinas Tenaga Kerja	

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2023

No	IKK OUTCOME	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	Persentase tenaga Kerja yang ditempatkan dalam dan luar negeri melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah kabupaten/kota	91,69%	Dinas Tenaga Kerja	

NO	IKK OUTPUT	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	Jumlah tempat lowongan kerja yang tersedia diwilayah kabupaten/kota	526	Dinas Tenaga Kerja	
2	Jumlah pencari kerja yang terdaftar di kabupaten/kota	2059	Dinas Tenaga Kerja	
3	Jumlah bursa kerja khusus (BKK) wilayah kabupaten/kota	2	Dinas Tenaga Kerja	
4	Jumlah tenaga kerja khusus terdaftar dalam asatu kabupaten/kota	0	Dinas Tenaga Kerja	
5	Jumlah pejabat fungsional pengantar kerja	4	Dinas Tenaga Kerja	
6	Jumlah lembaga penempatan tenaga kerja swasta (LPTKS) antar kerja lokal dalam satu wilayah kabupaten/kota	1	Dinas Tenaga Kerja	
7	Jumlah perjanjian kerja yang disahkan oleh dinas bidang ketenaga kerjaan kabupaten/kota	0	Dinas Tenaga Kerja	Suket
8	Jumlah penempatan tenaga kerja melaui informasi pasar kerja (IPK) online (SISNAKER)	1888	Dinas Tenaga Kerja	
9	Jumlah calon pekerja migran indonesia (CPMI)/calon tenaga kerja indonesia (CTKI) yang mendapatkan	55	Dinas Tenaga Kerja	

NO	IKK OUTPUT	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
	sosialisasi			
10	Jumlah calon pekerja migran indonesia (CPMI)/calon tenaga kerja indonesia (CTKI) yang terdata	55	Dinas Tenaga Kerja	
11	Jumlah pekerja migran indonesia (PMI)/tengaa kerja indonesia (TKI) yang mendapatkan fasilitasi kepulangannya	48	Dinas Tenaga Kerja	
12	Jumlah pekerja migran indonesia (PMI)/tengaa kerja indonesia (TKI) yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan kerja	55	Dinas Tenaga Kerja	
13	Data pemberdayaan migran indonesia (PMI)/tenaga kerja indonesia (TKI) purna dan keluarganya	48	Dinas Tenaga Kerja	
14	Jumlah layanan terpadu satu atap (LTSA) yang dibentuk	0	Dinas Tenaga Kerja	Suket

2.2.8 Indikator Kinerja Kunci Urusan Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten/Kota

1. Persentase ARG pada belanja langsung APBD

No	IKK OUTCOME	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	1,880%	DP2KBP3A	

NO	IKK OUTPUT	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	Jumlah lembaga pemerintah tingkat daerah kabupaten/kota yang telah dilatih PUG	27	DP2KBP3A	
2	Jumlah program/kegiatan PUG pada perangkat daerah	26	DP2KBP3A	

NO	IKK OUTPUT	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
	yang sudah dievaluasi melalui analisis gender ditingkat kabupaten/kota			

2. Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten/kota

No	IKK OUTCOME	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten/kota	100%	DP2KBP3A	

NO	IKK OUTPUT	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	Jumlah media massa (cetak, elektronik) yang bekerjasama dengan pemkab/kota (dinas PPPA) untuk melakukan KIE pencegahan kekerasan terhadap anak	1	DP2KBP3A	
2	Jumlah lembaga layanan anak yang telah memiliki standar pelayanan minimal	1	DP2KBP3A	
3	Persentase korban kekerasan anak yang terlayani	100	DP2KBP3A	
4	Jumlah lembaga layanan anak yang mendapat pelatihan	2	DP2KBP3A	
5	Jumlah lembaga layanan anak yang mendapatkan bantuan keuangan/fasilitas oleh pemkab/kota (APBD kabupaten/kota)	1	DP2KBP3A	

3. Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2023

No	IKK OUTCOME	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	3,31%	DP2KBP3A	

NO	IKK OUTPUT	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	Jumlah organisasi kemasyarakatan yang bergerak dalam bidang perempuan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan pelatihan	2	DP2KBP3A	
2	Jumlah kader perempuan tingkat kabupaten/kota yang sudah dilatih	3	DP2KBP3A	
3	Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapat pelatihan	1	DP2KBP3A	
4	Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan bantuan keuangan oleh pemerintah kabupaten/kota	1	DP2KBP3A	
5	Jumlah kebijakan/program pencegahan kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi	2	DP2KBP3A	
6	Jumlah lembaga penyedia layanan perlindungan hak perempuan yang telah terstandarisasi	3	DP2KBP3A	

NO	IKK OUTPUT	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
7	Persentase korban kekerasan perempuan yang terlayani	100	DP2KBP3A	

2.2.9 Indikator Kinerja Kunci Urusan Pangan Kabupaten/Kota

1. Persentase Ketersediaan Pangan (Tersedianya cadangan beras/Jagung sesuai kebutuhan)

NO	IKK OUTCOME	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	Persentase Ketersediaan Pangan (Tersedianya cadangan beras/Jagung sesuai kebutuhan)	941,455%	Dinas Ketahanan Pangan	

NO	IKK OUTPUT	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	Tersedianya infrastruktur perundangan dan sarana pendukung lainnya untuk penyimpanan cadangan pangan	26	Dinas Ketahanan Pangan	
2	Tersalurkannya pangan pokok dan pangan lainnya	3534.3	Dinas Ketahanan Pangan	
3	Tersedianya regulasi harga minimum daerah untuk pangan lokal	0	Dinas Ketahanan Pangan	Suket
4	Terlaksananya kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam rangka pemenuhan konsumsi pangan yang beragam dan bergizi seimbang	4	Dinas Ketahanan Pangan	
5	Tersedianya peta ketahanan dan kerentanan pangan	1	Dinas Ketahanan Pangan	

NO	IKK OUTPUT	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
6	Tertanganinya kerawanan pangan	1	Dinas Ketahanan Pangan	
7	Tersalurkannya cadangan pangan pada daerah rentan rawan pangan	1	Dinas Ketahanan Pangan	
8	Terlaksananya pengawasan keamanan pangan segar	1	Dinas Ketahanan Pangan	

2.2.10 Indikator Kinerja Kunci Urusan Pertanahan Kabupaten/Kota

1. Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukan tanahnya di atas izin lokasi yang di terbitkan.

NO	IKK OUTCOME	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukan tanahnya di atas izin lokasi yang di terbitkan.	100%	DP3	

NO	IKK OUTPUT	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	Sk izin Lokasi yang di terbitkan oleh bupati/wali kota	0	DP3	Suket
2	SK Bupati/Wali kota tentang penetapan tanah obyek landre form yang bersumber kelebihan maksimum /absentre dan daftar subyek	0	DP3	Suket
3	SK bupati/Wali Kota tentang penetapan besarnya ganti rugi kepada bekas pemilik tanah kelebihan maksimun/Absentee	0	DP3	Suket
4	Dokumen izin membuka	0	DP3	Suket

NO	IKK OUTPUT	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
	tanah			
5	Dokumen perencanaan penggunaan tanah kabupaten/kota.	1	DP3	

2. Persentase penetapan tanah untuk pembangunan kapsitas umum

NO	IKK OUTCOME	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	100%	DP3	

3. Tersedianya lokasi pembangunan dalam rangka penanaman modal

NO	IKK OUTCOME	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	Tersedianya lokasi pembangunan dalam rangka penanaman modal	100%	DP3	

4. Tersedianya tanah Obyek Tanah Landre Form yang siap didistribusikan yang berasal dari tanah kelebihan maksumum dan absentee

NO	IKK OUTCOME	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	Tersedianya tanah Obyek Tanah Landre Form yang siap direstribusikan yang berasal dari tanah kelebihan maksumum dan absentee	100	DP3	

5. Tersedianya tanah untuk masyarakat

NO	IKK OUTCOME	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	Tersedianya tanah untuk masyarakat	100	DP3	

6. Penanganan persentase sengketa tanah yang di lakukan melalui mediasi

NO	IKK OUTCOME	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	Penanganan persentase sengketa tanah yang di lakukan melalui mediasi	100%	DP3	

2.2.11 Indikator Kinerja Kunci Urusan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota

1. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten/kota

NO	IKK OUTCOME	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten/kota	63,74%	DLHK	

NO	IKK OUTPUT	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	Hasil Perhitungan provinsi terhadap : Indek Kualitas Air (IKA) Indeks Kualitas Udara (IKU) Indeks Tutupan Hutan (ITH)	50 93.82 31.71	DLHK	

2. Terlaksanakanya pengelolaan sampah di wilayah kabupaten/kota

NO	IKK OUTCOME	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	Terlaksanakanya pengelolaan sampah di wilayah kabupaten/kota	94,793%	DLHK	

NO	IKK OUTPUT	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	Tersedianya data dan Informasi penanganan sampah di kabupaten/kota	1	DLHK	

3. Ketaatan penanggungjawab usaha dan atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PPU LH yang diterbitkan Oleh Pemerintah daerah kabupaten/kota

NO	IKK OUTCOME	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	Ketaatan penanggungjawab usaha dan atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PPU LH yang diterbitkan Oleh Pemerintah daerah kabupaten/kota	6,66%	DLHK	

NO	IKK OUTPUT	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	Data izin PPLH dan PPULH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupAten/kota	3	DLHK	
2	Rasio pejabat pengawas LH di daerah (PPLHD) di Provinsi terhadap usaha yang izin lingkungan, izin PPLH dan PPULH yang di terbitkan Oleh Kabupaten/kota	166	DLHK	
3	Penetapan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di daerah kabupaten/kota Penetapan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di dua atau lebih daerah kab/kota	1	DLHK	
4.	Terfasilitasinya kegiatan peningkatan pengetahuan dan keterampilan masyarakat hukum adat terkait PPLH Jumlah lembaga kemasyarakatan yang diberikan diklat	1	DLHK	
5	Penanganan pengaduan masyarakat terkait izin	30	DLHK	

NO	IKK OUTPUT	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
	lingkungan izin PPLH dan PPULH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten kota lokasi usaha, dan dampaknya di daerah kabupaten/kota yang di tangani			

2.2.12 Indikator Kinerja Kunci Urusan Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

1. Perekaman KTP Elektronik

NO	IKK OUTCOME	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	Perekaman KTP Elektronik	99,539%	Disduk Capil	

NO	IKK OUTPUT	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	Penerbitan akta perkawinan	1	Disduk Capil	
2	Penerbitan akta perceraian	5615	Disduk Capil	
3	Penerbitan akta kematian	3449	Disduk Capil	
4	Penyajian data kependudukan	1	Disduk Capil	

2. Persentase anak usia 01-7 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA

NO	IKK OUTCOME	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	Persentase anak usia 01-7 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	45,44%	Disduk Capil	

3. Kepemilikan akta kelahiran

NO	IKK OUTCOME	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	Kepemilikan akta kelahiran	98.62%	Disduk Capil	

4. Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian Kerjasama

NO	IKK OUTCOME	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama	100%	Disduk Capil	

2.2.13 Indikator Kinerja Kunci Urusan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa

1. Persentase Pengentasan Desa Tertinggal

NO	IKK OUTCOME	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	Persentase pengentasan desa tertinggal	100%	DPMD	

NO	IKK OUTPUT	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	Jumlah desa yang terfasilitasi dalam kerjasama antar desa	4	DPMD	
2	Jumlah Desa yang melakukan kerjasama antar desa tahun berjalan dikurangi jumlah Desa yang melakukan kerjasama antar desa tahun sebelumnya	4	DPMD	
3	Jumlah lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat di desa yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan diberdayakan	655	DPMD	
4	Jumlah peningkatan desa yang lembaga kemasyarakatan dan lembaga adatnya melaksanakan kegiatan	109	DPMD	

NO	IKK OUTPUT	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
	ekonomi produktif dan pemberdayaan			

2. Persentase peningkatan status Desa Mandiri

NO	IKK OUTCOME	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	Persentase peningkatan status Desa mandiri	100%	DPMD	

2.2.14 Indikator Kinerja Kunci Urusan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

1. TFR (Angka Kelahiran Total)

NO	IKK OUTCOME	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	TFR (Angka Kelahiran Total)	2,19%	DP2KB	

NO	IKK OUTPUT	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	Tersedianya dokumen Grand Design pembangunan kependudukan (GDPK) yang di Perdakan	0	DP2KB	Suket
2	Median usia kawin pertama perempuan (MUKP) seluruh wanita umur 25-49 tahun	22.1	DP2KB	
3	Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/A SFR 15-19)	45.7	DP2KB	
4	Persentase masyarakat yang terpapar isi pesan program KKBPK (advokasi dan KIE)	129.09	DP2KB	
5	Jumlah stakeholder/pemangku kepentingan dan mitra kerja (termasuk organisasi kemasyarakatan) yang berperan serta aktif dalam pengelolaan program KKBPK	15	DP2KB	

2. Persentase pemakaian kontrasepsi modern (Modern Contraceptive Prevalance Rate/mCPR)

NO	IKK OUTCOME	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	Persentase pemakaian kontrasepsi modern (Modern Contraceptive Prevalance Rate/mCPR)	65,147%	DP2KB	

NO	IKK OUTPUT	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	Persentase fasilitasi kesehatan (Faskes) yang siap melayani KBMKJP	15.2	DP2KB	
2	Persentase peserta KBA aktif (PA) metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP)	65.14	DP2KB	
3	Pemerintah daerah kabupaten/kota yang memiliki kelompok kerja KKBPK yang efektif	114	DP2KB	
4	Persentase pelayanan KB pasca persalinan	27.68	DP2KB	

3. Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmetneed)

NO	IKK OUTCOME	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmetneed)	15,34%	DP2KB	

NO	IKK OUTPUT	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	Persentase kesertaan KB di kabupaten dan kota dengan kesertaan rendah	0	DP2KB	Suket
2	Persentase kesertaan KB keluarga penerima bantuan iuran (PBI)	37.78	DP2KB	

2.2.15 Indikator Kinerja Kunci Urusan Perhubungan

1. Rasio konektivitas kabupaten/kota

NO	IKK OUTCOME	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	Rasio konektivitas kabupaten/kota	100%	Dishub	

NO	IKK OUTPUT	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	Persentase tersedianya fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan tipe C	100	Dishub	
2	Terlaksananya pelayanan uji berkala	2703	Dishub	
3	Penetapan tarif angkutan orang antar kota dalam kabupaten, serta angkutan perkotaan dan pedesaan kelas ekonomi	1	Dishub	
4	Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kabupaten / kota	0	Dishub	Suket

2. V/C Ratio di jalan kabupaten/kota

NO	IKK OUTCOME	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	Kinerja lalu lintas kabupaten/kota	0,24%	Dishub	

NO	IKK OUTPUT	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kabupaten/kota	0	Dishub	Suket

2.2.16 Indikator Kinerja Kunci Urusan Komunikasi Dan Informatika

NO	IKK OUTCOME	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	Persentase Organisasi Perangkat daerah (OPD) yang telah terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh dinas kominfo	100%	Dinas Kominfo	

NO	IKK OUTPUT	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	Persentase perangkat daerah yang terkoneksi di jaringan intra pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh dinas kominfo	100	Dinas Kominfo	
2	Persentase perangkat daerah yang menggunakan akses internet yang berkualitas yang disediakan dinas kominfo	37	Dinas Kominfo	
3	Tersedianya sistem elektronik komunikasi intra pemerintah yang disediakan dinas kominfo (berbasis suara, video, teks, data dan sinyal lainnya) dengan memanfaatkan jaringan intra pemerintah	27	Dinas Kominfo	

1. Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi

NO	IKK OUTCOME	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	100%	Dinas Kominfo	

NO	IKK OUTPUT	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	Persentase kegiatan (event) perangkat daerah dan pelayanan publik pada pemerintah yang dimanfaatkan secara daring dengan memanfaatkan domain dan sub domain instansi penyelenggara Negara sesuai dengan peraturan menteri kominfo nomor 5 tahun 2015	0	Dinas Kominfo	Suket
2	Persentase perangkat daerah yang memiliki portal dan situs web yang sesuai standar	55.5	Dinas Kominfo	
3	Persentase perangkat daerah yang mengimplementasikan layanan aplikasi umum dan aplikasi khusus yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	33,3	Dinas Kominfo	
4	Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang tercantum dalam dokumen proses bisnis yang telah diimplementasikan secara elektronik	100	Dinas Kominfo	
5	Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang memanfaatkan sertifikat elektronik	15	Dinas Kominfo	
6	Persentase sistem elektronik yang terdaftar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	100	Dinas Kominfo	

NO	IKK OUTPUT	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
7	Persentase layanan publik dan layanan administrasi yang terintegrasi dengan sistem penghubung layanan pemerintah	15	Dinas Kominfo	
8	Persentase perangkat daerah yang menggunakan layanan pusat data pemerintah	100	Dinas Kominfo	
9	Persentase perangkat daerah yang menyimpan data di pusat data pemerintah	100	Dinas Kominfo	
10	Persentase perangkat daerah yang memperbaharui datanya sesuai siklus Janis data (sesuai renstra kominfo)	100	Dinas Kominfo	
11	Persentase data yang dapat berbagi pakai	100	Dinas Kominfo	
12	Persentase perangkat daerah yang mengimplementasi inovasi yang mendukung smart city	0	Dinas Kominfo	Suket
13	Persentase ASN pengelola TIK yang tersertifikasi kompetensi dibawah pengelolaan dinas kominfo	3	Dinas Kominfo	
14	Tersedianya peraturan daerah atau peraturan kepala daerah terkait implementasi government	2	Dinas Kominfo	

2. Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota

NO	IKK OUTCOME	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran		Dinas Kominfo	

NO	IKK OUTCOME	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
	penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota	100%		

NO	IKK OUTPUT	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	Persentase komunitas masyarakat/mitra strategis pemerintah daerah provinsi yang menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah dan pemerintah provinsi	100	Dinas Kominfo	
2	Persentase konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah provinsi sesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM)	100	Dinas Kominfo	
3	Persentase diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi (STARKOM) dan SOP yang telah ditetapkan	100	Dinas Kominfo	

2.2.17 Indikator Kinerja Kunci Urusan Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah

1. Meningkatnya koperasi yang berkualitas

NO	IKK OUTCOME	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	Meningkatnya koperasi yang berkualitas	40,201%	Diskop dan UMKM	

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2023

NO	IKK OUTPUT	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	Persentase fasilitasi penerbitan izin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	2.7	Diskop dan UMKM	
2	Persentase fasilitasi penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas usaha simpan pinjam oleh koperasi untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	100	Diskop dan UMKM	
3	Persentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	40.2	Diskop dan UMKM	
4	Persentase usaha simpan pinjam oleh koperasi yang di nilai kesehatannya untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	27.46	Diskop dan UMKM	
5	Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	13.75	Diskop dan UMKM	
6	Persentase jumlah anggota koperasi yang telah mengikuti pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	0.82	Diskop dan UMKM	
7	Persentase koperasi yang telah menyelenggarakan	13.75	Diskop dan UMKM	

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2023

NO	IKK OUTPUT	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
	pendidikan dan pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota			
8	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan	0	Diskop dan UMKM	Suket
9	Persentase fasilitasi penerbitan sertifikat nomor induk koperasi (NIK) untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	31.16	Diskop dan UMKM	
10	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	4.52	Diskop dan UMKM	
11	Persentase yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	1	Diskop dan UMKM	
12	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pendampingan kelembagaan dan usaha untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	2.51	Diskop dan UMKM	
13	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi kemitraan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	0	Diskop dan UMKM	Suket

2. Meningkatnya usaha mikro yang menjadi wirausaha

NO	IKK OUTCOME	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	Meningkatnya usaha mikro yang menjadi wirausaha	100%	Diskop dan UMKM	

NO	IKK OUTPUT	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	Rasio pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro	100	Diskop dan UMKM	
2	Persentase jumlah usaha mikro yang diinput kedalam sistem online data sistem (ODS)	11.92	Diskop dan UMKM	
3	Persentase jumlah usaha mikro yang bermitra	7.3	Diskop dan UMKM	
4	Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi produk usaha	7.16	Diskop dan UMKM	
5	Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran	6.96	Diskop dan UMKM	
6	Rasio usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan	15.39	Diskop dan UMKM	
7	Persentase usaha mikro yang diberikan pendampingan melalui lembaga pendampingan	15.39	Diskop dan UMKM	

2.2.18 Indikator Kinerja Kunci Urusan Penanaman Modal

1. Persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota

NO	IKK OUTCOME	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	Persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota	1,475%	DPMPTSP	

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2023

NO	IKK OUTPUT	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	PERDA mengenai pemberian fasilitas/intensif penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota	0	DPMPTSP	Suket
2	Standar operasional prosedur pelaksanaan pemberian fasilitas/intensif penanaman modal	0	DPMPTSP	Suket
3	Laporan evaluasi pelaksanaan pemberian fasilitas/intensif penanaman modal	0	DPMPTSP	Suket
4	Kegiatan seminar bisnis, forum, one ononemeeting	0	DPMPTSP	Suket
5	Kegiatan pameran penanaman modal	0	DPMPTSP	Suket
6	Kegiatan penerimaan misi penanaman modal	0	DPMPTSP	Suket
7	Konsultasi perizinan dan non perizinan penanaman modal	8379	DPMPTSP	
8	Penerbitan perizinan dan non perizinan penanaman modal	8379	DPMPTSP	
9	Laporan realisasi penanaman modal	68614755975	DPMPTSP	
10	Pembinaan aparatur penanaman modal tingkat kabupaten/kota	2	DPMPTSP	
11	Pembinaan penanaman modal PMA dan PMDN	98	DPMPTSP	

NO	IKK OUTPUT	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
12	Tersedianya data dan informasi perizinan dan non perizinan provinsi kabupaten/kota	8379	DPMPTSP	

2.2.19 Indikator Kinerja Kunci Urusan Kepemudaan Dan Olahraga

1. Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri

NO	IKK OUTCOME	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	4,98%	Disparpora	

NO	IKK OUTPUT	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan kewirausahaan	336	Disparpora	
2	Jumlah pemuda yang mendapat bantuan kewirausahaan	0	Disparpora	Suket

2. Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi social kemasyarakatan

NO	IKK OUTCOME	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	71,17%	Disporpora	

NO	IKK OUTPUT	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan kader pengembangan kepemimpinan, kepedulian, kesukarelawanan dan kepeloporan pemuda	101	Disparpora	

NO	IKK OUTPUT	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
2	Jumlah pengelola organisasi kepemudaan yang mendapat pelatihan manajemen organisasi kepemudaan	281	Disparpora	

3. Peningkatan prestasi olahraga

NO	IKK OUTCOME	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	Peningkatan prestasi olahraga	14%	Disparpora	

NO	IKK OUTPUT	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	Jumlah pelatih olahraga yang memiliki kompetensi di satuan pendidikan	67	Disparpora	
2	Jumlah penyelenggaraan event OR prestasi tingkat daerah	2	Disparpora	

2.2.20 Indikator Kinerja Kunci Urusan Statistik

1. Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah

NO	IKK OUTCOME	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistic dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	100%	Diskominfo	

NO	IKK OUTPUT	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	Tersedianya buku profil daerah	1	Diskominfo	Suket
2	Jumlah survei statistik sektoral yang dilakukan	0	Diskominfo	Suket

NO	IKK OUTPUT	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
3	Jumlah kompilasi statistik sektoral yang dilakukan	114	Diskominfo	
4	Jumlah survey statistik sektoral yang mendapat rekomendasi BPS	0	Diskominfo	Suket
5	Jumlah kompilasi statistik sektoral yang mendapat rekomendasi dari BPS	0	Diskominfo	Suket
6	Persentase kelengkapan meta data kegiatan statistik sektoral	0	Diskominfo	Suket
7	Persentase kelengkapan meta data variabel sektoral	0	Diskominfo	Suket

- Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah

NO	IKK OUTCOME	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	100%	Diskominfo	

2.2.21 Indikator Kinerja Kunci Urusan Persandian

- Tingkat keamanan informasi pemerintah

NO	IKK OUTCOME	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	Tingkat keamanan informasi pemerintah	27,596%	Diskominfo	

NO	IKK OUTPUT	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	Persentase kegiatan strategis yang telah diamankan melalui kegiatan pengamanan sinyal dibanding banyaknya jumlah kegiatan strategis	0	Diskominfo	Suket

NO	IKK OUTPUT	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
	yang harus diamankan			
2	Persentase sistem elektronik yang telah menerapkan prinsip sistem manajemen yang telah menerapkan prinsip-prinsip manajemen keamanan informasi (SMKI) dan atau aplikasi persandian dibanding jumlah sistem elektronik yang ada pada pemerintah daerah	0	Diskominfo	Suket
3	Persentase sistem elektronik/asset informasi yang telah di audit dengan resiko kategori rendah	37.5	Diskominfo	
4	Persentase titik yang di amankan dibanding dengan jumlah seluruh titik pada pemerintah (PHKS) yang ditetapkan	0	Diskominfo	Suket

2.2.22 Indikator Kinerja Kunci Urusan Kebudayaan

1. Terlestarikannya cagar budaya

NO	IKK OUTCOME	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	Terlestarikannya cagar budaya	100%	Dikbud	

NO	IKK OUTPUT	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dilindungi (inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, penyelamatan dan publikasi)	3	Dikbud	
2	Jumlah obyek pemajuan			

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2023

NO	IKK OUTPUT	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
	kebudayaan yang di kembangkan (penyebarluasan, pengkajian, penayaan keberagaman	3	Dikbud	
3	Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dimanfaatkan (membangun karakter bangsa, meningkatkan ketahanan budaya, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat)	3	Dikbud	
4	Jumlah SDM, lembaga dan pranata yang dibina (peningkatan kompetensi, standarisasi dan sertifikasi, serta peningkatan kapasitas tata kelola)	5	Dikbud	
5	Register cagar budaya (pendaftaran, pengjasian, penetapan, pencatatan, pemeringkatan, penghapusan)	15	Dikbud	
6	Perlindungan cagar budaya kabupaten/kota (penyelamatan, zonasi, pemeliharaan dan pemugaran)	0	Dikbud	Suket
7	Layanan perizinan membawa cagar budaya provinsi keluar provinsi dengan dukungan data	0	Dikbud	Suket
8	Pengembangan cagar budaya provinsi (penelitian, revitalisasi, adaptasi)	0	Dikbud	Suket
9	Pemanfaatan cagar budaya provinsi (dalam hal agama, sosial, pendidikan, ilmu	0	Dikbud	Suket

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2023

NO	IKK OUTPUT	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
	pengetahuan, teknologi, kebudayaan dan pariwisata)			
10	Pengelolaan, pengamanan, pengembangan dan pemanfaatan koleksi museum	0	Dikbud	Suket
11	Peningkatan akses masyarakat dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan museum peningkatan akses masyarakat dalam pengelolaan sarana dan prasarana museum	0	Dikbud	Suket
12	Pengelolaan, pengamanan, pengembangan dan pemanfaatan koleksi museum	0	Dikbud	Suket
13	Pembentukan tim pendaftaran cagar budaya	5	Dikbud	
14	Pembentukan tim ahli cagar budaya provinsi	0	Dikbud	Suket
15	Fasilitas sertifikasi tim ahli cagar budaya	5	Dikbud	
16	Pemetaan SDM cagar budaya dan permuseuman	5	Dikbud	
17	Peningkatan kompetensi SDM cagar budaya dan permuseuman	5	Dikbud	
18	Penyediaan sarana dan prasarana pendaftaran cagar budaya dan permuseuman	0	Dikbud	Suket
19	Penyelenggaraan kegiatan museum yang melibatkan masyarakat	0	Dikbud	Suket

2.2.23 Indikator Kinerja Kunci Urusan Perpustakaan

1. Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat

NO	IKK OUTCOME	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	51,71%	Perpustakaan & Kearsipan	

NO	IKK OUTPUT	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	Rasio ketercukupan koleksi perpustakaan dengan penduduk	178.46	Perpustakaan & Kearsipan	
2	Persentase kemanfaatan perpustakaan oleh masyarakat	9.43	Perpustakaan & Kearsipan	
3	Rasio ketercukupan tenaga perpustakaan dengan penduduk	0.133	Perpustakaan & Kearsipan	
4	Persentase perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan	3.792	Perpustakaan & Kearsipan	
5	Jumlah pemasyarakatan gemar membaca di masyarakat	7588	Perpustakaan & Kearsipan	

3. Indeks pembangunan Literasi masyarakat

NO	IKK OUTCOME	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	Indeks pembangunan Literasi masyarakat	86,73%	Perpustakaan & Kearsipan	

NO	IKK OUTPUT	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	Jumlah naskah kuno yang di akuisisi/di alih media (digitalisasi)/terdaftar yang ada diwilayahnya	0	Perpustakaan & Kearsipan	Suket

NO	IKK OUTPUT	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
2	Jumlah naskah kuno yang dialih aksara dan dialih bahasa	0	Perpustakaan & Kearsipan	Suket
3	Jumlah koleksi budaya etnis nusantara yang tersimpan dan/atau terdaftar yang ada di wilayahnya (item)	527	Perpustakaan & Kearsipan	

2.2.24 Indikator Kinerja Kunci Urusan Kearsipan

1. Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional (Pasal 40 dan Pasal 59 undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan

NO	IKK OUTCOME	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional (Pasal 40 dan Pasal 59 undang-undang Nomor 43 tahun 2009 tentang kearsipan	665,5%	Perpustakaan & Kearsipan	

NO	IKK OUTPUT	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	Persentase arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip	100	Perpustakaan & Kearsipan	
2	Persentase arsipin-aktif yang telah dibuatkan daftar arsip	100	Perpustakaan & Kearsipan	
3	Persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik	100	Perpustakaan & Kearsipan	
4	Persentase jumlah arsip yang di masukkan dalam SIKN melalui JIKN	0	Perpustakaan & Kearsipan	Suket

2. Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan Negara, Pemerintahan, Pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2023

NO	IKK OUTCOME	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan Negara, Pemerintahan, Pelayanan publik dan Kesejahteraan rakyat	571,83%	Perpustakaan & Kearsipan	

NO	IKK OUTPUT	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	Pemusnahan arsip yang sesuai NSPK	3431	Perpustakaan & Kearsipan	
2	Perlindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana yang sesuai NSPK	0	Perpustakaan & Kearsipan	Suket
3	Penyelamatan arsip perangkat daerah Kabupaten/Kota yang digabung dan atau dibubarkan dan pemekaran daerah kecamatan/kelurahan yang sesuai NSPK di Provinsi	0	Perpustakaan & Kearsipan	Suket
4	Autentifikasi arsip statis dan arsip hasil alih media yang dikelola oleh lembaga kearsipan kabupaten/kota yang sesuai NSPK	0	Perpustakaan & Kearsipan	Suket
5	Pencarian arsip statis yang pengelolaannya menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota yang dinyatakan hilang dalam bentuk daftar pencarian arsip yang sesuai NSPK	0	Perpustakaan & Kearsipan	Suket
6	Penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup yang disimpan dilembaga kearsipan daerah kabupaten/kota yang sesuai NSPK	0	Perpustakaan & Kearsipan	Suket

2.2.25 Indikator Kinerja Kunci Urusan Perikanan

1. Jumlah total produksi perikanan (Tangkap dan Budidaya) dari seluruh kabupaten kota

NO	IKK OUTCOME	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	Jumlah total produksi perikanan (tangkap dan budidaya) kabupaten/kota (sumber data : one data KKP)	434,071%	Dinas Perikanan	

NO	IKK OUTPUT	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	Jumlah rumah tangga nelayan yang melakukan diversifikasi usaha (RTP)	12.810	Dinas Perikanan	
2	Persentase Tempat Pelelangan Ikan yang operasional	75	Dinas Perikanan	
3	Jumlah Izin Usaha Perikanan (IUP) di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/Kota yang diterbitkan	9	Dinas Perikanan	
4	Jumlah pembudidaya ikan yang memperoleh kegiatan pemberdayaan (pendidikan dan pelatihan/penyuluhan dan pendampingan/kemitraan usaha/kemudahan akses informasi/dan penguatan kelembagaan)	90	Dinas Perikanan	
5	Jumlah benih budidaya air tawar dan air payau yang di produksi	2683523	Dinas Perikanan	

2.2.26 Indikator Kinerja Kunci Urusan Pariwisata

1. Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara perkebangsaan

NO	IKK OUTCOME	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan	193,145%	Dinas Pariwisata	

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2023

NO	IKK OUTCOME	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
	mancanegara perkebangaan			

NO	IKK OUTPUT	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	Jumlah entitas pengelolaan destiasi	135	Dinas Pariwisata	
2	Jumlah kelengkapan infrastruktur dasar, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata	25	Dinas Pariwisata	
3	Jumlah tanda daftar usaha pariwisata per sub jenis usaha di kabupaten/kota	24	Dinas Pariwisata	
4	Jumlah wisatawan mancanegara perkebangaan	0	Dinas Pariwisata	Suket
5	Jumlah promosi event daerah yang terlaksana di dalam negeri	8	Dinas Pariwisata	
6	Jumlah event luar negeri yang diikuti kabupaten/kota	1	Dinas Pariwisata	
7	Jumlah industri pariwisata daerah yang berpartisipasi pada event promosi pariwisata di dalam negeri	8	Dinas Pariwisata	
8	Persentase tenaga kerja disektor pariwisata yang di sertifikasi	0.11	Dinas Pariwisata	
9	Persentase SDM peserta pembekalan sektor kepariwisataan	100	Dinas Pariwisata	
10	Jumlah lokasi yang memperoleh pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemitraan usaha masyarakat	22	Dinas Pariwisata	

2. Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke kabupaten/kota

NO	IKK OUTCOME	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke kabupaten/kota	9,55%	Dinas Pariwisata	

3. Tingkat Hunian Akomodasi

NO	IKK OUTCOME	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	Tingkat hunian akomodasi	48,11%	Dinas Pariwisata	

4. Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku

NO	IKK OUTCOME	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	0,81%	Dinas Pariwisata	

5. Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD

NO	IKK OUTCOME	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	3,201%	Dinas Pariwisata	

2.2.27 Indikator Kinerja Kunci Urusan Pertanian

1. Produktivitas pertanian perhektar pertahun

NO	IKK OUTCOME	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	Produktivitas pertanian perhektar pertahun	593,347%	Dinas TPH & Perkebunan	

NO	IKK OUTPUT	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	Jumlah sarana dan prasarana pertanian yang diberikan	1766	Dinas TPH & Perkebunan	
2	Prasarana pertanian yang digunakan	100	Dinas TPH & Perkebunan	

NO	IKK OUTPUT	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
3	Penerbitan izin usaha pertanian	0	Dinas TPH & Perkebunan	Suket
4	Persentase prasarana yang digunakan	100	Dinas TPH & Perkebunan	
5	Persentase jumlah usulan izin usaha pertanian kabupaten/kota	0	Dinas TPH & Perkebunan	Suket

2. Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular

NO	IKK OUTCOME	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	-24,59%	Dinas Peternakan	

NO	IKK OUTPUT	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	Persentase fasilitas penanggulangan bencana	-24.59	Dinas Peternakan	

2.2.28 Indikator Kinerja Kunci Urusan Kehutanan

NO	IKK OUTPUT	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	Tersedianya dokumen rencana pengelolaan Tahura	1	DLHK	Urusan provinsi
2	Pemberdayaan masyarakat di daerah penyangga	3	DLHK	
3	Pemulihan ekosistem pada Tahura	1	DLHK	
4	Menurunnya gangguan kawasan Tahura	1	DLHK	

2.2.29 Indikator Kinerja Kunci Urusan Energi Dan Sumber Daya Mineral

1. Persentase perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki ijin di kabupaten/kota

NO	IKK OUTCOME	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	Persentase perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki ijin di kabupaten/kota	100%		Urusan Provinsi

NO	IKK OUTPUT	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	Penerbitan izin pemanfaatan langsung panas bumi dalam daerah kabupaten/kota	1	Suket	Urusan Provinsi

2.2.30 Indikator Kinerja Kunci Urusan Perdagangan

1. Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko swalayan)

NO	IKK OUTCOME	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko swalayan)	98,076%	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	

NO	IKK OUTPUT	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	Persentase perizinan yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan untuk izin : Pusat perbelanjaan Toko swalayan	0 51	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Suket
2	Persentase penerbitan TDG	59.25	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	
3	Persentase gudang yang tidak mempunyai TDG	48.14	Dinas Perdagangan	

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2023

NO	IKK OUTPUT	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
			dan Perindustrian	
4	Persentase penerbitan STPW yang tepat waktu untuk : Penerima waralaba dari waralaba dalam negeri Penerima waralaba lanjutan dari waralaba dalam negeri Penerima waralaba lanjutan dari waralaba luar negeri	0 0 0	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Suket Suket Suket
5	Persentase pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya ditingkat daerah kabupaten/kota	0	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Suket
6	Persentase penerbitan SPKA yang tepat waktu	100	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	
7	Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya	100	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	
8	Persentase koefisien variasi harga antar waktu	100	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	

2. Persentase Kinerja Realisasi Pupuk

NO	IKK OUTCOME	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	Persentase kinerja realisasi pupuk	64,189%	Dinas Pertanian	

NO	IKK OUTPUT	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	Jumlah pupuk dan pestisida yang tersalurkan	18483.2	Dinas Pertanian	

3. Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku

NO	IKK OUTCOME	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	9,964%	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	

NO	IKK OUTPUT	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang ditera/tera ulang dalam tahun berjalan	9.96	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	
2	Persentase kesesuaian BDKT yang diawasi terhadap ketentuan yang berlaku	93.87	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	

2.2.31 Indikator Kinerja Kunci Urusan Perindustrian

1. Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di kabupaten/kota

NO	IKK OUTCOME	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di kabupaten/kota	156,49%	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	

NO	IKK OUTPUT	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	Persentase jumlah penetapan izin usaha kawasan industri (IUKI) dan izin perluasan kawasan Industri (IPKI) yang	1	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Suket

NO	IKK OUTPUT	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
	lokasinya di daerah kabupaten/kota			

2. Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK

NO	IKK OUTCOME	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK	159,86%	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	

NO	IKK OUTPUT	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	Persentase terselesaikannya dokumen RIPIK sampai dengan ditetapkannya menjadi PERDA	100	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	

3. Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah izin usaha industri (IUI) kecil dan industri menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait

NO	IKK OUTCOME	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah izin usaha industri (IUI) kecil dan industri menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	100%	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	

NO	IKK OUTPUT	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	Persentase jumlah izin yang diterbitkan usaha industri (IUI) kecil dan IUI menengah yang diterbitkan	1	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Suket

4. Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah izin perluasan industri (IPUI) kecil dan industri menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait

NO	IKK OUTCOME	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah izin perluasan industri (IPUI) kecil dan industri menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	100%	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	

NO	IKK OUTPUT	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	Persentase jumlah izin perluasan industri (IPUI) bagi industri kecil dan menengah yang diterbitkan	1	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Suket

5. Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah izin usaha kawasan industri (IUKI) dan izin perluasan kawasan industri (IPKI) yang lokasinya di daerah kabupaten/kota

NO	IKK OUTCOME	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah izin usaha kawasan industri (IUKI) dan izin perluasan kawasan industri (IPKI) yang	100	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	

NO	IKK OUTCOME	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
	lokasinya di daerah kabupaten/kota			

6. Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini

NO	IKK OUTCOME	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	54%	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	

NO	IKK OUTPUT	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	Persentase data perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri di kabupaten/kota yang masuk dalam SIINas terhadap total populasi perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri di kabupaten/kota	2.88	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	

2.2.32 Indikator Kinerja Kunci Urusan Transmigrasi

NO	IKK OUTPUT	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	Jumlah kawasan transmigrasi yang di fasilitasi penetapannya	1	Suket	Urusan Provinsi
2	Jumlah satuan pemukiman transmigrasi yang di fasilitasi pembangunannya	1	Suket	Urusan Provinsi
3	Jumlah satuan pemukiman yang dibina	1	Suket	Urusan Provinsi

2.2.33 Indikator Kinerja Kunci Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan (Perencanaan Dan Keuangan)

1. Rasio belanja pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan

NO	IKK OUTCOME	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	Rasio belanja pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan	8,301%	BKAD	

2. Rasio PAD

NO	IKK OUTCOME	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	Rasio PAD	12,492%	BKAD	

3. Maturitas sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP)

NO	IKK OUTCOME	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	Maturitas sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP)	3	Inspektorat	

4. Peningkatan kapabilitas aparat pengawasan intern pemerintah (APIP)

NO	IKK OUTCOME	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	Peningkatan kapabilitas aparat pengawasan intern pemerintah (APIP)	2	Inspektorat	

5. Rasio belanja urusan pemerintahan umum (dikurangi transfer expenditures)

NO	IKK OUTCOME	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	Rasio belanja urusan pemerintahan umum (dikurangi transfer expenditures)	63,735%	BPKPD	

6. Opini laporan keuangan

NO	IKK OUTCOME	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	Opini laporan keuangan	9	BPKPD	

2.2.34 Indikator Kinerja Kunci Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan (Pengadaan)

1. Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang ditanda tangani pada kuartal pertama

NO	IKK OUTCOME	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ketahun berikutnya yang ditanda tangani pada kuartal pertama	0,094%	Bagian PBJ	

2. Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif

NO	IKK OUTCOME	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	55,071%	Bagian PBJ	

3. Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan

NO	IKK OUTCOME	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	28,799%	Bagian PBJ	

4. Peningkatan Penggunaan Produk dalam Negeri dan produk Usaha Mikro,Usaha Kecil dan Koperasi pada pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah daerah

NO	IKK OUTCOME	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	Peningkatan Penggunaan Produk dalam Negeri dan produk Usaha Mikro,Usaha Kecil dan Koperasi pada pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah daerah	2,544	Bagian PBJ	

2.2.35. Indikator Kinerja Kunci Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan (Kepegawaian)

1. Rasio pegawai pendidikan tinggi dan menengah/dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)

NO	IKK OUTCOME	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	Rasio pegawai pendidikan tinggi dan menengah/dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	76,257%	BKPSDM	

2. Rasio pegawai fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)

NO	IKK OUTCOME	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	Rasio pegawai fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	22,982%	BKPSDM	

3. Rasio jabatan fungsional bersertifikat kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)

NO	IKK OUTCOME	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	Rasio jabatan fungsional bersertifikat kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	25,95%	BKPSDM	

2.2.35 Indikator Kinerja Kunci Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan (Manajemen Keuangan)

1. Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD

NO	IKK OUTCOME	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	45,967%	BPKPD	

2. Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD

NO	IKK OUTCOME	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	21,611%	BPKPD	

3. Assets management

NO	IKK OUTCOME	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	Assets management	4	BPKPD	

4. Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD Tahun sebelumnya

NO	IKK OUTCOME	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya	5,638%	BPKPD	

2.2.36 Indikator Kinerja Kunci Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan (Transparansi Dan Partisipasi Publik)

1. Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan

NO	IKK OUTCOME	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan	93,777%	BPKPD	

2. Akses publik terhadap informasi keuangan daerah

NO	IKK OUTCOME	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	Akses publik terhadap informasi keuangan daerah	100%	Dinas Kominfo	

2.3 Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan wujud kewajiban kepala daerah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan tugas dan fungsinya dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Kepala Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2023 . Pada pembahasan ini disajikan uraian hasil pengukuran kinerja, analisis dan evaluasi akuntabilitas kinerja, termasuk di dalamnya menguraikan secara sistematis keberhasilan dan kegagalan, hambatan/kendala, dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah yang diambil guna

mengatasi hambatan/kendala dan permasalahan tersebut.

Pengukuran capaian berdasarkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran strategis berdasarkan Perjanjian Kinerja Kepala Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2023 dan dibandingkan dengan realisasinya. Pencapaian tujuan dan sasaran diperoleh dengan cara membandingkan target dengan realisasi indikator, dan dibandingkan dengan capaian realisasi pada tahun sebelumnya serta dibandingkan dengan target capaian pada akhir periode RPJMD. Pengukuran pencapaian kinerja menggunakan rumus penghitungancapaian kinerja berdasarkan jenis indikator, yang dibagi menjadi dua jenis yaitu: indikator positif dan indikator negatif, dengan rumus penghitungan sebagai berikut:

1. Indikator Positif apabila semakin tinggi realisasi maka semakin tinggi capaian kinerja, dengan rumus:

$$\begin{array}{l} \text{Persentase Capaian} \\ \text{Kinerja} \\ \text{(Indikator Positif)} \end{array} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100 \%$$

2. Indikator Negatif apabila semakin tinggi realisasi maka semakin rendah capaian kinerja, untuk membedakan indikator positif dan indikator negatif, maka selanjutnya indikator negatif diberi tanda bintang (*) pada indikator kinerja yang dinilai, dengan rumus:

$$\begin{array}{l} \text{Persentase Capaian} \\ \text{Kinerja} \\ \text{(Indikator Negatif)} \end{array} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100 \%$$

Untuk mengukur tingkat capaian kinerja mengacu interval realisasi kinerja berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Pengukuran dibuat skala pengukuran ordinal dengan pemberian predikat berdasarkan persentase capaian dari masing- masing indikator dengan interval nilai realisasi kinerja sebagaimana pada tabel berikut ini:

Tabel 2. 2
Interval Nilai dan Predikat Penilaian Realisasi Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Predikat Penilaian Realisasi Kinerja	Kode Warna
1	91% ≤ 100%	Sangat Tinggi	Biru
2	76% ≤ 90%	Tinggi	Hijau
3	66 % ≤ 75%	Sedang	Kuning
4	51% ≤ 65%	Rendah	Coklat
5	≤ 50	Sangat Rendah	Merah

Sumber : Permendagri 86 Tahun 2017, diolah

2.3.1 Capaian Kinerja IKU

Untuk mengukur keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang akan digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja, maka dalam laporan kinerja Pemerintah Kabupaten Bulukumba tahun 2023 ini akan dijelaskan capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang mendukung pencapaian kinerja sasaran dalam RPJMD Kabupaten Bulukumba. Pencapaian Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Bulukumba secara ringkas digambarkan sebagai berikut:

Indikator Kinerja		Satuan	Tahun 2023			
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Notif
1	Persentase Konflik Antar Umat Beragama yang tertangani	%	100,00	100,00	100,00	B
2	Indeks Kerukunan Umat Beragama	Angka	71,00	71,00	100,00	B

**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2023**

Indikator Kinerja		Satuan	Tahun 2023			
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Notif
3	Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	60,00	59,46	99,10	CB
4	Skor LPPD/Kategori	Skor	3,53	3,33	94,44	CB
5	Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	3,26	3,81	116,87	SB
6	Indeks Gini	%	0,37	0,36	98,10	CB
7	Kontribusi Sub Sektor Pertanian Terhadap PDRB	%	22,28	24,33	109,20	SB
8	Pertumbuhan PDRB Sub sektor Pertanian	%	4,37	-1,43	-32,72	TB
9	Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Perikanan	%	6,75	6,89	102,07	SB
10	Kontribusi PDRB sector perikanan	%	13,21	13,15	99,55	CB
11	Indeks Pembangunan Manusia	Angka	70,11	73,64	105,03	SB
12	Indeks Pendidikan	Angka	65,13	65,07	99,91	CB
13	Indeks Kesehatan	Angka	74,94	83,09	110,88	SB

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2023

Indikator Kinerja		Satuan	Tahun 2023			
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Notif
14	Usia Harapan Hidup	Tahun	69,15	74,01	107,03	SB
15	Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PAD	%	2,88	2,50	86,81	CB
16	Pertumbuhan PAD Sektor Pariwisata	%	6,11	-22,16	-362,68	TB
17	Indeks Daya saing infrastruktur	Angka	90,00	90,00	100,00	B
18	Kontribusi Sektor Perdagangan dan Industri Terhadap PDRB	%	24,47	6,54	26,73	TB
19	Pertumbuhan PDRB sektor Perdagangan dan Industri	%	10,84	5,09	46,96	TB
20	Indeks Pembangunan Pemuda	Angka	58,38	56,88	97,43	CB
21	Persentase Peningkatan Pemuda yang berperestasi	%	27,00	125,00	462,96	SB
22	Indeks Desa Membangun	Angka	0,76	0,76	100,39	SB
23	Persentase Desa Mandiri	%	2,75	21,01	764,00	SB

Indikator Kinerja		Satuan	Tahun 2023			
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Notif
24	Indeks Rasa Aman	Angka	15,00	14,00	93,33	CB
25	Persentase Angka Kriminalitas yang tertangani	%	100,00	100,00	100,00	B

Indikator Kinerja Utama (IKU) yang mendukung sasaran strategis dalam RPJMD Kabupaten Bulukumba tahun 2021-2026 sebanyak 25 indikator, dan capaian indikator kinerja utama tersebut dapat dibagi berdasarkan kriteria sebagai berikut:

- Sangat berhasil atau $>100\%$ (biru) sebanyak 9 indikator.
- Berhasil atau $=100\%$ (hijau) sebanyak 4 indikator.
- Cukup berhasil atau $80\% \leq 99,99\%$ (kuning) sebanyak 8 indikator.
- Kurang berhasil atau $50\% \leq 79,99\%$ (orange) sebanyak 0 indikator.
- Tidak berhasil atau $\leq 50\%$ (merah) sebanyak 4 indikator.

Dari 25 IKU di atas, kinerja yang dicapai menunjukkan bahwa 36,00 persen dengan notifikasi biru dengan kriteria sangat berhasil (SB), 16,00 persen dengan notifikasi hijau dengan kriteria berhasil (B), 32,00 persen dengan notifikasi kuning dengan kriteria cukup berhasil (CB), 0,00 persen dengan notifikasi orange dengan kriteria kurang berhasil (KB), dan 16,00 persen dengan notifikasi merah dengan kriteria tidak berhasil (TB). Analisis keberhasilan dan kegagalan pencapaian IKU Kabupaten Bulukumba tahun 2023 akan dijelaskan pada analisis capaian kinerja sasaran strategis di bawah.

2.3.2 Capaian Kinerja IKD

Dari hasil pengukuran dan evaluasi kinerja secara umum Pemerintah Kabupaten Bulukumba tahun 2023 dapat dikemukakan bahwa sebagian besar sasaran-sasaran strategis yang telah ditargetkan dapat dicapai, namun demikian masih terdapat sasaran strategis yang belum mencapai target yang

1 Meningkatnya hubungan masyarakat yang harmonis berlandaskan nilai agama

diharapkan tahun 2023 dengan berbagai kendala. Rincian analisis capaian masing-masing sasaran strategis dapat diuraikan sebagai berikut:

Analisis pencapaian **Sasaran 1:** Meningkatnya hubungan masyarakat yang harmonis berlandaskan nilai agama, dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2023				Notifikasi
			Target	Realisasi	Capaian (%)		
Meningkatnya hubungan masyarakat yang harmonis berlandaskan nilai agama	1	Persentase Konflik Antar Umat Beragama yang tertangani	%	100	100	100	B
	2	Indeks Kerukunan Umat Beragama	Angka	71			B
	3	Persentase peningkatan penanganan konflik di daerah	%	100	100	100	B
	4	Jumlah kegiatan pendidikan politik masyarakat	Kali	5	5	100	B
	5	Rasio tempat ibadah persatuan penduduk	Angka	2,8			CB
Rata-rata Capaian					99.57	CB	

Dari 5 indikator kinerja yang mendukung sasaran strategis ini, tidak terdapat indikator kinerja sasaran mencapai target 100 persen atau sangat berhasil dan 5 indikator kinerja belum mencapai target namun telah tercapai di atas 98 persen atau cukup berhasil. Secara umum rata-rata pencapaian sasaran Meningkatnya hubungan masyarakat yang harmonis berlandaskan nilai agama, telah berhasil melampaui target yaitu rata-rata 99,57 persen.

2. Perbandingan antara realisasi kinerja tahun ini dengan tahun sebelumnya.

Indikator Kinerja		Satuan	Realisasi		
			2021	2022	2023
1	Persentase Konflik Antar Umat Beragama yang tertangani	%	100	100	100
2	Indeks Kerukunan Umat Beragama	Angka	72	70	71
3	Persentase peningkatan penanganan konflik di daerah	%	100	100	100
4	Jumlah kegiatan pendidikan politik masyarakat	Kali	5	5,00	5,00
5	Rasio tempat ibadah persatuan penduduk	Angka	2,91	2,60	100

Jika dilihat realisasi kinerja tahun ini dengan tahun sebelumnya, maka 5 indikator yang menunjang pencapaian sasaran Meningkatnya hubungan masyarakat yang harmonis berlandaskan nilai agama, 1 indikator yang mengalami peningkatan dari tahun lalu dan tahun sekarang yaitu Indeks Kerukunan Umat Beragama.

3. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini terhadap target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen RPJMD.

Indikator Kinerja		Sat	Target Tahun 2026 (kondisi akhir)	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2023	Capaian (%)	Notif
1	Persentase Konflik Antar Umat Beragama yang tertangani	%	100	100,00	100,00	J
2	Indeks Kerukunan Umat Beragama	Angka	72	71,00	98,61	J
3	Persentase peningkatan	%	100	100,00	100,00	J

	penanganan konflik di daerah					
4	Jumlah kegiatan pendidikan politik masyarakat	Kali	5	5,00	100,00	J
5	Rasio tempat ibadah persatuan penduduk	Angka	2,86	2,74	95,69	J

Pada Sasaran strategis 1, Meningkatnya hubungan masyarakat yang harmonis berlandaskan nilai agama, terdapat 5 indikator sasaran yang mendukung pencapaian sasaran ini, dan semua indikator sasaran tercapai dengan notifikasi hijau yang berarti sudah tercapai/*on track/on trend*.

4. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Keberhasilan atau kegagalan pencapaian beberapa indikator sasaran Meningkatnya hubungan masyarakat yang harmonis berlandaskan nilai agama dapat dijelaskan sebagai berikut:

Pertama, pencapaian kinerja untuk sasaran Meningkatnya hubungan masyarakat yang harmonis berlandaskan nilai agama melalui indikator Persentase Konflik Antar Umat Beragama yang tertangani dengan capaian tahun 2023 sebesar 100 persen artinya realisasi Persentase Konflik Antar Umat Beragama yang tertangani pada tahun 2023 baik atau mencapai target yaitu 100 persen dibandingkan dengan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 100 persen. Indikator sasaran ini merupakan indikator pencapaian yang membutuhkan waktu jangka panjang untuk dapat menuntaskannya.

Kedua, pencapaian kinerja untuk sasaran Meningkatnya hubungan masyarakat yang harmonis berlandaskan nilai agama melalui indikator Indeks Kerukunan Umat Beragama dengan capaian tahun 2023 sebesar 100 persen artinya realisasi Indeks Kerukunan Umat Beragama tahun 2023 berhasil dengan capaian target yaitu 100 persen dibandingkan dengan target yang



ditetapkan di tahun yang sama yaitu 71 persen. Keberhasilan pencapaian target indikator tersebut didukung dengan adanya kebijakan pemerintah untuk memprioritaskan Kerukunan Umat Beragama

Ketiga, pencapaian kinerja untuk sasaran Meningkatnya hubungan masyarakat yang harmonis berlandaskan nilai agama melalui indikator Persentase peningkatan penanganan konflik di daerah dengan capaian tahun 2023 sebesar 100 persen artinya realisasi Persentase peningkatan penanganan konflik di daerah tahun 2023 berhasil mencapai target yaitu 100 persen dibandingkan dengan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu sebesar 100 persen.

Keempat, pencapaian kinerja untuk sasaran Meningkatnya hubungan masyarakat yang harmonis berlandaskan nilai agama melalui indikator Jumlah kegiatan pendidikan politik masyarakat dengan capaian tahun 2023 sebesar 100 persen, artinya realisasi Jumlah kegiatan pendidikan politik masyarakat tahun 2023 berhasil dan mencapai target yaitu 5 kali dibandingkan dengan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu sebesar 5 kali.

Kelima, pencapaian kinerja untuk sasaran Meningkatnya hubungan masyarakat yang harmonis berlandaskan nilai agama melalui indikator Rasio tempat ibadah persatuan penduduk dengan capaian tahun 2023 sebesar 97,83 persen, artinya realisasi Rasio tempat ibadah persatuan penduduk tahun 2023 cukup berhasil dan mencapai target yaitu 2,70 angka dibandingkan dengan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu sebesar 2,8 angka.

5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya.

Anggaran yang direncanakan pada perjanjian kinerja tahun 2022 untuk pencapaian sasaran Meningkatnya hubungan masyarakat yang harmonis berlandaskan nilai agama ini adalah sebesar Rp. 1.778.856.020 dari anggaran tersebut terealisasi sebesar Rp. 1.570.137.195 atau 88.27 persen.

6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian sasaran Meningkatkan hubungan masyarakat yang harmonis berlandaskan nilai agama ini adalah sebanyak 5 program, yaitu:

- Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosila dan Budaya
- Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial
- Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
- Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan
- Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan

2 Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Analisis pencapaian **Sasaran 2:** Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Satuan	Tahun 2023			Notif
				Tar get	Real isasi	Capaian (%)	
Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Pembangunan	1	Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	60,00	59,46	99,10	CB
	2	Skor LPPD/Kategori	Skor	3,53	3,33	94,44	CB
	3	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	%	100	100,00	100,00	B
	4	Persentase SILPA Terhadap APBD	%	3,00	2,83	105,67	SB
	5	Persentase Program/Kegiatan Yang Tidak Terlaksana	%	0	0	100,00	B
	6	Persentase Belanja Pendidikan (20%)	%	21	29,88	140,94	SB
	7	Persentase Belanja Kesehatan (10%)	%	19	17,35	90,18	CB
	8	Penetapan APBD (Tepat Waktu/Tidak)	%	100	100,00	100,00	B
	9	Bagi Hasil Kabupaten/Kota Dan Desa	%	0,42	0,42	100,00	B

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2023

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Satuan	Tahun 2023			
				Tar get	Real isasi	Capaian (%)	Notif
	10	Persentase PAD terhadap Pendapatan	%	11	12,54	116,00	SB
	11	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD Kedalam RKPD	%	100	110,84	110,84	SB
	12	Penjabaran Konsistensi Program RKPD Kedalam APBD	%	100	100,00	100,00	B
	13	Persentase implementasi rencana Kelitbangan	%	9	7,50	87,6	CB
	14	Persentase pemanfaatan hasil Kelitbangan	%	12	2,70	22,39	TB
	15	Persentase Perangkat Daerah Yang Difasilitasi Dalam Penerapan Inovasi Daerah	%	12	16	134,49	SB
	16	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah	%	61	49,74	81,53	CB
	17	Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan Pelatihan	bulan	3	3,00	100,00	B
	18	Persentase ASN Yang Mengikuti Pendidikan Dan Pelatihan Formal	%	89	88,32	98,85	CB
	19	Persentase Pejabat ASN Yang Telah Mengikuti Pendidikan Dan Pelatihan Struktural	%	85	43,85	51,6	KB
	20	Jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi Pada Instansi Pemerintah	jabatan	29	32,00	110,34	SB
	21	Jumlah Jabatan Administrasi Pada Instansi Pemerintah	jabatan	1703	544	31,94	TB
	22	Persentase tindak lanjut temuan	%	79	88	111,10	SB
	23	Persentase pelanggaran Pegawai	%	0,18		0,00	TB

**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2023**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Satuan	Tahun 2023			Notif
				Tar get	Real isasi	Capaian (%)	
	24	Jumlah temuan BPK	Temuan	6	13	-16,67	TB
	25	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD Yang Telah Ditetapkan Dengan Perda/Perkada	%	100	100	100,00	B
	26	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD Yang Telah Ditetapkan Dengan Perkada	%	100	100	100,00	B
	27	Tersedianya Dokumen RTRW Yang Telah Ditetapkan Dengan Perda	%	100	100	100,00	B
	28	Kesesuaian Rencana Pembangunan Dengan RTRW	%	100	100	100,00	B
Rata-rata Capaian						95,25	CB

Dari 28 indikator kinerja yang mendukung sasaran strategis ini, 17 indikator kinerja mencapai target di atas 100 persen atau sangat berhasil, 11 indikator kinerja tidak mencapai target. Secara umum rata-rata pencapaian sasaran Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, telah cukup berhasil mencapai target yaitu 95,25 persen.

2. Perbandingan antara realisasi kinerja tahun ini dengan tahun sebelumnya.

Indikator Kinerja		Satuan	Realisasi		
			2021	2022	2023
1	Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	59,46	59,46	59,46
2	Skor LPPD/Kategori	Skor	0,00	3,33	3,33
3	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	%	100,00	100,00	100,00
4	Persentase SILPA Terhadap APBD	%	6,77	2,83	2,83
5	Persentase Program/Kegiatan Yang Tidak Terlaksana	%	0,00	0,00	0
6	Persentase Belanja Pendidikan (20%)	%	28,05	29,88	29,88

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2023

Indikator Kinerja		Satuan	Realisasi		
			2021	2022	2023
7	Persentase Belanja Kesehatan (10%)	%	18,44	17,35	17,35
8	Penetapan APBD (Tepat Waktu/Tidak)	%	100,00	100,00	100,00
9	Bagi Hasil Kabupaten/Kota Dan Desa	%	0,5400	0,42	0,42
10	Persentase PAD terhadap Pendapatan	%	11,95	12,54	12,54
11	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD Kedalam RKPD	%	100,00	110,84	110,84
12	Penjabaran Konsistensi Program RKPD Kedalam APBD	%	100,00	100,00	100,00
13	Persentase implementasi rencana Kelitbangan	%	5,12	7,50	7,50
14	Persentase pemanfaatan hasil Kelitbangan	%	1,61	2,70	2,70
15	Persentase Perangkat Daerah Yang Difasilitasi Dalam Penerapan Inovasi Daerah	%	15	16	16
16	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah	%	60,87	49,74	49,74
17	Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan Pelatihan	bulan	3,00	3,00	3,00
18	Persentase ASN Yang Mengikuti Pendidikan Dan Pelatihan Formal	%	66,35	88,32	88,32
19	Persentase Pejabat ASN Yang Telah Mengikuti Pendidikan Dan Pelatihan Struktural	%	29,40	43,85	43,85
20	Jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi Pada Instansi Pemerintah	jabatan	9,28	32,00	32,00
21	Jumlah Jabatan Administrasi Pada Instansi Pemerintah	jabatan	538	544	544
22	Persentase tindak lanjut temuan	%	88	88	88
23	Persentase pelanggaran Pegawai	%	0,13	0,05	0,01
24	Jumlah temuan BPK	Temuan	5	13	13
25	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD Yang Telah Ditetapkan Dengan Perda/Perkada	%	100	100	100
26	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD Yang	%	100	100	100

**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2023**

Indikator Kinerja		Satuan	Realisasi		
			2021	2022	2023
	Telah Ditetapkan Dengan Perkada				
27	Tersedianya Dokumen RTRW Yang Telah Ditetapkan Dengan Perda	%	100	100	100
28	Kesesuaian Rencana Pembangunan Dengan RTRW	%	100	100	100

Jika dilihat realisasi kinerja tahun ini dengan tahun sebelumnya, maka 11 indikator yang menunjang pencapaian sasaran Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah mengalami peningkatan, dan 12 indikator tidak mengalami peningkatan atau sama dengan tahun lalu, dan 9 indikator mengalami penurunan dari kondisi awal.

3. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini terhadap target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen RPJMD.

Indikator Kinerja		Sat	Target Tahun 2026 (kondisi akhir)	Realisasi s/d Tahun 2023	Capaian (%)	Notif
1	Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	60,0	58,56	97,61	J
2	Skor LPPD/Kategori	Skor	3,6	2,99	83,77	J
3	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	%	100	93,33	93,33	J
4	Persentase SILPA Terhadap APBD	%	2,25	4,61	204,89	J
5	Persentase Program/Kegiatan Yang Tidak Terlaksana	%	0	0,00	0,00	L
6	Persentase Belanja Pendidikan (20%)	%	22	30,22	137,35	J
7	Persentase Belanja Kesehatan (10%)	%	20,04	19,30	90,17	J
8	Penetapan APBD (Tepat Waktu/Tidak)	%	100	100,00	514,40	J
9	Bagi Hasil Kabupaten/Kota Dan Desa	%	1,22	0,52	84,41	J

**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2023**

Indikator Kinerja		Sat	Target Tahun 2026 (kondisi akhir)	Realisasi s/d Tahun 2023	Capaian (%)	Notif
10	Persentase PAD terhadap Pendapatan	%	11,4	11,89	104,33	J
11	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD Kedalam RKPD	%	100	103,61	103,61	J
12	Penjabaran Konsistensi Program RKPD Kedalam APBD	%	100	100,00	100,00	J
13	Persentase implementasi rencana Kelitbangan	%	14,83	6,40	43,18	K
14	Persentase pemanfaatan hasil Kelitbangan	%	15,05	1,44	9,55	L
15	Persentase Perangkat Daerah Yang Difasilitasi Dalam Penerapan Inovasi Daerah	%	15,05	12,76	84,78	J
16	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah	%	61,55	43,62	70,87	J
17	Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan Pelatihan	bulan	3	2,03	67,67	K
18	Persentase ASN Yang Mengikuti Pendidikan Dan Pelatihan Formal	%	90,31	76,22	84,40	J
19	Persentase Pejabat ASN Yang Telah Mengikuti Pendidikan Dan Pelatihan Struktural	%	100	30,62	30,62	L
20	Jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi Pada Instansi Pemerintah	jabatan	29	26,67	91,95	J
21	Jumlah Jabatan Administrasi Pada Instansi Pemerintah	jabatan	1274,88	375,06	29,42	L

**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2023**

Indikator Kinerja		Sat	Target Tahun 2026 (kondisi akhir)	Realisasi s/d Tahun 2023	Capaian (%)	Notif
22	Persentase tindak lanjut temuan	%	100	70,44	70,44	J
23	Persentase pelanggaran Pegawai	%	0	0,06	624,33	J
24	Jumlah temuan BPK	Temuan	3	10,67	355	J
25	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD Yang Telah Ditetapkan Dengan Perda/Perkada	%	100	100,00	100,00	J
26	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD Yang Telah Ditetapkan Dengan Perkada	%	100	100,00	100,00	J
27	Tersedianya Dokumen RTRW Yang Telah Ditetapkan Dengan Perda	%	100	100,00	100,00	J
28	Kesesuaian Rencana Pembangunan Dengan RTRW	%	100	100,00	100,00	J

Pada Sasaran strategis 2, Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, terdapat 28 indikator sasaran yang mendukung pencapaian sasaran ini, 22 indikator sasaran tercapai dengan notifikasi hijau yang berarti sudah tercapai/*on track/on trend*, dan 2 indikator sasaran dengan notifikasi kuning yang berarti kerja keras, 4 indikator sasaran dengan notifikasi merah yang berarti sulit untuk dapat dicapai.

4. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Keberhasilan atau kegagalan pencapaian beberapa indikator sasaran Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dapat dijelaskan sebagai berikut:

Pertama, pencapaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah melalui indikator Indeks Reformasi Birokrasi dengan capaian tahun 2023 sebesar diangka 99.10 artinya realisasi persentase Indeks Reformasi Birokrasi tahun 2023 Cukup berhasil atau tidak mencapai target yaitu 59,46 dibandingkan dengan target yang ditetapkan di tahun yang sama diangka 60,00.

Kedua, pencapaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah melalui indikator Skor LPPD/Kategori dengan capaian tahun 2023 sebesar 94.44 persen artinya Skor LPPD/Kategori tahun 2023 cukup berhasil mencapai target atau skor 3.33 dibandingkan dengan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 3.53 persen.

Ketiga, pencapaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah melalui indikator Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan dengan capaian tahun 2023 sebesar 100 persen artinya realisasi Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan tahun 2023 berhasil mencapai target atau 100 persen dibandingkan dengan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 100 persen.



Keempat, pencapaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah melalui indikator Persentase SILPA Terhadap APBD dengan capaian tahun 2023 sebesar 105.65 persen artinya realisasi persentase SILPA Terhadap APBD tahun 2023 sangat berhasil atau melebihi target yaitu 2.83 persen dibandingkan dengan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 3 persen.

Kelima, pencapaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah melalui indikator Persentase Program/Kegiatan Yang Tidak Terlaksana dengan capaian tahun 2023 sebesar 0 persen artinya realisasi Program/Kegiatan Yang Tidak Terlaksana sampai dengan tahun 2023 berhasil atau sudah mencapai target yaitu 0

persen dibandingkan dengan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 0 persen

Keenam, pencapaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah melalui indikator Persentase Belanja Pendidikan (20%) dengan capaian tahun 2023 sebesar 140.94 persen artinya realisasi jumlah Persentase Belanja Pendidikan (20%) tahun 2023 sangat berhasil atau melebihi target yaitu 29.88 persen dibandingkan dengan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 21 persen.

Ketujuh, pencapaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah melalui indikator Persentase Belanja Kesehatan (10%) dengan capaian tahun 2023 sebesar 100 persen artinya realisasi jumlah Persentase Belanja Kesehatan (10%) tahun 2023 berhasil atau mencapai target yaitu 100 persen dibandingkan dengan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 100 persen.

Kedelapan, pencapaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah melalui indikator Penetapan APBD (Tepat Waktu/Tidak) dengan capaian tahun 2023 sebesar 100 persen artinya realisasi jumlah Penetapan APBD (Tepat Waktu/Tidak) tahun 2023 berhasil atau mencapai target yaitu 100 persen dibandingkan dengan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 100 persen.



Kesembilan, pencapaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah melalui indikator Bagi Hasil Kabupaten/Kota Dan Desa dengan capaian tahun 2023 sebesar 100 persen artinya realisasi jumlah Bagi Hasil Kabupaten/Kota Dan Desa tahun 2023 berhasil atau mencapai target yaitu 0,42 persen dibandingkan dengan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 0,42 persen.

Kesepuluh,

pencapaian Kinerja
Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah
melalui indikator Persentase
PAD terhadap Pendapatan
dengan capaian tahun 2023
sebesar 116,00 persen
artinya realisasi jumlah
Persentase PAD terhadap



Pendapatan tahun 2023 sangat berhasil atau mencapai target
yaitu 12.54 persen dibandingkan dengan target yang
ditetapkan di tahun yang sama yaitu 11 persen.

Kesebelas,

pencapaian Kinerja Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah melalui indikator Penjabaran
Konsistensi Program RPJMD Kedalam RKPD dengan capaian
tahun 2023 sebesar 100 persen artinya realisasi Penjabaran
Konsistensi Program RPJMD Kedalam RKPD tahun 2023
berhasil atau terlaksana yaitu 100 persen dibandingkan
dengan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 100
persen.

Keduabelas,

pencapaian Kinerja Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah melalui indikator Penjabaran
Konsistensi Program RKPD Kedalam APBD dengan capaian
tahun 2023 sebesar 100 persen artinya realisasi Penjabaran
Konsistensi Program RPJMD Kedalam RKPD tahun 2023
berhasil atau terlaksana yaitu 100 persen dibandingkan
dengan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 100
persen.

Ketigabelas,

pencapaian Kinerja Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah melalui indikator Persentase
implementasi rencana Kelitbangan dengan capaian tahun 2023
sebesar 87.6 persen artinya realisasi jumlah Persentase
implementasi rencana Kelitbangan tahun 2023 cukup berhasil
atau mencapai target yaitu 7.50 persen dibandingkan dengan
target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 9 persen.

Keempatbelas,

pencapaian Kinerja Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah melalui indikator Persentase
pemanfaatan hasil Kelitbangan dengan capaian tahun 2023

sebesar 22.39 persen artinya realisasi jumlah Persentase pemanfaatan hasil Kelitbangan tahun 2023 tidak berhasil atau terlaksana yaitu 2.70 persen dibandingkan dengan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 12 persen.

Kelimabelas, pencapaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah melalui indikator Persentase Perangkat Daerah Yang Difasilitasi Dalam Penerapan Inovasi Daerah dengan capaian tahun 2023 sebesar 134,49 persen artinya realisasi jumlah Persentase Perangkat Daerah Yang Difasilitasi Dalam Penerapan Inovasi Daerah tahun 2023 sangat berhasil atau terlaksana yaitu 16,22 persen dibandingkan dengan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 12,06 persen.

Keenambelas, pencapaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah melalui indikator Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah dengan capaian tahun 2023 sebesar 81,53 persen artinya realisasi jumlah Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah tahun 2023 cukup berhasil yaitu 60,87 persen dibandingkan dengan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 61 persen.



Ketujuhbelas, pencapaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah melalui indikator Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan Pelatihan dengan capaian tahun 2023 sebesar 100 persen artinya realisasi jumlah Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan Pelatihan tahun 2023 berhasil atau terlaksana yaitu 3 bulan dibandingkan dengan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 3 bulan.

Kedelapanbelas, pencapaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah melalui indikator Persentase ASN Yang Mengikuti Pendidikan Dan Pelatihan Formal dengan capaian tahun 2023 sebesar 98.85 persen

artinya realisasi jumlah Persentase ASN Yang Mengikuti Pendidikan Dan Pelatihan Formal tahun 2022 cukup berhasil yaitu 88,32 persen dibandingkan dengan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 89,35 persen.

Kesembilanbelas, pencapaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah melalui indikator Persentase Pejabat ASN Yang Telah Mengikuti Pendidikan Dan Pelatihan Struktural dengan capaian tahun 2023 sebesar 51,6 persen artinya realisasi jumlah Persentase Pejabat ASN Yang Telah Mengikuti Pendidikan Dan Pelatihan Struktural tahun 2023 kurang berhasil yaitu 43,85 persen dibandingkan dengan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 89,94 persen.

Keduapuluh, pencapaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah melalui indikator Jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi Pada Instansi Pemerintah dengan capaian tahun 2023 sebesar 110,34 jabatan artinya realisasi Jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi Pada Instansi Pemerintah tahun 2023 sangat berhasil yaitu 32,00 jabatan dibandingkan dengan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 29 jabatan.

Keduapuluh satu, pencapaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah melalui indikator Jumlah Jabatan Administrasi Pada Instansi Pemerintah dengan capaian tahun 2023 sebesar 31,94 jabatan artinya realisasi Jumlah Jabatan Administrasi Pada Instansi Pemerintah tahun 2023 tidak berhasil yaitu 544 jabatan dibandingkan dengan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 1703 jabatan.

Keduapuluh dua, pencapaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah melalui indikator Persentase tindak lanjut temuan dengan capaian tahun 2023 sebesar 111,10 persen artinya realisasi Jumlah Persentase tindak lanjut temuan tahun 2023 sangat berhasil atau terlaksana yaitu 88 persen dibandingkan dengan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 79 persen.

Keduapuluh tiga, pencapaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah melalui indikator Persentase pelanggaran Pegawai dengan capaian tahun 2023

sebesar 196,63 persen artinya realisasi Jumlah Persentase pelanggaran Pegawai tahun 2023 tidak berhasil atau terlaksana yaitu 0,01 persen dibandingkan dengan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 0,18 persen.

Kedua puluh empat,
pencapaian Kinerja
Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah melalui indikator Jumlah temuan BPK dengan capaian tahun 2023 sebesar -16,67 persen artinya realisasi Jumlah temuan BPK tahun 2023 kurang berhasil

atau terlaksana yaitu 13 temuan dibandingkan dengan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 6 temuan.



Kedua puluh lima,
pencapaian Kinerja
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah melalui indikator Tersedianya Dokumen

Perencanaan : RPJMD Yang Telah Ditetapkan Dengan Perda/Perkada dengan capaian tahun 2023 sebesar 100 persen artinya realisasi Tersedianya

Dokumen Perencanaan : RPJMD Yang Telah Ditetapkan Dengan Perda/Perkada tahun 2023 berhasil atau terlaksana yaitu 100 persen dibandingkan dengan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 100 persen.



Kedua puluh enam, pencapaian Kinerja
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah melalui indikator Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD Yang Telah Ditetapkan Dengan Perkada dengan capaian tahun 2023 sebesar 100 persen artinya realisasi Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD Yang Telah Ditetapkan Dengan Perkada tahun 2023 berhasil atau terlaksana yaitu 100 persen dibandingkan dengan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 100 persen.

Keduapuluh tujuh, pencapaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah melalui indikator Tersedianya Dokumen RTRW Yang Telah Ditetapkan Dengan Perda dengan capaian tahun 2023 sebesar 100 persen artinya realisasi Tersedianya Dokumen RTRW Yang Telah Ditetapkan Dengan Perda tahun 2023 berhasil atau terlaksana yaitu 100 persen dibandingkan dengan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 100 persen.

Keduapuluh delapan, pencapaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah melalui indikator Kesesuaian Rencana Pembangunan Dengan RTRW dengan capaian tahun 2023 sebesar 100 persen artinya realisasi Kesesuaian Rencana Pembangunan Dengan RTRW tahun 2023 berhasil atau terlaksana yaitu 100 persen dibandingkan dengan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 100 persen.

5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya.

Anggaran yang direncanakan pada perjanjian kinerja tahun 2022 untuk pencapaian sasaran Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah ini adalah sebesar Rp. 197.966.351.615 dari anggaran tersebut terealisasi sebanyak Rp. 191.896.054.901 dengan persentase 96,93 persen.

6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian sasaran Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Pembangunan ini adalah sebanyak 12 program yaitu:

1. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
2. Program koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
3. Program Pengelolaan Keuangan Daerah
4. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah
5. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah
6. Program Kepegawaian Daerah
7. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia
8. Program Penyelenggaraan Pengawasan
9. Program Perekonomian Dan Pembangunan
10. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi

11. Program Perencanaan, Pengendalian Evaluasi Pembangunan Daerah
 12. Program Penelitian Dan pengembangan Daerah

3 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Modernisasi Birokrasi

Analisis pencapaian **Sasaran 3:** Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Modernisasi Birokrasi, dapat dijelaskan sebagai berikut:

a) Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Satuan	Tahun 2022			
				Target	Realisasi	Capaian (%)	Notif
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Modernisasi Birokrasi	1	Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	3,26	3,81	116,87	SB
	2	Indeks Gini	%	0,37	0,361	98,10	CB
	3	Persentase Penduduk miskin	%	6,41	7,22	87,36	CB
	4	Sarana Sosial Seperti Panti Asuhan, Panti Jompo Dan Panti Rehabilitasi	unit	12,00	12	100,00	B
	5	Perentase Jumlah Korban Bencana Yang Ditangani	%	100	100	100,00	B
	6	Persentase PMKS Yang Memperoleh Bantuan Sosial	%	99,69	100	100,31	SB
	7	Persentase PMKS Yang Tertangani	%	65,25	57,25	87,74	CB
	8	Persentase Korban Bencana Yang Menerima Bantuan Sosial Selama Masa Tanggap Darurat	%	91,82	100	108,91	SB
	9	Persentase Penyandang Cacat Fisik Dan Mental,	%	81,32	100	122,97	SB

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2023

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Satuan	Tahun 2022			
				Target	Realisasi	Capaian (%)	Notif
		serta Lanjut Usia Tidak Potensial Yang Telah Menerima Jaminan Sosial					
	10	Angka Sengketa Pengusaha-Pekerja Per Tahun	%	0	0	0,00	TB
	11	Besaran Kasus Yang Diselesaikan Dengan Perjanjian Bersama (PB)	%	0,02	0,001	195,00	SB
	12	Besaran Pekerja/Buruh Yang Menjadi Peserta Program Jamsostek	%	3,92	3,92	100,00	B
	13	Besaran Pencari Kerja Yang Terdaftar Yang Ditempatkan	%	2,09	2,00	95,89	CB
	14	Besaran Pemeriksaan Perusahaan	%	0,23	0,37	160,87	SB
	15	Besaran Pengujian Peralatan Di Perusahaan	%	0,05	0	0,00	TB
	16	Besaran Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi	%	0,79	0,79	100,00	B
	17	Rasio Lulusan S1/S2/S3	Per 10,000	762,88	160,00	20,97	TB
	18	Rasio Daya Serap Tenaga Kerja		86,22	86,22	100,00	B
	19	Besaran Tenaga Kerja Yang Mendapatkan		1,05	0	0,00	TB

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2023

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Satuan	Tahun 2022			
				Target	Realisasi	Capaian (%)	Notif
		Pelatihan Kewirausahaan					
	20	Besaran Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Masyarakat		0,47	0,47	100,00	B
	21	Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA)	buah	69,00	60,08 ₃	87,08	CB
	22	Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)	Rp (juta)	780.75 ₅	68.61 ₄	8,79	TB
	23	Kenaikan / Penurunan Nilai Realisasi PMDN	%	25	36,94	147,76	SB
	24	Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah,	%	100	100	100,00	B
	25	Buku "Kabupaten Dalam Angka"	%	100	100	100,00	B
	26	Buku "PDRB"	%	100	100	100,00	B
	27	Rasio Penduduk ber KTP per satuan penduduk,	%	1	0,99	99,00	CB
	28	Rasio bayi berakta kelahiran,	%	0,8	0,54	67,50	KB
	29	Rasio pasangan berakta nikah,	%	0,5	1	200,00	SB
	30	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	%	100	100	100,00	B

**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2023**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Satuan	Tahun 2022			
				Target	Realisasi	Capaian (%)	Notifikasi
	31	Cakupan penerbitan KTP-el	%	100	99,26	99,26	CB
	32	Cakupan penerbitan akte kelahiran	%	80	98,48	123,10	SB
	33	Proporsi rumah tangga yang memiliki komputer	%	91,0	0	0,00	TB
	34	Cakupan Layanan Telekomunikasi	%	0,8	1,155	146,15	SB
	35	Persentase Penduduk Yang Menggunakan Hp/Telepon	%	84,6	0	0,00	TB
	36	Proporsi Rumah Tangga Dengan Akses Internet	%	57,91	0	0,00	TB
	37	Proporsi Rumah Tangga Yang Memiliki Komputer Pribadi	%	91,33	0	0,00	TB
Rata-rata Capaian						85,77	CB

Dari 37 indikator kinerja yang mendukung sasaran strategis ini, 10 indikator kinerja mencapai target di atas 100 persen atau sangat berhasil, 7 indikator tercapai di atas 80 persen atau cukup berhasil, 10 indikator tercapai sama dengan 100 persen atau berhasil dan 1 indikator tercapai di atas 50 persen atau kurang berhasil serta 9 indikator yang tidak berhasil. Secara umum rata-rata pencapaian sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Modernisasi Birokrasi, kurang berhasil yaitu rata-rata 85,77 persen.

b) Perbandingan antara realisasi kinerja tahun ini dengan tahun sebelumnya.

Indikator Kinerja		Satuan	Realisasi		
			2021	2022	2023
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	3,25	3,25	3,81
2	Indeks Gini	%	0,362	0,361	0,361

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2023

Indikator Kinerja		Satuan	Realisasi		
			2021	2022	2023
3	Persentase Penduduk miskin	%	31,31	31,29	7,22
4	Sarana Sosial Seperti Panti Asuhan, Panti Jompo Dan Panti Rehabilitasi	unit	1,69	13	12
5	Perentase Jumlah Korban Bencana Yang Ditangani	%	100	100	100
6	Persentase PMKS Yang Memperoleh Bantuan Sosial	%	26,16	100	100
7	Persentase PMKS Yang Tertangani	%	20,49	40,73	57,25
8	Persentase Korban Bencana Yang Menerima Bantuan Sosial Selama Masa Tanggap Darurat	%	91,49	91,66	100
9	Persentase Penyandang Cacat Fisik Dan Mental, serta Lanjut Usia Tidak Potensial Yang Telah Menerima Jaminan Sosial	%	79,24	80,44	100
10	Angka Sengketa Pengusaha-Pekerja Per Tahun	%	1,82	23,26	0
11	Besaran Kasus Yang Diselesaikan Dengan Perjanjian Bersama (PB)	%	0,11	0,15	0,001
12	Besaran Pekerja/Buruh Yang Menjadi Peserta Program Jamsostek	%	1,82	2,68	3,92
13	Besaran Pencari Kerja Yang Terdaftar Yang Ditempatkan	%	1,75	1,29	2,00
14	Besaran Pemeriksaan Perusahaan	%	0,25	0,7	

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2023

Indikator Kinerja		Satuan	Realisasi		
			2021	2022	2023
15	Besaran Pengujian Peralatan Di Perusahaan	%	0,08	0,07	0
16	Besaran Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi	%	0,3763	0,69	0,79
17	Rasio Lulusan S1/S2/S3	Per 10,000	717,48	3179	160,00
18	Rasio Daya Serap Tenaga Kerja	%	32,45	33,85	86,22
19	Besaran Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan Kewirausahaan	%	0,98	1,01	0
20	Besaran Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Masyarakat	%	1	1	0,47
21	Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA)	buah	73,71	23,1	60,083
22	Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)	Rp (juta)	2.215.177,91	414.973.906	68614
23	Kenaikan / Penurunan Nilai Realisasi PMDN	%	8,7	8,7	36.94
24	Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah,	%	100	100	100
25	Buku "Kabupaten Dalam Angka"	%	100	100	100
26	Buku "PDRB"	%	100	100	100
27	Rasio Penduduk ber KTP per satuan penduduk,	%	0,00999	0,01095	0,99
28	Rasio bayi berakta kelahiran,	%	0,007	0,008	0,54
29	Rasio pasangan berakta nikah,	%	0,005	0,005	1

**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2023**

Indikator Kinerja		Satuan	Realisasi		
			2021	2022	2023
30	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	%	100	100	100
31	Cakupan penerbitan KTP-el	%	99,9	109,55	99,26
32	Cakupan penerbitan akte kelahiran	%	72,47	88,85	98,48
33	Proporsi rumah tangga yang memiliki komputer	%	0	0	0
34	Cakupan Layanan Telekomunikasi	%	0	0	1,15458
35	Persentase Penduduk Yang Menggunakan Hp/Telepon	%	0	0	0
36	Proporsi Rumah Tangga Dengan Akses Internet	%	0	0	0
37	Proporsi Rumah Tangga Yang Memiliki Komputer Pribadi	%	0	0	0

Jika dilihat realisasi kinerja tahun ini dengan tahun sebelumnya, maka 37 indikator yang menunjang pencapaian sasaran Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Modernisasi Birokrasi mengalami peningkatan, 15 indikator mengalami penurunan dari tahun lalu, dan 13 indikator sama dengan tahun lalu. dan 17 indikator mengalami peningkatan dari kondisi awal.

c) Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini terhadap target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen RPJMD.

Indikator Kinerja		Sat	Target 2026 (kondisi akhir)	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2022	Capaian (%)	Notif
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	4	3,25	81,25	J
2	Indeks Gini	%	0,33	0,36	110,55	J
3	Persentase Penduduk miskin	%	5,89	31,30	531,48	J
4	Sarana Sosial Seperti Panti Asuhan, Panti	unit	11	7,35	66,77	K

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2023

Indikator Kinerja		Sat	Target 2026 (kondisi akhir)	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2022	Capaian (%)	Notif
	Jompo Dan Panti Rehabilitasi					
5	Perentase Jumlah Korban Bencana Yang Ditangani	%	100	100,00	100,00	J
6	Persentase PMKS Yang Memperoleh Bantuan Sosial	%	100	63,08	63,08	K
7	Persentase PMKS Yang Tertangani	%	48,6	39,01	80,27	J
8	Persentase Korban Bencana Yang Menerima Bantuan Sosial Selama Masa Tanggap Darurat	%	92,19	95,75	103,86	J
9	Persentase Penyandang Cacat Fisik Dan Mental, serta Lanjut Usia Tidak Potensial Yang Telah Menerima Jaminan Sosial	%	77,95	88,24	113,20	J
10	Angka Sengketa Pengusaha-Pekerja Per Tahun	%	0	12,54	0,00	L
11	Besaran Kasus Yang Diselesaikan Dengan Perjanjian Bersama (PB)	%	0	0,13	0,00	L
12	Besaran Pekerja/Buruh Yang Menjadi Peserta Program Jamsostek	%	8,82	2,25	25,54	L
13	Besaran Pencari Kerja Yang Terdaftar Yang Ditempatkan	%	2,47	1,52	61,53	K
14	Besaran Pemeriksaan Perusahaan	%	0,21	0,48	226,19	J
15	Besaran Pengujian Peralatan Di Perusahaan	%	0,03	0,08	250,00	J
16	Besaran Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi	%	0,91	0,53	58,35	K
17	Rasio Lulusan S1/S2/S3	Per 10,000	813,13	1948,24	239,60	J
18	Rasio Daya Serap Tenaga Kerja		100	33,15	33,15	L

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2023

Indikator Kinerja		Sat	Target 2026 (kondisi akhir)	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2022	Capaian (%)	Notif
19	Besaran Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan Kewirausahaan		1,17	1,00	85,04	J
20	Besaran Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Masyarakat		0,05	1,00	2000,00	J
21	Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA)	buah	76	48,41	63,69	K
22	Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)	Rp (juta)	831,275	1315,08	158,20	J
23	Kenaikan / Penurunan Nilai Realisasi PMDN	%	35	8,70	24,86	L
24	Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah,	%	100	100,00	100,00	J
25	Buku "Kabupaten Dalam Angka"	%	100	100,00	100,00	J
26	Buku "PDRB"	%	100	100,00	100,00	J
27	Rasio Penduduk ber KTP per satuan penduduk,	%	1	0,01	1,05	L
28	Rasio bayi berakta kelahiran,	%	0,8	0,01	0,93	L
29	Rasio pasangan berakta nikah,	%	0,5	0,01	1,00	L
30	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	%	100	100,00	100,00	J
31	Cakupan penerbitan KTP-el	%	100	104,73	104,73	J
32	Cakupan penerbitan akte kelahiran	%	80	80,66	100,83	J
33	Proporsi rumah tangga yang memiliki komputer	%	102	0,00	0,00	L
34	Cakupan Layanan Telekomunikasi	%	0,85	0,00	0,00	L
35	Persentase Penduduk Yang	%	86,7	0,00	0,00	L

Indikator Kinerja		Sat	Target 2026 (kondisi akhir)	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2022	Capaian (%)	Notif
	Menggunakan Hp/Telepon					
36	Proporsi Rumah Tangga Dengan Akses Internet	%	65,87	0,00	0,00	L
37	Proporsi Rumah Tangga Yang Memiliki Komputer Pribadi	%	100	0,00	0,00	L

Pada Sasaran strategis 3, Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Modernisasi Birokrasi, terdapat 37 indikator sasaran yang mendukung pencapaian sasaran ini, 23 indikator sasaran tercapai dengan notifikasi hijau yang berarti sudah tercapai/*on track/on trend*, 7 indikator sasaran tercapai dengan notifikasi kuning yang berarti butuh kerja keras untuk mencapainya dan 10 indikator sasaran dengan notifikasi merah yang berarti sulit tercapai.

d) Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Keberhasilan atau kegagalan pencapaian beberapa indikator sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Modernisasi Birokrasi dapat dijelaskan sebagai berikut:

Pertama, pencapaian kinerja untuk sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Modernisasi Birokrasi melalui indikator Indeks Kepuasan Masyarakat dengan capaian tahun 2023 sebesar 116,87 angka artinya realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat tahun 2023 berhasil mencapai target yaitu 3,81 angka dibandingkan dengan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 3,26 angka.

Kedua, pencapaian kinerja untuk sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Modernisasi Birokrasi melalui indikator Indeks Gini dengan capaian tahun 2023 sebesar 98,10 persen artinya realisasi Indeks Gini tahun 2023 cukup berhasil mencapai target yaitu 0,36 persen dibandingkan dengan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 0,37 persen.

Ketiga,

pencapaian kinerja
untuk sasaran
Meningkatnya Kualitas
Pelayanan Publik dan
Modernisasi Birokrasi
melalui indikator
Persentase Penduduk
miskin dengan



capaian tahun 2023 sebesar 87,36 persen artinya realisasi Persentase Penduduk miskin tahun 2023 cukup berhasil mencapai target yaitu 7,22 persen dibandingkan dengan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 6,41 persen.

Keempat,

pencapaian kinerja untuk sasaran Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Modernisasi Birokrasi melalui indikator Sarana Sosial Seperti Panti Asuhan, Panti Jompo Dan Panti Rehabilitasi dengan capaian tahun 2023 sebesar 100 unit artinya realisasi Sarana Sosial Seperti Panti Asuhan, Panti Jompo Dan Panti Rehabilitasi tahun 2023 berhasil mencapai target yaitu 12 unit dibandingkan dengan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 12 unit.

Kelima,

pencapaian kinerja untuk sasaran Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Modernisasi Birokrasi melalui indikator Perentase Jumlah Korban Bencana Yang Ditangani dengan



capaian tahun 2023 sebesar 100 persen artinya realisasi Perentase Jumlah Korban Bencana Yang Ditangani tahun 2023 berhasil mencapai target yaitu 100 persen dibandingkan dengan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 100 persen.

Keenam, pencapaian kinerja untuk sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Modernisasi Birokrasi melalui indikator Persentase PMKS Yang Memperoleh Bantuan Sosial dengan capaian tahun 2023 sebesar 100,31 persen artinya realisasi Persentase PMKS Yang Memperoleh Bantuan Sosial tahun 2023 sangat berhasil mencapai target yaitu 100 persen dibandingkan dengan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 99,69 persen.



Ketujuh, pencapaian kinerja untuk sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Modernisasi Birokrasi melalui indikator Persentase PMKS Yang Tertangani dengan capaian tahun 2023 sebesar 87,74 persen artinya realisasi Persentase PMKS Yang Tertangani tahun 2023 cukup berhasil mencapai target yaitu 57,25 persen dibandingkan dengan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 65,25 persen.

Kedelapan, pencapaian kinerja untuk sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Modernisasi Birokrasi melalui indikator Persentase Korban Bencana Yang Menerima Bantuan Sosial Selama Masa



Tanggap Darurat dengan capaian tahun 2023 sebesar 108,91 persen artinya realisasi Persentase Korban Bencana Yang Menerima Bantuan Sosial Selama Masa Tanggap Darurat tahun 2023 sangat berhasil mencapai target yaitu 100 persen dibandingkan dengan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 91,86 persen.

Kesembilan, pencapaian kinerja untuk sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Modernisasi Birokrasi melalui indikator Persentase Penyandang Cacat Fisik Dan Mental, serta Lanjut Usia Tidak Potensial Yang Telah Menerima Jaminan Sosial dengan capaian tahun 2023 sebesar 122,97 persen artinya realisasi Persentase Penyandang Cacat Fisik Dan Mental, serta Lanjut Usia Tidak Potensial Yang Telah Menerima Jaminan Sosial tahun 2023 sangat berhasil mencapai target yaitu 100 persen dibandingkan dengan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 81,32 persen.

Kesepuluh, pencapaian kinerja untuk sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Modernisasi Birokrasi melalui indikator Angka Sengketa Pengusaha-Pekerja Per Tahun dengan capaian tahun 2023 sebesar 0 persen artinya realisasi Angka Sengketa Pengusaha-Pekerja Per Tahun tahun 2023 tidak berhasil mencapai target yaitu 23,26 persen dibandingkan dengan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 0 persen.

Kesebelas, pencapaian kinerja untuk sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Modernisasi Birokrasi melalui indikator Besaran Kasus Yang Diselesaikan Dengan Perjanjian Bersama (PB) dengan capaian tahun 2023 sebesar 195 persen artinya realisasi Besaran Kasus Yang Diselesaikan Dengan Perjanjian Bersama (PB) tahun 2023 sangat berhasil mencapai target yaitu 0,001 persen dibandingkan dengan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 0,02 persen.

Keduabelas, pencapaian kinerja untuk sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Modernisasi Birokrasi melalui indikator Besaran Pekerja/Buruh Yang Menjadi Peserta Program Jamsostek dengan capaian tahun 2023 sebesar 100 persen artinya realisasi Besaran Pekerja/Buruh Yang Menjadi Peserta Program Jamsostek tahun 2023 berhasil mencapai target yaitu 3,95 persen dibandingkan dengan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 3,95 persen.

Ketigabelas,

pencapaian kinerja untuk sasaran Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Modernisasi Birokrasi melalui indikator Besaran Pencari Kerja Yang Terdaftar Yang Ditempatkan dengan



capaian tahun 2023 sebesar 95,89 persen artinya realisasi Besaran Pencari Kerja Yang Terdaftar Yang Ditempatkan tahun 2023 cukup berhasil mencapai target yaitu 2,00 persen dibandingkan dengan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 2,09 persen.

Keempatbelas, pencapaian kinerja untuk sasaran Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Modernisasi Birokrasi melalui indikator Besaran Pemeriksaan Perusahaan dengan capaian tahun 2023 sebesar 160,87 persen artinya realisasi Besaran Pemeriksaan Perusahaan tahun 2023 sangat berhasil mencapai target yaitu 0,37 persen dibandingkan dengan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 0,23 persen.

Kelimabelas, pencapaian kinerja untuk sasaran Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Modernisasi Birokrasi melalui indikator Besaran Pengujian Peralatan Di Perusahaan dengan capaian tahun 2023 sebesar 0 persen artinya realisasi Besaran Pengujian Peralatan Di Perusahaan tahun 2023 tidak berhasil mencapai target yaitu 0 persen dibandingkan dengan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 0,05 persen.

Keenambelas,

pencapaian kinerja untuk sasaran Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Modernisasi Birokrasi melalui indikator Besaran Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi dengan capaian tahun 2023 sebesar 100



persen artinya realisasi Besarannya Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi tahun 2023 berhasil mencapai target yaitu 0,79 persen dibandingkan dengan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 0,79 persen.

Ketujuhbelas, pencapaian kinerja untuk sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Modernisasi Birokrasi melalui indikator Rasio Lulusan S1/S2/S3 dengan capaian tahun 2023 sebesar 20,97 per 10.000 artinya realisasi Rasio Lulusan S1/S2/S3 tahun 2023 tidak berhasil mencapai target yaitu 160 per 10.000 dibandingkan dengan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 762,88 per 10.000.

Kedelapanbelas, pencapaian kinerja untuk sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Modernisasi Birokrasi melalui indikator Rasio Daya Serap Tenaga Kerja dengan capaian tahun 2023 sebesar 100 persen artinya realisasi Rasio Daya Serap Tenaga Kerja tahun 2023 tidak berhasil mencapai target yaitu 86,22 persen dibandingkan dengan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 86,22 persen.

Kesembilanbelas, pencapaian kinerja untuk sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Modernisasi Birokrasi melalui indikator Besarannya Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan Kewirausahaan dengan



capaian tahun 2023 sebesar 0 persen artinya realisasi Besarannya Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan Kewirausahaan tahun 2023 tidak berhasil mencapai target yaitu 0 persen dibandingkan dengan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 1,05 persen.

Kedua puluh, pencapaian kinerja untuk sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Modernisasi Birokrasi melalui indikator Besarannya Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Masyarakat dengan capaian tahun 2023 sebesar 100 persen artinya realisasi Besarannya

Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Masyarakat tahun 2023 berhasil mencapai target yaitu 0,47 persen dibandingkan dengan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 0,47 persen.

Keduapuluh satu, pencapaian kinerja untuk sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Modernisasi Birokrasi melalui indikator Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA) dengan capaian tahun 2023 sebesar 87,08 buah artinya realisasi Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA) tahun 2023 cukup berhasil mencapai target yaitu 60 buah dibandingkan dengan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 69 buah.

Keduapuluh dua, pencapaian kinerja untuk sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Modernisasi Birokrasi melalui indikator Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA) dengan capaian tahun 2023 sebesar 8,79 persen artinya realisasi Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA) tahun 2023 tidak berhasil mencapai target yaitu 68.614 Rp (Juta) dibandingkan dengan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 780.755 Rp (Juta).

Keduapuluh tiga, pencapaian kinerja untuk sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Modernisasi Birokrasi melalui indikator Kenaikan / Penurunan Nilai Realisasi PMDN dengan capaian tahun 2023 sebesar 147,76 persen artinya realisasi Kenaikan / Penurunan Nilai Realisasi PMDN tahun 2023 sangat berhasil mencapai target yaitu 36,94 persen dibandingkan dengan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 25 persen.

Keduapuluh empat, pencapaian kinerja untuk sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Modernisasi Birokrasi melalui indikator Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah, dengan capaian tahun 2023 sebesar 100 persen artinya realisasi Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah, tahun 2023 berhasil mencapai target yaitu 100 persen dibandingkan dengan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 100 persen.

Keduapuluh lima, pencapaian kinerja untuk sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Modernisasi Birokrasi melalui indikator Buku "Kabupaten Dalam Angka" dengan capaian tahun 2023 sebesar 100 persen artinya realisasi Buku "Kabupaten Dalam Angka" tahun 2023 berhasil mencapai target yaitu 100 persen dibandingkan dengan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 100 persen.

Keduapuluh enam, pencapaian kinerja untuk sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Modernisasi Birokrasi melalui indikator Buku "PDRB" dengan capaian tahun 2023 sebesar 100 persen artinya realisasi Buku "PDRB" tahun 2023 berhasil mencapai target yaitu 100 persen dibandingkan dengan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 100 persen.

Keduapuluh tujuh, pencapaian kinerja untuk sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Modernisasi Birokrasi melalui indikator Rasio Penduduk ber KTP per satuan penduduk, dengan capaian tahun 2023 sebesar 99,00 persen



artinya realisasi Rasio Penduduk ber KTP per satuan penduduk, tahun 2023 tidak berhasil mencapai target yaitu 0,99 persen dibandingkan dengan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 1,0 persen.

Keduapuluh delapan, pencapaian kinerja untuk sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Modernisasi Birokrasi melalui indikator Rasio bayi berakta kelahiran dengan capaian tahun 2023 sebesar 67,50 persen artinya realisasi Rasio bayi berakta kelahiran tahun 2023 kurang berhasil mencapai target yaitu 0,54 persen dibandingkan dengan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 0,8 persen.

Keduapuluh sembilan, pencapaian kinerja untuk sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Modernisasi Birokrasi melalui indikator Rasio pasangan berakta

nikah dengan capaian tahun 2023 sebesar 200,00 persen artinya realisasi Rasio pasangan berakta nikah tahun 2023 sangat berhasil mencapai target yaitu 1 persen dibandingkan dengan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 0,5 persen.

Ketigapuluh, pencapaian kinerja untuk sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Modernisasi Birokrasi melalui indikator Penerapan KTP Nasional berbasis NIK dengan capaian tahun 2023 sebesar 100 persen artinya realisasi Penerapan KTP Nasional berbasis NIK tahun 2023 berhasil mencapai target yaitu 100 persen dibandingkan dengan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 100 persen.

Ketigapuluh satu,

pencapaian kinerja untuk sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Modernisasi Birokrasi melalui indikator Cakupan penerbitan KTP-el dengan capaian tahun 2023 sebesar 99,26 persen artinya realisasi Cakupan penerbitan KTP-el tahun 2023 cukup berhasil mencapai target yaitu 99,26 persen dibandingkan dengan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 100 persen.



Ketigapuluh dua,

pencapaian kinerja untuk sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Modernisasi Birokrasi melalui indikator Cakupan penerbitan akte kelahiran dengan capaian tahun 2023 sebesar 123,10 persen artinya realisasi Cakupan penerbitan akte kelahiran tahun 2023 sangat berhasil mencapai target yaitu 98,48 persen dibandingkan dengan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 80 persen.



Ketigapuluh tiga, pencapaian kinerja untuk sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Modernisasi Birokrasi melalui indikator Proporsi rumah tangga yang memiliki komputer dengan capaian tahun 2023 sebesar 0

persen artinya realisasi Proporsi rumah tangga yang memiliki komputer tahun 2023 tidak berhasil mencapai target yaitu 0 persen dibandingkan dengan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 87,0 persen.

Ketigapuluh empat, pencapaian kinerja untuk sasaran Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Modernisasi Birokrasi melalui indikator Cakupan Layanan Telekomunikasi dengan capaian tahun 2023 sebesar 146,15 persen artinya realisasi Cakupan Layanan Telekomunikasi tahun 2023 sangat berhasil mencapai target yaitu 1,15 persen dibandingkan dengan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 0,8 persen.

Ketigapuluh lima, pencapaian kinerja untuk sasaran Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Modernisasi Birokrasi melalui indikator Persentase Penduduk Yang Menggunakan Hp/Telepon dengan capaian tahun 2023 sebesar 0 persen artinya realisasi Persentase Penduduk Yang Menggunakan Hp/Telepon tahun 2023 tidak berhasil mencapai target yaitu 0 persen dibandingkan dengan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 84,06 persen.

Ketigapuluh enam, pencapaian kinerja untuk sasaran Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Modernisasi Birokrasi melalui indikator Proporsi Rumah Tangga Dengan Akses Internet dengan capaian tahun 2023 sebesar 0 persen artinya realisasi Proporsi Rumah Tangga Dengan Akses Internet tahun 2023 tidak berhasil mencapai target yaitu 0 persen dibandingkan dengan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 57,91 persen.

Ketigapuluh tujuh, pencapaian kinerja untuk sasaran Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Modernisasi Birokrasi melalui indikator Proporsi Rumah Tangga Yang Memiliki Komputer Pribadi dengan capaian tahun 2023 sebesar 0 persen artinya realisasi Proporsi Rumah Tangga Yang Memiliki Komputer Pribadi tahun 2023 tidak berhasil mencapai target yaitu 0 persen dibandingkan dengan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 91,33 persen.

e) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.

Anggaran yang direncanakan pada perjanjian kinerja tahun 2023 untuk pencapaian sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Modernisasi Birokrasi ini adalah sebesar Rp. 4.619.975.395 dari anggaran tersebut terealisasi sebesar Rp. 4.534.013.738 atau 98.14 persen.

f) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Modernisasi Birokrasi ini adalah sebanyak 19 program yaitu:

1. Program Rehabilitasi Sosial
2. Program Pemberdayaan Sosial
3. Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial
4. Program Penanganan Bencana
5. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan
6. Program Pendaftaran Penduduk
7. Program Pencatatan Sipil
8. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
9. Program Pengelolaan Profil Kependudukan
10. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika
11. Program Penyelenggaraan Statistik sektoral
12. Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi ,
13. Program Pelayanan Penanaman Modal
14. Program Penempatan Tenaga Kerja
15. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
16. Program Promosi Penanaman Modal
17. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
18. Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja

4

Meningkatnya Nilai Tambah Produk Pertanian

Analisis pencapaian **Sasaran 4:** Meningkatnya Nilai Tambah Produk Pertanian, dapat dijelaskan sebagai berikut:

**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2023**

a) Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.

Sasaran Strategi s	Indikator Kinerja		Satuan	Tahun 2023			
				Target	Realisasi	Capaian (%)	Notif
Meningkatnya Nilai Tambah Produk Pertanian	1	Kontribusi Sub Sektor Pertanian Terhadap PDRB	%	22,28	24,33	109,20	SB
	2	Pertumbuhan PDRB Sub sektor Pertanian	%	4,37	-1,43	-32,72	TB
	3	Pertumbuhan Ekonomi	%	4,25	4,11	96,71	CB
	4	PDRB ADHK	Rp, Miliar	9065,34	9741,4	107,46	SB
	5	PDRB Perkapita ADHB	Rp, Juta	40,92	41,90	102,39	SB
	6	Ketersediaan Pangan Utama	angka	456,15	456,15	100,00	B
	7	Ketersediaan Energi (Kkl/Kap/Hari)	angka	13.353,36	8.959,00	67,09	KB
	8	Ketersediaan Protein (Gram/Kap/Hari)	angka	404,03	239,78	59,35	KB
	9	Pengawasan Dan Pembinaan Keamanan Pangan (%)	%	83,09	93,33	112,32	SB
	10	Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan dan perkebunan terhadap PDRB		25,5616	25,1	98,19	CB
	11	Cakupan bina kelompok tani	%	76,2	63,34	83,12	CB
	12	Jumlah Populasi Ternak		3.202.906	2.853.301	87,42	CB
		Sapi Potong	Ekor	78.729	67.808	86,13	CB
		Ayam Ras Pedaging	Ekor	2.414.546	2.174.800	90,07	CB
		Ayam Ras Petelur	Ekor	709.631	610.693	86,06	CB
Rata-rata Capaian						83,52	CB

Dari 12 indikator kinerja yang mendukung sasaran strategis ini, terdapat 4 indikator kinerja mencapai target di atas 100 persen atau sangat berhasil, 10 indikator tercapai sama dengan 100 persen atau berhasil, 4 indikator tercapai diatas 80 persen persen atau cukup berhasil dan 2 indikator

tercapai di atas 50 persen atau kurang berhasil serta 1 indikator yang tidak berhasil. Secara umum rata-rata pencapaian sasaran Meningkatnya Nilai Tambah Produk Pertanian, cukup berhasil melampaui target yaitu rata-rata 83,52 persen.

b) Perbandingan antara realisasi kinerja tahun ini dengan tahun sebelumnya.

Indikator Kinerja		Satuan	Realisasi		
			2021	2022	2023
1	Kontribusi Sub Sektor Pertanian Terhadap PDRB	%	24,32	24,42	24,33
2	Pertumbuhan PDRB Sub sektor Pertanian	%	4,76	3,81	-1,43
3	Pertumbuhan Ekonomi	%	0,15	3,81	4,11
4	PDRB ADHK	Rp, Miliar	9013,58	9357,11	9741,4
5	PDRB Perkapita ADHB	Rp, Juta	15,87	38,66	41,90
6	Ketersediaan Pangan Utama	angka	368,95	100	456,15
7	Ketersediaan Energi (Kkl/Kap/Hari)	angka	2.662,51	17.766,98	8.959,00
8	Ketersediaan Protein (Gram/Kap/Hari)	angka	69,00	919,76	239,78
9	Pengawasan Dan Pembinaan Keamanan Pangan (%)	%	60	90	93,33
10	Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan dan perkebunan terhadap PDRB		26,31	25,48	25,1
11	Cakupan bina kelompok tani	%	26,75	53,35	63,34
12	Jumlah Populasi Ternak		4948,54	5.295.632	2.853.301
	Sapi Potong	Ekor	77,658	71.801	67.808
	Ayam Ras Pedaging	Ekor	3,694,02	4.384.830	2.174.800
	Ayam Ras Petelur	Ekor	1,176,858	839.001	610.693

Jika dilihat realisasi kinerja tahun ini dengan tahun sebelumnya, maka 12 indikator yang menunjang pencapaian sasaran Meningkatnya Nilai Tambah Produk Pertanian 9 indikator mengalami peningkatan dari tahun lalu dan kondisi awal.

c) Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini terhadap target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen RPJMD.

Indikator Kinerja		Sat	Target Tahun 2026 (kondisi akhir)	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2022	Capaian (%)	Notif
1	Kontribusi Sub Sektor Pertanian Terhadap PDRB	%	22,24	24,36	109,52	J
2	Pertumbuhan PDRB Sub sektor Pertanian	%	18,43	2,38	12,91	L
3	Pertumbuhan Ekonomi	%	6	2,69	44,85	L
4	PDRB ADHK	Rp, Miliar	9353,15	9370,70	100,19	J
5	PDRB Perkapita ADHB	Rp, Juta	46,75	32,14	59,65	L
6	Ketersediaan Pangan Utama	angka	528,59	308,37	58,34	K
7	Ketersediaan Energi (Kkl/Kap/Hari)	angka	32.489,49	9796,16	30,15	L
8	Ketersediaan Protein (Gram/Kap/Hari)	angka	1486,92	409,51	27,54	L
9	Pengawasan Dan Pembinaan Keamanan Pangan (%)	%	94,3	81,11	86,01	K
10	Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan dan perkebunan terhadap PDRB		24,18	25,63	106,00	J
11	Cakupan bina kelompok tani	%	89,08	47,81	53,68	L
12	Jumlah Populasi Ternak	Ekor	3.467.740	13.097.469,00	377,69	J
	Sapi Potong	Ekor	80.762	217.267,00	269,02	J
	Ayam Ras Pedaging	Ekor	2.522.533	10.253.650,00	406,48	J
	Ayam Ras Petelur	Ekor	864.442	2.626.552,00	303,84	J

Pada Sasaran strategis 4, Meningkatnya Nilai Tambah Produk Pertanian, terdapat 12 indikator sasaran yang mendukung pencapaian sasaran ini, 5 indikator sasaran tersebut tercapai dengan notifikasi hijau yang berarti sudah tercapai/*on track/on tren*, 4 indikator dengan notifikasi kuning yang berarti kerja keras dan 3 indikator dengan notifikasi merah yang berarti sulit tercapai.

d) Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Keberhasilan atau kegagalan pencapaian beberapa indikator sasaran Meningkatnya Nilai Tambah Produk Pertanian dapat dijelaskan sebagai berikut:

Pertama, pencapaian kinerja untuk sasaran Meningkatnya Nilai Tambah Produk Pertanian melalui indikator Kontribusi Sub Sektor Pertanian Terhadap PDRB dengan capaian tahun 2023 sebesar 109,20 persen artinya realisasi Kontribusi Sub Sektor Pertanian Terhadap PDRB pada tahun 2023 sangat berhasil dan mencapai target yaitu 24,33 persen dibandingkan dengan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 22,28 persen.



Kedua, pencapaian kinerja untuk sasaran Meningkatnya Nilai Tambah Produk Pertanian melalui indikator Pertumbuhan PDRB Sub sektor Pertanian dengan capaian tahun 2023 sebesar -32,72 persen artinya realisasi Pertumbuhan PDRB Sub sektor Pertanian pada tahun 2023 tidak berhasil dan mencapai target yaitu - 1,43 persen dibandingkan dengan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 4,37 persen.

Penyebab terjadinya Pertumbuhan PDRB Sub sektor Pertanian menurun karena adanya alih fungsi lahan pertanian.

Ketiga, pencapaian kinerja untuk sasaran Meningkatnya Nilai Tambah Produk Pertanian melalui indikator Pertumbuhan Ekonomi dengan capaian tahun 2023 sebesar 96,71 persen artinya realisasi Pertumbuhan Ekonomi pada tahun 2023 cukup berhasil mencapai target yaitu 4,11 persen dibandingkan dengan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 4,25 persen.

Keempat, pencapaian kinerja untuk sasaran Meningkatnya Nilai Tambah Produk Pertanian melalui indikator PDRB ADHK dengan capaian tahun 2023 sebesar 107,46 Rp, Miliar artinya realisasi PDRB ADHK pada tahun 2023 sangat berhasil mencapai target yaitu 9741,4 Rp, Miliar dibandingkan dengan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 9065,34 Rp, Miliar.



Kelima, pencapaian kinerja untuk sasaran Meningkatnya Nilai Tambah Produk Pertanian melalui indikator PDRB Perkapita ADHB dengan capaian tahun 2023 sebesar 102,39 persen artinya realisasi PDRB Perkapita ADHB pada tahun 2023 tidak berhasil mencapai target yaitu 41,90 Rp, Juta dibandingkan dengan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 40,92 Rp, Juta.

Keenam, pencapaian kinerja untuk sasaran Meningkatnya Nilai Tambah Produk Pertanian melalui indikator Ketersediaan Pangan Utama dengan capaian tahun 2023 sebesar 100,00 angka artinya realisasi Ketersediaan Pangan Utama pada tahun 2023 berhasil mencapai target yaitu 456,15 angka dibandingkan dengan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 456,15 angka.

Ketujuh, pencapaian kinerja untuk sasaran Meningkatnya Nilai Tambah Produk Pertanian melalui indikator Ketersediaan Energi (Kkl/Kap/Hari) dengan capaian tahun 2023 sebesar 67,09 persen artinya realisasi Ketersediaan

Energi (Kkl/Kap/Hari) pada tahun 2023 sangat berhasil dan mencapai target yaitu di angka 8.959,00 dibandingkan dengan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu diangka 13.353,36.

Kedelapan,

pencapaian kinerja
untuk sasaran
Meningkatnya Nilai
Tambah Produk
Pertanian melalui
indikator Ketersediaan
Protein
(Gram/Kap/Hari)
dengan capaian tahun
2023 sebesar 59,35



angka artinya realisasi Ketersediaan Protein (Gram/Kap/Hari) pada tahun 2023 kurang berhasil mencapai target yaitu 239,78 angka dibandingkan dengan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 404,03 angka.

Kesembilan, pencapaian kinerja untuk sasaran Meningkatkan Nilai Tambah Produk Pertanian melalui indikator Pengawasan Dan Pembinaan Keamanan Pangan (%) dengan capaian tahun 2023 sebesar 112,32 persen artinya realisasi Pengawasan Dan Pembinaan Keamanan Pangan (%) pada tahun 2023 sangat berhasil mencapai target yaitu 93,33 persen dibandingkan dengan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 83,09 persen.

Kesepuluh, pencapaian kinerja untuk sasaran Meningkatkan Nilai Tambah Produk Pertanian melalui indikator Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan dan perkebunan terhadap PDRB dengan capaian tahun 2023 sebesar 98,19 persen artinya realisasi Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan dan perkebunan terhadap PDRB pada tahun 2023 cukup berhasil mencapai target yaitu 25,1 persen dibandingkan dengan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 25,56 persen.



Kesebelas, pencapaian kinerja untuk sasaran Meningkatnya Nilai Tambah Produk Pertanian melalui indikator Cakupan bina kelompok tani dengan capaian tahun 2023 sebesar 83,12 persen artinya realisasi Cakupan bina kelompok tani pada tahun 2023 kurang berhasil mencapai target yaitu 63,34 persen dibandingkan dengan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 76,2 persen.

Keduabelas, pencapaian kinerja untuk sasaran Meningkatnya Nilai Tambah Produk Pertanian melalui indikator Jumlah Populasi Ternak (sapi potong, ayam ras pedaging, ayam ras petelur) dengan capaian tahun 2023 sebesar 87,42 ekor artinya realisasi Jumlah Populasi Ternak (sapi potong, ayam ras pedaging, ayam ras petelur) pada tahun 2023 cukup berhasil mencapai target yaitu 2.853.301 ekor dibandingkan dengan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 3.202.906 ekor.



e) Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya.

Anggaran yang direncanakan pada perjanjian kinerja tahun 2022 untuk pencapaian sasaran Meningkatnya Nilai Tambah Produk Pertanian ini adalah sebesar Rp. 36.613.367.040 dari anggaran tersebut terealisasi sebesar Rp. 34.000.051.499 atau 82.86 persen.

f) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian sasaran Meningkatnya Nilai Tambah Produk Pertanian ini adalah sebanyak 10 program yaitu:

1. Program Peningkatan Diversifikasi Dan ketahanan Pangan Masyarakat
2. Program Penanganan Kerawanan Pangan
3. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
4. Program Pengendalian Dan penanggulangan Bencana Pertanian
5. Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian

6. Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian
7. Program Pengawasan Keamanan Pangan
8. Program Penyuluhan Pertanian
9. Program Perizinan Usaha Pertanian

5 Meningkatnya Produksi hasil Perikanan

Analisis pencapaian **Sasaran 5:** Meningkatnya Produksi hasil Perikanan, dapat dijelaskan sebagai berikut:

a) Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Sat	Tahun 2022			
				Target	Realisasi	Capaian (%)	Notif
Meningkatnya Produksi hasil Perikanan	1	Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Perikanan	%	6,75	6,89	102,07	SB
	2	Kontribusi PDRB sector perikanan	%	13,21	13,15	99,55	CB
	3	Cakupan Produksi perikanan	%	130	113,4	87,23	CB
	4	Perikanan tangkap	ton	57120	55612	97,36	CB
	5	Perikanan Budidaya	ton	5176	21479,90	414,99	SB
	6	Cakupan Bina Kelompok Perikanan	%	72,2	83,3	115,37	SB
Rata-rata Capaian						152,76	SB

Dari 6 indikator kinerja yang mendukung sasaran strategis ini ,3 indikator kinerja sasaran mencapai target rata-rata di atas 152,76 persen atau sangat berhasil, 3 indikator kinerja belum mencapai target dan pencapaian di atas 80 sampai 99 persen atau cukup berhasil . Secara umum rata-rata pencapaian sasaran Meningkatnya Produksi hasil Perikanan, sangat berhasil melampaui target yaitu rata-rata 152,76 persen.

b) Perbandingan antara realisasi kinerja tahun ini dengan tahun sebelumnya

Indikator Kinerja		Satuan	Realisasi		
			2021	2022	2023
1	Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Perikanan	%	8,78	-0,31	6,89
2	Kontribusi PDRB sector perikanan	%	12,9	12,57	13,15
3	Cakupan Produksi perikanan	%	15,14	119,47	113,4
4	Perikanan tangkap	ton	53830	54911	55612
5	Perikanan Budidaya	ton	228,90	168,04	21479,90
6	Cakupan Bina Kelompok Perikanan	%	44,59	51,74	83,3

Jika dilihat realisasi kinerja tahun ini dengan tahun sebelumnya, maka 3 indikator yang menunjang pencapaian sasaran Meningkatnya Produksi hasil Perikanan, dan 5 indikator mengalami peningkatan dari tahun lalu.

c) Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini terhadap target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen RPJMD.

Indikator Kinerja		Sat	Target Tahun 2026 (kondisi akhir)	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2023	Capaian (%)	Notif
1	Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Perikanan	%	13,52	4,24	37,87	L
2	Kontribusi PDRB sector perikanan	%	14,24	12,74	90,40	J
3	Cakupan Produksi perikanan	%	136	67,30	54,20	K
4	Perikanan tangkap	ton	60187,3	54370,50	91,02	J
5	Perikanan Budidaya	ton	5176,00	198,47	140,89	J
6	Cakupan Bina Kelompok Perikanan	%	75,8	48,16	88,47	J

Pada sasaran strategis 5, Meningkatnya Produksi hasil Perikanan, terdapat 6 indikator sasaran yang mendukung pencapaian sasaran ini, 4 indikator sasaran tercapai dengan notifikasi hijau yang berarti sudah tercapai/*on track/on trend*, 1 indikator sasaran tercapai dengan notifikasi kuning yang

berarti butuh kerja keras, dan 1 indikator sasaran tercapai dengan notifikasi merah yang berarti sulit tercapai

d) Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Keberhasilan atau kegagalan pencapaian beberapa indikator sasaran Meningkatnya Produksi hasil Perikanan dapat dijelaskan sebagai berikut:

Pertama, pencapaian kinerja untuk sasaran Meningkatnya Produksi hasil Perikanan melalui indikator Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Perikanan dengan capaian tahun 2023 sebesar 102,07 persen artinya realisasi Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Perikanan pada tahun 2023 sangat berhasil mencapai target yaitu 6,89 persen dibandingkan dengan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 6,75 persen.



Kedua, pencapaian kinerja untuk sasaran Meningkatnya Produksi hasil Perikanan melalui indikator Kontribusi PDRB sektor perikanan dengan capaian tahun 2023 sebesar 99,55 persen artinya realisasi Kontribusi PDRB sektor perikanan pada tahun 2023 cukup berhasil mencapai target yaitu 13,15 persen dibandingkan dengan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 13,21 persen.

Ketiga, pencapaian kinerja untuk sasaran Meningkatnya Produksi hasil Perikanan melalui indikator Cakupan Produksi perikanan dengan capaian tahun 2023 sebesar 87,23 persen artinya realisasi Cakupan Produksi perikanan pada tahun 2023 cukup berhasil mencapai target yaitu 113,4 persen dibandingkan dengan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 130 persen.



Keempat, pencapaian kinerja untuk sasaran Meningkatnya Produksi hasil Perikanan melalui indikator Perikanan tangkap dengan capaian tahun 2023 sebesar 97,36 ton artinya realisasi Perikanan tangkap pada tahun 2023 cukup berhasil mencapai target yaitu 55.612 ton dibandingkan dengan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 57.120 ton.

Kelima, pencapaian kinerja untuk sasaran Meningkatnya Produksi hasil Perikanan melalui indikator Perikanan Budidaya dengan capaian tahun 2023 sebesar 414,99 persen artinya realisasi Perikanan Budidaya pada tahun 2023 tidak berhasil dan mencapai target yaitu 21479,90 ton dibandingkan dengan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 5176 ton.



Keenam, pencapaian kinerja untuk sasaran Meningkatnya Produksi hasil Perikanan melalui indikator Cakupan Bina Kelompok Perikanan dengan capaian tahun 2023 sebesar 115,37 persen artinya realisasi Cakupan Bina Kelompok Perikanan pada tahun 2023 kurang berhasil dan mencapai target yaitu 83,3 persen dibandingkan dengan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 72,2 persen.



e) Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya.

Anggaran yang direncanakan pada perjanjian kinerja tahun 2023 untuk pencapaian sasaran Meningkatnya Produksi hasil Perikanan ini adalah sebesar Rp. 32.904.846.417 dari anggaran tersebut terealisasi sebesar Rp. 26.921.262.071 atau 81.82 persen.

f) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian sasaran Meningkatnya Produksi hasil Perikanan ini adalah sebanyak 3 program yaitu:

- Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
- Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
- Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan

6 Meningkatnya Kualitas Pendidikan

Analisis pencapaian **Sasaran 6** : Meningkatnya Kualitas Pendidikan, dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Satuan	Tahun 2023			
				Target	Realisasi	Capaian (%)	Notif
Meningkatnya Kualitas Pendidikan	1	Indeks Pembangunan Manusia	Angka	70,11	73,64	105,03	SB
	2	Indeks Pendidikan	Angka	65,13	65,07	99,91	CB
	3	Angka Partisipasi Kasar (APK)		100,23	93,89	94,19	CB
		SD	%	114,5	100,4	87,65	CB
		SMP	%	97,1	93,24	95,98	CB
		SMA	%	89	88,04	98,92	CB
	4	Angka Partisipasi Murni (APM)		83,29	82,81	99,01	CB
		SD	%	98,69	98,86	100,17	SB
		SMP	%	84,85	87,04	102,58	SB
		SMA	%	66,32	62,53	94,29	CB
	5	Angka Partisipasi Sekolah (APS)		88,99	87,28	98,53	CB
		7-12 Tahun	%	98,87	95,28	96,37	CB
		14-15 Tahun	%	92,24	87,04	94,36	CB
		16-18 Tahun	%	75,85	79,53	104,85	SB
	6	Angka Putus Sekolah		0,05	2,66	-5412,7	TB
		SD	%	0	4,5	-449800,0	TB

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2023

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Satuan	Tahun 2023			
				Target	Realisasi	Capaian (%)	Notif
		SMP	%	0	2,5	249800,0	TB
		SMA	%	0,14	0,97	692,86	SB
	7	Angka Kelulusan		100,00	100,00	-492,9	TB
		SD	%	100	100	100,00	B
		SMP	%	100	100	100,00	B
		SMA	%	100	100	100,00	B
	8	Guru Yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-Iv	%	100	100	100,00	B
	9	Rasio Guru/Murid Sekolah Pendidikan Dasar	rasio	1:8	1:12	105,88	SB
	10	Rasio Guru Terhadap Murid Pendidikan Menengah	rasio	1:7	1:14	110,45	SB
	11	Angka Melek Huruf Berumur 15 Tahun Ke Atas	%	91,53	91,42	99,88	CB
	12	Penyelenggaraan Festival Seni Dan Budaya		3,15	3	95,24	CB
	13	Benda, Situs Dan Kawasan Cagar Budaya Yang Dilestarikan	buah	58,62	78	133,06	SB
	14	Jumlah Cagar Budaya Yang Dikelola Secara Terpadu		2	41	2050,00	SB
	15	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun		34,67	10,67	30,78	TB
	16	Koleksi Buku Yang Tersedia Di Perpustakaan Daerah		45,158	71,94	159,31	SB
	17	Rasio Perpustakaan Persatuan Penduduk		1,786	1,61	90,15	CB
	18	Jumlah Rata-Rata Pengunjung Perpustakaan/Tahun	Orang	69.006,98	2324	3,37	TB

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2023

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Satuan	Tahun 2023			
				Target	Realisasi	Capaian (%)	Notif
	19	Jumlah Koleksi Judul Buku Perpustakaan	Judul	12287,80	16227	132,06	SB
	20	Jumlah Pustakawan, Tenaga Teknis, Dan Penilai Yang Memiliki Sertifikat	%	63,78	55,20	86,55	CB
	21	Persentase Peningkatan SDM pengelola kearsipan	%	100,00	100,00	100,00	B
	22	Persentase Perangkat Daerah Yang Mengelola Arsip Secara Baku	%	1,39	44,44	3197,12	SB
Rata-rata Capaian						76,27	KB

Dari 22 indikator kinerja yang mendukung sasaran strategis ini, 11 indikator kinerja mencapai target di atas 100 persen atau sangat berhasil. Secara umum rata-rata pencapaian sasaran Meningkatnya Kualitas Pendidikan, dengan predikat Kurang Berhasil mencapai target yaitu rata-rata 76,27 persen.

a. perbandingan antara realisasi kinerja tahun ini dengan tahun sebelumnya.

Indikator Kinerja		Satuan	Realisasi		
			2021	2022	2023
1	Indeks Pembangunan Manusia	Angka	69,62	70,34	73,64
2	Indeks Pendidikan	Angka	63,32	63,98	65,07
3	Angka Partisipasi Kasar (APK)		91,49	94,47	93,89
	SD	%	106,38	100,9	100,4
	SMP	%	81,88	92,03	93,24
	SMA	%	86,20	90,48	88,04
4	Angka Partisipasi Murni (APM)		77,25	88,53	82,81
	SD	%	98,06	98,5	98,86
	SMP	%	74,01	88,09	87,04
	SMA	%	59,69	79	62,53
5	Angka Partisipasi Sekolah (APS)		87,76	85,47	87,28

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2023

Indikator Kinerja		Satuan	Realisasi		
			2021	2022	2023
	7-12 Tahun	%	106,38	94,45	95,28
	14-15 Tahun	%	81,88	82,42	87,04
	16-18 Tahun	%	75,03	79,53	79,53
6	Angka Putus Sekolah		0,65	0,11	2,66
	SD	%	0,78	0,057	4,5
	SMP	%	1,17	0,15	2,5
	SMA	%	0	0,13	0,97
7	Angka Kelulusan		100,00	97,95	100,00
	SD	%	100	95,76	100
	SMP	%	100	98,68	100
	SMA	%	100	99,42	100
8	Guru Yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-Iv	%	90,68	85,15	100
9	Rasio Guru/Murid Sekolah Pendidikan Dasar	rasio	01:13	01:13	1:12
10	Rasio Guru Terhadap Murid Pendidikan Menengah	rasio	01:11	01:09	1:14
11	Angka Melek Huruf Berumur 15 Tahun Ke Atas	%	89,9	92,26	91,42
12	Penyelenggaraan Festival Seni Dan Budaya		1	2	3
13	Benda, Situs Dan Kawasan Cagar Budaya Yang Dilestarikan	buah	58	78	78
14	Jumlah Cagar Budaya Yang Dikelola Secara Terpadu		2	2	41
15	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun		7,89	6,34	10,67
16	Koleksi Buku Yang Tersedia Di Perpustakaan Daerah		18,52	31,40	71,94
17	Rasio Perpustakaan Persatuan Penduduk		0,01	1,61	1,61
18	Jumlah Rata-Rata Pengunjung Perpustakaan/Tahun	Orang	3107,00	27884	2324
19	Jumlah Koleksi Judul Buku Perpustakaan	Judul	10727,00	15933	16227
20	Jumlah Pustakawan, Tenaga Teknis, Dan Penilai Yang Memiliki Sertifikat	%	25,01	30,47	55,20
21	Persentase Peningkatan SDM pengelola kearsipan	%	100,00	100,00	100,00
22	Persentase Perangkat Daerah Yang Mengelola Arsip Secara Baku	%	0,09	0,07	44,44

Jika dilihat realisasi kinerja tahun ini dengan tahun sebelumnya, maka 3 indikator yang menunjang pencapaian Meningkatnya Kualitas Pendidikan dalam mendorong kualitas Pendidikan mengalami penurunan, 14 indikator yang menunjang pencapaian Meningkatnya Kualitas Pendidikan dalam mendorong kualitas Pendidikan mengalami peningkatan, 14 indikator yang menunjang pencapaian Meningkatnya Kualitas Pendidikan dalam mendorong kualitas Pendidikan mengalami peningkatan dari tahun lalu dan kondisi awal (2021).

b. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini terhadap target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen RPJMD.

Indikator Kinerja		Sat	Target Tahun 2026 (kondisi akhir)	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2023	Capaian (%)	Notifikasi
1	Indeks Pembangunan Manusia	Angka	72,17	71,20	98,66	J
2	Indeks Pendidikan	Angka	68,42	64,12	93,72	J
3	Angka Partisipasi Kasar (APK)	%	104,09	93,28	89,62	J
	SD	%	115,47	102,56	88,82	J
	SMP	%	104,00	89,05	85,62	J
	SMA	%	92,79	88,24	95,10	J
4	Angka Partisipasi Murni (APM)	%	83,67	82,86	99,03	J
	SD	%	98,73	98,47	99,74	J
	SMP	%	85,77	83,05	96,82	J
	SMA	%	66,51	67,07	100,84	J
5	Angka Partisipasi Sekolah (APS)	%	89,18	86,84	97,37	J
	7-12 Tahun	%	98,86	98,70	99,84	J
	14-15 Tahun	%	92,19	83,78	90,88	J
	16-18 Tahun	%	76,50	78,03	102,00	J
6	Angka Putus Sekolah	%	0,04	0,97	2228,72	J
	SD	%	0	1,55	0,00	L
	SMP	%	0	0,94	0,00	L
	SMA	%	0,13013738	0,41	318,59	J

**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2023**

Indikator Kinerja		Sat	Target Tahun 2026 (kondisi akhir)	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2023	Capaian (%)	Notifikasi
7	Angka Kelulusan	%	100,00	99,32	99,32	J
	SD	%	100	98,59	98,59	J
	SMP	%	100	99,56	99,56	J
	SMA	%	100	99,81	99,81	J
8	Guru Yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-Iv	%	100	91,94	91,94	J
9	Rasio Guru/Murid Sekolah Pendidikan Dasar	rasio	1:5	0,05	111,79	J
10	Rasio Guru Terhadap Murid Pendidikan Menengah	rasio	1:6	0,05	108,08	J
11	Angka Melek Huruf Berumur 15 Tahun Ke Atas	%	91,4438102	91,19	99,73	J
12	Penyelenggaraan Festival Seni Dan Budaya	seni	3	2,00	66,67	K
13	Benda, Situs Dan Kawasan Cagar Budaya Yang Dilestarikan	buah	61	71,33	116,94	J
14	Jumlah Cagar Budaya Yang Dikelola Secara Terpadu	buah	2	15,00	750,00	J
15	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	orang	25,48	8,30	32,58	L
16	Koleksi Buku Yang Tersedia Di Perpustakaan Daerah	Buku	51,82	54,00	104,21	J
17	Rasio Perpustakaan Persatuan Penduduk	%	3,28	1,08	32,85	L
18	Jumlah Rata-Rata Pengunjung Perpustakaan/Tahun	Orang	96069,05	11105,00	11,56	L
19	Jumlah Koleksi Judul Buku Perpustakaan	Judul	14039,80	14295,67	101,82	J
20	Jumlah Pustakawan, Tenaga Teknis, Dan Penilai Yang Memiliki Sertifikat	%	92,25	44,49	48,23	K
21	Persentase Peningkatan SDM pengelola kearsipan	%	100,00	100,00	100,00	J
22	Persentase Perangkat Daerah Yang Mengelola Arsip Secara Baku	%	2,18	16,70	764,88	J

Pada Sasaran strategis 6, Meningkatkan Kualitas Pendidikan, terdapat 22 indikator sasaran yang mendukung pencapaian sasaran ini, 17 indikator sasaran tercapai dengan notifikasi hijau yang berarti sudah tercapai/on track/on trend, dan 2 indikator sasaran dengan notifikasi kuning yang berarti kerja keras, 3 indikator sasaran dengan notifikasi merah yang berarti sulit untuk dapat dicapai

c. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Keberhasilan atau kegagalan pencapaian beberapa indikator sasaran Meningkatnya Kualitas Pendidikan dapat dijelaskan sebagai berikut:

Pertama, pencapaian kinerja untuk sasaran Meningkatnya Kualitas Pendidikan melalui Indeks Pembangunan Manusia pada tahun 2023 sebesar 105,03 persen atau realisasi Indeks Pembangunan Manusia pada tahun 2023 sangat berhasil mencapai target yaitu sebesar 73,07 persen dibandingkan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 70,11 persen.

Kedua, pencapaian kinerja untuk sasaran Meningkatnya Kualitas Pendidikan melalui Indeks pendidikan pada tahun 2023 sebesar 94,19 persen atau realisasi Indeks pendidikan pada tahun 2023 cukup berhasil mencapai target yaitu sebesar 93,89 persen dibandingkan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 100,23 persen.

Ketiga, pencapaian kinerja untuk sasaran Meningkatnya Kualitas Pendidikan melalui Angka Partisipasi Kasar (APK) pada tahun 2023 sebesar 99,01 persen atau realisasi Angka Partisipasi Kasar (APK) pada tahun 2023 berhasil mencapai target yaitu sebesar 82,81 persen dibandingkan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 83,29 persen

Keempat, pencapaian kinerja untuk sasaran Meningkatnya Kualitas Pendidikan melalui Angka Partisipasi Murni (APM) pada tahun 2023 sebesar 99,07 persen atau realisasi Angka Partisipasi Murni (APM) pada tahun 2023 cukup berhasil mencapai target yaitu sebesar 88,53 persen dibandingkan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 83,12 persen

Kelima, pencapaian kinerja untuk sasaran Meningkatnya Kualitas Pendidikan melalui Angka Partisipasi Sekolah (APS) pada tahun 2023 sebesar 98,53 persen atau realisasi Angka Partisipasi Sekolah (APS) pada tahun 2023 cukup berhasil mencapai target yaitu sebesar 87,28 persen

dibandingkan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 88,99 persen.

Keenam, pencapaian kinerja untuk sasaran Meningkatnya Kualitas Pendidikan melalui Angka Putus Sekolah pada tahun 2023 sebesar -5412,7 persen atau realisasi Angka Putus Sekolah pada tahun 2023 berhasil mencapai target yaitu sebesar 2,66 persen dibandingkan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 0,05 persen.

Ketujuh, pencapaian kinerja untuk sasaran Meningkatnya Kualitas Pendidikan melalui Angka Kelulusan pada tahun 2023 sebesar 100,00 persen atau realisasi Angka Kelulusan pada tahun 2023 berhasil mencapai target yaitu sebesar 100,00persen dibandingkan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 100,00 persen.

Kedelapan, pencapaian kinerja untuk sasaran Meningkatnya Kualitas Pendidikan melalui Guru Yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-Iv pada tahun 2023 sebesar 100,00 persen atau realisasi Guru Yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-Iv pada tahun 2023 berhasil mencapai target yaitu sebesar 100,00 persen dibandingkan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 100,00 persen.

Kesembilan, pencapaian kinerja untuk sasaran Meningkatnya Kualitas Pendidikan melalui Rasio Guru/Murid Sekolah Pendidikan Dasar pada tahun 2023 sebesar 105,88 persen atau realisasi Rasio Guru/Murid Sekolah Pendidikan Dasar pada tahun 2023 sangat berhasil mencapai target yaitu sebesar 1:12 rasio dibandingkan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 1:8 rasio.

Kesepuluh, pencapaian kinerja untuk sasaran Meningkatnya Kualitas Pendidikan melalui Rasio Guru Terhadap Murid Pendidikan Menengah pada tahun 2023 sebesar 110,45 persen atau realisasi Rasio Guru Terhadap Murid Pendidikan Menengah pada tahun 2023 sangat berhasil mencapai target yaitu sebesar 1:14 rasio dibandingkan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 1:7 rasio.

Kesebelas, pencapaian kinerja untuk sasaran Meningkatnya Kualitas Pendidikan melalui Angka Melek Huruf

Berumur 15 Tahun Ke Atas pada tahun 2023 sebesar 99,88 persen atau realisasi Angka Melek Huruf Berumur 15 Tahun Ke Atas pada tahun 2023 cukup berhasil mencapai target yaitu sebesar 91,42 persen dibandingkan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 91,53 persen.

Kedua Belas, pencapaian kinerja untuk sasaran Meningkatnya Kualitas Pendidikan melalui Penyelenggaraan Festival Seni Dan Budaya pada tahun 2023 sebesar 95,24 persen atau realisasi



Penyelenggaraan Festival Seni Dan Budaya pada tahun 2023 cukup berhasil mencapai target yaitu sebesar 3 festival dibandingkan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 3,15 festival.

Ketiga Belas, pencapaian kinerja untuk sasaran Meningkatnya Kualitas Pendidikan melalui Benda, Situs Dan Kawasan Cagar Budaya Yang Dilestarikan pada tahun 2023 sebesar 133,06 persen atau realisasi Benda, Situs Dan Kawasan Cagar Budaya Yang Dilestarikan pada tahun 2023 berhasil mencapai target yaitu sebesar 78 buah dibandingkan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 58,62 buah.

Keempat Belas, pencapaian kinerja untuk sasaran Meningkatnya Kualitas Pendidikan melalui Jumlah Cagar Budaya Yang Dikelola Secara Terpadu pada tahun 2023 sebesar 2050,00persen atau realisasi Jumlah Cagar Budaya Yang Dikelola Secara Terpadu pada tahun 2023 berhasil mencapai target yaitu sebesar 41 buah dibandingkan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 2 buah

Kelima Belas, pencapaian kinerja untuk sasaran Meningkatnya Kualitas Pendidikan melalui Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun pada tahun 2023 sebesar 30,78 persen atau realisasi Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun pada tahun 2023 tidak berhasil mencapai target yaitu sebesar 10,67 buah dibandingkan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 34,67 buah

Keenam Belas, pencapaian kinerja untuk sasaran Meningkatnya Kualitas Pendidikan melalui Koleksi Buku Yang

Tersedia Di Perpustakaan Daerah pada tahun 2023 sebesar 159,31 persen atau realisasi Koleksi Buku Yang Tersedia Di Perpustakaan Daerah pada tahun 2023 berhasil mencapai target yaitu sebesar 71,94 buku dibandingkan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 45,16 buku

Ketujuh Belas, pencapaian kinerja untuk sasaran Meningkatnya Kualitas Pendidikan melalui Rasio Perpustakaan Persatuan Penduduk pada tahun 2023 sebesar 90,15 persen atau realisasi Rasio Perpustakaan Persatuan Penduduk pada tahun 2023 cukup berhasil mencapai target yaitu sebesar 1,61 persen dibandingkan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 1,79 persen

Kedelapan Belas, pencapaian kinerja untuk sasaran Meningkatnya Kualitas Pendidikan melalui Jumlah Rata-Rata Pengunjung Perpustakaan per Tahun pada tahun 2023 sebesar 3,37 persen atau realisasi Jumlah Rata-Rata Pengunjung Perpustakaan/Tahun pada tahun 2023 tidak berhasil mencapai target yaitu sebesar 2324 orang dibandingkan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 69.006,98 orang

Kesembilan Belas, pencapaian kinerja untuk sasaran Meningkatnya Kualitas Pendidikan melalui Jumlah Koleksi Judul Buku Perpustakaan pada tahun 2023 sebesar 132,06 persen atau realisasi Jumlah Koleksi Judul Buku Perpustakaan pada tahun 2023 sangat berhasil mencapai target yaitu sebesar 16.227 judul dibandingkan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 12287,80 judul.

Kedua Puluh, pencapaian kinerja untuk sasaran Meningkatnya Kualitas Pendidikan melalui Jumlah Pustakawan, Tenaga Teknis, Dan Penilai Yang Memiliki Sertifikat pada tahun 2023 sebesar 86,55 persen atau realisasi Jumlah Pustakawan, Tenaga Teknis, Dan Penilai Yang Memiliki Sertifikat pada tahun 2023 cukup berhasil mencapai target yaitu sebesar 55,20 persen dibandingkan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 63,78 persen

Kedua Puluh Satu, pencapaian kinerja untuk sasaran Meningkatnya Kualitas Pendidikan melalui Persentase Peningkatan SDM pengelola kearsipan pada tahun 2023 sebesar 100,00 persen atau realisasi Persentase Peningkatan

SDM pengelola kearsipan pada tahun 2023 berhasil mencapai target yaitu sebesar 100,00 persen dibandingkan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 100,00 persen

Kedua Puluh Dua, pencapaian kinerja untuk sasaran Meningkatnya Kualitas Pendidikan melalui Persentase Perangkat Daerah Yang Mengelola Arsip Secara Baku pada tahun 2023 sebesar 3197,12persen atau realisasi Persentase Perangkat Daerah Yang Mengelola Arsip Secara Baku pada tahun 2023 berhasil mencapai target yaitu sebesar 44,44 persen dibandingkan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 1,39 persen

d. Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya.

Anggaran yang direncanakan pada perjanjian kinerja tahun 2023 untuk pencapaian sasaran Meningkatnya Kualitas Pendidikan ini adalah sebesar Rp. 123.338.569.302 dari anggaran tersebut terealisasi sebesar Rp. 122.564.009.957 atau 99.37 persen.

e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian sasaran Meningkatnya Kualitas Pendidikan ini adalah sebanyak 7 program yaitu:

- a. Program Pengelolaan Pendidikan
- b. Program Pendidikan dan Tenaga Kependidikan
- c. Program Pengembangan Kebudayaan
- d. Program Pengembangan Kesenian Tradisional
- e. Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya
- f. Program Pengelolaan Arsip

7

Meningkatnya Akses dan mutu Pelayanan Kesehatan Masyarakat

Analisis pencapaian **Sasaran 7:** Meningkatnya Akses dan mutu Pelayanan Kesehatan Masyarakat , dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Satuan	Tahun 2023			
				Target	Realisasi	Capaian	Notif
Meningkatnya Akses dan mutu Pelayanan Kesehatan Masyarakat	1	Indeks Kesehatan	Angka	74,94	74,94	110,88	SB
	2	Usia Harapan Hidup	Tahun	69,15	74,01	107,03	SB
	3	Angka Kematian Bayi Kelahiran Hidup	Angka	4,57	5,00	90,59	CB
	4	Angka Kematian Balita Kelahiran Hidup	Angka	9,94	3,00	169,82	SB
	5	Angka Kematian Neonatal Kelahiran Hidup	Angka	0,01	0,06	-430,00	TB
	6	Angka Kematian Ibu	Angka	46,71	9,00	180,73	SB
	7	Rasio Posyandu Per Satuan Balita	%	29,92	2,40	8,02	TB
	8	Rasio Puskesmas Dan Pustu	%	0,19	0,35	184,21	SB
	9	Rasio Rumah Sakit Per Satuan Penduduk	%	0,00	0,00	100,00	B
	10	Rasio Poliklinik Per Satuan Penduduk	%	0,04	0,01	25,00	TB
	11	Rasio Dokter Per Satuan Penduduk	%	0,09	0,01	14,44	TB
	12	Rasio Tenaga Medis/Penduduk	%	0,24	0,29	120,83	SB
	13	Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan Yang Memiliki Kompetensi Kebidanan	%	86,30	78,80	91,31	CB
	14	Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	%	100,00	100,00	100,00	B
	15	Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapatkan Perawatan	%	100,00	100,00	100,00	B

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2023

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Satuan	Tahun 2023			
				Target	Realisasi	Capaian	Notif
	16	Cakupan Penemuan Dan Penanganan Penderita Penyakit Tbc Bta	%	41,34	53,51	129,44	SB
	17	Tingkat Prevalensi Tuberkulosis	Per 1000 Penduduk	93,82	178,00	10,27	TB
	18	Tingkat Kematian Karena Tuberkulosis	Per 1000 Penduduk	2,56	5,00	4,69	TB
	19	Cakupan Penemuan Dan Penanganan Penderita Penyakit DBD	%	100,00	100,00	100,00	B
	20	Angka Kejadian Malaria	Per 1000 Penduduk	0,24	0,07	170,83	SB
	21	Prevalensi Hiv/Aids (Persen) Dari Total Populasi	%	0,01	0,06	-430,00	TB
	22	Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Masyarakat Miskin	%	10,40	36,44	350,38	SB
	23	Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4	%	73,17	68,60	93,75	CB
	24	Cakupan Pemberian Makanan Pendamping Asi Pada Anak Usia 6 - 24 Bulan Keluarga Miskin	%	50,43	100,00	198,29	SB
	25	Cakupan Pelayanan Dasar Masyarakat Miskin	%	89,19	36,44	40,86	TB
Rata-rata Capaian						65,66	SB

Dari 25 indikator kinerja yang mendukung sasaran strategis ini, 7 indikator kinerja mencapai target di atas 100 persen atau Sangat berhasil. Secara umum rata-rata pencapaian sasaran Meningkatnya Akses dan mutu Pelayanan Kesehatan Masyarakat dengan predikat sangat Berhasil mencapai target yaitu rata-rata 65,22 persen.

b. perbandingan antara realisasi kinerja tahun ini dengan tahun sebelumnya.

Indikator Kinerja		Satuan	Realisasi		
			2021	2022	2023
1	Indeks Kesehatan	Angka	74	74,63	83,09
2	Usia Harapan Hidup	Tahun	68,1	68,51	74,01
3	Angka Kematian Bayi Kelahiran Hidup	Angka	0	0,009	5,00
4	Angka Kematian Balita Kelahiran Hidup	Angka	8	2	3,00
5	Angka Kematian Neonatal Kelahiran Hidup	Angka	7	0	0,06
6	Angka Kematian Ibu	Angka	146	264	9,00
7	Rasio Posyandu Per Satuan Balita	%	23	85	2,40
8	Rasio Puskesmas Dan Pustu	%	0,19	2	0,35
9	Rasio Rumah Sakit Per Satuan Penduduk	%	0,01	0,002	0,00
10	Rasio Poliklinik Per Satuan Penduduk	%	0,04	0,03	0,01
11	Rasio Dokter Per Satuan Penduduk	%	0,14	0,17	0,01
12	Rasio Tenaga Medis/Penduduk	%	0,26	0,33	0,29
13	Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan Yang Memiliki Kompetensi Kebidanan	%	74	84	78,80
14	Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	%	64	90	100,00
15	Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapatkan Perawatan	%	100	100	100,00
16	Cakupan Penemuan Dan Penanganan Penderita Penyakit Tbc Bta	%	34	50	53,51
17	Tingkat Prevalensi Tuberkulosis	Per 1000 Penduduk	121	2	178,00
18	Tingkat Kematian Karena Tuberkulosis	Per 1000 Penduduk	6	0	5,00
19	Cakupan Penemuan Dan Penanganan Penderita Penyakit DBD	%	100	100	100,00
20	Angka Kejadian Malaria	Per 1000 Penduduk	0	0	0,07
21	Prevalensi Hiv/Aids (Persen) Dari Total Populasi	%	0	0	0,06

**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2023**

Indikator Kinerja		Satuan	Realisasi		
			2021	2022	2023
22	Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Masyarakat Miskin	%	2	0	36,44
23	Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4	%	40	83	68,60
24	Cakupan Pemberian Makanan Pendamping Asi Pada Anak Usia 6 - 24 Bulan Keluarga Miskin	%	39	72	100,00
25	Cakupan Pelayanan Dasar Masyarakat Miskin	%	49	0	36,44

Jika dilihat realisasi kinerja tahun ini dengan tahun sebelumnya, maka 9 indikator yang menunjang pencapaian Meningkatnya Akses dan mutu Pelayanan Kesehatan Masyarakat mengalami penurunan dari tahun lalu dan 11 kondisi awal (2021).

c. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini terhadap target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen RPJMD.

Indikator Kinerja		Satuan	Target Jangka Menengah	Realisasi Kinerja Sd Tahun 2023	Capaian	Notif
1	Indeks Kesehatan	Angka	77,99	74,52	95,55	J
2	Usia Harapan Hidup	Tahun	70,69	70,21	99,32	J
3	Angka Kematian Bayi Kelahiran Hidup	Angka	3	1,77	55,20	K
4	Angka Kematian Balita Kelahiran Hidup	Angka	10	4,17	42,60	K
5	Angka Kematian Neonatal Kelahiran Hidup	Angka	0	2,45	-2254,00	L
6	Angka Kematian Ibu	Angka	30	97,29	325,96	J
7	Rasio Posyandu Per Satuan Balita	%	38	37,09	96,91	J
8	Rasio Puskesmas Dan Pustu	%	0,19	0,76	400,00	J
9	Rasio Rumah Sakit Per Satuan Penduduk	%	0,00	0,00	118,33	J
10	Rasio Poliklinik Per Satuan Penduduk	%	0,04	0,03	69,08	K
11	Rasio Dokter Per Satuan Penduduk	%	0,10	0,11	111,78	J
12	Rasio Tenaga Medis/Penduduk	%	0,27	0,29	109,48	J

**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2023**

Indikator Kinerja		Satuan	Target Jangka Menengah	Realisasi Kinerja Sd Tahun 2023	Capaian	Notif
13	Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan Yang Memiliki Kompetensi Kebidanan	%	90	78,89	87,62	J
14	Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	%	100	84,80	84,80	J
15	Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapatkan Perawatan	%	100	100,00	100,00	J
16	Cakupan Penemuan Dan Penanganan Penderita Penyakit Tbc Bta	%	33	45,70	139,75	J
17	Tingkat Prevalensi Tuberkulosis	Per 1000 Penduduk	71	100,27	140,62	J
18	Tingkat Kematian Karena Tuberkulosis	Per 1000 Penduduk	1	3,83	695,94	J
19	Cakupan Penemuan Dan Penanganan Penderita Penyakit DBD	%	100	100,00	100,00	J
20	Angka Kejadian Malaria	Per 1000 Penduduk	0	0,04	0,00	L
21	Prevalensi Hiv/Aids (Persen) Dari Total Populasi	%	0	0,03	0,00	L
22	Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Masyarakat Miskin	%	19	12,92	66,56	K
23	Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4	%	72	63,86	88,37	J
24	Cakupan Pemberian Makanan Pendamping Asi Pada Anak Usia 6 - 24 Bulan Keluarga Miskin	%	45	70,62	156,51	J
25	Cakupan Pelayanan Dasar Masyarakat Miskin	%	98	28,62	29,16	L

Pada Sasaran strategis 7, Meningkatnya Akses dan mutu Pelayanan Kesehatan Masyarakat, terdapat 25 indikator sasaran yang mendukung pencapaian sasaran ini, 17 indikator sasaran tercapai dengan notifikasi hijau yang berarti sudah tercapai/on track/on trend, dan 4 indikator sasaran dengan

notifikasi kuning yang berarti kerja keras, 4 indikator sasaran dengan notifikasi merah yang berarti sulit untuk dapat dicapai

d. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Keberhasilan atau kegagalan pencapaian beberapa indikator sasaran Meningkatnya Akses dan mutu Pelayanan Kesehatan Masyarakat dapat dijelaskan sebagai berikut:

Kesatu, pencapaian kinerja untuk sasaran Meningkatnya Akses dan mutu Pelayanan Kesehatan Masyarakat melalui indikator Indeks Kesehatan pada tahun 2023 sebesar 100,00 persen atau realisasi Indeks Kesehatan pada tahun 2023 berhasil mencapai target yaitu sebesar 74,94 persen dibandingkan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 74,94 persen.



Kedua, pencapaian kinerja untuk sasaran Meningkatnya Akses dan mutu Pelayanan Kesehatan Masyarakat melalui indikator Usia Harapan Hidup pada tahun 2023 sebesar 107,03 persen atau realisasi Usia Harapan Hidup pada tahun 2023 sangat berhasil mencapai target yaitu sebesar 74,01 persen dibandingkan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 69,15 persen.

Ketiga, pencapaian kinerja untuk sasaran Meningkatnya Akses dan mutu Pelayanan Kesehatan Masyarakat melalui indikator Angka Kematian Bayi Kelahiran Hidup pada tahun 2023 sebesar 90,59 persen atau realisasi Angka Kematian Bayi Kelahiran Hidup pada tahun 2023 tidak berhasil mencapai target yaitu sebesar 5,00 angka dibandingkan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 4,57 angka.

Keempat, pencapaian kinerja untuk sasaran Meningkatnya Akses dan mutu Pelayanan Kesehatan Masyarakat melalui indikator Angka Kematian Balita Kelahiran Hidup pada tahun 2023 sebesar 169,82 persen atau realisasi Angka Kematian Balita Kelahiran Hidup pada tahun 2023 tidak berhasil mencapai target yaitu sebesar 3 angka dibandingkan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 9,94 angka.

Kelima, pencapaian kinerja untuk sasaran Meningkatnya Akses dan mutu Pelayanan Kesehatan Masyarakat melalui indikator Angka

Kematian Neonatal Kelahiran Hidup pada tahun 2023 sebesar -430,00 persen atau realisasi Angka Kematian Neonatal Kelahiran Hidup pada tahun 2023 tidak berhasil mencapai target yaitu sebesar 0,06 angka dibandingkan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 0,01 angka.

Keenam, pencapaian kinerja untuk sasaran Meningkatnya Akses dan mutu Pelayanan Kesehatan Masyarakat melalui indikator Angka Kematian Ibu pada tahun 2023 sebesar 180,73 persen atau realisasi Angka Kematian Ibu pada tahun 2023 sangat berhasil mencapai target yaitu sebesar 9 jiwa dibandingkan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 46,71 jiwa.

Ketujuh, pencapaian kinerja untuk sasaran Meningkatnya Akses dan mutu Pelayanan Kesehatan Masyarakat melalui indikator Rasio Posyandu Per Satuan Balita pada tahun 2023 sebesar 8,02 persen atau realisasi Rasio Posyandu Per Satuan Balita pada tahun 2023 tidak berhasil mencapai target yaitu sebesar 2,40 persen dibandingkan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 29,92 persen.

Kedelapan, pencapaian kinerja untuk sasaran Meningkatnya Akses dan mutu Pelayanan Kesehatan Masyarakat melalui indikator Rasio Puskesmas Dan Pustu pada tahun 2023 sebesar 184,21 persen atau realisasi Rasio Puskesmas Dan Pustu pada tahun 2023 sangat berhasil mencapai target yaitu sebesar 0,35 persen dibandingkan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 0,19 persen



Kesembilan, pencapaian kinerja untuk sasaran Meningkatnya Akses dan mutu Pelayanan Kesehatan Masyarakat melalui indikator Rasio Rumah Sakit Per Satuan Penduduk pada tahun 2023 sebesar 100 persen atau realisasi Rasio Rumah Sakit Per Satuan Penduduk pada tahun 2023 berhasil mencapai target yaitu sebesar 0,001 persen dibandingkan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 0,001 persen

Kesepuluh, pencapaian kinerja untuk sasaran Meningkatnya Akses dan mutu Pelayanan Kesehatan Masyarakat melalui indikator Rasio Poliklinik Per Satuan Penduduk pada tahun 2023 sebesar 25 persen atau realisasi Rasio Poliklinik Per Satuan Penduduk pada tahun

2023 cukup berhasil mencapai target yaitu sebesar 0,01 persen dibandingkan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 0,04 persen.

Kesebelas, pencapaian kinerja untuk sasaran Meningkatnya Akses dan mutu Pelayanan Kesehatan Masyarakat melalui indikator Rasio Dokter Per Satuan Penduduk pada tahun 2023 sebesar 14,44 persen atau realisasi Rasio Dokter Per Satuan Penduduk pada tahun 2023 tidak berhasil mencapai target yaitu sebesar 0,01 persen dibandingkan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 0,09 persen.



Kedua Belas, pencapaian kinerja untuk sasaran Meningkatnya Akses dan mutu Pelayanan Kesehatan Masyarakat melalui indikator Rasio Tenaga Medis/Penduduk pada tahun 2023 sebesar 120,83 persen atau realisasi Rasio Tenaga Medis/Penduduk pada tahun 2023 sangat berhasil mencapai target yaitu sebesar 0,29 persen dibandingkan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 0,24 persen.

Ketiga Belas, pencapaian kinerja untuk sasaran Meningkatnya Akses dan mutu Pelayanan Kesehatan Masyarakat melalui indikator "Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan Yang Memiliki Kompetensi Kebidanan pada tahun 2023 sebesar 91.31 persen atau realisasi "Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan Yang Memiliki Kompetensi Kebidanan pada tahun 2023 cukup berhasil mencapai target yaitu sebesar 78.80 persen dibandingkan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 86.30 persen.

Keempat Belas, pencapaian kinerja untuk sasaran Meningkatnya Akses dan mutu Pelayanan Kesehatan Masyarakat melalui indikator Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) pada tahun 2023 sebesar 100 persen atau realisasi Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) pada tahun 2023 berhasil mencapai target yaitu sebesar 100 persen dibandingkan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 100 persen.

Kelima belas, pencapaian kinerja untuk sasaran Meningkatnya Akses dan mutu Pelayanan Kesehatan Masyarakat melalui indikator Cakupan Balita Gizi Buruk

Mendapatkan Perawatan dengan capaian tahun 2023 sebesar 100 persen artinya realisasi Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapatkan Perawatan pada tahun 2023 berhasil mencapai target yaitu 100 persen dibandingkan dengan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 100 persen.

Keenam belas, pencapaian kinerja untuk sasaran Meningkatnya Akses dan mutu Pelayanan Kesehatan Masyarakat melalui indikator Cakupan Penemuan Dan Penanganan Penderita Penyakit Tbc Bta dengan capaian tahun 2023 sebesar 129.44 persen artinya realisasi Cakupan Penemuan Dan Penanganan Penderita Penyakit Tbc Bta pada tahun 2023 sangat berhasil dan mencapai target yaitu 53.51 persen dibandingkan dengan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 41.34 persen.

Ketujuh belas, pencapaian kinerja untuk sasaran Meningkatnya Akses dan mutu Pelayanan Kesehatan Masyarakat melalui indikator Tingkat Prevalensi Tuberkulosis dengan capaian tahun 2023 sebesar 10.27 per 1000 penduduk/jiwa artinya realisasi Tingkat Prevalensi Tuberkulosis pada tahun 2023 tidak berhasil mencapai target yaitu 178.00 per 1000 penduduk/jiwa dibandingkan dengan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 93.82 per 1000 penduduk/jiwa.

Kedelapan belas, pencapaian kinerja untuk sasaran Meningkatnya Akses dan mutu Pelayanan Kesehatan Masyarakat melalui indikator Tingkat Kematian Karena Tuberkulosis dengan capaian tahun 2023 sebesar 4.69 per 1000 penduduk/jiwa artinya realisasi Tingkat Kematian Karena Tuberkulosis pada tahun 2023 tidak berhasil dan mencapai target yaitu 5.00 per 1000 penduduk/jiwa dibandingkan dengan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 2.56 per 1000 penduduk/jiwa.

Kesembilan belas, pencapaian kinerja untuk sasaran Meningkatnya Akses dan mutu Pelayanan Kesehatan Masyarakat melalui indikator Cakupan Penemuan Dan Penanganan Penderita Penyakit DBD dengan capaian tahun 2023 sebesar 100 persen artinya realisasi Cakupan Penemuan Dan Penanganan Penderita Penyakit DBD pada tahun 2023 berhasil dan mencapai target yaitu 100 persen dibandingkan

dengan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 100 persen.

Keduapuluh, pencapaian kinerja untuk sasaran Meningkatnya Akses dan mutu Pelayanan Kesehatan Masyarakat melalui indikator Angka Kejadian Malaria dengan capaian tahun 2023 sebesar 170.83 per 1000 penduduk/jiwa artinya realisasi Angka Kejadian Malaria pada tahun 2023 sangat berhasil dan mencapai target yaitu 0.07 per 1000 penduduk/jiwa dibandingkan dengan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 0.24 per 1000 penduduk/jiwa.

Keduapuluh satu, pencapaian kinerja untuk sasaran Meningkatnya Akses dan mutu Pelayanan Kesehatan Masyarakat melalui indikator Prevalensi Hiv/Aids (Persen) Dari Total Populasi dengan capaian tahun 2023 sebesar -430.00 persen artinya realisasi Prevalensi Hiv/Aids (Persen) Dari Total Populasi pada tahun 2023 tidak berhasil dan mencapai target yaitu 0.06 persen dibandingkan dengan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 0.01persen.

Keduapuluh dua, pencapaian kinerja untuk sasaran Meningkatnya Akses dan mutu Pelayanan Kesehatan Masyarakat melalui indikator Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Masyarakat Miskin dengan capaian tahun 2023 sebesar 350.38 persen artinya realisasi Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Masyarakat Miskin pada tahun 2023 sangat berhasil dan mencapai target yaitu 36.44 persen dibandingkan dengan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 10.40 persen.

Keduapuluh tiga, pencapaian kinerja untuk sasaran Meningkatnya Akses dan mutu Pelayanan Kesehatan Masyarakat melalui indikator Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4 dengan capaian tahun 2023 sebesar 93.75 persen artinya realisasi Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4 pada tahun 2023 cukup berhasil dan mencapai target yaitu 68.60 persen dibandingkan dengan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 73.17 persen.



Keduapuluh empat, pencapaian kinerja untuk sasaran Meningkatnya Akses dan mutu Pelayanan Kesehatan Masyarakat melalui indikator Cakupan Pemberian Makanan Pendamping Asi Pada Anak Usia 6 - 24 Bulan Keluarga Miskin dengan capaian tahun 2023 sebesar 198.29 persen artinya realisasi Cakupan Pemberian Makanan Pendamping Asi Pada Anak Usia 6 - 24 Bulan Keluarga Miskin pada tahun 2023 sangat berhasil dan mencapai target yaitu 100.00 persen dibandingkan dengan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 50.43 persen.

Keduapuluh lima, pencapaian kinerja untuk sasaran Meningkatnya Akses dan mutu Pelayanan Kesehatan Masyarakat melalui indikator Cakupan Pelayanan Dasar Masyarakat Miskin dengan capaian tahun 2023 sebesar 40.86 persen artinya realisasi Cakupan Pelayanan Dasar Masyarakat Miskin pada tahun 2023 tidak berhasil dan mencapai target yaitu 36.44 persen dibandingkan dengan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 36.44 persen.

e. Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya.

Anggaran yang direncanakan pada perjanjian kinerja tahun 2023 untuk pencapaian sasaran Meningkatnya Akses dan mutu Pelayanan Kesehatan Masyarakat adalah sebesar Rp. 250.337.015.352 dari anggaran tersebut terealisasi sebesar Rp. 215.081.189.275 atau 85.92 persen.

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian sasaran Meningkatnya Akses dan mutu Pelayanan Kesehatan Masyarakat ini adalah sebanyak 5 program yaitu:

1. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
2. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
3. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Makanan Minuman
4. Program Penunjang Urusan pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
5. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan

8 Meningkatnya daya tarik destinasi wisata domestik dan mancanegara

Analisis pencapaian Sasaran 8: Meningkatnya daya tarik destinasi wisata domestik dan mancanegara, dapat dijelaskan sebagai berikut:

3 Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Sat Uan	Tahun 2023			
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN	NOT
8 Meningkatnya daya tarik destinasi wisata domestik dan mancanegara	1 Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PAD	%	2.88	2,5	86,81	CB
	2 Pertumbuhan PAD Sektor Pariwisata	%	6.11	-22,16	-362,68	TB
	3 Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara	Orang	395,675	544.139	137,52	SB
	4 Lama Kunjungan Wisata	Hari	3	2	66,67	KB
	5 PAD Sektor Pariwisata	%	6.11	4,9	80,20	CB
RATA RATA CAPAIAN					1,70	TB

Dari 5 indikator kinerja yang mendukung sasaran strategis ini, 1 indikator kinerja mencapai target di bawah 50 persen atau tidak berhasil. Secara umum rata-rata pencapaian sasaran Meningkatnya Pemenuhan pembangunan Infrastruktur Wilayah, dengan predikat Cukup Berhasil mencapai target yaitu rata-rata 1,70 persen.

4 perbandingan antara realisasi kinerja tahun ini dengan tahun sebelumnya.

Jika dilihat realisasi kinerja tahun ini dengan tahun sebelumnya, maka 7 indikator yang menunjang pencapaian Meningkatnya perekonomian daerah melalui perdagangan, Perindustrian, UMKM, dan IKM dalam mendorong pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan dari tahun lalu dan kondisi awal (2023).

INDIKATOR KINERJA		SATUAN	REALISASI		
			2021	2022	2023
1	Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PAD	%	3,41	4,47	2.5
2	Pertumbuhan PAD Sektor Pariwisata	%	5,88	22,48	-22.16
3	Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara	Orang	423.605	682.777	544,139
4	Lama Kunjungan Wisata	Hari	4	4	2
5	PAD Sektor Pariwisata	%	4	4	4.9

5 Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini terhadap target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen RPJMD.

Indikator Kinerja		Satuan	Target (Kondisi Akhir Rpjmd)	Realisasi Kinerja Sd Tahun 2023	Capaian	Not
1	Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PAD	%	3,79	3.46	91.29	J
2	Pertumbuhan PAD Sektor Pariwisata	%	7,86	2.07	26.29	L
3	Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara	Orang	488.084	550173.67	113	J
4	Lama Kunjungan Wisata	Hari	4	3.33	83.33	J
5	PAD Sektor Pariwisata	%	8	4.42	56.26	K

Pada Sasaran strategis 8, Meningkatnya daya tarik destinasi wisata domestik dan mancanegara , terdapat 5 indikator sasaran yang mendukung pencapaian sasaran ini, 3 indikator sasaran tercapai dengan notifikasi hijau yang berarti sudah tercapai/on track/on trend, dan 1 indikator sasaran dengan notifikasi kuning yang berarti kerja keras, 1 indikator sasaran dengan notifikasi merah yang berarti sulit untuk dapat dicapai

6 Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Keberhasilan atau kegagalan pencapaian beberapa indikator sasaran Meningkatnya Pemenuhan pembangunan Infrastruktur Wilayah dapat dijelaskan sebagai berikut:

Satu, pencapaian kinerja untuk sasaran Meningkatnya Pemenuhan pembangunan Infrastruktur Wilayah melalui indikator Indeks Daya saing infrastruktur pada tahun 2023 sebesar 86.81 persen atau Indeks Daya saing infrastruktur pada tahun 2023 cukup berhasil mencapai target yaitu sebesar 2.5 persen dibandingkan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 2,88 persen.



Dua, pencapaian kinerja untuk sasaran Meningkatnya Pemenuhan pembangunan Infrastruktur Wilayah melalui indikator Pertumbuhan PAD Sektor Pariwisata pada tahun 2023 sebesar angka -362.68 atau realisasi Pertumbuhan PAD Sektor Pariwisata pada tahun 2023 tidak berhasil mencapai target yaitu sebesar angka -22.16 dibandingkan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu angka 6.11.



Penyebab terjadinya penurunan capaian indikator dinas pariwisata pemuda dan olahraga kabupaten bulukumba karna kondisi kunjungan dibulan januari sampai maret mengalami penurunan disebabkan karena kondisi cuaca pada saat itu sangat ekstrim sehingga volume sampa di pantai setiap harinya terdapat sampah kiriman dan berita tersebut tersebar di media sosial

Adanya kegiatan nasional 10 juta bendera dalam Kawasan wisata bira dan pada saat itu wisatawan di gratiskan masuk kekawasan wisata bira beberapa hari selama kegiatan tersebut berlangsung.

Tiga, pencapaian kinerja untuk sasaran Meningkatnya Pemenuhan pembangunan Infrastruktur Wilayah melalui indikator Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara pada tahun 2023 sebesar 137.52 persen atau realisasi Indeks Daya saing infrastruktur pada tahun 2023 sangat berhasil mencapai target yaitu sebesar 544,139 orang dibandingkan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 395,675 orang.



Empat, pencapaian kinerja untuk sasaran Meningkatnya Pemenuhan pembangunan Infrastruktur Wilayah melalui indikator Lama Kunjungan Wisata pada tahun 2023 sebesar 66.67 persen atau realisasi Indeks Daya saing infrastruktur pada tahun 2023 kurang berhasil mencapai target yaitu sebesar 2 hari dibandingkan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 3 hari .



Lima, pencapaian kinerja untuk sasaran Meningkatnya Pemenuhan pembangunan Infrastruktur Wilayah melalui indikator PAD Sektor Pariwisata pada tahun 2023 sebesar 80.20 persen atau Indeks Daya saing infrastruktur pada tahun 2023 cukup berhasil mencapai target yaitu sebesar 4.9 persen dibandingkan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 6.11 persen.

Adanya wisata lain yang tidak memungut retribusi seperti pantai panrang luhu dan marrumasa sehingga wisatawan lebih memilih tempat tersebut.

7 Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya.

Anggaran yang direncanakan pada perjanjian kinerja tahun 2023 untuk pencapaian sasaran Meningkatnya perekonomian daerah melalui perdagangan, perindustrian, UMKM dan IKM

dalam mendorong pertumbuhan ekonomi adalah sebesar Rp 4.868.461.350 terealisasi sebesar Rp 4.779.533.692 atau 98,17 persen.

8 Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian sasaran Meningkatnya Produktifitas Generasi Muda (Generasi Emas) ini adalah sebanyak 3 program yaitu:

- a) Program Peningkatan daya tarik destinasi Pariwisata
- b) Program Pemasaran Pariwisata
- c) Program Penembangan Sumber Daya Pariwisata dan ekonomi Kreatif

9 Meningkatnya pemenuhan pembangunan infrastruktur wilayah

Analisis pencapaian Sasaran 9: Meningkatnya pemenuhan pembangunan infrastruktur wilayah , dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2023				Notif
			Target	Realisasi	Capaian		
9 Meningkatnya Pemenuhan pembangunan Infrastruktur Wilayah	1 Indeks Daya saing infrastruktur	Angka	90	90	100		B
	2 Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik	%	0,70	0,43	61,71		KB
	3 Rasio Panjang Jalan Dengan Jumlah Penduduk	%	0,001	0,003	259,00		SB
	4 Persentase Jalan Yang Memiliki Trotoar Dan Drainase/Saluran Pembuangan Air (Minimal 1,5 M)	%	100,00	98,98	98,98		CB
	5 Persentase Luas irigasi dalam kondisi baik	%	81,70	80,92	99,05		CB
	6 Rasio Jaringan Irigasi	%	0,19	10,72	5642,11		SB

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2023

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja		Satuan	Tahun 2023			
					Target	Realisasi	Capaian	Notif
	7	Rasio Rumah Layak Huni	%	0,25	0,23	91,52	CB	
	8	Persentase Pemukiman Yang Tertata	%	74,46	4,13	5,55	TB	
	9	Persentase Lingkungan Permukiman Kumuh	%	12,15	12,16	100,08	SB	
	10	Cakupan Layanan Rumah Layak Huni Yang Terjangkau	%	94,08	60,72	64,54	KB	
	11	Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi	%	84,74	88,34	104,25	SB	
	12	Persentase Penduduk Berakses Air Minum	%	84,96	85,75	100,93	SB	
	13	Persentase Areal Kawasan Kumuh	%	0,00	0,00	100,00	B	
	14	Rasio Bangunan Ber IMB Per Satuan Bangunan	%	20,44	0,42	2,05	TB	
	15	Persentase Luas Lahan Bersertifikat	%	28,06	26,18	93,30	CB	
	16	Penyelesaian Kasus Tanah Negara	%	88,05	88,05	100,00	B	
	17	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Poin	63,45	63,74	100,46	SB	
	18	Penurunan Emisi GRK	Gg CO2-Eq	462952,25	462952,90	100,00	SB	
	19	Indeks Kualitas Air	Poin	58,95	63,74	108,13	SB	
	20	Indeks Kualitas Udara	Poin	84,84	93,82	110,58	SB	
	21	Indeks Kualitas Tutup Lahan	Poin	31,64	28,89	91,31	CB	
	22	Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH d yang diterbitkan oleh	%	100,00	100,00	100,00	B	

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2023

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2023			
				Target	Realisasi	Capaian	Notif
		Pemerintah Daerah kabupaten/ kota					
		23 Terfasilitasi Pendampingan Pengakuan MHA	%	1	1	100,00	B
		24 Terverifikasinya MHA Dan Kearifan Lokal Atau Pengetahuan Tradisional	Kelompok	1	1	100,00	B
		25 Penetapan Hak MHA	Kelompok	1	1	100,00	B
		26 Terfasilitasi Kegiatan Peningkatan Pengetahuan Dan Keterampilan	Kelompok	100	100	100,00	B
		27 Terfasilitasi Penyediaan Sarana/Prasarana	Kelompok	100	100	100,00	B
		28 Terlaksananya Pendidikan Dan Pelatihan Masyarakat	Kelompok	1	1	100,00	B
		29 Terlaksananya Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup	Kelompok	100	100	100,00	B
		30 Pengaduan Masyarakat Terkait Izin Lingkungan, Izin Pplh Dan PUU LH yang Di Terbitkan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota , Lokasi Usaha dan Dampaknya Di Daerah Kabupaten/Kota	sekolah	100	100	100,00	B
		31 Timbulan Sampah Yang Ditangani	%	29,18	63,14	216,39	SB
		32 Persentase Jumlah Sampah Yang Tertangani	%	100,00	94,79	94,79	CB
		33 Operasionalisasi TPA/TPST/SPA di Kabupaten/Kota	%	24,30	75,00	308,64	SB

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2023

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja		Satuan	Tahun 2023				
					Target	Realisasi	Capaian	Notif	
		34	Jumlah Limbah B3 Yang Terkelola Dan Proporsi Limbah B3 Yang Diolah Sesuai Peraturan Perundang-Undangan (Sektor Industri)	Ton/Kg	41,28	35,00	84,79	CB	
		35	Jumlah Perusahaan Yang Menerapkan Sertifikasi SNI ISO 14001	Buah	1,00	1	100,00	B	
		36	Proporsi Tutupan Lahan Terhadap Luas Lahan Keseluruhan	%	33,85	29	85,35	CB	
		37	Proporsi Luas Lahan Kritis Yang Direhabilitasi Terhadap Luas Lahan Keseluruhan	Dok	36,62	36,62	100,00	B	
		38	Dokumen rencana pemanfaatan keanekaragaman hayati	1	0,00	0,00	0,00	TB	
		39	Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis	Unit	3,00	3	100,00	B	
		40	Jumlah arus penumpang angkutan Umum	Unit	12910,7	69248,0	536,4	SB	
		41	Persentase Layanan Angkutan Darat	%	1,17	22,63	1934,19	SB	
		42	Persentase Kepemilikan Kir Angkutan Umum	%	100,00	94,72	95	CB	
		43	Pemasangan Rambu-Rambu	%	68,66	0	0	TB	
		44	Jumlah Orang/Barang Yang Terangkut Angkutan Umum	Orang/Barang	28134	207744	738	SB	
		45	Rasio Ijin Trayek	%	0,01	0,0830	830,00	SB	
		Rata Rata Capaian						303,49	CB

Dari 44 indikator kinerja yang mendukung sasaran strategis ini, 4 indikator kinerja mencapai target di bawah 50 persen atau tidak berhasil. Secara umum rata-rata pencapaian sasaran Meningkatnya Pemenuhan pembangunan Infrastruktur Wilayah, dengan predikat Cukup Berhasil mencapai target yaitu rata-rata 303,49 persen.

2) perbandingan antara realisasi kinerja tahun ini dengan tahun sebelumnya.

Jika dilihat realisasi kinerja tahun ini dengan tahun sebelumnya, maka 6 indikator yang menunjang pencapaian Meningkatnya perekonomian daerah melalui perdagangan, Perindustrian, UMKM, dan IKM dalam mendorong pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan dari tahun lalu dan kondisi awal (2021).

Indikator Kinerja		Satuan	Realisasi		
			2021	2022	2023
1	Indeks Daya saing infrastruktur	Angka	87	89	90
2	Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik	%	0,46	1	0,43
3	Rasio Panjang Jalan Dengan Jumlah Penduduk	%	0,003	0,003	0,003
4	Persentase Jalan Yang Memiliki Trotoar Dan Drainase/Saluran Pembuangan Air (Minimal 1,5 M)	%	0,00	98,97	98,98
5	Persentase Luas irigasi dalam kondisi baik	%	82,91	81,16	80,92
6	Rasio Jaringan Irigasi	%	0,93	0,49	10,72
7	Rasio Rumah Layak Huni	%	0,24	0,44	0,23
8	Persentase Pemukiman Yang Tertata	%	65,44	58,83	4,13
9	Persentase Lingkungan Permukiman Kumuh	%	11,56	9,41	12,16
10	Cakupan Layanan Rumah Layak Huni Yang Terjangkau	%	92,42	92,54	60,72
11	Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi	%	76,35	64,60	88,34
12	Persentase Penduduk Berakses Air Minum	%	84,26	85,48	85,75
13	Persentase Areal Kawasan Kumuh	%	11,08	12,02	0,00
14	Rasio Bangunan Ber IMB Per Satuan Bangunan	%	6,02	0,42	0,42
15	Persentase Luas Lahan Bersertifikat	%	25,74	25,74	26,18
16	Penyelesaian Kasus Tanah Negara	%	75,00	20,00	88,05
17	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Poin	63,22	60,31	63,74
18	Penurunan Emisi GRK	Gg CO2-Eq	46388 0,00	4629 52,25	4629 52,90
19	Indeks Kualitas Air	Poin	61,00	55,00	63,74
20	Indeks Kualitas Udara	Poin	84,64	92,13	93,82
21	Indeks Kualitas Tutup Lahan	Poin	23,56	28,89	28,89
22	Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH d yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/ kota	%	95,93	100,0 0	100,0 0
23	Terfasilitasi Pendampingan Pengakuan MHA	%	1	1	1

**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2023**

Indikator Kinerja		Satuan	Realisasi		
			2021	2022	2023
24	Terverifikasinya MHA Dan Kearifan Lokal Atau Pengetahuan Tradisional	klp	1	1	1
25	Penetapan Hak MHA	klp	1	1	1
26	Terfasilitasi Kegiatan Peningkatan Pengetahuan Dan Keterampilan	klp	100	100	100
27	Terfasilitasi Penyediaan Sarana/Prasarana	klp	100	100	100
28	Terlaksananya Pendidikan Dan Pelatihan Masyarakat	klp	1	1	1
29	Terlaksananya Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup	klp	2	100	100
30	Pengaduan Masyarakat Terkait Izin Lingkungan, Izin Pplh Dan PUU LH yang Di Terbitkan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Lokasi Usaha dan Dampaknya Di Daerah Kabupaten/Kota,	sekolah	100	100	100
31	Timbulan Sampah Yang Ditangani	%	24,95	26,03	63,14
32	Persentase Jumlah Sampah Yang Tertangani	%	86,63	73,13	94,79
33	Operasionalisasi TPA/TPST/SPA di Kabupaten/Kota	%	26,24	74,00	75,00
34	Jumlah Limbah B3 Yang Terkelola Dan Proporsi Limbah B3 Yang Diolah Sesuai Peraturan Perundang-Undangan (Sektor Industri)	Ton/Kg	35,00	35,00	35,00
35	Jumlah Perusahaan Yang Menerapkan Sertifikasi SNI ISO 14001	Buah	1	1	1
36	Proporsi Tutupan Lahan Terhadap Luas Lahan Keseluruhan	%	30	30	29
37	Proporsi Luas Lahan Kritis Yang Direhabilitasi Terhadap Luas Lahan Keseluruhan	Dok	32,36	32,36	36,62
38	Dokumen rencana pemanfaatan keanekaragaman hayati	1	0,00	0,00	0,00
39	Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis	Unit	3	3	3
40	Jumlah arus penumpang angkutan Umum	Unit	17500,0	9125,0	69248,0
41	Persentase Layanan Angkutan Darat	%	0,35	1,15	22,63
42	Persentase Kepemilikan Kir Angkutan Umum	%	0	98,67	94,72
43	Pemasangan Rambu-Rambu	%	0	0	0
44	Jumlah Orang/ Barang Yang Terangkut Angkutan Umum	Orang/Barang	12000	39949	207744
45	Rasio Ijin Trayek	%	0,0001	0,0005	0,0830

3) Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini terhadap target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen RPJMD.

Indikator Kinerja		Satuan	Target (Kondisi Akhir Rpjmd)	Realisasi Kinerja Sd Tahun 2023	Capaian	Not
1	Indeks Daya saing infrastruktur	Angka	95	88,67	93,33	J
2	Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik	%	1	0,59	59,50	K

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2023

	Indikator Kinerja	Satuan	Target (Kondisi Akhir Rpjmd)	Realisasi Kinerja Sd Tahun 2023	Capaian	Not
3	Rasio Panjang Jalan Dengan Jumlah Penduduk	%	0	0,00	103,41	J
4	Persentase Jalan Yang Memiliki Trotoar Dan Drainase/Saluran Pembuangan Air (Minimal 1,5 M)	%	100	65,98	65,98	K
5	Persentase Luas irigasi dalam kondisi baik	%	84,43	81,66	96,72	J
6	Rasio Jaringan Irigasi	%	0,19	4,05	2129,82	J
7	Rasio Rumah Layak Huni	%	0,25	0,30	120,11	J
8	Persentase Pemukiman Yang Tertata	%	83	42,80	51,48	K
9	Persentase Lingkungan Permukiman Kumuh	%	13	11,04	82,15	J
10	Cakupan Layanan Rumah Layak Huni Yang Terjangkau	%	95	81,89	86,34	J
11	Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi	%	88	76,43	86,78	J
12	Persentase Penduduk Berakses Air Minum	%	85	85,16	100,06	J
13	Persentase Areal Kawasan Kumuh	%	0	7,70	0,00	L
14	Rasio Bangunan Ber IMB Per Satuan Bangunan	%	87	2,29	2,64	L
15	Persentase Luas Lahan Bersertifikat	%	32,9232	25,89	78,63	J
16	Penyelesaian Kasus Tanah Negara	%	100,00	61,02	61,02	K
17	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Poin	65,08	62,42	95,93	J
18	Penurunan Emisi GRK	Gg CO2 -Eq	459.259,72	463261,72	100,87	J
19	Indeks Kualitas Air	Poin	59,25	59,91	101,12	J
20	Indeks Kualitas Udara	Poin	85,14	90,20	105,94	J
21	Indeks Kualitas Tutup Lahan	Poin	37,97	27,11	0,00	L
22	Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH d yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/ kota	%	100	98,64	98,64	J
23	Terfasilitasi Pendampingan Pengakuan MHA	%	1	1,00	100,00	J
24	Terverifikasinya MHA Dan Kearifan Lokal Atau Pengetahuan Tradisional	Kelompok	1	1,00	100,00	J
25	Penetapan Hak MHA	Kelompok	1	1,00	100,00	J

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2023

Indikator Kinerja		Satuan	Target (Kondisi Akhir Rpjmd)	Realisasi Kinerja Sd Tahun 2023	Capaian	Not
26	Terfasilitasi Kegiatan Peningkatan Pengetahuan Dan Keterampilan	Kelompok	100	100,00	100,00	J
27	Terfasilitasi Penyediaan Sarana/Prasarana	Kelompok	100	100,00	100,00	J
28	Terlaksananya Pendidikan Dan Pelatihan Masyarakat	Kelompok	1	1,00	100,00	J
29	Terlaksananya Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup	Kelompok	100	67,33	67,33	K
30	Pengaduan Masyarakat Terkait Izin Lingkungan, Izin Pplh Dan PUU LH yang Di Terbitkan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Lokasi Usaha dan Dampaknya Di Daerah Kabupaten/Kota,	sekolah	100	100,00	100,00	J
31	Timbulan Sampah Yang Ditangani	%	33,87	38,04	112,32	J
32	Persentase Jumlah Sampah Yang Tertangani	%	100,00	84,85	84,85	J
33	Operasionalisasi TPA/TPST/SPA di Kabupaten/Kota	%	22,16	58,41	263,55	J
34	Jumlah Limbah B3 Yang Terkelola Dan Proporsi Limbah B3 Yang Diolah Sesuai Peraturan Perundang-Undangan (Sektor Industri)	Ton/Kg	48,23	35,00	72,58	J
35	Jumlah Perusahaan Yang Menerapkan Sertifikasi SNI ISO 14001	Buah	2	1,00	50,00	K
36	Proporsi Tutupan Lahan Terhadap Luas Lahan Keseluruhan	%	38	29,54	77,17	J
37	Proporsi Luas Lahan Kritis Yang Direhabilitasi Terhadap Luas Lahan Keseluruhan	Dok	41,34	33,78	0,00	L
38	Dokumen rencana pemanfaatan keanekaragaman hayati	1	0,00	0,00	0,00	L
39	Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis	Unit	3	3,00	100,00	J
40	Jumlah arus penumpang angkutan Umum	Unit	10075,1	31957,67	317,19	J
41	Persentase Layanan Angkutan Darat	%	1,03	8,05	780,44	J
42	Persentase Kepemilikan Kir Angkutan Umum	%	100	64,46	64,46	K
43	Pemasangan Rambu-Rambu	%	76,08	0,00	0,00	L

	Indikator Kinerja	Satuan	Target (Kondisi Akhir Rpjmd)	Realisasi Kinerja Sd Tahun 2023	Capaian	Not
44	Jumlah Orang/ Barang Yang Terangkut Angkutan Umum	Orang/ Barang	30437	86564,42	284,41	J
45	Rasio Ijin Trayek	%	0,02	0,03	170,02	J

Pada Sasaran strategis 9, Meningkatnya Pemenuhan pembangunan Infrastruktur Wilayah , terdapat 44 indikator sasaran yang mendukung pencapaian sasaran ini, 32 indikator sasaran tercapai dengan notifikasi hijau yang berarti sudah tercapai/on track/on trend, dan 7 indikator sasaran dengan notifikasi kuning yang berarti kerja keras, 5 indikator sasaran dengan notifikasi merah yang berarti sulit untuk dapat dicapai

4) Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Keberhasilan atau kegagalan pencapaian beberapa indikator sasaran Meningkatnya Pemenuhan pembangunan Infrastruktur Wilayah dapat dijelaskan sebagai berikut:

Satu, pencapaian kinerja untuk sasaran Meningkatnya Pemenuhan pembangunan Infrastruktur Wilayah melalui indikator Indeks Daya saing infrastruktur pada tahun 2023 sebesar angka 100 atau Indeks Daya saing infrastruktur pada tahun 2023 berhasil mencapai target yaitu sebesar angka 90 dibandingkan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu angka 90.

Dua, pencapaian kinerja untuk sasaran Meningkatnya Pemenuhan pembangunan Infrastruktur Wilayah melalui indikator Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik pada tahun 2023 sebesar 62,71 persen atau realisasi Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik pada tahun 2023 kurang berhasil mencapai target yaitu sebesar 0,43 persen dibandingkan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 0,70 persen.



Tiga, pencapaian kinerja untuk sasaran Meningkatnya Pemenuhan pembangunan Infrastruktur Wilayah melalui indikator Rasio Panjang Jalan Dengan Jumlah Penduduk pada tahun 2023 sebesar 259 persen atau realisasi Rasio Panjang Jalan Dengan Jumlah Penduduk pada tahun 2023 sangat berhasil mencapai target yaitu sebesar 0,003 persen dibandingkan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 0,001 persen.

Empat, pencapaian kinerja untuk sasaran Meningkatnya Pemenuhan pembangunan Infrastruktur Wilayah melalui indikator Persentase Jalan Yang Memiliki Trotoar Dan Drainase/Saluran Pembuangan Air



(Minimal 1,5 M) pada tahun 2023 sebesar 98,98 persen atau realisasi Persentase Jalan Yang Memiliki Trotoar Dan Drainase/Saluran Pembuangan Air (Minimal 1,5 M) pada tahun 2023 cukup berhasil mencapai target yaitu sebesar 98,98 persen dibandingkan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 100 persen.

Lima, pencapaian kinerja untuk sasaran Meningkatnya Pemenuhan pembangunan Infrastruktur Wilayah melalui indikator Persentase Luas irigasi dalam kondisi baik pada tahun 2023 sebesar 99,05 persen atau realisasi Persentase Luas irigasi dalam kondisi baik pada tahun 2023 cukup berhasil mencapai target yaitu sebesar 80,92 persen dibandingkan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 81,70 persen.

Enam, pencapaian kinerja untuk sasaran Meningkatnya Pemenuhan pembangunan Infrastruktur Wilayah melalui indikator Rasio Jaringan Irigasi pada tahun 2023 sebesar 5642,11 persen



atau realisasi Rasio Jaringan Irigasi pada tahun 2023 sangat berhasil mencapai target yaitu sebesar 10,72 persen dibandingkan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 0,19 persen.

Tujuh, pencapaian kinerja untuk sasaran Meningkatnya Pemenuhan pembangunan Infrastruktur Wilayah melalui indikator Rasio Rumah Layak Huni pada tahun 2023 sebesar 91,52 persen atau realisasi Rasio Rumah Layak Huni pada tahun 2023 cukup berhasil mencapai target yaitu sebesar 0,23 persen dibandingkan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 0,25 persen.

Delapan, pencapaian kinerja untuk sasaran Meningkatnya Pemenuhan pembangunan Infrastruktur Wilayah melalui indikator Persentase Pemukiman Yang Tertata pada tahun 2023 sebesar 5,55 persen atau realisasi Persentase Pemukiman Yang Tertata pada tahun 2023 tidak berhasil mencapai target yaitu sebesar 4,13 persen dibandingkan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 74,46 persen.

Sembilan, pencapaian kinerja untuk sasaran Meningkatnya Pemenuhan pembangunan Infrastruktur Wilayah melalui Persentase Lingkungan Permukiman Kumuh pada tahun 2023 sebesar 100,08 persen atau realisasi Persentase Lingkungan Permukiman Kumuh pada tahun 2023 sangat berhasil mencapai target yaitu sebesar 12,16 persen dibandingkan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 12,15 persen.

Sepuluh, pencapaian kinerja untuk sasaran Meningkatnya Pemenuhan pembangunan Infrastruktur Wilayah melalui indikator Cakupan Layanan Rumah Layak Huni Yang Terjangkaupada tahun 2023 sebesar 64,54 persen atau realisasi Cakupan Layanan Rumah Layak Huni Yang Terjangkau pada tahun 2023 kurang berhasil mencapai target yaitu sebesar 60,72 persen dibandingkan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 94,08 persen.

Sebelas, pencapaian kinerja untuk sasaran Meningkatnya Pemenuhan pembangunan Infrastruktur Wilayah melalui indikator Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi tahun 2023 sebesar 104,25 persen atau realisasi Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi pada tahun 2023 kurang berhasil mencapai target



yaitu sebesar 88,34 persen dibandingkan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 84,74 persen.

Dua belas, pencapaian kinerja untuk sasaran Meningkatnya Pemenuhan pembangunan Infrastruktur Wilayah melalui indikator Persentase Penduduk Berakses Air Minum pada tahun 2023 sebesar 100,93 persen atau realisasi Persentase Penduduk Berakses Air Minum pada tahun 2023 sangat berhasil mencapai target yaitu sebesar 85,75 persen dibandingkan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 84,96 persen.

Tiga belas, pencapaian kinerja untuk sasaran Meningkatnya Pemenuhan pembangunan Infrastruktur Wilayah melalui indikator Persentase Areal Kawasan Kumuh pada tahun 2023 sebesar 0 persen atau realisasi Cakupan Layanan Rumah Layak Huni Yang Terjangkau pada tahun 2023 tidak berhasil mencapai target yaitu sebesar 0 persen dibandingkan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 0 persen.

Empat belas, pencapaian kinerja untuk sasaran Meningkatnya Pemenuhan pembangunan Infrastruktur Wilayah melalui indikator Rasio Bangunan Ber IMB Per Satuan Bangunan pada tahun 2023 sebesar 2,05 persen atau realisasi Rasio Bangunan Ber IMB Per Satuan Bangunan Yang Terjangkau pada tahun 2023 tidak berhasil mencapai target yaitu sebesar 0,42 persen dibandingkan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 20,44 persen.

Lima belas, pencapaian kinerja untuk sasaran Meningkatnya Pemenuhan pembangunan Infrastruktur Wilayah melalui indikator Persentase Luas Lahan Bersertifikat pada tahun 2023



sebesar 93,30 persen atau realisasi Cakupan Layanan Rumah Layak Huni Yang Terjangkau pada tahun 2023 cukup berhasil mencapai target yaitu sebesar 26,18 persen dibandingkan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 28,06 persen.

Enam belas, pencapaian kinerja untuk sasaran Meningkatnya Pemenuhan pembangunan Infrastruktur Wilayah melalui indikator Penyelesaian Kasus Tanah Negara pada tahun 2023 sebesar 100 persen atau realisasi Penyelesaian Kasus Tanah Negara pada tahun 2023 berhasil mencapai target yaitu sebesar 88,05 persen dibandingkan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 88,05 persen.

Tujuh belas, pencapaian kinerja untuk sasaran Meningkatnya Pemenuhan pembangunan Infrastruktur Wilayah melalui Indeks Kualitas Lingkungan Hidup pada tahun 2023 sebesar 100,46 persen atau realisasi Indeks Kualitas Lingkungan Hidup pada tahun 2023 sangat berhasil mencapai target yaitu sebesar 63,74 persen dibandingkan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 63,45 persen.

Delapan belas, pencapaian kinerja untuk sasaran Meningkatnya Pemenuhan pembangunan Infrastruktur Wilayah Penurunan Emisi GRK pada tahun 2023 sebesar 100,00 persen atau realisasi Penurunan Emisi GRK pada tahun 2023 sangat berhasil mencapai target yaitu sebesar 462952,90 Gg CO₂-Eq dibandingkan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 462952,25 Gg CO₂-Eq.

Sembilan belas, pencapaian kinerja untuk sasaran Meningkatnya Pemenuhan pembangunan Infrastruktur Wilayah melalui Indeks Kualitas Air pada tahun 2023 sebesar 108,13 poin atau Indeks Kualitas Air pada tahun 2023 sangat berhasil mencapai target yaitu sebesar 63,74 poin persen dibandingkan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 58,95 poin.

Dua puluh, pencapaian kinerja untuk sasaran Meningkatnya Pemenuhan pembangunan Infrastruktur Wilayah melalui Indeks Kualitas Udara pada tahun 2023 sebesar 110,58 persen atau realisasi Indeks Kualitas Udara pada tahun 2023 sangat berhasil mencapai target yaitu sebesar 93,82 Poin dibandingkan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 84,84 Poin.

Dua puluh satu, pencapaian kinerja untuk sasaran Meningkatnya Pemenuhan pembangunan Infrastruktur Wilayah melalui Indeks Kualitas Tutupan Lahan pada tahun

2023 sebesar 91,31persen atau realisasi Indeks Kualitas Tutupan Lahan pada tahun 2023 cukup berhasil mencapai target yaitu sebesar 28,89 Poin dibandingkan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 31,64 Poin.

Dua puluh dua, pencapaian kinerja untuk sasaran Meningkatnya Pemenuhan pembangunan Infrastruktur Wilayah melalui Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH d yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/ kota pada tahun 2023 sebesar 100,00 persen atau realisasi Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH d yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/ kota pada tahun 2023 cukup berhasil mencapai target yaitu sebesar 100,00 persen dibandingkan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 100,00 persen.

Dua puluh tiga, pencapaian kinerja untuk sasaran Meningkatnya Pemenuhan pembangunan Infrastruktur Wilayah melalui Terfasilitasi Pendampingan Pengakuan MHA pada tahun 2023 sebesar 100 persen atau realisasi Terfasilitasi Pendampingan Pengakuan MHA pada tahun 2023 berhasil mencapai target yaitu sebesar 1 persen dibandingkan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 1 persen.

Dua puluh empat, pencapaian kinerja untuk sasaran Meningkatnya Pemenuhan pembangunan Infrastruktur Wilayah melalui indikator Terverifikasinya MHA Dan Kearifan Lokal Atau Pengetahuan Tradisional pada tahun 2023 sebesar 100 persen atau realisasi Terverifikasinya MHA Dan Kearifan Lokal Atau Pengetahuan Tradisional pada tahun 2023 berhasil mencapai target yaitu sebesar 1 klp dibandingkan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 1 klp.

Dua puluh lima, pencapaian kinerja untuk sasaran Meningkatnya Pemenuhan pembangunan Infrastruktur Wilayah melalui indikator Penetapan Hak MHA pada tahun 2023 sebesar 100 persen atau realisasi Penetapan Hak MHA pada tahun 2023 berhasil mencapai target yaitu sebesar 1 klp

dibandingkan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 1 klp.

Dua puluh enam, pencapaian kinerja untuk sasaran Meningkatnya Pemenuhan pembangunan Infrastruktur Wilayah melalui indikator Terfasilitasi Kegiatan Peningkatan Pengetahuan Dan Keterampilan pada tahun 2023 sebesar 100 persen atau realisasi Terfasilitasi Kegiatan Peningkatan Pengetahuan Dan Keterampilan pada tahun 2023 berhasil mencapai target yaitu sebesar 100 klp dibandingkan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 100 klp.

Dua puluh tujuh, pencapaian kinerja untuk sasaran Meningkatnya Pemenuhan pembangunan Infrastruktur Wilayah melalui indikator Terfasilitasi Penyediaan Sarana/Prasarana pada tahun 2023 sebesar 100 persen atau realisasi Terfasilitasi Penyediaan Sarana/Prasarana pada tahun 2023 berhasil mencapai target yaitu sebesar 100 klp dibandingkan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 100 klp.

Dua puluh delapan, pencapaian kinerja untuk sasaran Meningkatnya Pemenuhan pembangunan Infrastruktur Wilayah melalui indikator Terlaksananya Pendidikan Dan Pelatihan Masyarakat pada tahun 2023 sebesar 100 persen atau realisasi Terlaksananya Pendidikan Dan Pelatihan Masyarakat pada tahun 2023 cukup berhasil mencapai target yaitu sebesar 1 klp dibandingkan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 1 klp.

Dua puluh sembilan, pencapaian kinerja untuk sasaran Meningkatnya Pemenuhan pembangunan Infrastruktur Wilayah melalui indikator Terlaksananya Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup pada tahun 2023 sebesar 100 persen atau realisasi Terlaksananya Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup pada tahun 2023 cukup berhasil mencapai target yaitu sebesar 100 klp dibandingkan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 100 klp.



Tiga puluh, pencapaian kinerja untuk sasaran Meningkatnya Pemenuhan pembangunan Infrastruktur Wilayah melalui indikator Pengaduan Masyarakat Terkait Izin Lingkungan, Izin Pplh Dan PUU LH yang Di Terbitkan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Lokasi Usaha dan Dampaknya Di Daerah Kabupaten/Kota pada tahun 2023 sebesar 100 persen atau realisasi Pengaduan Masyarakat Terkait Izin Lingkungan, Izin Pplh Dan PUU LH yang Di Terbitkan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Lokasi Usaha dan Dampaknya Di Daerah Kabupaten/Kota pada tahun 2023 cukup berhasil mencapai target yaitu sebesar 100 sekolah dibandingkan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 100 sekolah.

Tiga puluh satu, pencapaian kinerja untuk sasaran Meningkatnya Pemenuhan pembangunan Infrastruktur Wilayah melalui indikator Timbulan Sampah Yang Ditangani pada tahun 2023 sebesar 216,39 persen atau realisasi Timbulan Sampah Yang Ditangani pada tahun 2023 cukup berhasil mencapai target yaitu sebesar 63,14 persen dibandingkan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 29,18 persen.

Tiga puluh dua, pencapaian kinerja untuk sasaran Meningkatnya Pemenuhan pembangunan Infrastruktur Wilayah melalui indikator Persentase Jumlah Sampah Yang Tertangani pada



tahun 2023 sebesar 94,79 persen atau realisasi Persentase Jumlah Sampah Yang Tertangani pada tahun 2023 cukup berhasil mencapai target yaitu sebesar 94,79 persen dibandingkan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 100,00 persen.

Tiga puluh tiga, pencapaian kinerja untuk sasaran Meningkatnya Pemenuhan pembangunan Infrastruktur Wilayah melalui indikator Operasionalisasi TPA/TPST/SPA di Kabupaten/Kota pada tahun



2023 sebesar 308,64 persen atau realisasi Operasionalisasi TPA/TPST/SPA di Kabupaten/Kota pada tahun 2023 sangat berhasil mencapai target yaitu sebesar 75,00 persen dibandingkan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 24,30 persen.

Tiga puluh empat, pencapaian kinerja untuk sasaran Meningkatnya Pemenuhan pembangunan Infrastruktur Wilayah melalui indikator Jumlah Limbah B3 Yang Terkelola Dan Proporsi Limbah B3 Yang Diolah Sesuai Peraturan Perundang-Undangan (Sektor Industri) pada tahun 2023 sebesar 84,79 persen atau realisasi Jumlah Limbah B3 Yang Terkelola Dan Proporsi Limbah B3 Yang Diolah Sesuai Peraturan Perundang-Undangan (Sektor Industri) pada tahun 2023 cukup berhasil mencapai target yaitu sebesar 35,00 Ton/Kg dibandingkan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 41,28 Ton/Kg.

Tiga puluh lima, pencapaian kinerja untuk sasaran Meningkatnya Pemenuhan pembangunan Infrastruktur Wilayah melalui indikator Jumlah Perusahaan Yang Menerapkan Sertifikasi SNI ISO 14001 pada tahun 2023 sebesar 100 persen atau realisasi Jumlah Perusahaan Yang Menerapkan Sertifikasi SNI ISO 14001 pada tahun 2023 berhasil mencapai target yaitu sebesar 1 buah dibandingkan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 1 buah.

Tiga puluh enam, pencapaian kinerja untuk sasaran Meningkatnya Pemenuhan pembangunan Infrastruktur Wilayah melalui indikator Proporsi Tutupan Lahan Terhadap Luas Lahan Keseluruhan pada tahun 2023 sebesar 85,35 persen atau realisasi Proporsi Tutupan Lahan Terhadap Luas Lahan Keseluruhan pada tahun 2023 cukup berhasil mencapai

target yaitu sebesar 29 persen dibandingkan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 33,85 persen.

Tiga puluh tujuh, pencapaian kinerja untuk sasaran Meningkatnya Pemenuhan pembangunan Infrastruktur Wilayah melalui indikator Proporsi Luas Lahan Kritis Yang Direhabilitasi Terhadap Luas Lahan Keseluruhan pada tahun 2023 sebesar 100,00 persen atau realisasi Proporsi Luas Lahan Kritis Yang Direhabilitasi Terhadap Luas Lahan Keseluruhan pada tahun 2023 -berhasil mencapai target yaitu sebesar 36,62 dokumen dibandingkan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 36,62 dokumen.

Tiga puluh delapan, pencapaian kinerja untuk sasaran Meningkatnya Pemenuhan pembangunan Infrastruktur Wilayah melalui indikator Dokumen rencana pemanfaatan keanekaragaman hayati pada tahun 2023 sebesar 0 persen atau realisasi Dokumen rencana pemanfaatan keanekaragaman hayati pada tahun 2023 cukup berhasil mencapai target yaitu sebesar 0 persen dibandingkan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 0 persen.

Tiga puluh sembilan, pencapaian kinerja untuk sasaran Meningkatnya Pemenuhan pembangunan Infrastruktur Wilayah melalui indikator Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis pada tahun 2023 sebesar 100 persen atau realisasi Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis pada tahun 2023 cukup berhasil mencapai target yaitu sebesar 3 unit dibandingkan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 3 unit.



Empat puluh, pencapaian kinerja untuk sasaran Meningkatnya Pemenuhan pembangunan Infrastruktur Wilayah melalui indikator Jumlah arus penumpang angkutan Umum pada tahun 2023 sebesar 536,4 persen atau realisasi Jumlah arus penumpang angkutan Umum pada tahun 2023 sangat berhasil mencapai target yaitu



sebesar 69248,0 persen dibandingkan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 12910,7 persen.

Empat puluh satu, pencapaian kinerja untuk sasaran Meningkatnya Pemenuhan pembangunan Infrastruktur Wilayah melalui indikator Persentase Layanan Angkutan Darat pada tahun 2023 sebesar 1934,19 persen atau realisasi Dokumen rencana pemanfaatan keanekaragaman hayati pada tahun 2023 cukup berhasil mencapai target yaitu sebesar 22,63 persen dibandingkan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 1,17 persen.

Empat puluh dua, pencapaian kinerja untuk sasaran Meningkatnya Pemenuhan pembangunan Infrastruktur Wilayah melalui indikator Persentase Kepemilikan Kir Angkutan Umum pada tahun 2023 sebesar 95 persen atau realisasi Persentase Kepemilikan Kir Angkutan Umum pada tahun 2023 sangat berhasil mencapai target yaitu sebesar 94,72 persen dibandingkan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 100,00 persen.

Empat puluh tiga, pencapaian kinerja untuk sasaran Meningkatnya Pemenuhan pembangunan Infrastruktur Wilayah melalui indikator Pemasangan Rambu-Rambu pada tahun 2023 sebesar 0 persen atau realisasi Pemasangan Rambu-Rambu pada tahun 2023 cukup berhasil mencapai target yaitu sebesar 0 persen dibandingkan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 66.01persen.

Empat puluh empat, pencapaian kinerja untuk sasaran Meningkatnya Pemenuhan pembangunan Infrastruktur Wilayah melalui indikator Jumlah Orang/ Barang Yang Terangkut Angkutan Umum pada tahun 2023 sebesar 738 persen atau realisasi Jumlah Orang/ Barang Yang Terangkut Angkutan Umum pada tahun 2023 sangat berhasil mencapai target yaitu sebesar 207.744 Orang/Barang dibandingkan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 28.134 Orang/Barang.

Empat puluh lima, pencapaian kinerja untuk sasaran Meningkatnya Pemenuhan pembangunan Infrastruktur Wilayah melalui indikator Rasio Ijin Trayek pada tahun 2023 sebesar 830,00 persen atau realisasi Rasio Ijin Trayek pada

tahun 2023 tidak berhasil mencapai target yaitu sebesar 0,0830 persen dibandingkan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 0,01 persen.

5) Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya.

Anggaran yang direncanakan pada perjanjian kinerja tahun 2023 untuk pencapaian sasaran Meningkatnya perekonomian daerah melalui perdagangan, perindustrian, UMKM dan IKM dalam mendorong pertumbuhan ekonomi adalah sebesar Rp 211.031.812.083 terealisasi sebesar Rp 182.942.270.304 atau 86,69 persen.

6) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian sasaran Meningkatnya Produktifitas Generasi Muda (Generasi Emas) ini adalah sebanyak 15 program yaitu:

1. Program Pengelolaan Dan Pengembangan sistem Air Limbah
2. Program Pengembangan Jasa Konstruksi
3. Program Penyelenggaraan Penataan ruang
4. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase
5. Program Penyelenggaraan Jalan
6. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)
7. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
8. Program Kawasan Permukiman
9. Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (Psu)
10. Program Pengelolaan Izin Membuka Tanah
11. Program Pengembangan Perumahan
12. Program Penataan Bangunan Gedung
13. Program Pengelolaan Persampahan
14. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)
15. Program Perencanaan Lingkungan Hidup
16. Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau kerusakan Lingkungan Hidup

17. Program Pengendalian Bahan Berbahaya Danberacun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Danberacun (Limbah B3)
18. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk masyarakat
19. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan hidup
20. Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayatidan Ekosistemnya
21. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Llaj)

10 Meningkatnya perekonomian daerah melalui perdagangan, Perindustrian, UMKM, dan IKM dalam mendorong pertumbuhan ekonomi

Analisis pencapaian Sasaran 10: Meningkatnya perekonomian daerah melalui perdagangan, Perindustrian, UMKM, dan IKM dalam mendorong pertumbuhan ekonomi , dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja		Sat	Tahun 2022			
					Tar Get	Real Isasi	Cap Aian	Notif
10	Meningkatnya perekonomian daerah melalui perdagangan, Perindustrian, UMKM, dan IKM dalam mendorong pertumbuhan ekonomi	1	Kontribusi Sektor Perdagangan dan Industri Terhadap PDRB	%	24	6,54	26,73	TB
		2	Pertumbuhan PDRB sektor Perdagangan dan Industri	%	11	5	46,96	TB
		3	Persentase koperasi aktif	%	75,21	67,68	89,99	CB
		4	Persentase Usaha Mikro Dan Kecil	%	98,97	97,55	98,57	CB
		5	Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal	%	0,72	0,45	62,50	KB
		6	Jumlah Pasar	Unit	43	43,00	100,00	B
		7	Cakupan bina klppengrajin	%	0,18	0,57	316,67	SB
Rata Rata Capaian							105.91	SB

Dari 7 indikator kinerja yang mendukung sasaran strategis ini, 2 indikator kinerja mencapai target di bawah 50 persen atau tidak berhasil. Secara umum rata-rata pencapaian sasaran Meningkatnya perekonomian daerah melalui perdagangan, Perindustrian, UMKM, dan IKM dalam mendorong pertumbuhan ekonomi , dengan predikat Sangat Berhasil mencapai target yaitu rata-rata 105.91 persen.

2. perbandingan antara realisasi kinerja tahun ini dengan tahun sebelumnya.

Jika dilihat realisasi kinerja tahun ini dengan tahun sebelumnya, maka 3 indikator yang menunjang pencapaian Meningkatnya perekonomian daerah melalui perdagangan, Perindustrian, UMKM, dan IKM dalam mendorong pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan dari tahun lalu dan kondisi awal (2023).

INDIKATOR KINERJA		SATUAN	REALISASI		
			2021	2022	2023
1	Kontribusi Sektor Perdagangan dan Industri Terhadap PDRB	%	23	12	6,54
2	Pertumbuhan PDRB sektor Perdagangan dan Industri	%	12	7	5
3	Persentase koperasi aktif	%	70,28	67,80	67,68
4	Persentase Usaha Mikro Dan Kecil	%	97,99	97,99	97,55
5	Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal	%	0,85	0,28	0,45
6	Jumlah Pasar	Unit	43	40,00	43,00
7	Cakupan bina klp pengrajin	%	0,13	0,56	0,57

3. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini terhadap target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen RPJMD.

Indikator Kinerja		Satuan	Target (Kondisi Akhir Rpjmd)	Realisasi Kinerja Sd Tahun 2023	Capaian	Not
1	Kontribusi Sektor Perdagangan dan Industri Terhadap PDRB	%	26	17,86	67,84	K
2	Pertumbuhan PDRB sektor Perdagangan dan Industri	%	10	8,00	78,13	J
3	Persentase koperasi aktif	%	76,34	68,59	89,84	J
4	Persentase Usaha Mikro Dan Kecil	%	99,85	97,84	97,99	J
5	Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal	%	0,8	0,53	65,83	K
6	Jumlah Pasar	Unit	43	42,00	97,67	J
7	Cakupan bina kelompok pengrajin	%	0,224	0,42	187,50	J

Pada Sasaran strategis 10, Meningkatnya perekonomian daerah melalui perdagangan, Perindustrian, UMKM, dan IKM dalam mendorong pertumbuhan ekonomi , terdapat 7 indikator sasaran yang mendukung pencapaian sasaran ini, 5 indikator sasaran tercapai dengan notifikasi hijau yang berarti sudah tercapai/on track/on trend, dan 2 indikator sasaran dengan notifikasi kuning yang berarti kerja keras, 0 indikator

sasaran dengan notifikasi merah yang berarti sulit untuk dapat dicapai

4. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Keberhasilan atau kegagalan pencapaian beberapa indikator sasaran Meningkatnya perekonomian daerah melalui perdagangan, Perindustrian, UMKM, dan IKM dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dapat dijelaskan sebagai berikut:

Satu, pencapaian kinerja untuk sasaran Meningkatnya perekonomian daerah melalui perdagangan, Perindustrian, UMKM, dan IKM dalam mendorong pertumbuhan ekonomi melalui indikator Kontribusi Sektor Perdagangan dan Industri Terhadap PDRB pada tahun 2023 sebesar 26,73 persen atau realisasi Kontribusi Sektor Perdagangan dan Industri Terhadap PDRB pada tahun 2023 tidak berhasil mencapai target yaitu sebesar 6,54 persen dibandingkan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 24.47 persen.



Dua, pencapaian kinerja untuk sasaran Meningkatnya perekonomian daerah melalui perdagangan, Perindustrian, UMKM, dan IKM dalam mendorong pertumbuhan ekonomi melalui indikator Pertumbuhan PDRB sektor Perdagangan dan Industri pada tahun 2023 sebesar 46,96 persen atau realisasi Pertumbuhan PDRB sektor Perdagangan dan Industri pada tahun 2023 kurang berhasil mencapai target yaitu sebesar 5,09 persen dibandingkan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 10,84 persen.

Tiga, pencapaian kinerja untuk sasaran Meningkatnya perekonomian daerah melalui perdagangan, Perindustrian, UMKM, dan IKM dalam mendorong pertumbuhan ekonomi melalui indikator Persentase koperasi aktif pada tahun 2023 sebesar 89,99



persen atau realisasi Persentase koperasi aktif pada tahun 2023 cukup berhasil mencapai target yaitu sebesar 67,68 persen dibandingkan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 75,21 persen.

Empat, pencapaian kinerja untuk sasaran Meningkatnya perekonomian daerah melalui perdagangan, Perindustrian, UMKM, dan IKM dalam mendorong pertumbuhan ekonomi melalui Persentase Usaha Mikro Dan Kecil pada tahun 2023 sebesar 98,57 persen atau realisasi Persentase Usaha Mikro Dan Kecil pada tahun 2023 cukup berhasil mencapai target yaitu sebesar 97,55 persen dibandingkan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 98,97 persen.

Lima, pencapaian kinerja untuk sasaran Meningkatnya perekonomian daerah melalui perdagangan, Perindustrian, UMKM, dan IKM dalam mendorong pertumbuhan ekonomi melalui indikator Cakupan bina klppedagang/usaha informal pada tahun 2023 sebesar 62,50 persen atau realisasi Cakupan bina klp pedagang/usaha informal pada tahun 2023 kurang berhasil mencapai target yaitu sebesar 0,45 persen dibandingkan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 0,72 persen.



Enam, pencapaian kinerja untuk sasaran Meningkatnya perekonomian daerah melalui perdagangan, Perindustrian, UMKM, dan IKM dalam mendorong pertumbuhan ekonomi melalui indikator Jumlah Pasar pada tahun 2023 sebesar 100,00 persen atau realisasi Indeks Pembangunan Pemuda pada tahun 2023 berhasil mencapai target yaitu sebesar 43,00 persen dibandingkan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 43 persen.

Tujuh, pencapaian kinerja untuk sasaran Meningkatnya perekonomian daerah melalui perdagangan, Perindustrian, UMKM, dan IKM dalam mendorong pertumbuhan ekonomi melalui indikator Cakupan bina klppengrajin pada tahun 2023 sebesar 316,67 persen atau realisasi Indeks Pembangunan Pemuda pada tahun 2023 sangat berhasil mencapai target yaitu sebesar 0,57 persen dibandingkan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 0,18 persen.



5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya.

Anggaran yang direncanakan pada perjanjian kinerja tahun 2023 untuk pencapaian sasaran Meningkatnya perekonomian daerah melalui perdagangan, perindustrian, UMKM dan IKM dalam mendorong pertumbuhan ekonomi adalah sebesar Rp 43.732.566.300 terealisasi sebesar Rp 40.873.955.873 atau 93.46 persen.

6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian sasaran Meningkatnya Produktifitas Generasi Muda (Generasi Emas) ini adalah sebanyak 15 program yaitu:

1. Program Hubungan Industri
2. Program Pelayanan izin usaha simpan pinjam
3. Program Pemberdayaan UMKM
4. Program Pengembangan UMKM
5. Program Peningkatan sarana distribusi perdagangan
6. Program Perencanaan dan pembangunan industri
7. Program Standarisasi dan perlindungan konsumen
8. Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi
9. Program Penilaian Kesehatan Ksp /Usp Koperasi
10. Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian
11. Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi
12. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting
13. Program Pengembangan Ekspor
14. Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota
15. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional

11 Meningkatnya Produktifitas Generasi Muda (Generasi Emas)

Analisis pencapaian Sasaran 11: Meningkatnya Produktifitas Generasi Muda (Generasi Emas), dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja		Sat	Tahun 2023			
					Target	Realisasi	Capaian	Notif
3		4		5	11	12	13	14
11	Meningkatnya Produktifitas Generasi Muda (Generasi Emas)	1	Indeks Pembangunan Pemuda	Angka	58,4	56,88	97,43	CB
		2	Persentase Peningkatan Pemuda yang berprestasi	%	27,0	125	462,96	SB
		3	Persentase Organisasi Pemuda Yang Aktif	%	91	47,17	52,00	KB
		4	Persentase wirausaha muda	%	3,37	25,90	768,55	SB
		5	Cakupan Pembinaan Olahraga	%	21,57	85,71	397,41	SB
		6	Cakupan Pelatih Yang Bersertifikat/Lisensi Kepelatihan	%	41,03	29,31	71,43	KB
		7	Cakupan pembinaan atlet muda	atlet	52,30	73,65	140,82	SB
		8	Jumlah atlet berprestasi	atlet	19	32,00	172,04	SB
		9	Jumlah prestasi olahraga	prestasi	3	6,00	191,42	SB
		10	Penyelesaian Kasus Tanah Negara	%	28	28	100	SB
		11	Persentase Luas Lahan Bersertifikat	%	88,05	29,30	33,28	TB
Rata Rata Capaian							226,12	SB

Dari 11 indikator kinerja yang mendukung sasaran strategis ini, 1 indikator kinerja mencapai target di bawah 50 persen atau tidak berhasil. Secara umum rata-rata pencapaian sasaran Meningkatnya Produktifitas Generasi Muda (Generasi Emas), dengan predikat Sangat Berhasil mencapai target yaitu rata-rata 226,12 persen

2. perbandingan antara realisasi kinerja tahun ini dengan tahun sebelumnya.

Indikator Kinerja		Satuan	Realisasi		
			2021	2022	2023
1	Indeks Pembangunan Pemuda	Angka	55,11	56,85	56,88
2	Persentase Peningkatan Pemuda yang berperestasi	%	18	140	125
3	Persentase Organisasi Pemuda Yang Aktif	%	76	89	47,17
4	Persentase wirausaha muda	%	3	3	25,90
5	Cakupan Pembinaan Olahraga	%	17	85,71	85,71
6	Cakupan Pelatih Yang Bersertifikat/Lisensi Kevelatihan	%	29	29	29,31
7	Cakupan pembinaan atlet muda	atlet	26	73,65	73,65
8	Jumlah atlet berprestasi	atlet	11	3	32,00
9	Jumlah prestasi olahraga	prestasi	3	2	6,00
10	Penyelesaian Kasus Tanah Negara	%	43	20	28
11	Persentase Luas Lahan Bersertifikat	%	25,74	25,74	29,30

Jika dilihat realisasi kinerja tahun ini dengan tahun sebelumnya, maka 11 indikator yang menunjang pencapaian Meningkatnya Produktifitas Generasi Muda (Generasi Emas), melalui Persentase wirausaha muda mengalami kenaikan dari tahun lalu dan kondisi awal (2021).

3. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini terhadap target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen RPJMD.

Indikator Kinerja		Satuan	Target Kondisi Akhir Rpjmd	Realisasi Kinerja Sd Tahun 2023	Capaian	Notif
1	Indeks Pembangunan Pemuda	Angka	63,24	56,28	88,99	J
2	Persentase Peningkatan Pemuda yang berperestasi	%	36,00	94,33	262,04	J
3	Persentase Organisasi Pemuda Yang Aktif	%	96,07	70,90	73,80	J
4	Persentase wirausaha muda	%	4,09	10,36	253,30	J
5	Cakupan Pembinaan Olahraga	%	20,12	62,86	312,43	J
6	Cakupan Pelatih Yang Bersertifikat/Lisensi Kevelatihan	%	55,51	29,31	52,80	K
7	Cakupan pembinaan atlet muda	atlet	58,68	57,82	98,54	J
8	Jumlah atlet berprestasi	atlet	20,00	15,33	76,67	J
9	Jumlah prestasi olahraga	prestasi	3,00	3,67	122,22	J

	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kondisi Akhir Rpjmd	Realisasi Kinerja Sd Tahun 2023	Capaian	Notif
10	Penyelesaian Kasus Tanah Negara	%	100,00	90,79	90,79	J
11	Persentase Luas Lahan Bersertifikat	%	32,92	26,93	81,79	J

Pada Sasaran strategis 11, Meningkatnya Kinerja Meningkatnya Produktifitas Generasi Muda (Generasi Emas), terdapat 11 indikator sasaran yang mendukung pencapaian sasaran ini, 10 indikator sasaran tercapai dengan notifikasi hijau yang berarti sudah tercapai/*on track/on trend*, dan 1 indikator sasaran dengan notifikasi kuning yang berarti kerja keras, 0 indikator sasaran dengan notifikasi merah yang berarti sulit untuk dapat dicapai

4. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Keberhasilan atau kegagalan pencapaian beberapa indikator sasaran Meningkatnya Kemandirian Desa dalam Pembangunan Daerah melalui pengembangan Kawasan Perdesaan dapat dijelaskan sebagai berikut:

Satu, pencapaian kinerja untuk sasaran Meningkatnya Produktifitas Generasi Muda (Generasi Emas) melalui indikator Indeks Pembangunan Pemuda pada tahun 2023 sebesar 97,43 persen atau realisasi Indeks Pembangunan Pemuda pada tahun 2023 sangat berhasil mencapai target yaitu sebesar 56,88 persen dibandingkan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 58,4 persen.

Dua, pencapaian kinerja untuk sasaran Meningkatnya Produktifitas Generasi Muda (Generasi Emas) melalui indikator Persentase Peningkatan Pemuda yang berperestasi pada tahun 2023 sebesar 462,96 persen atau realisasi Persentase Peningkatan Pemuda yang berperestasi pada tahun 2023 sangat berhasil mencapai target yaitu sebesar 123 persen dibandingkan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 27,0 persen.

Tiga, pencapaian kinerja untuk sasaran Meningkatnya Produktifitas Generasi Muda (Generasi Emas) melalui indikator Persentase Organisasi Pemuda Yang Aktif pada tahun 2023 sebesar 52,00 persen atau realisasi Persentase Organisasi Pemuda Yang Aktif pada tahun 2023 kurang

berhasil mencapai target yaitu sebesar 47,17 persen dibandingkan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 90,71 persen.

Empat, pencapaian kinerja untuk sasaran Meningkatnya Produktifitas Generasi Muda (Generasi Emas) melalui indikator Persentase wirausaha muda pada tahun 2023 sebesar 768,55 persen atau realisasi Persentase wirausaha muda pada tahun 2023 sangat berhasil mencapai target yaitu sebesar 25,90 persen dibandingkan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 3,37 persen.

Lima, pencapaian kinerja untuk sasaran Meningkatnya Produktifitas Generasi Muda (Generasi Emas) melalui indikator Cakupan Pembinaan Olahraga pada tahun 2023 sebesar 397,41 persen atau realisasi Cakupan Pembinaan Olahraga pada tahun 2023 sangat berhasil mencapai target yaitu sebesar 85,71 persen dibandingkan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 21,57 persen.

Enam pencapaian kinerja untuk sasaran Meningkatnya Produktifitas Generasi Muda (Generasi Emas) melalui indikator Cakupan Pelatih Yang Bersertifikat/Lisensi Kepelatihan pada tahun 2023 sebesar 71,43 persen atau realisasi Cakupan Pelatih Yang Bersertifikat/Lisensi Kepelatihan pada tahun 2023 kurang berhasil mencapai target yaitu sebesar 29,31 persen dibandingkan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 41,03 persen.

Tujuh, pencapaian kinerja untuk sasaran Meningkatnya Produktifitas Generasi Muda (Generasi Emas) melalui indikator Cakupan Pelatih Yang Bersertifikat/Lisensi Kepelatihan pada tahun 2023 sebesar 140,82 persen atau realisasi Cakupan Pelatih Yang Bersertifikat/Lisensi Kepelatihan pada tahun 2023 sangat berhasil mencapai target yaitu sebesar 73,65 persen dibandingkan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 52,30 persen.

Delapan, pencapaian kinerja untuk sasaran Meningkatnya Produktifitas Generasi Muda (Generasi Emas) melalui indikator Jumlah atlet berprestasi pada tahun 2023 sebesar 172,04 persen atau realisasi Jumlah atlet berprestasi pada tahun 2023 sangat berhasil mencapai target yaitu sebesar 32,00 atlet dibandingkan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 19 atlet.



Sembilan, pencapaian kinerja untuk sasaran Meningkatnya Produktifitas Generasi Muda (Generasi Emas) melalui indikator Jumlah prestasi olahraga pada tahun 2023 sebesar 191,42 persen atau realisasi Jumlah prestasi olahraga pada tahun 2023 sangat berhasil mencapai target yaitu sebesar 6 prestasi dibandingkan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 3 prestasi.

Sepuluh, pencapaian kinerja untuk sasaran Meningkatnya Produktifitas Generasi Muda (Generasi Emas) melalui indikator Penyelesaian Kasus Tanah Negara pada tahun 2023 sebesar 100,00 persen atau realisasi Penyelesaian Kasus Tanah Negara pada tahun 2023 sangat berhasil mencapai target yaitu sebesar 28 persen dibandingkan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 28 persen.

Sebelah, pencapaian kinerja untuk sasaran Meningkatnya Produktifitas Generasi Muda (Generasi Emas) melalui indikator Persentase Luas Lahan Bersertifikat pada tahun 2023 sebesar 33,28 persen atau realisasi Persentase Luas Lahan Bersertifikat pada tahun 2023 tidak berhasil mencapai target yaitu sebesar 29,30 persen dibandingkan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 88,05 persen.

5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya.

Anggaran yang direncanakan pada perjanjian kinerja tahun 2023 untuk pencapaian sasaran Meningkatnya Produktifitas Generasi Muda (Generasi Emas) adalah sebesar Rp 10.554.578.500 terealisasi sebesar Rp 10.221.542.102 atau 96,84 persen.

6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian sasaran Meningkatnya Produktifitas Generasi Muda (Generasi Emas) ini adalah sebanyak 4 program yaitu:

1. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan
2. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan
3. Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan

12 Meningkatnya kemandirian desa dalam pembangunan daerah melalui pengembangan kawasan perdesaan

Analisis pencapaian Sasaran 12: Meningkatnya Kemandirian Desa dalam Pembangunan Daerah melalui pengembangan Kawasan Perdesaan, dapat dijelaskan sebagai berikut: dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja		Sat	Tahun 2023			
					Target	Realisasi	Pencapaian	Not
1 2	Meningkatnya Kemandirian Desa dalam Pembangunan Daerah melalui pengembangan Kawasan Perdesaan	1	Indeks Desa Membangun	Angka	0,76	0,763	100,39	SB
		2	Persentase Desa Mandiri	%	2,75	21,01	764,00	SB
		3	Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintahan Desa Yang Baik	%	100	95,4	95,40	CB
		4	Rata-Rata Jumlah KlpBinaan Pkk	%	146	136	93,15	CB
		5	Persentase Lsm Aktif	%	100	91	91,00	CB
		6	Persentase Pkk Aktif	%	100	100	100,00	B
		7	Persentase Posyandu Aktif	%	100	100	100,00	B
		8	Jumlah Aparat Desa Yang Ditingkatkan Kapasitasnya	%	100	100	100,00	B
		9	Rata-Rata Jumlah KlpBinaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)	%	93	100	107,53	SB

Dari 9 indikator kinerja yang mendukung sasaran strategis ini, 0 indikator kinerja mencapai target di bawah 50 persen atau tidak berhasil. Secara umum rata-rata pencapaian sasaran Meningkatnya Kemandirian Desa dalam Pembangunan Daerah melalui pengembangan Kawasan Perdesaan dengan predikat Kurang Berhasil mencapai target yaitu rata-rata 172.39 persen

2. perbandingan antara realisasi kinerja tahun ini dengan tahun sebelumnya

Indikator kinerja		Satuan	Realisasi		
			2021	2022	2023
1	Indeks Desa Membangun	Angka	0,720	0,72	0,763
2	Persentase Desa Mandiri	%	0,051	0,12	21,01
3	Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintahan Desa Yang Baik	%	79,39	73,39	95,4
4	Rata-Rata Jumlah KlpBinaan Pkk	%	146	146	136
5	Persentase Lsm Aktif	%	0	90,9	91
6	Persentase Pkk Aktif	%	100	100	100
7	Persentase Posyandu Aktif	%	100	100	100
8	Jumlah Aparat Desa Yang Ditingkatkan Kapasitasnya	%	100	0	100
9	Rata-Rata Jumlah KlpBinaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)	%	93	93	100

Jika dilihat realisasi kinerja tahun ini dengan tahun sebelumnya, maka 9 indikator yang menunjang pencapaian Meningkatnya Kemandirian Desa dalam Pembangunan Daerah melalui pengembangan Kawasan Perdesaan mengalami peningkatan dari tahun lalu dan mengalami penurunan kondisi awal (2021).

3. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini terhadap target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen RPJMD.

Sasaran strategis		Indikator kinerja		Satuan	Target kondisi akhir rpjmd	Realisasi kinerja sd tahun 2023	Capaian	Nota
1 2	Meningkatnya Kemandirian Desa dalam Pembangunan Daerah melalui pengembangan Kawasan Perdesaan	1	Indeks Desa Membangun	Angka	0,824	0,73	89,12	J
		2	Persentase Desa Mandiri	%	9,17	7,06	76,99	J
		3	Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintahan Desa Yang Baik	%	100	82,73	82,73	J
		4	Rata-Rata Jumlah	%	146	142,67	97,72	J

Sasaran strategis	Indikator kinerja	Satuan	Target kondisi akhir rpjmd	Realisasi kinerja sd tahun 2023	Capaian	Nota
	Kelompok Binaan Pkk					
	5 Persentase Lsm Aktif	%	100	60,63	60,63	K
	6 Persentase Pkk Aktif	%	100	100,00	100,00	J
	7 Persentase Posyandu Aktif	%	100	100,00	100,00	J
	8 Jumlah Aparat Desa Yang Ditingkatkan Kapasitasnya	%	100	66,67	66,67	K
	9 Rata-Rata Jumlah Kelompok Binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)	%	100	95,33	95,33	J

Pada Sasaran strategis 12, Meningkatnya Kinerja Meningkatnya kemandirian desa dalam pembangunan daerah melalui pengembangan kawasan perdesaan terdapat 9 indikator sasaran yang mendukung pencapaian sasaran ini, 7 indikator sasaran tercapai dengan notifikasi hijau yang berarti sudah tercapai/on track/on trend, dan 2 indikator sasaran dengan notifikasi kuning yang berarti kerja keras, 0 indikator sasaran dengan notifikasi merah yang berarti sulit untuk dapat dicapai

4. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Keberhasilan atau kegagalan pencapaian beberapa indikator sasaran Meningkatnya Kemandirian Desa dalam Pembangunan Daerah melalui pengembangan Kawasan Perdesaan dapat dijelaskan sebagai berikut:

Satu, pencapaian kinerja untuk sasaran Meningkatnya Kemandirian Desa dalam Pembangunan Daerah melalui indikator Indeks Desa Membangun pada tahun 2023 sebesar 100,39 persen atau realisasi Indeks Desa Membangun pada tahun 2023 berhasil mencapai target yaitu sebesar 0,763 persen dibandingkan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 0,760 persen.

Dua, pencapaian kinerja untuk sasaran Meningkatnya Kemandirian Desa dalam Pembangunan Daerah melalui indikator Persentase Desa Mandiri pada tahun 2023 sebesar 764,00 persen atau realisasi Persentase Desa Mandiri pada tahun 2023 sangat berhasil mencapai target yaitu sebesar 21,01 persen dibandingkan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 2,75 persen.

Tiga, pencapaian kinerja untuk sasaran Meningkatnya Kemandirian Desa dalam Pembangunan Daerah melalui indikator Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintahan Desa Yang Baik pada tahun 2023 sebesar 95,40 persen atau Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintahan Desa Yang Baik pada tahun 2023 cukup berhasil mencapai target yaitu sebesar 95,4 persen dibandingkan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 100 persen.

Empat, pencapaian kinerja untuk sasaran Meningkatnya Kemandirian Desa dalam Pembangunan Daerah melalui indikator Rata-Rata Jumlah KlpBinaan Pkk pada tahun 2023 sebesar 93,15 persen atau Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintahan Desa Yang Baik pada tahun 2023 cukup berhasil mencapai target yaitu sebesar 136 persen dibandingkan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 146 persen.

Lima, pencapaian kinerja untuk sasaran Meningkatnya Kemandirian Desa dalam Pembangunan Daerah melalui indikator Persentase Lsm Aktif pada tahun 2023 sebesar 91 persen atau realisasi Persentase LSM Aktif pada tahun 2023 cukup berhasil mencapai target yaitu sebesar 91 persen dibandingkan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 100 persen.

Enam, pencapaian kinerja untuk sasaran Meningkatnya Kemandirian Desa dalam Pembangunan Daerah melalui indikator Persentase Pkk Aktif pada tahun 2023 sebesar 100 persen atau realisasi Persentase Pkk Aktif pada tahun 2023 berhasil mencapai target yaitu sebesar 100 persen dibandingkan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 100 persen.



Tujuh, pencapaian kinerja untuk sasaran Meningkatnya Kemandirian Desa dalam Pembangunan Daerah melalui indikator Persentase Posyandu Aktif pada tahun 2023 sebesar 100 persen atau

realisasi Persentase Posyandu Aktif pada tahun 2023 berhasil mencapai target yaitu sebesar 100 persen dibandingkan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 100 persen.

Delapan, pencapaian kinerja untuk sasaran Meningkatnya Kemandirian Desa dalam Pembangunan Daerah melalui indikator Jumlah Aparat Desa Yang Ditingkatkan Kapasitasnya pada tahun 2023 sebesar 100,00 persen atau realisasi Jumlah Aparat Desa Yang Ditingkatkan Kapasitasnya pada tahun 2023 berhasil mencapai target yaitu sebesar 100,00 persen dibandingkan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 100 persen.

Sembilan, pencapaian kinerja untuk sasaran Meningkatnya Kemandirian Desa dalam Pembangunan Daerah melalui indikator Rata-Rata Jumlah KlpBinaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) pada tahun 2023 sebesar 107,53 persen atau realisasi Rata-Rata Jumlah KlpBinaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) pada tahun 2023 sangat berhasil mencapai target yaitu sebesar 100 persen dibandingkan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 93 persen.

5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya.

Anggaran yang direncanakan pada perjanjian kinerja tahun 2023 untuk pencapaian sasaran Meningkatnya Kemandirian Desa dalam Pembangunan Daerah adalah sebesar Rp Rp 2.613.691.596 terealisasi sebesar Rp Rp 2.507.549.870 atau 95,94 persen.

6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian sasaran Meningkatnya Kemandirian Desa dalam Pembangunan Daerah ini adalah sebanyak 4 program yaitu:

1. Program Penataan Desa
2. Program Peningkatan Kerjasama Desa
3. Program Administrasi Pemerintahan Desa
4. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga adat dan

13 Terwujudnya tatanan kehidupan masyarakat yang aman dan nyaman

Analisis pencapaian Sasaran 13: Terwujudnya tatanan kehidupan masyarakat yang aman dan nyaman, dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

Sasaran Strategis	No	Indikator	Sat	Tahun 2023			
				Target	Realisasi	Capaian	Not
13 Terwujudnya tatanan kehidupan masyarakat yang aman dan nyaman	1	Indeks Rasa Aman	Angka	15	14	93,33	CB
	2	Persentase Angka Kriminalitas yang tertangani	%	100	100	100	B
	3	Perkembangan Laju Pertumbuhan Penduduk (Lpp)	%	0,53	2,76	520,75	SB
	4	Total Fertility Rate (Tfr)	%	2,50	2,19	87,60	CB
	5	Persentase perangkat daerah(dinas/badan) yang berperan aktif dalam pembangunan daerah melalui kampung KB	%	78,58	75,40	95,95	CB
	6	Persentase Perangkat Daerah Dinas/ Badan Yang Menyusun Dan Memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk	%	26,42	25,92	98,11	CB
	7	Jumlah Kebijakan (Peraturan Daerah/ Peraturan Kepala Daerah) Yang Mengatur Tentang Pengendalian Kuantitas Dan Kualitas Penduduk	%	1	1	100	B
	8	Jumlah Sektor Yang Menyapakati Dan Memanfaatkan Data Profil (Parameter Dan Proyeksi Penduduk) Untuk Perencanaan Program Pembangunan	sektor	6	6	100	B
	9	Jumlah Kerja Sama Penyelenggaraan Pendidikan Formal, Non Formal, Dan Informal Yang Melakukan Pendidikan Kependudukan,	sektor	3	3	100	B
	10	Rata-Rata Jumlah Anak Per Keluarga	%	16,85	2,19	13	TB
	11	Ratio Akseptor Kb	%	18,33	64,48	351,77	SB

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2023

Sasaran Strategis	No	Indikator	Sat	Tahun 2023			
				Target	Realisasi	Capaian	Not
	12	Angka Pemakaian Kontrasepsi/Cpr Bagi Perempuan Menikah Usia 15 – 49	%	74,86	45,70	61,05	KB
	13	Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15-19)per 1,000 perempuan usia 15-19 tahun (ASFR 15-19)	%	89,79	45,7	50,90	KB
	14	Cakupan Pasangan Usia Subur (Pus) Yang Istrinya Dibawah 20 Tahun	%	4,45	15,34	344,72	SB
	15	Cakupan Pus Yang Ingin Ber-Kb Tidak Terpenuhi (Unmet Need)	%	11,84	20,92	176,69	SB
	16	Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	%	39,09	60,30	154,26	SB
	17	Persentase Tingkat Keberlangsungan Pemakaian Kontrasepsi	%	53,50	65	121,50	SB
	18	Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita	%	100	65	65	KB
	19	Cakupan Bina Keluarga Remaja Ber- Kb	%	79,78	12,16	15,24	TB
	20	Cakupan Anggota Bina Keluarga Lansia Ber- Kb	%	91,16	6,21	6,81	TB
	21	Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (Ppks) Di Setiap Kecamatan	%	10	5	50	KB
	22	Cakupan Remaja Dalam Pusat Informasi Dan Konseling Remaja/ Mahasiswa	%	1,03	4,8	466,02	SB
	23	Cakupan Pkb/Plkb Yang Didaya Gunakan Perangkat Derah Kb Untuk Perencanaan Dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah Di Bdag Pengendalian Penduduk	%	100	100	100	B
	24	Cakupan Pus Peserta Kb Anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (Uppks) Yang Ber-Kb Mandiri	%	0,25	0,01	2,80	TB
	25	Rasio Petugas Pembantu Pembina Kb Desa (Ppkbd) Setiap Desa/Kelurahan	%	100	100	100	B
	26	Cakupan Ketersediaan Dan Distribusi Alat Dan	%	100	100	100	B

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2023

Sasaran Strategis	No	Indikator	Sat	Tahun 2023			
				Target	Realisasi	Capaian	Not
		Obat Kontrasepsi Untuk Memenuhi Permintaan Masyarakat					
	27	Persentase Faskes Dan Jejaringnya (Seluruh Tingkatan Wilayah) Yang Bekerja Sama Dengan Bpjs Dan Memberikan Pelayanan Kb/Kr Yang Sesuai Dengan Standarisasi Pelayanan	%	65,05	100	153,73	SB
	28	Cakupan Penyediaan Informasi Data Makro Keluarga Disetiap Desa	%	100	100	100	B
	29	Persentase Remaja Yang Terkena Infeksi Menular Sesual (Ims)	%	0,0	0,0	100	B
	30	Cakupan KlpKegiatan Yang Melakukan Pembinaan Keluarga Melalui 8 Fungsi Keluarga	%	100	100	100	B
	31	Cakupan Keluarga Yang Mempunyai Balita Dan Anak Yng Memahami Dan Melaksanakan Pengasuhan Dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak	%	38,87	5,14	13,22	TB
	32	Rata-Rata Usia Kawin Pertama Wanita	%	22,79	22,10	96,97	CB
	33	Persentase Pembiayaan Program Kependudukan , Keluarga Berencana Dan Pembangunan Keluarga Melalui APBD Dan APBDes	%	0,01		0	TB
	34	Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)	%	0,31	0,28	90,32	CB
	35	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan)	%	100	100	100	B
	36	Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Kabupaten/Kota	%	03	0256	83,93	CB
	37	Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	%	100	100	100	B
	38	Persentase Penegakan Perda	%	100	100	100	B

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2023

Sasaran Strategis	No	Indikator	Sat	Tahun 2023			
				Target	Realisasi	Capaian	Not
	39	Persentase Partisipasi Perempuan Di Lembaga Pemerintah	%	4,36	61,33	1406,65	SB
	40	Proporsi Kursi Yang Diduduki Perempuan Di DPRD	%	26,36	17,5	66,39	KB
	41	Partisipasi Perempuan Di Lembaga Swasta	%	84,52	97	114,77	SB
	42	Rasio KDRT	%	02	0003	198,50	SB
	43	Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	%	97	70	72,35	KB
	44	Cakupan Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan Yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan Oleh Petugas Terlatih Di Dalam Unit Pelayanan Terpadu	%	100	100	100	B
	45	Cakupan Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan Yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Oleh Tenaga Kesehatan Terlatih Di Puskesmas Mampu Tatalaksana Ktp/A Dan Ppt/Pkt Di Rumah Sakit	%	100	100	100	B
	46	Cakupan Penegakan Hukum Dari Tingkat Penyidikan Sampai Dengan Putusan Pengadilan Atas Kasus-Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak	%	100	100	100	B
	47	Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD Kabupaten	%	100	100	100	B
	48	Tersusun Dan Terintegrasinya Program-Program Kerja DPRD Untuk Melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, Dan Fungsi Anggaran Dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) Maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD)	%	100	100	100	B
	49	Terintegrasi Program-Program DPRD Untuk Melaksanakan Fungsi Pengawasan,	%	100	100	100	B

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2023

Sasaran Strategis	No	Indikator	Sat	Tahun 2023			
				Target	Realisasi	Capaian	Not
		Pembentukan Perda Dan Anggaran Ke Dalam Dokumen Perencanaan Dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD					
Rata Rata Capaian						142,29	SB

Dari 49 indikator kinerja yang mendukung sasaran strategis ini, 6 indikator kinerja mencapai target di bawah 50 persen atau tidak berhasil. Secara umum rata-rata pencapaian sasaran meningkatnya pelayanan kehidupan beragama dengan predikat Kurang Berhasil mencapai target yaitu rata-rata 142,29 persen

2. Perbandingan antara realisasi kinerja tahun ini dengan tahun sebelumnya

Sasaran Strategis		Indikator		Satuan	Realisasi		
					2021	2022	
13	Terwujudnya tatanan kehidupan masyarakat yang aman dan nyaman	1	Indeks Rasa Aman	Angka	14	14	14
		2	Persentase Angka Kriminalitas yang tertangani	%	68,38	51,77	100
		3	Perkembangan Laju Pertumbuhan Penduduk (Lpp)	%	0,01	0,74	2,76
		4	Total Fertility Rate (Tfr)	%	2,31	1,99	2,19
		5	Persentase perangkat daerah(dinas/badan) yang berperan aktif dalam pembangunan daerah melalui kampung KB	%	120,12	59,97	75,40
		6	Persentase Perangkat Daerah Dinas/ Badan Yang Menyusun Dan Memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk	%	0,93	1,67	25,92
		7	Jumlah Kebijakan (Peraturan Daerah/ Peraturan Kepala Daerah) Yang Mengatur Tentang Pengendalian Kuantitas Dan Kualitas Penduduk	%	1	1	1
		8	Jumlah Sektor Yang Menyepakati Dan Memanfaatkan Data Profil (Parameter Dan Proyeksi Penduduk) Untuk Perencanaan Program Pembangunan	sektor	6	6	6
		9	Jumlah Kerja Sama Penyelenggaraan	sektor	3	3	3

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2023

Sasaran Strategis		Indikator	Satuan	Realisasi		
				2021	2022	
		Pendidikan Formal, Non Formal, Dan Informal Yang Melakukan Pendidikan Kependudukan,				
		10 Rata-Rata Jumlah Anak Per Keluarga	%	114,59	3,78	2,19
		11 Ratio Akseptor Kb	%	1,54	79,60	64,48
		12 Angka Pemakaian Kontrasepsi/Cpr Bagi Perempuan Menikah Usia 15 – 49	%	56,43	56,34	45,70
		13 Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15-19)per 1,000 perempuan usia 15-19 tahun (ASFR 15-19)	%	80,62	0	45,7
		14 Cakupan Pasangan Usia Subur (Pus) Yang Istrinya Dibawah 20 Tahun	%	0,19	0,21	15,34
		15 Cakupan Pus Yang Ingin Ber-Kb Tidak Terpenuhi (Unmet Need)	%	1,59	1,45	20,92
		16 Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	%	7,26	7,75	60,30
		17 Persentase Tingkat Keberlangsungan Pemakaian Kontrasepsi	%	14,75	16,80	65,00
		18 Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita	%	68,97	74,97	65,00
		19 Cakupan Bina Keluarga Remaja Ber- Kb	%	49,90	53,62	12,16
		20 Cakupan Anggota Bina Keluarga Lansia Ber- Kb	%	99,99	58,94	6,21
		21 Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (Ppks) Di Setiap Kecamatan	%	10	10	5
		22 Cakupan Remaja Dalam Pusat Informasi Dan Konseling Remaja/ Mahasiswa	%	0,08	0,035	4,8
		23 Cakupan Pkb/Plkb Yang Didaya Gunakan Perangkat Derah Kb Untuk Perencanaan Dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah Di Bdan Pengendalian Penduduk	%	100	100	100
		24 Cakupan Pus Peserta Kb Anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera	%	7,3	6,75	0,01

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2023

Sasaran Strategis		Indikator	Satuan	Realisasi		
				2021	2022	
		(Uppks) Yang Ber-Kb Mandiri				
	25	Rasio Petugas Pembantu Pembina Kb Desa (Ppkbd) Setiap Desa/Kelurahan	%	100	100	100
	26	Cakupan Ketersediaan Dan Distribusi Alat Dan Obat Kontrasepsi Untuk Memenuhi Permintaan Masyarakat	%	100	100	100
	27	Persentase Faskes Dan Jejaringnya (Seluruh Tingkatan Wilayah) Yang Bekerja Sama Dengan Bpjs Dan Memberikan Pelayanan Kb/Kr Yang Sesuai Dengan Standarisasi Pelayanan	%	5,55	33,76	100,00
	28	Cakupan Penyediaan Informasi Data Makro Keluarga Di setiap Desa	%	100	100	100
	29	Persentase Remaja Yang Terkena Infeksi Menular Seksual (Ims)	%	0	0	0,0
	30	Cakupan KlpKegiatan Yang Melakukan Pembinaan Keluarga Melalui 8 Fungsi Keluarga	%	100	100	100
	31	Cakupan Keluarga Yang Mempunyai Balita Dan Anak Yng Memahami Dan Melaksanakan Pengasuhan Dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak	%	37,82	32,20	5,14
	32	Rata-Rata Usia Kawin Pertama Wanita	%	4,94	4,98	22,10
	33	Persentase Pembiayaan Program Kependudukan , Keluarga Berencana Dan Pembangunan Keluarga Melalui APBD Dan APBDes	%	0,0056	0,0065	
	34	Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)	%	0,3	0,3	0,28
	35	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan)	%	100	100	100

**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2023**

Sasaran Strategis		Indikator	Satuan	Realisasi		
				2021	2022	
		36 Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Kabupaten/Kota	%	0,00273	0,00000008	0,00256
		37 Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	%	100	100,00	100,00
		38 Persentase Penegakan Perda	%	100	100	100
		39 Persentase Partisipasi Perempuan Di Lembaga Pemerintah	%	4,04	0	61,33
		40 Proporsi Kursi Yang Diduduki Perempuan Di DPRD	%	3,85	4,2	17,5
		41 Partisipasi Perempuan Di Lembaga Swasta	%		96	97
		42 Rasio KDRT	%	0,00000004	0,0000064	0,00003
		43 Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	%	98	0	70
		44 Cakupan Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan Yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan Oleh Petugas Terlatih Di Dalam Unit Pelayanan Terpadu	%	100	100	100
		45 Cakupan Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan Yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Oleh Tenaga Kesehatan Terlatih Di Puskesmas Mampu Tatalaksana Ktp/A Dan Ppt/Pkt Di Rumah Sakit	%	0,895	6,23	100,00
		46 Cakupan Penegakan Hukum Dari Tingkat Penyidikan Sampai Dengan Putusan Pengadilan Atas Kasus-Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak	%	100	100	100
		47 Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD Kabupaten	%	100	100	100
		48 Tersusun Dan Terintegrasinya Program-Program Kerja DPRD Untuk Melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, Dan Fungsi	%	100	100	100

**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2023**

Sasaran Strategis		Indikator	Satuan	Realisasi		
				2021	2022	
		Anggaran Dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) Maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD)				
		49 Terintegrasi Program-Program DPRD Untuk Melaksanakan Fungsi Pengawasan, Pembentukan Perda Dan Anggaran Ke Dalam Dokumen Perencanaan Dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD	%	100	100	100

Jika dilihat realisasi kinerja tahun ini dengan tahun sebelumnya, maka 49 indikator yang menunjang pencapaian Terwujudnya tatanan kehidupan masyarakat yang aman dan nyaman mengalami peningkatan dari tahun lalu dan kondisi awal (2021).

3. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini terhadap target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen RPJMD.

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja		Satuan	Target Kondisi Akhir RPJMD	Realisasi Kinerja sd Tahun 2023	Capaian	Notifikasi
13	Terwujudnya tatanan kehidupan masyarakat yang aman dan nyaman	1	Indeks Rasa Aman	Angka	15	14,00	93,33	J
		2	Persentase Angka Kriminalitas yang tertangani	%	90,75	73,38	80,86	J
		3	Perkembangan Laju Pertumbuhan Penduduk (Lpp)	%	90,48	1,17	1,29	L
		4	Total Fertility Rate (Tfr)	%	90,48	28,66	31,68	L
		5	Persentase perangkat daerah(dinas/badan) yang berperan aktif dalam pembangunan daerah melalui kampung KB	%	90,48	92,33	102,05	J
		6	Persentase Perangkat Daerah Dinas/ Badan Yang Menyusun Dan Memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk	%	89,29	12,65	14,17	L
		7	Jumlah Kebijakan (Peraturan Daerah/ Peraturan Kepala Daerah) Yang Mengatur Tentang Pengendalian	%	1	1,00	100,00	J

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2023

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja		Satuan	Target Kondisi Akhir RPJMD	Realisasi Kinerja sd Tahun 2023	Capaian	Notifikasi
			Kuantitas Dan Kualitas Penduduk					
		8	Jumlah Sektor Yang Menyepakati Dan Memanfaatkan Data Profil (Parameter Dan Proyeksi Penduduk) Untuk Perencanaan Program Pembangunan	sektor	6	6,00	100,00	J
		9	Jumlah Kerja Sama Penyelenggaraan Pendidikan Formal, Non Formal, Dan Informal Yang Melakukan Pendidikan Kependudukan,	sektor	3	3,00	100,00	J
		10	Rata-Rata Jumlah Anak Per Keluarga	%	11,99	45,85	382,37	J
		11	Ratio Akseptor Kb	%	23,13	26,50	114,55	J
		12	Angka Pemakaian Kontrasepsi/Cpr Bagi Perempuan Menikah Usia 15 – 49	%	74,15	59,03	79,62	J
		13	Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15-19)per 1,000 perempuan usia 15-19 tahun (ASFR 15-19)	%	89,79	49,94	55,62	K
		14	Cakupan Pasangan Usia Subur (Pus) Yang Istrinya Dibawah 20 Tahun	%	4,56	6,76	148,49	J
		15	Cakupan Pus Yang Ingin Ber-Kb Tidak Terpenuhi (Unmet Need)	%	9,94	11,38	114,48	J
		16	Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	%	43,29	29,44	68,00	K
		17	Persentase Tingkat Keberlangsungan Pemakaian Kontrasepsi	%	73,89	38,51	52,11	K
		18	Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita	%	100	71,64	71,64	J
		19	Cakupan Bina Keluarga Remaja Ber- Kb	%	92,58	44,53	48,10	K
		20	Cakupan Anggota Bina Keluarga Lansia Ber- Kb	%	100	59,43	59,43	K
		21	Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (Ppks) Di Setiap Kecamatan	kec	10	8,33	83,33	J
		22	Cakupan Remaja Dalam Pusat Informasi Dan	%	0,51	2,46	485,52	J

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2023

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja		Satuan	Target Kondisi Akhir RPJMD	Realisasi Kinerja sd Tahun 2023	Capaian	Notifikasi
			Konseling Remaja/ Mahasiswa					
		23	Cakupan Pkb/Plkb Yang Didaya Gunakan Perangkat Derah Kb Untuk Perencanaan Dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah Di Btang Pengendalian Penduduk	%	100	100,00	100,00	J
		24	Cakupan Pus Peserta Kb Anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (Uppks) Yang Ber-Kb Mandiri	%	23,28	11,09	47,62	K
		25	Rasio Petugas Pembantu Pembina Kb Desa (Ppkbd) Setiap Desa/Kelurahan	%	100	100,00	100,00	J
		26	Cakupan Ketersediaan Dan Distribusi Alat Dan Obat Kontrasepsi Untuk Memenuhi Permintaan Masyarakat	%	100	100,00	100,00	J
		27	Persentase Faskes Dan Jejaringnya (Seluruh Tingkatan Wilayah) Yang Bekerja Sama Dengan Bpjs Dan Memberikan Pelayanan Kb/Kr Yang Sesuai Dengan Standarisasi Pelayanan	%	100	64,15	64,15	K
		28	Cakupan Penyediaan Informasi Data Makro Keluarga Disetiap Desa	%	100	100,00	100,00	J
		29	Persentase Remaja Yang Terkena Infeksi Menular Seksual (Ims)	%	0	0,00	0,00	L
		30	Cakupan Kelompok Kegiatan Yang Melakukan Pembinaan Keluarga Melalui 8 Fungsi Keluarga	%	100	100,00	100,00	J
		31	Cakupan Keluarga Yang Mempunyai Balita Dan Anak Yng Memahami Dan Melaksanakan Pengasuhan Dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak	%	40,03	42,29	105,64	J

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2023

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja		Satuan	Target Kondisi Akhir RPJMD	Realisasi Kinerja sd Tahun 2023	Capaian	Notifikasi
		32	Rata-Rata Usia Kawin Pertama Wanita	%	23,17	16,35	70,55	J
		33	Persentase Pembiayaan Program Kependudukan , Keluarga Berencana Dan Pembangunan Keluarga Melalui APBD Dan APBDes	%	0,001	0,00	403,33	J
		34	Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)	%	0,29	0,29	101,15	J
		35	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan)	%	100	100,00	100,00	J
		36	Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Kabupaten/Kota	%	0,00311	0,00	85,74	J
		37	Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	%	100	100,00	100,00	J
		38	Persentase Penegakan Perda	%	100	100,00	100,00	J
		39	Persentase Partisipasi Perempuan Di Lembaga Pemerintah	%	4,2	21,79	518,81	J
		40	Proporsi Kursi Yang Diduduki Perempuan Di DPRD	%	35,58	12,95	36,40	L
		41	Partisipasi Perempuan Di Lembaga Swasta	%		64,33	0,00	L
		42	Rasio KDRT	%	0,001	0,11	10734,33	J
		43	Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	%	97	55,93	0,00	L
		44	Cakupan Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan Yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan Oleh Petugas Terlatih Di Dalam Unit Pelayanan Terpadu	%	100	100,00	100,00	J
		45	Cakupan Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan Yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Oleh Tenaga Kesehatan Terlatih Di Puskesmas Mampu Tatalaksana	%	100	36,32	36,32	L

**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2023**

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja		Satuan	Target Kondisi Akhir RPJMD	Realisasi Kinerja sd Tahun 2023	Capaian	Notifikasi
			Ktp/A Dan Ppt/Pkt Di Rumah Sakit					
		46	Cakupan Penegakan Hukum Dari Tingkat Penyidikan Sampai Dengan Putusan Pengadilan Atas Kasus-Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak	%	100	100,00	100,00	J
		47	Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD Kabupaten	%	100	100,00	100,00	J
		48	Tersusun Dan Terintegrasinya Program-Program Kerja DPRD Untuk Melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, Dan Fungsi Anggaran Dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) Maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD)	%	100	100,00	100,00	J
		49	Terintegrasi Program-Program DPRD Untuk Melaksanakan Fungsi Pengawasan, Pembentukan Perda Dan Anggaran Ke Dalam Dokumen Perencanaan Dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD	%	100	100,00	100,00	J

Pada Sasaran strategis 13, Terwujudnya tatanan kehidupan masyarakat yang aman dan nyaman terdapat 49 indikator sasaran yang mendukung pencapaian sasaran ini, 34 indikator sasaran tercapai dengan notifikasi hijau yang berarti sudah tercapai/on track/on trend, dan 7 indikator sasaran dengan notifikasi kuning yang berarti kerja keras, 8 indikator sasaran dengan notifikasi merah yang berarti sulit untuk dapat dicapai

4. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Keberhasilan atau kegagalan pencapaian beberapa indikator sasaran meningkatnya pelayanan kehidupan beragama dapat dijelaskan sebagai berikut

Pertama, pencapaian kinerja untuk sasaran Terwujudnya tatanan kehidupan masyarakat yang aman dan nyaman melalui indikator Indeks Rasa Aman pada tahun 2023 sebesar 99.33 Persen, artinya realisasi Indeks Rasa Aman pada tahun 2023 cukup berhasil mencapai target yaitu 14 angka dibandingkan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 15 angka.

Kedua, pencapaian kinerja untuk sasaran Terwujudnya tatanan kehidupan masyarakat yang aman dan nyaman melalui indikator Persentase Angka Kriminalitas yang tertangani pada tahun 2023 sebesar 100 persen atau realisasi Persentase Angka Kriminalitas yang tertangani pada tahun 2023 berhasil mencapai target yaitu sebesar 100 persen dibandingkan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 100 persen.

Ketiga, pencapaian kinerja untuk sasaran Terwujudnya tatanan kehidupan masyarakat yang aman dan nyaman melalui indikator Perkembangan Laju Pertumbuhan Penduduk (Lpp) pada tahun 2023 sebesar 520,75 persen atau realisasi indikator Perkembangan Laju Pertumbuhan Penduduk (Lpp) pada tahun 2023 sangat berhasil mencapai target yaitu sebesar 2,76 persen dibandingkan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 0,53 persen.

Empat, pencapaian kinerja untuk sasaran Terwujudnya tatanan kehidupan masyarakat yang aman dan nyaman melalui indikator Total Fertility Rate (Tfr) pada tahun 2023 sebesar 87,60 Persen atau realisasi Total Fertility Rate (Tfr) pada tahun 2023 sangat berhasil mencapai target yaitu sebesar 2,76 persen dibandingkan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 2,50 persen.

Lima, pencapaian kinerja untuk sasaran Terwujudnya tatanan kehidupan masyarakat yang aman dan nyaman melalui Persentase perangkat daerah(dinas/badan) yang berperan aktif dalam pembangunan daerah melalui



kampung KB pada tahun 2023 sebesar 95,95 persen atau realisasi Persentase perangkat daerah(dinas/badan) yang berperan aktif dalam pembangunan daerah melalui kampung KB pada tahun 2023 cukup berhasil mencapai target yaitu sebesar 75,40 persen dibandingkan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 78,58 persen.

Salah satu prioritas nasional adalah penanganan Stunting dengan melibatkan elemen berbagai sektor. Untuk itu Kampung Keluarga Berkualitas (KB) yang selama ini menjadi program pemerintah diharapkan kegiatannya dikonvergensi untuk penanganan Stunting. Hal ini mengemuka pada kegiatan Penguatan Kemitraan dan Pemberdayaan Kelompok Masyarakat di Kampung KB dalam rangka Percepatan Penurunan Stunting di Kabupaten Bulukumba. Kampung KB yang terbentuk di Kabupaten Bulukumba baru berjumlah 63 yang ditargetkan 64 Kampung KB.

Enam , pencapaian kinerja untuk sasaran Terwujudnya tatanan kehidupan masyarakat yang aman dan nyaman melalui indikator Persentase Perangkat Daerah Dinas/ Badan Yang Menyusun Dan Memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk pada tahun 2023 sebesar 98,11 persen atau realisasi Persentase Perangkat Daerah Dinas/ Badan Yang Menyusun Dan Memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk pada tahun 2023 cukup berhasil mencapai target yaitu sebesar 25,92 persen dibandingkan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 26,42 persen.

Tujuh, pencapaian kinerja untuk sasaran Terwujudnya tatanan kehidupan masyarakat yang aman dan nyaman melalui indikator Jumlah Kebijakan (Peraturan Daerah/ Peraturan Kepala Daerah) Yang Mengatur Tentang Pengendalian Kuantitas Dan Kualitas Penduduk pada tahun 2023 sebesar 100,00 persen atau realisasi Jumlah Kebijakan (Peraturan Daerah/ Peraturan Kepala Daerah) Yang Mengatur Tentang Pengendalian Kuantitas Dan Kualitas Penduduk pada tahun 2023 berhasil mencapai target yaitu sebesar 1 persen dibandingkan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 1 persen.

Delapan, pencapaian kinerja untuk sasaran Terwujudnya tatanan kehidupan masyarakat yang aman dan nyaman melalui indikator Jumlah Sektor Yang Menyepakati Dan Memanfaatkan Data Profil (Parameter Dan Proyeksi Penduduk) Untuk Perencanaan Program Pembangunan pada tahun 2023 sebesar 100,00 persen atau realisasi Jumlah Sektor Yang Menyepakati Dan Memanfaatkan Data Profil (Parameter Dan Proyeksi Penduduk) Untuk Perencanaan Program

Pembangunan pada tahun 2023 berhasil mencapai target yaitu sebesar 6 persen dibandingkan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 6 persen.

Sembilan , pencapaian kinerja untuk sasaran Terwujudnya tatanan kehidupan masyarakat yang aman dan nyaman melalui indikator Jumlah Kerja Sama Penyelenggaraan Pendidikan Formal, Non Formal, Dan Informal Yang Melakukan Pendidikan Kependudukan, pada tahun 2023 sebesar 100,00 persen atau realisasi Jumlah Kerja Sama Penyelenggaraan Pendidikan Formal, Non Formal, Dan Informal Yang Melakukan Pendidikan Kependudukan, pada tahun 2023 berhasil mencapai target yaitu sebesar 3 persen dibandingkan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 3 persen.

Sepuluh , pencapaian kinerja untuk sasaran Terwujudnya tatanan kehidupan masyarakat yang aman dan nyaman melalui indikator Rata-Rata Jumlah Anak Per Keluarga pada tahun 2023 sebesar 13 persen atau realisasi Rata-Rata Jumlah Anak Per Keluarga pada tahun 2023 tidak berhasil mencapai target yaitu sebesar 2,19 persen dibandingkan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 16,85 persen.

Sebelas , pencapaian kinerja untuk sasaran Terwujudnya tatanan kehidupan masyarakat yang aman dan nyaman melalui indikator ratio Akseptor Kb pada tahun 2023 sebesar 351,77 persen atau realisasi ratio Akseptor Kb pada tahun 2023 berhasil mencapai target yaitu sebesar 64,48 persen dibandingkan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 18,33 persen.

Dua belas , pencapaian kinerja untuk sasaran Terwujudnya tatanan kehidupan masyarakat yang aman dan nyaman melalui indikator Angka Pemakaian Kontrasepsi/Cpr Bagi Perempuan Menikah Usia 15 – 49 pada tahun 2023 sebesar 61,05 persen atau realisasi Angka Pemakaian Kontrasepsi/Cpr Bagi Perempuan Menikah Usia 15 – 49 pada tahun 2023 cukup berhasil mencapai target yaitu sebesar 45,70 persen dibandingkan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 74,86 persen.

Tiga belas , pencapaian kinerja untuk sasaran Terwujudnya tatanan kehidupan masyarakat yang aman dan nyaman melalui indikator Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15-19)per 1,000 perempuan usia 15-19 tahun (ASFR 15-19) pada tahun 2023 sebesar 50,90 persen atau realisasi Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15-19)per 1,000

perempuan usia 15-19 tahun (ASFR 15-19) pada tahun 2023 kurang berhasil mencapai target yaitu sebesar 45,7 persen dibandingkan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 89,79 persen.

Empat belas , pencapaian kinerja untuk sasaran Terwujudnya tatanan kehidupan masyarakat yang aman dan nyaman melalui indikator Cakupan Pasangan Usia Subur (Pus) Yang Istrinya Dibawah 20 Tahun pada tahun 2023 sebesar 344,72 persen atau realisasi Cakupan Pasangan Usia Subur (Pus) Yang Istrinya Dibawah 20 Tahun pada tahun 2023 sangat berhasil mencapai target yaitu sebesar 15,34 persen dibandingkan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 4,45 persen.

lima belas , pencapaian kinerja untuk sasaran Terwujudnya tatanan kehidupan masyarakat yang aman dan nyaman melalui indikator Cakupan Pus Yang Ingin Ber-Kb Tidak Terpenuhi (Unmet Need) pada tahun 2023 sebesar 176,69 persen atau realisasi Cakupan Pus Yang Ingin Ber-Kb Tidak Terpenuhi (Unmet Need) pada tahun 2023 sangat berhasil mencapai target yaitu sebesar 20,92 persen dibandingkan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 11,84 persen.

Enam belas , pencapaian kinerja untuk sasaran Terwujudnya tatanan kehidupan masyarakat yang aman dan nyaman melalui indikator Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) pada tahun 2023 sebesar 154,26 persen atau realisasi Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) pada tahun 2023 sangat berhasil mencapai target yaitu sebesar 60,30 persen dibandingkan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 39,09 persen.

Tujuh belas , pencapaian kinerja untuk sasaran Terwujudnya tatanan kehidupan masyarakat yang aman dan nyaman melalui indikator Persentase Tingkat Keberlangsungan Pemakaian Kontrasepsi pada tahun 2023 sebesar 121,50 persen atau realisasi Persentase Tingkat Keberlangsungan Pemakaian Kontrasepsi pada tahun 2023 kurang berhasil mencapai target yaitu sebesar 65,00 persen dibandingkan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 53,50 persen.

Delapan belas , pencapaian kinerja untuk sasaran Terwujudnya tatanan kehidupan masyarakat yang aman dan nyaman melalui indikator Cakupan Anggota Bina Keluarga



Balita pada tahun 2023 sebesar 65,00 persen atau realisasi Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita pada tahun 2023 kurang berhasil mencapai target yaitu sebesar 65,00 persen dibandingkan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 100,00 persen.

Sembilan belas , pencapaian kinerja untuk sasaran Terwujudnya tatanan kehidupan masyarakat yang aman dan nyaman melalui indikator Cakupan Bina Keluarga Remaja Ber- Kb pada tahun 2023 sebesar 15,24 persen atau realisasi Cakupan Bina Keluarga Remaja Ber- Kb pada tahun 2023 tidak berhasil mencapai target yaitu sebesar 12,16 persen dibandingkan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 79,78 persen.

Dua puluh , pencapaian kinerja untuk sasaran Terwujudnya tatanan kehidupan masyarakat yang aman dan nyaman melalui indikator Cakupan Anggota Bina Keluarga Lansia Ber- Kb pada tahun 2023 sebesar 6,81 persen atau Cakupan Anggota Bina Keluarga Lansia Ber- Kb pada tahun 2023 tidak berhasil mencapai target yaitu sebesar 6,21 persen dibandingkan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 91,16 persen.

Dua puluh satu, pencapaian kinerja untuk sasaran Terwujudnya tatanan kehidupan masyarakat yang aman dan nyaman melalui indikator Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (Ppks) Di Setiap Kecamatan pada tahun 2023 sebesar 50 persen atau realisasi Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (Ppks) Di Setiap Kecamatan pada tahun 2023 cukup berhasil mencapai target yaitu sebesar 5 kecamatan dibandingkan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 10 kecamatan.

Dua puluh dua, pencapaian kinerja untuk sasaran Terwujudnya tatanan kehidupan masyarakat yang aman dan nyaman melalui indikator Cakupan Remaja Dalam Pusat Informasi Dan Konseling Remaja/ Mahasiswa pada tahun 2023 sebesar 466,02 persen atau realisasi Cakupan Remaja Dalam Pusat Informasi Dan Konseling

Remaja/ Mahasiswa pada tahun 2023 sangat berhasil mencapai target yaitu sebesar 4,8 persen dibandingkan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 1,03 persen.

Dua puluh tiga, pencapaian kinerja untuk sasaran Terwujudnya tatanan kehidupan masyarakat yang aman dan nyaman melalui indikator Cakupan Pkb/Plkb Yang Didaya Gunakan Perangkat Daerah Kb Untuk Perencanaan Dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah Di Bidang Pengendalian Penduduk pada tahun 2023 sebesar 100 persen atau realisasi Cakupan Pkb/Plkb Yang Didaya Gunakan Perangkat Daerah Kb Untuk Perencanaan Dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah Di Bidang Pengendalian Penduduk pada tahun 2023 berhasil mencapai target yaitu sebesar 100 persen dibandingkan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 100 persen.

Dua puluh empat, pencapaian kinerja untuk sasaran Terwujudnya tatanan kehidupan masyarakat yang aman dan nyaman melalui indikator Cakupan Pus Peserta Kb Anggota Usaha Peningkatan Pendapatan



Keluarga Sejahtera (Uppks) Yang Ber-Kb Mandiri pada tahun 2023 sebesar 2,80 persen atau realisasi Cakupan Pus Peserta Kb Anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (Uppks) Yang Ber-Kb Mandiri pada tahun 2023 sangat berhasil mencapai target yaitu sebesar 0,01 persen dibandingkan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 0,25 persen.

Dua puluh lima, pencapaian kinerja untuk sasaran Terwujudnya tatanan kehidupan masyarakat yang aman dan nyaman melalui indikator Rasio Petugas Pembantu Pembina Kb Desa (Ppkbd) Setiap Desa/Kelurahan pada tahun 2023 sebesar 100 persen atau realisasi Rasio Petugas Pembantu Pembina Kb Desa (Ppkbd) Setiap Desa/Kelurahan pada tahun 2023 berhasil mencapai target yaitu sebesar 100 persen dibandingkan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 100 persen.

Dua puluh enam, pencapaian kinerja untuk sasaran Terwujudnya tatanan kehidupan masyarakat yang aman dan nyaman melalui indikator Cakupan Ketersediaan Dan Distribusi Alat Dan Obat Kontrasepsi Untuk Memenuhi Permintaan Masyarakat pada tahun 2023

sebesar 100 persen atau Cakupan Ketersediaan Dan Distribusi Alat Dan Obat Kontrasepsi Untuk Memenuhi Permintaan Masyarakat pada tahun 2023 berhasil mencapai target yaitu sebesar 100 persen dibandingkan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 100 persen.

Dua puluh tujuh, pencapaian kinerja untuk sasaran Terwujudnya tatanan kehidupan masyarakat yang aman dan nyaman melalui indikator Persentase Faskes Dan Jejarinya (Seluruh Tingkatan Wilayah) Yang Bekerja Sama Dengan Bpjs Dan Memberikan Pelayanan Kb/Kr Yang Sesuai Dengan Standarisasi Pelayanan pada tahun 2023 sebesar 153,73 persen atau realisasi Persentase Faskes Dan Jejarinya (Seluruh Tingkatan Wilayah) Yang Bekerja Sama Dengan Bpjs Dan Memberikan Pelayanan Kb/Kr Yang Sesuai Dengan Standarisasi Pelayanan pada tahun 2023 sangat berhasil mencapai target yaitu sebesar 100 persen dibandingkan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 65,05 persen.

Dua puluh delapan, pencapaian kinerja untuk sasaran Terwujudnya tatanan kehidupan masyarakat yang aman dan nyaman melalui indikator Cakupan Penyediaan Informasi Data Makro Keluarga Disetiap Desa pada tahun 2023 sebesar 100 persen atau realisasi Cakupan Penyediaan Informasi Data Makro Keluarga Disetiap Desa pada tahun 2023 berhasil mencapai target yaitu sebesar 100 persen dibandingkan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 100 persen.

Dua puluh sembilan, pencapaian kinerja untuk sasaran Terwujudnya tatanan kehidupan masyarakat yang aman dan nyaman melalui indikator Persentase Remaja Yang Terkena Infeksi Menular Seksual (Ims) pada tahun 2023 sebesar 100 persen atau realisasi Persentase Remaja Yang Terkena Infeksi Menular Seksual (Ims) pada tahun 2023 tidak berhasil mencapai target yaitu sebesar 0 persen dibandingkan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 0 persen.

Tiga puluh, pencapaian kinerja untuk sasaran Terwujudnya tatanan kehidupan masyarakat yang aman dan nyaman melalui indikator Cakupan KlpKegiatan Yang Melakukan Pembinaan Keluarga Melalui 8 Fungsi Keluarga pada tahun 2023 sebesar 100,00 persen atau realisasi Cakupan KlpKegiatan Yang Melakukan Pembinaan Keluarga Melalui 8 Fungsi Keluarga pada tahun 2023 berhasil mencapai target yaitu sebesar 100,00 persen dibandingkan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 100,00 persen.

Tiga puluh satu, pencapaian kinerja untuk sasaran Terwujudnya tatanan kehidupan masyarakat yang aman dan nyaman melalui indikator Cakupan Keluarga Yang Mempunyai Balita Dan Anak Yng Memahami Dan Melaksanakan Pengasuhan Dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak pada tahun 2023 sebesar 13,22 persen atau realisasi Cakupan Keluarga Yang Mempunyai Balita Dan Anak Yng Memahami Dan Melaksanakan Pengasuhan Dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak pada tahun 2023 tidak berhasil mencapai target yaitu sebesar 5,14 persen dibandingkan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 38,87 persen.

Tiga puluh dua, pencapaian kinerja untuk sasaran Terwujudnya tatanan kehidupan masyarakat yang aman dan nyaman melalui indikator Rata-Rata Usia Kawin Pertama Wanita pada tahun 2023 sebesar 96,67 persen atau realisasi Rata-Rata Usia Kawin Pertama Wanita pada tahun 2023 cukup berhasil mencapai target yaitu sebesar 22,10 persen dibandingkan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 22,79 persen.

Tiga puluh tiga, pencapaian kinerja untuk sasaran Terwujudnya tatanan kehidupan masyarakat yang aman dan nyaman melalui indikator Persentase Pembiayaan Program Kependudukan , Keluarga Berencana Dan Pembangunan Keluarga Melalui APBD Dan APBDes pada tahun 2023 sebesar 0 persen atau realisasi Persentase Pembiayaan Program Kependudukan , Keluarga Berencana Dan Pembangunan Keluarga Melalui APBD Dan APBDes pada tahun 2023 cukup berhasil mencapai target yaitu sebesar 0 persen dibandingkan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 0 persen.

Tiga puluh empat, pencapaian kinerja untuk sasaran Terwujudnya tatanan kehidupan masyarakat yang aman dan nyaman melalui indikator Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) pada tahun 2023 sebesar 90,32 persen atau realisasi Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) pada tahun 2023 cukup berhasil mencapai target yaitu sebesar 0,28 persen dibandingkan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 0,31 persen.

Tiga puluh lima, pencapaian kinerja untuk sasaran Terwujudnya tatanan kehidupan masyarakat yang aman dan nyaman melalui indikator Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan) pada tahun 2023 sebesar 100,00 persen atau realisasi Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan) pada tahun 2023 berhasil mencapai target

yaitu sebesar 100,00 persen dibandingkan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 100,00 persen.

Tiga puluh enam, pencapaian kinerja untuk sasaran Terwujudnya tatanan kehidupan masyarakat yang aman dan nyaman melalui indikator Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan) pada tahun 2023 sebesar 83,93 persen atau realisasi Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan) pada tahun 2023 cukup berhasil mencapai target yaitu sebesar 0,00256 persen dibandingkan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 0,003 persen.

Tiga puluh tujuh, pencapaian kinerja untuk sasaran Terwujudnya tatanan kehidupan masyarakat yang aman dan nyaman melalui indikator Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) pada tahun 2023 sebesar 100,00 persen atau realisasi Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) pada tahun 2023 berhasil mencapai target yaitu sebesar 100 persen dibandingkan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 100 persen.

Tiga puluh delapan, pencapaian kinerja untuk sasaran Terwujudnya tatanan kehidupan masyarakat yang aman dan nyaman melalui indikator Persentase Penegakan Perda pada tahun 2023 sebesar 100,00 persen atau realisasi Persentase Penegakan Perda pada tahun 2023 berhasil mencapai target yaitu sebesar 100 persen dibandingkan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 100 persen.

Tiga puluh sembilan, pencapaian kinerja untuk sasaran Terwujudnya tatanan kehidupan masyarakat yang aman dan nyaman melalui indikator Persentase Partisipasi Perempuan Di Lembaga Pemerintah pada tahun 2023 sebesar 1406,65 atau realisasi Persentase Partisipasi Perempuan Di Lembaga Pemerintah pada tahun 2023 sebesar 61,33 sangat berhasil memenuhi target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 4,36 persen.

Empat puluh, pencapaian kinerja untuk sasaran Terwujudnya tatanan kehidupan masyarakat yang aman dan nyaman melalui indikator Proporsi Kursi Yang Diduduki Perempuan Di DPRD pada tahun 2023 sebesar 66,39 persen atau realisasi Proporsi Kursi Yang Diduduki Perempuan Di DPRD pada tahun 2023 kurang berhasil mencapai target

yaitu sebesar 17,5persen dibandingkan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 26,36 persen.

Empat puluh satu, pencapaian kinerja untuk sasaran Terwujudnya tatanan kehidupan masyarakat yang aman dan nyaman melalui indikator Partisipasi Perempuan Di Lembaga Swasta pada tahun 2023 sebesar 114,77 persen atau realisasi Partisipasi Perempuan Di Lembaga Swasta pada tahun 2023 sangat berhasil mencapai target yaitu sebesar 84,52 persen dibandingkan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 97 persen.

Empat puluh dua, pencapaian kinerja untuk sasaran Terwujudnya tatanan kehidupan masyarakat yang aman dan nyaman melalui indikator Rasio KDRT pada tahun 2023 sebesar 198,50 persen atau realisasi Rasio KDRT pada tahun 2023 sangat berhasil mencapai target yaitu sebesar 0,00003 persen dibandingkan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 0,002 persen.

Empat puluh tiga, pencapaian kinerja untuk sasaran Terwujudnya tatanan kehidupan masyarakat yang aman dan nyaman melalui indikator Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan tahun 2023 72,35 persen atau realisasi Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan pada tahun 2023 sangat berhasil mencapai target yaitu sebesar 70 persen dibandingkan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 97 persen.

Empat puluh empat, pencapaian kinerja untuk sasaran Terwujudnya tatanan kehidupan masyarakat yang aman dan nyaman melalui Cakupan Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan Yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan Oleh Petugas Terlatih Di Dalam Unit Pelayanan Terpadu tahun 2023 sebesar 100 persen atau realisasi Cakupan Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan Yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan Oleh Petugas Terlatih Di Dalam Unit Pelayanan Terpadu pada tahun 2023 berhasil mencapai target yaitu sebesar 100 persen dibandingkan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 100 persen.

Empat puluh lima, pencapaian kinerja untuk sasaran Terwujudnya tatanan kehidupan masyarakat yang aman dan nyaman melalui Cakupan Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan Yang Mendapatkan Layanan Kesehatan



Oleh Tenaga Kesehatan Terlatih Di Puskesmas Mampu Tatalaksana Ktp/A Dan Ppt/Pkt Di Rumah Sakit tahun 2023 sebesar 100 persen atau realisasi Cakupan Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan Yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Oleh Tenaga Kesehatan Terlatih Di Puskesmas Mampu Tatalaksana Ktp/A Dan Ppt/Pkt Di Rumah Sakit pada tahun 2023 tidak berhasil mencapai target yaitu sebesar 100 persen dibandingkan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 100 persen.

Empat puluh enam, pencapaian kinerja untuk sasaran Terwujudnya tatanan kehidupan masyarakat yang aman dan nyaman melalui indikator Cakupan Penegakan Hukum Dari Tingkat Penyidikan Sampai Dengan Putusan Pengadilan Atas Kasus-Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak tahun 2023 sebesar 100 persen atau realisasi Cakupan Penegakan Hukum Dari Tingkat Penyidikan Sampai Dengan Putusan Pengadilan Atas Kasus-Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak pada tahun 2023 berhasil mencapai target yaitu sebesar 100 persen dibandingkan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 100 persen.

Empat puluh tujuh, pencapaian kinerja untuk sasaran Terwujudnya tatanan kehidupan masyarakat yang aman dan nyaman melalui indikator Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD Kabupaten tahun 2023 sebesar 100 persen atau realisasi Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD Kabupaten pada tahun 2023 berhasil mencapai target yaitu sebesar 100 persen dibandingkan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 100 persen.

Empat puluh delapan, pencapaian kinerja untuk sasaran Terwujudnya tatanan kehidupan masyarakat yang aman dan nyaman melalui indikator Tersusun Dan Terintegrasinya Program-Program Kerja DPRD Untuk Melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, Dan Fungsi Anggaran Dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) Maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD) tahun 2023 sebesar 100 persen atau realisasi Tersusun Dan Terintegrasinya Program-Program Kerja DPRD Untuk Melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, Dan Fungsi Anggaran Dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) Maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD) pada tahun 2023 berhasil mencapai target yaitu sebesar 100 persen dibandingkan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 100 persen.

Empat puluh delapan, pencapaian kinerja untuk sasaran Terwujudnya tatanan kehidupan masyarakat yang aman dan nyaman melalui indikator Terintegrasi Program-Program DPRD Untuk Melaksanakan Fungsi Pengawasan, Pembentukan Perda Dan Anggaran Ke Dalam Dokumen Perencanaan Dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD pada tahun 2023 sebesar 100 persen atau realisasi Terintegrasi Program-Program DPRD Untuk Melaksanakan Fungsi Pengawasan, Pembentukan Perda Dan Anggaran Ke Dalam Dokumen Perencanaan Dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD pada tahun 2023 berhasil mencapai target yaitu sebesar 100 persen dibandingkan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 100 persen.

5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya.

Anggaran yang direncanakan pada perjanjian kinerja tahun 2023 untuk pencapaian sasaran Terwujudnya tatanan kehidupan masyarakat yang aman dan nyaman adalah sebesar Rp 54.607.412.587 terealisasi sebesar Rp 50.297.711.207 atau 92,11 persen.

6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian sasaran Terwujudnya tatanan kehidupan masyarakat yang aman dan nyaman ini adalah sebanyak 16 program yaitu:

1. Program Penanggulangan bencana
2. Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum
3. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran
4. Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik
5. Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (Mha) Kearifan Lokal Dan Hak Mha Yang Terkait Dengan Pplh
6. Program Perlindungan Perempuan
7. Program Perlindungan Khusus Anak
8. Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan
9. Program Pengarusutamaan Gender Dan pemberdayaan Perempuan
10. Program Peningkatan Kualitas Keluarga
11. Program Pemenuhan Hak Anak (Pha)
12. Program Pengendalian Penduduk
13. Program Pembinaan Keluarga Berencana(Kb)
14. Program Pemberdayaan Dan Peningkatankeluarga Sejahtera (Ks)
15. Program Dukungan Pelaksanaan tugas Dan Fungsi DPRD
16. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan.

BAB III
CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN

3.1 Tugas Pembantuan Pusat yang Dilaksanakan oleh Daerah

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah menjelaskan bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah dilaksanakan berdasarkan azas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Sesuai definisinya Tugas Pembantuan merupakan salah satu azas penyelenggaraan urusan pemerintahan yang berfungsi untuk mendistribusikan tugas dari pemerintah kepada pemerintah daerah baik pemerintah daerah provinsi maupun pemerintah daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat atau penugasan dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi atas dasar prinsip efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan.

Adapun dasar hukum pelaksanaan tugas pembantuan antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Peraturan Pemerintah Nomer 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota ;
5. Peraturan Pemerintah Nomer 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomer 122, Tambahan Lembaran Negara Nomer 6794).

3.1.1 Target Kinerja

Pada Tahun 2023 Kabupaten Bulukumba tidak ada Tugas Pembantuan Provinsi yang Dilaksanakan. Kabupaten Bulukumba hanya melaksanakan Tugas Pembantuan Pusat. Dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 341.440.000,- (Tiga ratus empat puluh satu juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) berada pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dan anggaran sebesar Rp. 3.000.000.000,- (Tiga Miliar Rupiah) berada pada dinas perdagangan. Program kegiatan yang dilaksanakan adalah:

a. Dinas pertanian dan ketahanan pangan

1. Program Ketersediaan Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas, dengan Kegiatan;
 - Pengelolaan Sistem Penyediaan dan Pengawasan Alat dan Mesin Pertanian
 - Fasilitas Pupuk dan Pestisida
 - Fasilitas Pembiayaan Pertanian
2. Program Dukungan Manajemen, dengan Kegiatan;
 - Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian
3. Program Ketersediaan Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas, dengan Kegiatan;
 - Pengelolaan Produksi Tanaman Sereal Tanaman Pangan
4. Program Ketersediaan Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas, dengan Kegiatan;

- Pemantapan Ketersediaan dan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan
- Pengendalian Kerawanan Pangan dan Pemantapan Kewaspadaan Pangan dan Gizi
- Pemantapan Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan

b.Dinas Perdagangan

1. Program Perdagangan Dalam Negeri, dengan Kegiatan;
 - Kegiatan Pengembangan Sarana Perdagangan dan Kapasitas Logistik Perdagangan

3.1.2 Realisasi Kinerja

Tugas Pembantuan Kabupaten Bulukumba yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan mempunyai anggaran sebesar Rp. 341.440.000,- (Tiga Ratus Empat Puluh Satu Juta Empat Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah) dengan Capaian realisasi program/ kegiatan sebesar 100%, dan tugas pembantuan yang dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan mempunyai anggaran sebesar Rp. 3.000.000.000,- (Tiga Milliyar Rupiah) dengan capaian Realisasi anggaran sebesar Rp. 2.897.481.436 (Dua Milliyar Delapan Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Enam Rupiah) atau sebesar 96,58 %.

Matriks Capaian Kinerja Pelaksanaan tugas pembantuan Pusat di Kabupaten Bulukumba sebagaimana pada tabel berikut :

Tabel 3. 1
Matriks Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan Bidang Urusan Pertanian

No.	Bidang Urusan	Dasar Pelaksanaan Penugasan (TP)	Program, Kegiatan, Output dan Rincian Kegiatan	Lokasi	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	%	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9	12
1.	Kementerian Pertanian	Peraturan Menteri/LPN K No..... Tahun..... Ttg....	Program Ketersediaan Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	Kabupaten Bulukumba	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	157.966.000	157.947.650	100	
			Pengelolaan Sistem Penyediaan dan Pengawasan Alat dan Mesin Pertanian			15.000.000	14.999.750	100,00	
			Koordinasi			15.000.000	14.999.750	100,00	
			Bimtek, Monitoring dan Evaluasi Lingkup Alat dan Mesin Pertanian			15.000.000	14.999.750	100,00	
			Monitoring dan Evaluasi Lingkup Alat dan Mesin Pertanian			15.000.000	14.999.750	100,00	
			Kabupaten Bulukumba			15.000.000	14.999.750	100,00	
			Belanja Bahan			1.400.000	1.399.750	100	
			- Penggandaan dokumen Database/Inventrisasi Alsintan dan UPJA			350.000	350.000	100	

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2023

No.	Bidang Urusan	Dasar Pelaksanaan Penugasan (TP)	Program, Kegiatan, Output dan Rincian Kegiatan	Lokasi	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	%	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9	12
			- ATK dan bahan Komputer			550.000	550.000	100	
			- Pengadaan Petunjuk Pelaksanaan			400.000	400.000	100	
			- Fotocopy , dokumen, surat dll			100.000	99.750	100	
			Honor Output Kegiatan			3.600.000	3.600.000	100	
			- Honor Petugas Input BAST Online dan Pemanfaatan Alsintan			1.800.000	1.800.000	100	
			- Honor Petugas Pemeriksa			1.800.000	1.800.000	100	
			Belanja Perjalanan Biasa			10.000.000	10.000.000	100	
			- Monitoring Pemanfaatan alsintan dan Pengumpulan data/Informasi Alsintan dan UPJA			6.000.000	6.000.000	100	
			- Pendampingan, Verifikasi/Monitoring alsintan dan Pembinaan kelembagaan UPJA			4.000.000	4.000.000	100	
			Fasilitas Pupuk dan Pestisida			41.535.000	41.524.950	99,98	
			Koordinasi			17.700.000	17.689.950	99,94	

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2023

No.	Bidang Urusan	Dasar Pelaksanaan Penugasan (TP)	Program, Kegiatan, Output dan Rincian Kegiatan	Lokasi	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	%	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9	12
			Bimtek/Monitoring dan Evaluasi Lingkup Pupuk dan Pestisida			17.700.000	17.689.950	99,94	
			Persiapan, Pelaksanaan Bimbingan Teknis Lingkup Pupuk dan Pestisida			17.700.000	17.689.950	99,94	
			Penguatan KP3 Kabupaten Bulukumba			17.700.000	17.689.950	100	
			Belanja Bahan			1.700.000	1.699.950	100	
			- Penjilidan dan Penggandaan Laporan KP3			1.700.000	1.699.950	100	
			Belanja Perjalanan Biasa			12.000.000	12.000.000	100	
			- Identifikasi Penggunaan Pupuk dan Pestisida di Tingkat Kelompok Tani			5.500.000	5.500.000	100	
			- Konsultasi ke Provinsi			1.000.000	1.000.000	100	
			- Monitoring dan Pembinaan Peredaran Pupuk dan Pestisida			5.500.000	5.500.000	100	
			Belanja Perjalanan Biasa			4.000.000	3.990.000	100	
			- Rapat Penyusunan Laporan KP3			4.000.000	3.990.000,00	99,75	

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2023

No.	Bidang Urusan	Dasar Pelaksanaan Penugasan (TP)	Program, Kegiatan, Output dan Rincian Kegiatan	Lokasi	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	%	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9	12
			Pelayanan Publik Kepada Masyarakat			23.835.000	23.835.000	100,00	
			Penerimaan Pupuk Bersubsidi yang Diverifikasi dan Divalidasi			23.835.000	23.835.000	100,00	
			Penetapan Penerima Pupuk Bersubsidi			23.835.000	23.835.000	100,00	
			Kabupaten Bulukumba			23.835.000	23.835.000	100,00	
			Belanja Honor Output Kegiatan			2.000.000	2.000.000	100	
			- Honor Tim Pendataan Entry dan Updating Data Sistem Alokasi Pupuk Bersubsidi (2 Org x 1 Bln x 10 Kec)			2.000.000	2.000.000	100	
			Kabupaten Bulukumba			21.835.000	21.835.000	100,00	
			Belanja Honor Output Kegiatan			21.835.000	21.835.000	100	
			- Honor Tim Verifikasi dan Validasi Kecamatan/Tim Pengawasan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Berbasis Kartu Tani (2 Org X 11 Bln X 10 Kec)			21.835.000	21.835.000	100	
			Fasilitasi Pembiayaan Pertanian			25.231.000	25.222.950	99,97	

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2023

No.	Bidang Urusan	Dasar Pelaksanaan Penugasan (TP)	Program, Kegiatan, Output dan Rincian Kegiatan	Lokasi	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	%	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9	12
			Prasarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup			25.231.000	25.222.950	99,97	
			Asuransi Pertanian			25.231.000	25.222.950	99,97	
			Persiapan dan Pelaksanaan Kegiatan Asuransi Pertanian			25.231.000	25.222.950	99,97	
			Kabupaten Bulukumba			25.231.000	25.222.950	99,97	
			Belanja Bahan			3.531.000	3.522.950	100	
			- ATK,Bahan Komputer			1.963.000	1.963.000	100	
			- Penggandaan dan Penjilidan Laporan			300.000	299.950	100	
			- Konsumsi rapat			1.268.000	1.260.000	99	
			Honor Output Kegiatan			4.200.000	4.200.000	100	
			- Honor Ketua (1 Org X 3 Bln)			600.000	600.000	100	
			- Honor Anggota (4 Org X 3 Bln)			1.800.000	1.800.000	100	

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2023

No.	Bidang Urusan	Dasar Pelaksanaan Penugasan (TP)	Program, Kegiatan, Output dan Rincian Kegiatan	Lokasi	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	%	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9	12
			- Petugas Kegiatan (Peginput data Pendaftaran dan klaim) (4 Org X 3 Bln)			1.800.000	1.800.000	100	
			Belanja Perjalanan Biasa			14.000.000	14.000.000	100	
			- Verifikasi Wilayah, Identifikasi Pendaftaran dan Dokumen Asuransi			5.200.000	5.200.000	100	
			- Pembinaan, Sosialisasi, Monitoring dan Evaluasi Pembiayaan Pertanian			8.800.000	8.800.000	100	
			Belanja Perjalanan Dinas Dlam kota			3.500.000	3.500.000	100	
			- Transportasi Koordinasi/Pengumpulan data/evaluasi untuk petugas lapangan dan Administrasi			3.500.000	3.500.000	100	
			Program Dukungan Manajemen			76.200.000	76.200.000	100,00	
			Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian			76.200.000	76.200.000	100,00	
			Layanan Dukungan dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen PSP			76.200.000	76.200.000	100,00	
			Layanan Manajemen Keuangan			76.200.000	76.200.000	100,00	

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2023

No.	Bidang Urusan	Dasar Pelaksanaan Penugasan (TP)	Program, Kegiatan, Output dan Rincian Kegiatan	Lokasi	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	%	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9	12
			Layanan Manajemen Keuangan			76.200.000	76.200.000	100,00	
			KABUPATEN BULUKUMBA			76.200.000	76.200.000	100,00	
			Honor Operasional Satuan Kerja			37.800.000	37.800.000	100,00	
			> ADMINISTRASI TEKNIS KABUPATEN						
			- Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen			15.600.000	15.600.000	100,00	
			- Honorarium Pelaksana Kegiatan di Kabupaten/Kota			6.000.000	6.000.000	100,00	
			- Honorarium Pembantu Pelaksana Kegiatan di Kabupaten/Kota			4.200.000	4.200.000	100,00	
			- Honorarium Bendahara Pengeluaran Pembantu			4.800.000	4.800.000	100,00	
			- Honorarium Staf Bendahara Pembantu			3.600.000	3.600.000	100,00	
			- Honor Staf Penyusun Pelaporan Online			3.600.000	3.600.000	100,00	
			Belanja Bahan			6.000.000	6.000.000	100,00	

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2023

No.	Bidang Urusan	Dasar Pelaksanaan Penugasan (TP)	Program, Kegiatan, Output dan Rincian Kegiatan	Lokasi	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	%	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9	12
			- ATK Penyusunan Laporan			2.800.000	2.800.000	100,00	
			- Penyusunan dan Laporan Tahunan Satker			1.400.000	1.400.000	100,00	
			- Pengiriman, Perbanyakan dan Penjilidan			1.800.000	1.800.000	100,00	
			Belanja perjalanan Dinas Biasa			26.500.000	26.500.000	100,00	
			- Perjalanan dalam rangka Pembinaan, Teknis, Administrasi, Monitoring dan Pelaporan			16.000.000	16.000.000	100,00	
			- Perjalanan dalam rangka Pembinaan Kegiatan Lingkup Ditjen PSP			4.200.000	4.200.000	100,00	
			- Perjalanan dalam rangka Konsultasi ke Propinsi			6.300.000	6.300.000	100,00	
			Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting dalam Kota			3.500.000	3.500.000	100,00	
			- Akomodasi dan Konsumsi Rapat			3.500.000	3.500.000	100,00	
			Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota			2.400.000	2.400.000	100,00	
			- Perjalanan dlm rangka Percepatan, teknis administrasi, monitoring dan pelaporan kegiatan			2.400.000	2.400.000	100,00	

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2023

No.	Bidang Urusan	Dasar Pelaksanaan Penugasan (TP)	Program, Kegiatan, Output dan Rincian Kegiatan	Lokasi	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	%	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9	12
			Program Ketersediaan Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas			55.500.000	55.500.000	100,00	
			Pengelolaan Produksi Tanaman Serealia Tanaman Pangan			55.500.000	55.500.000	100,00	
			Koordinasi (Base Line)			55.500.000	55.500.000	100,00	
			Kabupaten Bulukumba			55.500.000	55.500.000	100,00	
			Belanja Bahan			1.000.000	1.000.000	100,00	
			- Penyusunan dan Penggandaan Juknis Kegiatan Serealia			1.000.000	1.000.000	100,00	
			Belanja Barang Persediaan Barang Konsumtif			4.500.000	4.500.000	100,00	
			- ATK, bahan komputer Kegiatan Serealia			4.500.000	4.500.000	100,00	
			Belanja Perjalanan Biasa			50.000.000	50.000.000	100,00	
			- Perjalanan identifikasi dan verifikasi CPCL, pelaksanaan, monitoring dan pelaporan			30.000.000	30.000.000	100,00	
			- Perjalanan konsultasi/koordinasi ke provinsi kegiatan serealia			20.000.000	20.000.000	100,00	

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2023

No.	Bidang Urusan	Dasar Pelaksanaan Penugasan (TP)	Program, Kegiatan, Output dan Rincian Kegiatan	Lokasi	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	%	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9	12
			Program Ketersediaan Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas			127.974.000	127.974.000	100,00	
			Pemantapan Ketersediaan dan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan			64.894.000	64.894.000	100,00	
			Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan			8.074.000	8.074.000	100,00	
			Rekomendasi Kebijakan Ketersediaan Pangan			8.074.000	8.074.000	100,00	
			Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Ketersediaan Pangan			8.074.000	8.074.000	100,00	
			Penyusunan Prognosa Neraca Pangan Wilayah			8.074.000	8.074.000	100,00	
			Belanja Bahan			3.074.000	3.074.000	100	
			- Fotocopy dan perbanyak laporan			199.000	199.000	100	
			- Rapat/ Pertemuan Koordinasi (35 Org X 1 Kali)			2.275.000	2.275.000	100	
			- Perbanyak Laporan			600.000	600.000	100	
			Belanja Honor Output Kegiatan			2.400.000	2.400.000	100	

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2023

No.	Bidang Urusan	Dasar Pelaksanaan Penugasan (TP)	Program, Kegiatan, Output dan Rincian Kegiatan	Lokasi	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	%	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9	12
			- Honor Petugas Input Data (1 org X 6 Bln)			2.400.000	2.400.000	100	
			Belanja Perjalanan Dinas Biasa			2.600.000	2.600.000	100	
			- Perjalanan Konsultasi ke Provinsi			2.600.000	2.600.000	100	
			Koordinasi			56.820.000	56.820.000	100,00	
			Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev, dan Pelaporan Ketersediaan Pangan			4.915.000	4.915.000	100,00	
			Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev, dan Pelaporan Ketersediaan Pangan			4.915.000	4.915.000	100,00	
			Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev, dan Pelaporan Ketersediaan Pangan			4.915.000	4.915.000	100	
			Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat			250.000	250.000	100	
			- Belanja Pengiriman Surat			250.000	250.000	100	
			Belanja Bahan			3.165.000	3.165.000	100	
			- Fotocopy dan Perbanyak			390.000	390.000	100	

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2023

No.	Bidang Urusan	Dasar Pelaksanaan Penugasan (TP)	Program, Kegiatan, Output dan Rincian Kegiatan	Lokasi	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	%	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9	12
			- Rapat/Pertemuan Koordinasi (35 x 1 kali)			2.275.000	2.275.000	100	
			- Perbanyak Laporan			500.000	500.000	100	
			Belanja Perjalanan Dinas Biasa			1.500.000	1.500.000	100	
			- Perjalanan Konsultasi ke Provinsi			1.500.000	1.500.000	100	
			Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev, dan Pelaporan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan			48.125.000	48.125.000	100,00	
			Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev, dan Pelaporan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan			48.125.000	48.125.000	100,00	
			Koordinasi Stablisasi Pasokan dan Harga Pangan			48.125.000	48.125.000	100,00	
			Belanja Bahan			20.925.000	20.925.000	100	
			- Rapat/Pertemuan Koordinasi			4.250.000	4.250.000	100	
			- Bahan Promosi			15.338.000	15.338.000	100	

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2023

No.	Bidang Urusan	Dasar Pelaksanaan Penugasan (TP)	Program, Kegiatan, Output dan Rincian Kegiatan	Lokasi	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	%	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9	12
			- Pencetakan Laporan			1.337.000	1.337.000	100	
			Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi			3.000.000	3.000.000	100	
			-ATK			3.000.000	3.000.000	100	
			Belanja Jasa Profesi			4.700.000	4.700.000	100	
			- Honor Narasumber			4.000.000	4.000.000	100	
			- Honor Moderator			700.000	700.000	100	
			Belanja Perjalanan Dinas Biasa			12.000.000	12.000.000	100	
			- Monitoring Evaluasi Pasokan dan Harga Pangan			12.000.000	12.000.000	100	
			Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota			7.500.000	7.500.000	100	
			- Koordinasi, Pemantauan, dan Pengumpulan Data			7.500.000	7.500.000	100	
			Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Distribusi dan Cadangan Pangan			3.780.000	3.780.000	100,00	

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2023

No.	Bidang Urusan	Dasar Pelaksanaan Penugasan (TP)	Program, Kegiatan, Output dan Rincian Kegiatan	Lokasi	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	%	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9	12
			Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev, dan Pelaporan Distribusi dan Cadangan Pangan			3.780.000	3.780.000	100,00	
			Penguatan Cadangan Pangan Nasional			3.780.000	3.780.000	100,00	
			Belanja Bahan			1.000.000	1.000.000	100	
			- Rapat/Pertemuan Koordinasi (10 org x 2 kali)			1.000.000	1.000.000	100	
			Belanja Perjalanan Dinas Biasa			1.880.000	1.880.000	100	
			-Dalam rangka koordinasi, konsultasi, dan sinkronisasi ke Provinsi			1.880.000	1.880.000	100	
			Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota			900.000	900.000	100	
			- Transport Lokal			900.000	900.000	100	
			Pengendalian Kerawanan Pangan dan Pemantapan Kewaspadaan Pangan dan Gizi			33.080.000	33.080.000	100,00	
			Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan			23.500.000	23.500.000	100,00	
			Rekomendasi Kebijakan Pengendalian Kerawanan Pangan			23.500.000	23.500.000	100,00	

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2023

No.	Bidang Urusan	Dasar Pelaksanaan Penugasan (TP)	Program, Kegiatan, Output dan Rincian Kegiatan	Lokasi	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	%	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9	12
			Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Pengendalian Kerawanan Pangan			23.500.000	23.500.000	100,00	
			Fasilitasi Penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (FSVA)			23.500.000	23.500.000	100,00	
			Belanja Bahan			7.500.000	7.500.000	100	
			- Rapat/ Pertemuan Koordinasi			7.500.000	7.500.000	100	
			Belanja Honor Output Kegiatan			6.000.000	6.000.000	100	
			- Honor Tim FSVA (5 org x 4 bln)			6.000.000	6.000.000	100	
			Belanja Barang Persediaan Barang konsumsi			2.000.000	2.000.000	100	
			- ATK dan Komputer Supplies			1.000.000	1.000.000	100	
			- Pencetakan			1.000.000	1.000.000	100	
			Belanja Perjalanan Dinas Dalam kota			8.000.000	8.000.000	100	
			- Transport Lokal (3 org x 2 keg)			8.000.000	8.000.000	100	

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2023

No.	Bidang Urusan	Dasar Pelaksanaan Penugasan (TP)	Program, Kegiatan, Output dan Rincian Kegiatan	Lokasi	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	%	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9	12
			Data dan Informasi Publik			9.580.000	9.580.000	100,00	
			Data dan Informasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi			9.580.000	9.580.000	100,00	
			Data dan Informasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi			9.580.000	9.580.000	100,00	
			Data dan Informasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi			9.580.000	9.580.000	100,00	
			Belanja Bahan			900.000	900.000	100	
			- Rapat/ Pertemuan Koordinasi (10 org x 2 keg)			900.000	900.000	100	
			Belanja Honor Output Kegiatan			4.500.000	4.500.000	100	
			- Honor Tim SKPG (3 org x 5 bln)			4.500.000	4.500.000	100	
			Belanja Barang Persediaan Barang konsumsi			1.180.000	1.180.000	100	
			- Pencetakan dan Penjilidan Laporan			1.180.000	1.180.000	100	
			Belanja Perjalanan Dinas Dalam kota			3.000.000	3.000.000	100	

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2023

No.	Bidang Urusan	Dasar Pelaksanaan Penugasan (TP)	Program, Kegiatan, Output dan Rincian Kegiatan	Lokasi	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	%	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9	12
			- Transport Lokal (3 org x 2 keg)			3.000.000	3.000.000	100	
			Pemantapan Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan			30.000.000	30.000.000	100,00	
			Perizinan Produk			30.000.000	30.000.000	100,00	
			Sertifikat sarana dan produk pangan segar yang memenuhi			30.000.000	30.000.000	100,00	
			Sertifikat dan Registrasi			30.000.000	30.000.000	100,00	
			Pendataan Pelaku Usaha Pangan Segar			30.000.000	30.000.000	100,00	
			Belanja Bahan			4.250.000	4.250.000	100,00	
			- Penyusunan dan Perbanyak Laporan			350.000	350.000	100	
			- Sosialisasi Keamanan Pangan Segar			3.900.000	3.900.000	100	
			Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi			1.300.000	1.300.000	100	
			- ATK			1.300.000	1.300.000	100	

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2023

No.	Bidang Urusan	Dasar Pelaksanaan Penugasan (TP)	Program, Kegiatan, Output dan Rincian Kegiatan	Lokasi	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	%	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9	12
			Belanja Jasa Profesi			1.200.000	1.200.000	100	
			- Honor Narasumber Sosialisasi			1.200.000	1.200.000	100	
			Belanja Perjalanan Dinas Biasa			14.250.000	14.250.000	100	
			-Perjalanan ke Provinsi			3.000.000	3.000.000	100	
			- Perjalanan dalam rangka pendataan			11.250.000	11.250.000	100	
			Belanja Perjalanan Dinas Dalam kota			9.000.000	9.000.000	100	
			- Bantuan transport			9.000.000	9.000.000	100	

Tabel 3. 2
Matriks Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan Bidang Urusan Perdagangan

No	K/LPNK	Dasar Pelaksanaan Penugasan (TP)	Program, Kegiatan, Output dan Rincian Kegiatan	Lokasi	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	(%)	Realisasi Capaian Kegiatan	(%)	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Kementerian Perdagangan RI	Peraturan Menteri Perdagangan RI No.12 Tahun 2023 Tentang Penugasan Bupati/Wali Kota dalam Rangka Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan/Revitalisasi sarana Perdagangan Berupa Pasar Rakyat melalui dana tugas pembantuan Tahun Anggaran 2023	Program Perdagangan Dalam Negeri Kegiatan Pengembangan Sarana Perdagangan dan Kapasitas Logistik Perdagangan Keluaran : Terlaksananya Pembangunan Pasar Rakyat Pa'baeng-Baeng Rincian Kegiatan : Pembangunan Pasar Pa'Baeng-Baeng	Pasar Pa'baeng-Baeng Desa Anrihua Kec. Kindang Kabupaten Bulukumba	Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kab. Bulukumba	3.000.000.000	2.897.481.436	96,58	Terlaksananya Pembangunan Pasar Rakyat Pa'baeng-Baeng	100	

3.1.3 Hambatan/Permasalahan dalam Pelaksanaan Tugas Pembantuan dan Upaya Penyelesaian

Pelaksanaan tugas pembantuan yang dialokasikan oleh Kementerian Pertanian RI tahun 2023 di kabupaten Bulukumba tidak mengalami hambatan, hanya beberapa hal yang perlu untuk diperbaiki dimasa depan terutama untuk mendukung pencapaian strategi Peningkatan Ketahanan Pangan Nasional dan daya saing produk pertanian sebagaimana yang diamanahkan dalam Rencana Strategis Kementerian Pertanian Tahun 2021-2024 dan diselaraskan dengan pencapaian tujuan sasaran strategis RPJMD Kabupaten Bulukumba dan Renstra Dinas Pertanian tahun 2022-2026.

3.1.4 Saran dan Tindak Lanjut

Adapun saran dan tindak lanjut diantaranya sebagai berikut:

1. Terhadap pencapaian Peningkatan Produktivitas dan Produksi Komoditas Prioritas Pertanian dengan fokus utama program padat karya pertanian misalnya pembangunan infrastruktur pertanian seperti jalan usaha tani, rehabilitasi jaringan irigasi, atau pengembangan prasarana dan sarana pertanian lainnya yang melibatkan warga atau swadaya masyarakat harus betul-betul memprioritaskan kualitas dan efesiensi anggaran yang dialokasikan sejak dari perencanaan, pelaksanaan hingga penyelesaian tahapan kegiatan dilapangan
2. Dinas Pertanian/Bidang teknis harus terus meningkatkan berkoordinasi dengan seluruh stakeholder demi mengawal pelaksanaan kegiatan dilapangan baik pelaksanaan kegiatan fisik maupun pengawalan kegiatan pendukung lainnya termasuk dalam penyusunan RDKK dan pengawasan pupuk.
3. Dinas Perdagangan/Bidang teknis harus terus berkoordinasi dengan seluruh stakeholder dan masyarakat demi mengawal pelaksanaan kegiatan dilapangan terutama pelaksanaan kegiatan fisik.

**BAB IV
PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN
MINIMAL**

4.1 Latar Belakang

Salah satu konsep Otonomi Daerah di Indonesia memberikan perwujudan kepada Pemerintah Daerah untuk mengefisienkan pelayanan pemerintahan pada konteks geografis dan demografis dalam luasan yang besar seperti negara Indonesia. Dengan memberikan sebagian kewenangan yang ada di pemerintah Pusat ke pemerintah Daerah atau yang disebut desentralisasi, harapannya adalah bahwa pelayanan pemerintah kepada warganya semakin didekatkan dan selanjutnya peningkatan kualitas dan akses pelayanan dapat ditingkatkan secara menerus seiring dengan intensipnya interaksi antara warga dengan pemerintahnya.

Hubungan antara warga selaku konstituen dengan Kepala Daerah yang telah dipilih oleh warganya dalam era demokrasi otonomi dan desentralisasi ini menjadi hubungan yang lebih langsung baik dalam pelayanan maupun kebijakan lainnya. Terkait dengan pelayanan, pada hakekatnya ada pelayanan kepada masyarakat yang tidak boleh di bedakan antara satu daerah dengan daerah lainnya. Tetapi, dilain sisi fungsi pelayanan pemerintah pusat hanya dapat diselenggarakan di daerah.

Dari dua pertimbangan di atas, selanjutnya diperintahkan kepada seluruh daerah untuk mewujudkan fungsi pelayanan yang menjadi tanggung jawab pemerintah, baik pemerintah pusat dan daerah.

Sesuai dengan kapasitas keuangan negara dan prioritas pembangunan yang ada, maka wujud pelayanan yang diwajibkan di atas merupakan pelayanan yang minimal yang dapat diberikan oleh pemerintah melalui pemerintahan di daerah baik pemerintah provinsi, kabupaten dan kota. Sehingga, pelayanan yang diberikan bukanlah

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2023

pelayanan yang diorientasikan untuk memberikan kepuasan kepada masyarakat, tetapi merupakan pelayanan dasar. Sementara bila ada daerah yang lebih mampu memberikan pelayanan yang dapat lebih memuaskan masyarakat, berdasarkan pada kreativitas dan inovasi dari pemerintah daerah tersebut sehingga dikatakan sebagai pelayanan minimal.

Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal. Sesuai dengan amanat Pasal 11 ayat (4) dan Pasal 14 ayat (3) Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2018 tentang Standar.

Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal

SPM diterapkan pada Urusan Wajib Daerah yang berkaitan dengan pelayanan dasar, baik daerah Provinsi maupun Daerah Kabupaten/Kota. Untuk urusan Pemerintahan lainnya, daerah dapat mengembangkan dan menerapkan standar/indikator kinerja. Dalam penerapannya, SPM harus menjamin akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dasar dari Pemerintahan Daerah sesuai dengan ukuran-ukuran yang ditetapkan oleh Pemerintah. Oleh karena itu, baik dalam perencanaan maupun penganggaran, wajib diperhatikan prinsip-prinsip SPM yaitu sederhana, konkrit, mudah diukur, terbuka, terjangkau dan dapat dipertanggungjawabkan serta mempunyai batas waktu pencapaian.

SPM juga diposisikan untuk menjawab isu-isu krusial dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, khususnya dalam pelayanan dasar yang bermuara pada terciptanya kesejahteraan masyarakat. Upaya ini sangat sesuai dengan apa yang secara normatif dijamin dalam

**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2023**

konstitusi sekaligus untuk menjaga kelangsungan kehidupan berbangsa yang serasi, harmonis dan utuh dalam koridor Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Adapun urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar terdiri atas :

1. Pendidikan;
2. Kesehatan;
3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
4. Perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
5. Ketentraman, Ketertiban umum dan perlindungan masyarakat; dan
6. Sosial.

Untuk memberikan pelayanan publik secara maksimal kepada masyarakat, yang berorientasi terhadap terwujudnya pelayanan publik yang prima dan excellent, maka Pemerintah Kabupaten Bulukumba menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dalam menyelenggarakan pelayanan dasar dengan tujuan peningkatan pelayanan prima yang secara langsung menyentuh kepentingan masyarakat umum sehingga terwujud suatu pelayanan prima menuju Good Governance.

a. Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Laporan Standar Pelayanan Minimal adalah sebagai berikut:

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
- b. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 59 tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal.
- c. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
- d. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan daerah Kabupaten/Kota;

**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2023**

- e. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
- f. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal;
- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub-Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di provinsi dan kabupaten/Kota;
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Su-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota;
- i. Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 80 tahun 2023-2027 tentang Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
- j. Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 188.7 – 25 Tahun 2024 tentang Pembentukan Tim Penyusunan Dokumen Penerapan standar Pelayanan Minimal Di Lingkungan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2024.

Penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) dalam penyusunannya didasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut :

- a. Diterapkan pada urusan wajib. Oleh karena itu SPM merupakan bagian integral dari Pembangunan yang berkesinambungan, menyeluruh, terpadu sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional.
- b. Diberlakukan untuk seluruh Daerah Kabupaten dan Daerah Kota. SPM harus mampu memberikan pelayanan kepada publik tanpa kecuali (tidak hanya masyarakat miskin), dalam bentuk, jenis, tingkat dan mutu pelayanan yang esensial dan sangat dibutuhkan oleh masyarakat.
- c. Menjamin akses masyarakat mendapat pelayanan dasar tanpa mengorbankan mutu dan mempunyai dampak luas pada masyarakat.

- d. Merupakan indikator kinerja bukan standar teknis, dikelola dengan manajerial profesional sehingga tercapai efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya.
- e. Bersifat dinamis

4.2 Kebijakan Umum

Strategi pembangunan daerah yang diterapkan oleh Pemerintah Kabupaten Bulukumba dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran diwujudkan dalam bentuk kebijakan-kebijakan dan program-program.

Kebijakan merupakan arah/ketentuan yang ditetapkan oleh instansi pemerintahan sebagai dasar untuk dijadikan pedoman, pegangan/petunjuk dalam melaksanakan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam mewujudkan tujuan dan sasaran.

Kebijakan dan program pembangunan yang diterapkan oleh Pemerintah Kabupaten Bulukumba untuk mencapai sasaran adalah meningkatnya aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan Pemerintah daerah yang ditetapkan dengan kebijakan meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan publik, dengan program penyempurnaan sistem manajemen pelayanan publik. Sistem yang demikian diharapkan akan dapat memenuhi kebutuhan data dan informasi diberbagai tingkatan administrasi dalam rangka peningkatan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

SPM yang telah ditetapkan pemerintah menjadi salah satu acuan bagi Pemerintah Kabupaten Bulukumba untuk menyusun perencanaan dan penganggaran penyelenggaraan Pemerintah daerah. Pemerintah Kabupaten Bulukumba menyusun rencana pencapaian SPM yang memuat target tahunan pencapaian SPM dengan mengacu pada batas waktu pencapaian SPM sesuai dengan Peraturan Menteri. Rencana pencapaian SPM dalam Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategi (Renstra) Satuan Organisasi Perangkat Daerah Daerah. Target tahunan pencapaian SPM dituangkan

**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2023**

ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Kerja Satuan Kerja Organisasi perangkat Daerah (Renja OPD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) sesuai klasifikasi belanja daerah dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.

4.3 Arah Kebijakan

Strategi pembangunan daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Bulukumba dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran diwujudkan dalam bentuk kebijakan-kebijakan dan program-program. Kebijakan merupakan arah/ketentuan yang ditetapkan oleh instansi pemerintah sebagai dasar untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam melaksanakan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam mewujudkan tujuan dan sasaran. Sehingga kedepanya dalam pelaksanaan dan penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Kabupaten Bulukumba harus dilaksanakan dengan mengintegrasikan seluruh sistem perencanaan mulai dari renstra, Renja, RPJMD, RKPD dan dokumen perencanaan lainnya.

4.4 Capaian SPM

4.4.1 Bidang Urusan Pendidikan

Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal urusan Pendidikan, disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan. Penyusunan Laporan Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Pendidikan bertujuan untuk memberikan informasi sekaligus sebagai evaluasi kinerja pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bulukumba Tahun 2022.

Pada hakekatnya pendidikan diharapkan dapat memperkuat keutuhan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, memberi kesempatan yang sama bagi setiap warga negara untuk berpartisipasi dalam pembangunan dan memungkinkan setiap warga negara untuk mengembangkan potensi yang dimilikinya secara optimal khususnya dalam meningkatkan Sumber Daya Manusia melalui Pendidikan, cerdas dan berahlak mulai serta memiliki daya saing yang di prioritaskan bagi warga Negara yang berhak memperoleh Pelayanan Dasar secara minimal sesuai dengan jenis pelayanan dasar dan mutu pelayanan dasarnya.

SPM Pendidikan ditetapkan dan diterapkan berdasarkan prinsip :

1. Kesesuaian kewenangan ; yaitu diterapkan sesuai dengan kewenangan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota menurut pembagian urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar.

**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2023**

2. Ketersediaan; yaitu diterapkan dalam rangka menjamin tersedianya barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh setiap warga negara secara minimal.
3. Keterjangkauan ; yaitu ditetapkan dan diterapkan dalam rangka menjamin barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang mudah diperoleh oleh setiap warga negara.
4. Kesenambungan ; yaitu ditetapkan dan diterapkan untuk memberikan jaminan tersedianya barang dan/atau jasa kebutuhan dasar warga negara secara terus-menerus
5. Keterukuran ; yaitu ditetapkan dan diterapkan untuk memberikan jaminan tersedianya barang dan/atau jasa kebutuhan dasar warga negara secara terus-menerus
6. ketepatan sasaran; yaitu diterapkan untuk pemenuhan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal dan pemenuhan oleh Pemerintah Daerah ditujukan kepada warga negara dengan memprioritaskan bagi keluarga miskin atau tidak mampu.

4.4.1.1 Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar adalah jenis-jenis pelayanan dasar yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah yang telah ditetapkan SPM nya oleh Pemerintah. Adapun jenis pelayanan dasar dan indikator yang harus dicapai dalam penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan sesuai Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021. Jenis Pelayanan Dasar pada SPM Pendidikan daerah kabupaten/kota terdiri atas:

1. Pendidikan anak usia dini ; merupakan peserta didik berusia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
2. Pendidikan dasar ; merupakan peserta didik berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan dasar.
3. Pendidikan kesetaraan ; merupakan peserta didik yang berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun. Dimana

**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2023**

jumlah penduduk usia 17-18 tahun yang belum menyelesaikan Pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam Pendidikan kesetaraan

Pelayanan Dasar untuk setiap Jenis Pelayanan Dasar SPM Pendidikan mencakup:

1. Standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa Standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa meliputi : standar satuan pendidikan, dan standar biaya pribadi Peserta Didik.
2. Standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan; terdiri atas: a). standar kompetensi lulusan; b). standar isi; c). standar proses; d). standar sarana dan prasarana; e). standar pengelolaan; f). standar pembiayaan; dan g). standar penilaian.
3. Tata cara pemenuhan standar : sesuai dengan jenjang pendidikan yang terdiri atas: a). perlengkapan dasar Peserta Didik; dan b). pembiayaan pendidikan.

4.4.1.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Pendidikan

Jenis pelayanan dasar adalah jenis-jenis pelayanan dasar yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah yang telah ditetapkan SPM nya oleh Pemerintah. Sasaran strategisnya jangka menengah Kabupaten Bulukumba berdasarkan restra tahun 2021 – 2026 yaitu :

- a. Meningkatnya layanan dan mutu Pendidikan masyarakat sesuai SPM
- b. Meningkatnya derajat Pendidikan masyarakat secara merata dan berkualitas.

Adapun jenis pelayanan dasar dan indikator yang harus dicapai dalam penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan sesuai Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 1.

Target dan Indikator Penerima Layanan Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan menurut Permendagri 59 tahun 2021 untuk Kabupaten/Kota.

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Batas Waktu Pencapaian
1.	Pendidikan Dasar	Jumlah Warga Negara Usia 7- 15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/Mi, SMP/MTs)	100 %	Setiap Tahun
2.	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah Warga Negara Usia 7– 18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan.	100 %	Setiap Tahun
3.	Pendidikan anak usia dini	Jumlah Warga Negara Usia 5- 6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	100 %	Setiap Tahun

Sumber : Permendagri Nomor 59 Tahun 2021

Untuk Pencapaian target dan Indikator Penerima Layanan Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan menurut Permendagri 59 tahun 2021 untuk Kabupaten/Kota yang telah ditetapkan ditargetkan capaian 100 Persen (%) setiap tahun dari masing masing jenis pelayanan dasar dengan indikator : Jumlah Warga Negara Usia 7- 15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/Mi, SMP/MTs), Jumlah Warga Negara Usia 7– 18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan dan Jumlah Warga Negara Usia 5- 6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD.

4.4.1.3 Realisasi

Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar selanjutnya disebut SPM Pendidikan adalah tolak ukur kinerja pelayanan Pendidikan Dasar melalui jalur Pendidikan Formal yang diselenggarakan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bulukumba. Untuk melihat Realisasi capaian Standar Pelayanan Minimal Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bulukumba Tahun 2022, dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.

Realisasi Capaian Standar Pelayanan Minimal Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bulukumba Tahun 2023.

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Capaian		
			Jumlah penduduk usia sekolah (Orang)	Jumlah penduduk yang mendapatkan pelayanan pendidikan (Orang)	Capaian (%)
1.	Pendidikan Dasar	Jumlah Warga Negara Usia 7- 15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	65.437	63.532	97%
2.	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah Warga Negara Usia 7– 18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan.	3.978	3.843	96,5%
3.	Pendidikan anak usia dini	Jumlah Warga Negara Usia 5- 6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	11.854	10.777	90%

Sumber : Data Capaian SPM Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, tahun 2023

Berdasarkan tabel di atas, dapat digambarkan bahwa capaian SPM Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Bulukumba tahun 2023 dari total penduduk usia 5-6 tahun sebesar 11.850 yang sudah

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2023

mendapatkan layanan pendidikan anak usia dini pada usia 5-6 tahun sebesar 10.777 atau sekitar 96,5%.

Capaian SPM Pendidikan dasar, berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa dari total penduduk usia 7-15 tahun sebesar 65.437 orang yang telah mendapatkan layanan pendidikan dasar sebanyak 3.843 orang atau persentase pada kisaran 97%.

Pada tabel di atas, dapat digambarkan bahwa capaian SPM Pendidikan Kesetaraan di Kabupaten Bulukumba tahun 2023 dari total penduduk usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan berpartisipasi di Pendidikan Kesetaraan sebanyak 3.978 orang dan yang sudah mendapatkan layanan pendidikan kesetaraan usia 7-18 tahun sebanyak 3.843 atau sekitar 96,5%.

4.4.1.4 Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran tahun 2023 di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bulukumba dalam rangka pencapaian target Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan di Kabupaten Bulukumba berjumlah Rp. 120.161.006.652,- dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.

Alokasi Anggaran dalam pencapaian Standar Pelayanan Minimal Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bulukumba Tahun 2023.

No.	Program	Anggaran
1	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	82.701.295.352,-
2	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	24.092.438.500,-
3	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	9.553.128.000,-
4	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	4.265.144.800,-

4.4.1.5 Dukungan Personil

Dukungan personil menggambarkan jumlah personil atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada Dinas Pendidikan dan kebudayaan

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2023

Kabupaten Bulukumba sebanyak 125 orang dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4.

Dukungan Personil dalam pencapaian Standar Pelayanan Minimal Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bulukumba berdasarkan Golongan, Tahun 2023.

No.	Pangkat/Golongan	Jumlah (Orang)
1.	Golongan IV	11
2.	Golongan III	43
3.	Golongan II	10
4.	Non ASN	61
Jumlah		125

Sumber : Data ASN Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bulukumba, Tahun 2023.

Berdasarkan tabel 3 terlihat bahwa dukungan personil berdasarkan pangkat/golongan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bulukumba memperlihatkan angka yang cukup bervariasi. Golongan III memperlihatkan angka yang cukup tinggi yaitu sebesar 43 orang, Golongan IV sebanyak 11 orang, golongan II sebanyak 10 orang. Dengan jenjang kepangkatan/golongan tersebut tersebut diharapkan dapat mempercepat pencapaian Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) khususnya bidang pendidikan. Karna berdasarkan tingkat golongan dapat dilihat bagaimana kondisi Sumber daya manusia pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bulukumba dalam mempercepat pencapaian Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) khususnya bidang pendidikan.

4.4.1.6 Permasalahan dan Solusi

Permasalahan yang dihadapi saat ini dalam pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang pendidikan adalah :

1. Tenaga pendidik pada semua jenjang pendidikan belum 100% berkualifikasi S1/DIV
- Sarana dan prasarana semua jenjang pendidikan belum memadai, masih terdapat beberapa sekolah dengan ruang kelas

dan bangunan penunjang sekolah lainnya dalam kondisi rusak ringan dan sedang.

- Pendataan dan verifikasi anak tidak sekolah di tingkat desa dan kelurahan belum optimal.
- Masih minimnya alokasi anggaran untuk pemenuhan SPM

Adapun solusi dari permasalahan tersebut adalah :

1. Perlunya peningkatan kompetensi untuk peningkatan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan pada semua jenjang Pendidikan
2. Mengoptimalkan pemenuhan dan peningkatan kualitas sarana dan prasarana sekolah.
3. Perlunya Kerjasama dengan berbagai pihak untuk lebih fokus terkait dengan pendataan anak tidak sekolah seperti:
Dinas Sosial, Bappelitbangda dan Pemerintah Desa/Kelurahan
4. Perlunya penambahan alokasi anggaran khususnya yang bersumber dari DAK, baik DAK Fisik maupun Non Fisik.

4.4.2 Bidang Urusan Kesehatan

Kesehatan merupakan kebutuhan dasar setiap manusia dan merupakan modal setiap warga Negara dalam mencapai tujuannya dan mencapai kemakmuran. Seseorang tidak bisa memenuhi seluruh kebutuhan hidupnya jika dia berada dalam kondisi tidak sehat sehingga kesehatan merupakan modal setiap individu untuk meneruskan kehidupan secara layak. Pencapaian target-target SPM yang lalu lebih merupakan kinerja program kesehatan, maka pada SPM yang sekarang pencapaian target-target tersebut lebih diarahkan pada kinerja pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan dasar kepada warga yang selanjutnya dijadikan bahan oleh pemerintah pusat dalam merumuskan kebijakan nasional, pemberian insentif dan disinsentif serta sanksi administrasi kepala Daerah. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2023

Minimal Bidang Kesehatan, terdapat 12 (Dua Belas) jenis pelayanan kesehatan yang harus menjadi target capaian setiap tahun dan pencapaiannya ditargetkan 100 %.

4.4.2.1 Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar adalah jenis-jenis pelayanan dasar yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah yang telah ditetapkan SPM nya oleh Pemerintah. Adapun jenis pelayanan dasar dan indikator yang harus dicapai dalam penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan sesuai Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan. Jenis Pelayanan Dasar pada SPM Kesehatan daerah kabupaten/kota terdiri atas:

1. Pelayanan Kesehatan ibu hamil
2. Pelayanan kesehatan ibu bersalin
3. Pelayanan kesehatan bayi baru lahir
4. Pelayanan kesehatan balita
5. Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar
6. Pelayanan kesehatan pada usia produktif
7. Pelayanan kesehatan pada usia lanjut
8. Pelayanan kesehatan pada penderita hipertensi
9. Pelayanan kesehatan pada penderita hipertensi
10. Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat
11. Pelayanan kesehatan orang terduga tuberculosi
12. Pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus).

Jenis Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di kabupaten/Kota dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 5.

Jenis layanan standar dan pernyataan Standar Pelayanan Minimal
 Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota.

No	Jenis layanan Dasar	Mutu layanan Dasar	Penerima layanan	Pernyataan Standar
1.	Pelayanan kesehatan ibu hamil	Sesuai standar pelayanan antenatal	Ibu hamil	Setiap ibu hamil mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar
2.	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	Sesuai standar pelayanan persalinan	Ibu bersalin	Setiap ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar
3.	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Sesuai standar pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Bayi baru lahir	Setiap bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar
4.	Pelayanan kesehatan balita	Sesuai standar pelayanan kesehatan balita	Balita	Setiap balita mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar
5.	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Sesuai standar skrining kesehatan usia pendidikan dasar	Anak pada usia pendidikan dasar	Setiap anak pada usia pendidikan dasar mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar
6.	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	Sesuai standar skrining kesehatan usia produktif	Warga Negara Indonesia usia 15 s/d 59 tahun	Setiap Warga Negara Indonesia usia 15 s/d 59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar
7.	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	Sesuai standar skrining kesehatan usia lanjut	Warga Negara Indonesia 60 tahun keatas	Setiap warga Negara Indonesia usia 60 tahun keatas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar.
8.	Pelayanan kesehatan	Sesuai standar pelayanan	Penderita hipertensi	Setiap penderita hipertensi mendapatkan

**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2023**

No	Jenis layanan Dasar	Mutu layanan Dasar	Penerima layanan	Pernyataan Standar
	penderita hipertensi	kesehatan penderita hipertensi		pelayanan kesehatan sesuai standar
9.	Pelayanan kesehatan penderita diabetes mellitus	Sesuai standar pelayanan kesehatan penderita diabetes mellitus	Penderita diabetes mellitus	Setiap penderita diabetes mellitus mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar.
10.	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Sesuai standar pelayanan kesehatan jiwa	Orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat	Setiap orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar.
11.	Pelayanan kesehatan orang terduga TB	Sesuai standar pelayanan kesehatan TB	Orang yang terduga TB	Setiap orang yang terduga TB mendapatkan pelayanan TB sesuai standar
12.	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV	Sesuai standar mendapatkan pemeriksaan HIV	Orang berisiko terinfeksi HIV (ibu hamil, pasien TB, pasien IMS, waria/transgender, pengguna napza, dan warga binaan lembaga pemasyarakatan)	Setiap orang berisiko terinfeksi HIV (ibu hamil, pasien TB, pasien IMS, waria/transgender, pengguna napza, dan warga binaan lembaga pemasyarakatan) mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar

Sumber : Permendagri 59 tahun 2021

4.4.2.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan

Jenis pelayanan dasar adalah jenis-jenis pelayanan dasar yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah yang telah ditetapkan SPM nya oleh Pemerintah. Adapun jenis pelayanan dasar dan indikator yang harus dicapai dalam penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan sesuai Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2023

Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan adalah sebagai berikut :

Tabel 6.
 Target dan Indikator Penerima Layanan Standar Pelayanan Minimal
 Bidang Kesehatan tahun 2023.

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Batas Waktu Pencapaian
1	Pelayanan Kesehatan ibu hamil	jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan Standar	100 %	Setiap Tahun
2	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	jumlah ibu hamil yang mendapatkan fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes)	100 %	Setiap Tahun
3	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	jumlah bayi baru lahir umur 0 - 28 hari yang mendapatkan pelayanan kesehatan standar	100 %	Setiap Tahun
4	Pelayanan kesehatan balita	Jumlah Balita yang berumur 0 – 59 bulan yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100 %	Setiap Tahun
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan standar	100 %	Setiap Tahun
6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	Jumlah orang berusia 15-59 tahun yang mendapatkan pelayanan kesehatan standar	100 %	Setiap Tahun
7	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	Jumlah orang berusia lebih dari 60 tahun yang mendapatkan pelayanan kesehatan standar	100 %	Setiap Tahun
8	Pelayanan kesehatan pada penderita hipertensi	Jumlah orang yang berusia 15 tahun keatas yang menderita Hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan standar	100 %	Setiap Tahun
9	Pelayanan kesehatan pada	Jumlah orang yang berusia 15 tahun keatas yang	100 %	Setiap Tahun

**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2023**

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Batas Waktu Pencapaian
	penderita hipertensi	menderita Diabet Melitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan standar		
10	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Jumlah orang dengan gangguan Jiwa (ODG) berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan standar	100 %	Setiap Tahun
11	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	Jumlah orang terduga Tuberkulosis (TBC) yang mendapatkan pelayanan kesehatan standar	100 %	Setiap Tahun
12	Pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)	Jumlah orang terduga beresiko Terinfeksi virus HIV yang mendapatkan pelayanan kesehatan standar	100 %	Setiap Tahun

Sumber : Permendagri Nomor 59 Tahun 2021

Dalam pencapaian setiap item pelayanan tersebut harus mempertimbangkan beberapa standar pada setiap pelayanan yaitu :

a. Pelayanan Kesehatan ibu hamil

Pelayanan prenatal sesuai standar diberikan kepada ibu hamil minimal 4 (empat) kali selama kehamilan yang diberikan kepada ibu hamil dengan memenuhi kriteria 10 T yaitu :

- Timbang berat badan dan ukur tinggi badan
- Ukur tekanan darah
- Nilai status gizi (ukur lingkar lengan atas/LILA)
- Ukur tinggi puncak rahim (fundus uteri)
- Tentukan presentasi janin dan denyut jantung janin (DJJ)
- Skrining status imunisasi tetanus dan berikan imunisasi tetanus toksoid (TT) bila diperlukan
- Pemberian tablet tambah darah minimal 90 tablet selama kehamilan

**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2023**

- h. Tes laboratorium kehamilan, pemeriksaan hemoglobin darah (Hb), pemeriksaaan golongan darah (bila belum pernah dilakukan sebelumnya), pemeriksaan protein urin (bila ada indikasi).
- i. Tatalaksana/penanganan kasus sesuai kewenangan
- j. Temu wicara (konseling)

Indikator ini dimulai dari cakupan pelayanan kesehatan ibu hamil (K4) sesuai standar diwilayah Kabupaten/Kota dalam kurun waktu setahun.

b. Pelayanan kesehatan ibu bersalin

Standar pelayanan persalinan normal mengikuti acuan asuhan persalinan normal yang tercantum dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 97 Tahun 2014 tentang Pelayanan kesehatan masa sebelum hamil, persalinan, dan masa sesudah melahirkan, penyelenggaraan pelayanan kontrasepsi, serta pelayanan kesehatan seksual.

c. Pelayanan kesehatan bayi baru lahir

Indikator dinilai dari persentase jumlah bayi baru lahir usia 0-28 hari yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar di wilayah Kabupaten/Kota tersebut dalam kurun waktu setahun.

d. Pelayanan kesehatan balita

Beberapa pelayanan kesehatan meliputi :

- a. Penimbangan minimal 8 kali setahun, pengukuran panjang/tinggi badan minimal 2 kali setahun.
- b. Pemberian kapsul vitamin A 2 kali setahun.
- c. Pemberian imunisasi dasar lengkap

e. Pelayanan Kesehatan pada usia pendidikan dasar

Standar pelayanan penjanringan kesehatan adalah pelayanan yang meliputi:

- 1. Penilaian status gizi
- 2. Penilaian tanda vital

3. Penilaian kesehatan gigi dan mulut
4. Penilaian ketajaman indera penglihatan dengan poster snellen
5. Penilaian ketajaman indera pendengaran dengan garpu tala

f. Pelayanan kesehatan usia produktif

Setiap warga Negara Indonesia usia 15 s/d 59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar :

1. Pelayanan skrining kesehatan usia 15 – 59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar.
2. Pelayanan skrining kesehatan usia 15 – 59 tahun di puskesmas dan jaringannya.
3. Pelayanan skrining kesehatan usia 15 – 59 tahun minimal dilakukan satu tahun sekali.
4. Pelayanan skrining kesehatan meliputi : 1). Deteksi kemungkinan obesitas dilakukan dengan memeriksa tinggi badan dan berat badan serta lingkar perut; 2). Deteksi hipertensi dengan memeriksa tekanan darah sebagai pencegahan primer; 3). Deteksi kemungkinan diabetes mellitus menggunakan tes cepat gula darah; 4). Deteksi gangguan mental emosional dan perilaku; 5). Pemeriksaan ketajaman penglihatan; 6). Pemeriksaan ketajaman pendengaran dan 7). Deteksi dini kanker dilakukan dengan pemeriksaan payudara klinis dan pemeriksaan IVA khusus untuk wanita usia 30 – 59 tahun.
5. Pengunjung yang ditemukan menderita kelainan wajib ditangani atau dirujuk kefasilitas pelayanan kesehatan yang mampu menanganinya.

g. Pelayanan kesehatan pada usia lanjut

Setiap warga Negara Indonesia usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar yang dilakukan sesuai kewenangan oleh : dokter, bidan, perawat, nutritionis/tenaga gizi dan kader posyandu.

h. Pelayanan kesehatan penderita hipertensi

Setiap penderita hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar diantaranya :

- a. Sasaran adalah penduduk usia 15 tahun keatas
- b. Penderita hipertensi esensial atau hipertensi tanpa komplikasi memperoleh pelayanan kesehatan sesuai standar.
- c. Penderita hipertensi dengan komplikasi (jantung,stroke, dan penyakit ginjal kronis, serta diabetes mellitus) perlu dirujuk ke Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjut (FKTL).
- d. Pelayanan kesehatan penderita hipertensi sesuai standar.

i. Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus

Setiap penderita Diabetes Melitus mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar :

- Penduduk yang ditemukan menderita DM atau penyandang DM memperoleh pelayanan kesehatan sesuai standar dan upaya promotif dan preventif di FKTP
- Penduduk yang ditemukan menderita DM atau penyandang DM komplikasi perlu dirujuk ke fasilitas kesehatan rujukan untuk penanganan selanjutnya
- Pelayanan kesehatan diberikan kepada penyandang DM di FKTP sesuai standar meliputi 4 (empat) pilar penatalaksanaan sebagai berikut : Edukasi, Aktifitas fisik, terapi nutrisi medis, intervensi farmakologis
- Setiap penyandang DM yang mendapatkan pelayanan sesuai standar termasuk pemeriksaan HbA 1 C
- Bagi penyandang DM yang belum menjadi peserta JKN diwajibkan menjadi peserta JKN

j. Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat

Setiap orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar. Pelayanan Kesehatan Jiwa pada ODGJ berat adalah :

**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2023**

- a. Pelayanan promotif preventif yang bertujuan meningkatkan kesehatan jiwa ODGJ berat (psikotik) dan mencegah terjadinya kekambuhan dan pemasangan
- b. Pelayanan kesehatan jiwa pada ODGJ berat diberikan oleh perawat dan dokter puskesmas di wilayah kerjanya
- c. Pelayanan kesehatan jiwa pada ODGJ berat meliputi : a) Edukasi dan evaluasi tentang: tanda dan gejala gangguan jiwa, kepatuhan minum obat dan informasi lain terkait obat, mencegah Tindakan pemasangan, kebersihan diri, sosialisasi, kegiatan rumah tangga dan aktivitas bekerja sederhana dan/atau b) Tindakan kebersihan diri ODGJ
- d. Dalam melakukan pelayanan promotive preventif diperlukan penyediaan materi KIE dan Buku Kerja Sederhana.

k. Pelayanan kesehatan orang yang terduga TB

Pelayanan yang diberikan sesuai pedoman penanggulangan TB yang berlaku antara lain :

1. Penegakan diagnosis TB dilakukan secara bakteriologis dan klinis serta dapat didukung dengan pemeriksaan penunjang lainnya; b) Dilakukan pemeriksaan pemantauan kemajuan pengobatan pada akhir pengobatan intensif, bulan ke 5 dan akhir pengobatan; c) Pengobatan dengan menggunakan obat anti tuberkolosis (OAT) dengan panduan OAT standar
2. Gejala utama TB adalah batuk selama 2 minggu atau lebih. Batuk dapat diikuti dengan dahak bercampur darah, batuk darah, sesak nafas, badan lemas, nafsu makan menurun, berat badan menurun, berkeringat malam hari tanpa aktifitas fisik dan badan meriang lebih dari satu bulan
3. Kegiatan promotif dan preventif antara lain penemuan kasus secara dini, penemuan kasus secara aktif, pemberian KIE untuk pencegahan penularan dengan penerapan etika batuk, pengendalian faktor risiko dan pemberian obat pencegahan

4. Prinsip pelayanan TB adalah penemuan orang terduga TB sedini mungkin, diatatalaksana sesuai standar sekaligus pemantauan hingga sembuh atau "TOSS TB" (Temukan, obati sampai sembuh)

Indikator ini dinilai dari persentase jumlah orang yang mendapatkan pelayanan TB sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun

I. Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV

- a. Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV sesuai standar adalah pelayanan kesehatan yang diberikan kepada ibu hamil, pasien TB, pasien infeksi menular seksual (IMS), waria/transgender, pengguna napza dan warga binaan lembaga pemasyarakatan, dilakukan oleh tenaga kesehatan sesuai kewenangan dan diberikan di FKTP (puskesmas dan jaringannya) dan FKTL baik pemerintah maupun swasta serta dilapas/rutan narkotika
- b. Pelayanan kesehatan meliputi : a) Upaya pencegahan pada orang yang memiliki risiko terinfeksi HIV; b) Pemeriksaan HIV ditawarkan secara aktif oleh petugas kesehatan bagi orang yang berisiko.

Indikator ini dinilai dari persentase orang berisiko terinfeksi HIV yang datang ke faskes dan mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun

4.4.2.3 Realisasi

Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Urusan Kesehatan adalah tolak ukur kinerja pelayanan kesehatan melalui jalur Pendidikan Formal yang diselenggarakan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bulukumba. Untuk melihat Realisasi capaian Standar Pelayanan Minimal Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba Tahun 2023, dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2023

Tabel 7.
 Realisasi Capaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan
 Kabupaten Bulukumba Tahun 2023.

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Capaian		
			Jumlah yang berhak mendapat layanan (orang)	Jumlah yang terlayani (orang)	Capaian (%)
1.	Pelayanan Kesehatan ibu hamil	jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan Standar	5.642	5.642	100
2.	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	jumlah ibu hamil yang mendapatkan fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes)	6.157	6.157	100
3.	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	jumlah bayi baru lahir umur 0 - 28 hari yang mendapatkan pelayanan kesehatan standar	6.128	6.128	100
4.	Pelayanan kesehatan balita	Jumlah Balita yang berumur 0 – 59 bulan yang mendapatkan pelayanan kesehatan	6.213	6.213	100
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan standar	18.746	17.997	96.00
6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	Jumlah orang berusia 15-59 tahun yang mendapatkan pelayanan kesehatan standar	146.504	146.504	100.00
7	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	Jumlah orang berusia lebih dari 60 tahun yang mendapatkan	57.503	57.503	100.00

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2023

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Capaian		
			Jumlah yang berhak mendapat layanan (orang)	Jumlah yang terlayani (orang)	Capaian (%)
		pelayanan kesehatan standar			
8	Pelayanan kesehatan pada penderita hipertensi	Jumlah orang yang menderita Hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan standar	31.174	31.174	100.00
9	Pelayanan Kesehatan pada Penderita Diabetes Mellitus	Jumlah orang yang menderita Diabet Melitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan standar	7.985	7.985	100.00
10	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Jumlah orang dengan gangguan Jiwa (ODG) berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan standar	854	854	100
11	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	Jumlah orang terduga Tuberkulosis (TBC) yang mendapatkan pelayanan kesehatan standar	3.354	3.354	100.00
12	Pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)	Jumlah orang terduga beresiko Terinfeksi virus HIV yang mendapatkan pelayanan kesehatan standar	6.558	6.558	100

Sumber : Data Capaian SPM Bidang Kesehatan, tahun 2023

Dari pencapaian penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan tahun 2023 di Kabupaten Bulukumba dapat diuraikan sebagai berikut:

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2023

a. Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil

Realisasi capaian dalam penerapan SPM untuk indikator pelayanan ibu hamil di Kabupaten Bulukumba sudah 100 % dengan perhitungan sebagai berikut :

$$\begin{aligned} &= \\ &= \frac{\text{Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan K4 di faskes milik pemerintah/swasta}}{\text{Jumlah semua ibu hamil di wilayah Kabupaten dalam kurun waktu tahun yang sama}} \times \\ &100 \% \\ &= \frac{5.642}{5.642} \times 100 \\ &= 100 \% \end{aligned}$$

Data sasaran yang digunakan pada indikator pelayanan kesehatan ibu hamil diatas merupakan data yang ditentukan oleh Pusdatin Kemenkes RI. Data tersebut merupakan data riil sehingga Cakupan pelayanan kesehatan ibu hamil mencapai 100 % dimana jumlah yang mendapatkan pelayanan sebanyak 5.642 orang sedangkan target ibu hamil di wilayah Kabupaten Bulukumba yang harusnya mendapatkan pelayanan K4 sebanyak 5.642 orang di fasilitas pelayanan kesehatan. Dalam pencapaian indikator tersebut Pemerintah daerah Kabupaten Bulukumba menyediakan sarana dan prasarana berupa unit pelayanan kesehatan (Rumah sakit, puskesmas, pustu dan poskodes) dengan sumber daya manusia dan alokasi anggaran dari APBD yang cukup.

b. Pelayanan kesehatan ibu bersalin

Realisasi capaian dalam penerapan SPM untuk indikator pelayanan kesehatan ibu bersalin di Kabupaten Bulukumba terlayani 100 % dengan perhitungan sebagai berikut :

$$\begin{aligned} &= \\ &= \frac{\text{Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar di fasilitas pelayanan kesehatan}}{\text{Jumlah semua ibu bersalin di wilayah Kabupaten Bulukumba dalam kurun waktu 1 tahun}} \times \\ &100 \% \\ &= \frac{6.157}{6.157} \times 100 \end{aligned}$$

= 100%

Data sasaran yang digunakan pada indikator pelayanan kesehatan ibu hamil diatas merupakan data yang ditentukan oleh Pusdatin Kemenkes RI. Data tersebut merupakan data riil sehingga Cakupan pelayanan kesehatan ibu bersalin mencapai 100 % dimana jumlah yang mendapatkan pelayanan sebanyak 6.157 orang sedangkan target ibu hamil di wilayah Kabupaten Bulukumba yang harusnya mendapatkan pelayanan K4 sebanyak 6.157 orang di fasilitas pelayanan kesehatan. Dalam pencapaian indikator tersebut Pemerintah daerah Kabupaten Bulukumba menyediakan sarana dan prasarana berupa unit pelayanan kesehatan (Rumah sakit, puskesmas, pustu dan poskodes) dengan sumber daya manusia dan alokasi anggaran dari APBD yang cukup.

c. Pelayanan kesehatan bayi baru lahir

Capaian pelayanan kesehatan bayi baru lahir untuk indicator pencapaian jumlah bayi baru lahir umur 0-28 hari yang mendapatkan pelayanan standar sebesar 100 % dengan perhitungan :

=

$$\frac{\text{Jumlah bayi baru lahir umur 0-28 hari yang mendapatkan pelayanan sesuai standar}}{\text{Jumlah bayi baru lahir di wilayah Kabupaten Bulukumba dalam kurun waktu 1 tahun}} \times$$

100 %

$$= \frac{6.128}{6.128} \times 100$$

= 100%

Pelayanan dasar pelayanan kesehatan ibu bayi baru lahir dengan indikator jumlah bayi baru lahir umur 0-28 hari dengan persentase capaian 100 %. yang mendapatkan pelayanan standar di targetkan sebanyak 6.128 orang dan semuanya dapat terlayani dengan persentase Pencapaian tersebut didukung oleh konstribusi pemerintah daerah dan swasta/masyarakat berupa ; Sumber Daya Manusia (SDM) kesehatan, Ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan, alokasi anggaran dari APBD

d. Pelayanan kesehatan balita

Capaian pelayanan kesehatan bayi baru lahir untuk indikator pencapaian jumlah balita usia 0-59 hari yang mendapatkan pelayanan standar sebesar 100 % dengan perhitungan :

$$\begin{aligned} &= \frac{\text{Jumlah balita usia 0-59 bulan yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar}}{\text{Jumlah balita usia 0-59 bulan di wilayah Kabupaten Bulukumba dalam kurun waktu 1 tahun}} \times 100 \% \\ &= \frac{16.213}{16.213} \times 100 \\ &= 100 \% \end{aligned}$$

Partisipasi masyarakat terutama ibu yang memiliki anak yang berumur dibawah 5 (lima) tahun untuk datang dan memeriksakan kesehatan balitanya ke Posyandu masih sangat diperlukan dengan persentase capaian 100 % yang mendapatkan pelayanan standar sebanyak 16.213 orang dengan target sebanyak 16.213 persentase Pencapaian tersebut didukung oleh konstribusi pemerintah daerah dan swasta/masyarakat berupa; Sumber Daya Manusia (SDM) kesehatan, Ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan, alokasi anggaran dari APBD.

e. Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar

Capaian pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar untuk indikator jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan standar sebesar 100 % dengan perhitungan :

$$\begin{aligned} &= \frac{\text{Jumlah anak usia pendidikan dasar kelas 1 dan 7 yang mendapat pelayanan skrining kesehatan disatuan pendidikan dasar}}{\text{Jumlah anak usia pendidikan dasar kelas 1 dan 7 di wilayah Kabupaten Bulukumba dalam kurun waktu 1 tahun}} \times 100 \% \\ &= \frac{17.997}{18.746} \times 100 \\ &= 96 \% \end{aligned}$$

Pelayanan kesehatan pada anak usia pendidikan dasar dengan indikator jumlah anak usia pendidikan dasar dengan persentase 96% yang mendapatkan pelayanan standar sebanyak 17.997 orang dengan target dapat terlayani sebanyak 18.746 orang dengan persentase Pencapaian tersebut didukung oleh konstribusi pemerintah daerah dan

**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2023**

swasta/masyarakat berupa ; Sumber Daya Manusia (SDM) Kesehatan dan lintas sektoral, Ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan, alokasi anggaran dari APBD maupun APBN.

f. Pelayanan kesehatan pada usia produktif

Capaian pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar untuk indikator jumlah orang berusia 15 – 59 tahun yang mendapatkan pelayanan kesehatan standar di Kabupaten Bulukumba mengalami penurunan hingga 100 %.

$$\begin{aligned} &= \frac{\text{Jumlah warga negara usia 15–59 tahun yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar}}{\text{Jumlah orang 15–59 tahun di wilayah Kabupaten Bulukumba dalam kurun waktu 1 tahun}} \times 100 \% \\ &= \frac{146.504}{146.504} \times 100 \\ &= 100 \% \end{aligned}$$

Pelayanan kesehatan pada warga negara usia 15 – 59 tahun dengan indikator jumlah warga negara usia 15 – 59 tahun yang mendapatkan pelayanan standar dengan pesentase 100 % yang terlayani sebanyak 146.504 orang dan semuanya dapat terlayani dengan persentase capaian 100 %. Pencapaian tersebut didukung oleh kontribusi pemerintah daerah dan swasta/masyarakat berupa ; Sumber Daya Manusia (SDM) kesehatan, Ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan, alokasi anggaran dari APBD

g. Pelayanan kesehatan pada usia lanjut

Capaian pelayanan kesehatan pada usia lanjut dengan indikator jumlah orang berusia 60 tahun yang mendapatkan pelayanan kesehatan standar sebesar 67 % dengan perhitungan :

$$\begin{aligned} &= \frac{\text{Jumlah orang berusia lebih dari 60 tahun yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar}}{\text{Jumlah orang berusia lebih dari 60 tahun di wilayah Kabupaten Bulukumba dalam kurun waktu 1 tahun}} \times 100 \\ &\% \\ &= \frac{57.503}{57.503} \times 100 \\ &= 100 \% \end{aligned}$$

**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2023**

Pelayanan kesehatan pada orang berusia lebih dari 60 tahun dengan indikator jumlah orang berusia lebih dari 60 tahun yang mendapatkan pelayanan standar dengan persentase 100% yang terlayani sebanyak 57.503 dengan dan semuanya dapat terlayani dengan baik dengan persentase capaian tersebut didukung oleh kontribusi pemerintah daerah dan swasta/masyarakat berupa ; Sumber Daya Manusia (SDM) kesehatan, Ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan, alokasi anggaran dari APBD

Program pembentukan Pos Pembinaan Terpadu Kesehatan Usila (Posbindu) disetiap puskesmas memberi dampak positif sehingga sangat diharapkan untuk lebih aktif dalam melaksanakan pembinaan terhadap Posbindu tersebut

h. Pelayanan kesehatan penderita hipertensi

Capaian pelayanan kesehatan penderita hipertensi dengan indikator jumlah orang berusia 15 tahun keatas yang menderita hipertensi yang dapatkan pelayanan kesehatan standar yaitu sebesar 100 % dengan perhitungan :

$$\begin{aligned} & \frac{\text{Jumlah orang berusia 15 tahun keatas yang menderita hipertensi}}{\text{mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar}} \\ &= \frac{\text{Jumlah orang berusia 15 tahun keatas di wilayah Kabupaten Bulukumba}}{\text{dalam kurun waktu 1 tahun}} \times 100 \% \\ &= \frac{31.174}{31.174} \times 100 \\ &= 100 \% \end{aligned}$$

Pelayanan kesehatan pada orang berusia 15 tahun keatas yang menderita hipertensi dengan indikator jumlah orang berusia 15 tahun keatas yang menderita hipertensi dengan capaian 100 % yang mendapatkan pelayanan standar di targetkan sebanyak 31.174 orang dan semuanya dapat terlayani dengan baik. dengan Pencapaian tersebut didukung oleh kontribusi pemerintah daerah dan termasuk cakupan pelayanan kesehatan

**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2023**

swasta/masyarakat berupa ; Sumber Daya Manusia (SDM) kesehatan, Ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan, alokasi anggaran dari APBD.

Cakupan pelayanan kesehatan penderita hipertensi untuk tahun 2023 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, program pembentukan pospindu di setiap puskesmas memberikan dampak positif sehingga sangat diharapkan untuk lebih aktif lagi dalam kegiatan deteksi dini faktor risiko hipertensi di pospindu. Namun demikian, upaya peningkatan kesadaran masyarakat dalam mengelola penyakitnya agar tetap mampu hidup proaktif secara mandiri.

i. Pelayanan kesehatan penderita diabetes mellitus

Capaian pelayanan kesehatan penderita diabetes mellitus dengan indikator jumlah orang berusia 15 tahun keatas yang menderita diabetes mellitus yang dapatkan pelayanan kesehatan standar sebesar 100 % dengan perhitungan :

$$\begin{aligned} & \frac{\text{Jumlah orang berusia 15 tahun keatas yang menderita diabetes mellitus mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar}}{\text{Jumlah orang berusia 15 tahun keatas di wilayah Kabupaten Bulukumba dalam kurun waktu 1 tahun}} \times 100 \% \\ &= \frac{7.985}{7.985} \times 100 \\ &= 100 \% \end{aligned}$$

Pelayanan kesehatan pada orang berusia 15 tahun keatas yang menderita Diabetes Mellitus dengan indikator jumlah orang berusia 15 tahun keatas yang menderita Diabetes Mellitus dengan persentase 100 % yang mendapatkan pelayanan standar di targetkan sebanyak 7.985 orang dan semuanya dengan persentase Pencapaian tersebut didukung oleh kontribusi pemerintah daerah dan termasuk cakupan pelayanan kesehatan swasta/masyarakat berupa; Sumber Daya Manusia (SDM) kesehatan, Ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan, alokasi anggaran dari APBD.

**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2023**

Cakupan pelayanan kesehatan penderita diabetes mellitus telah mencapai 100% dari target kinerja yang ditetapkan. Hal ini didukung oleh kesadaran penderita untuk senantiasa mengontrol kondisi kesehatannya secara lebih baik melalui pendekatan gerakan masyarakat untuk hidup lebih sehat dan produktif.

j. Pelayanan kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODG) Berat

Capaian pelayanan kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODG) Berat dengan indikator jumlah orang dengan Gangguan Jiwa (ODG) berat yang dapatkan pelayanan kesehatan standar dengan perhitungan :

$$= \frac{\text{Jumlah orang dengan Gangguan Jiwa (ODG) berat mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar}}{\text{Jumlah ODG Berat (Psikotik dan Skizofrenia di wilayah Kabupaten Bulukumbdalam kurun waktu 1 tahun)}} \times 100 \%$$

$$= \frac{854}{854} \times 100$$

$$= 100 \%$$

Adapun masalah sehingga Capaian pelayanan kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) tidak mencapai target sesuai yang diharapkan di Kabupaten Bulukumba pada tahun 2023 adalah :

- 1 Masih tingginya stigma orang dengan Gangguan Jiwa di Masyarakat yang menyebabkan masyarakat untuk melapor dan membawa penderita Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) ke Pusat Pelayanan Kesehatan.
- 2 Terbatasnya kuantitas dan kualitas SDM pengelola kesehatan jiwa di PKM
- 3 Adanya keterlibatan dan koordinasi lintas sector dalam masalah.

k. Pelayanan kesehatan orang yang terduga Tuberculosis (TB)

Capaian pelayanan kesehatan orang yang terduga Tuberculosis dengan indikator jumlah orang terduga tuberculosis (TBC) yang mendapatkan pelayanan kesehatan standar sebesar 100 % dengan perhitungan :

**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2023**

$$= \frac{\text{Jumlah orang yang terduga Tuberculosis mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar}}{\text{Jumlah orang yang terduga Tuberculosis di wilayah Kabupaten Bulukumba dalam kurun waktu 1 tahun}} \times 100$$

%

$$= \frac{3.354}{3.354} \times 100$$

$$= 100 \%$$

Pelayanan kesehatan pada orang yang terduga tuberkolosis yang menderita dengan indikator orang yang terduga tuberkolosis dengan persentase 100% yang mendapatkan pelayanan standar di targetkan sebanyak 6.826 orang dan semuanya dapat terlayani dengan baik. Pencapaian tersebut didukung oleh kontribusi pemerintah daerah dan termasuk cakupan pelayanan kesehatan swasta/masyarakat berupa ; Sumber Daya Manusia (SDM) kesehatan, Ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan, alokasi anggaran dari APBD.

I. Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV

Capaian pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi Virus HIV dengan indikator jumlah orang terduga beresiko terinfeksi Virus HIV yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar sebesar 100% dengan perhitungan :

$$= \frac{\text{Jumlah orang dengan risiko terinfeksi Virus HIV mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar}}{\text{Jumlah orang dengan risiko terinfeksi Virus HIV di wilayah Kabupaten Bulukumba dalam kurun waktu 1 tahun}} \times 100 \%$$

$$= \frac{6.558}{6.558} \times 100$$

$$= 100 \%$$

Pelayanan kesehatan pada orang yang dengan resiko terinfeksi Virus HIV yang menderita dengan orang yang dengan resiko terinfeksi Virus HIV yang mendapatkan pelayanan standar dengan persentase capaian 100 % di targetkan sebanyak 6.558 orang dapat terlayani sebanyak 6.558 orang dengan persentase capaian tersebut disebabkan masih minimnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat untuk

**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2023**

memeriksa diri. Dengan capaian tersebut didukung oleh kontribusi pemerintah daerah dan termasuk cakupan pelayanan kesehatan swasta/masyarakat berupa ; Sumber Daya Manusia (SDM) kesehatan, Ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan, alokasi anggaran dari APBD.

Data sasaran yang digunakan pada indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk program penanggulangan penyakit di atas merupakan data estimasi yang ditentukan oleh Pusdatin Kemenkes RI.

4.4.2.4 Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran tahun 2023 di Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba dalam rangka pencapaian target Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada Bidang Kesehatan Kabupaten Bulukumba berjumlah sebesar Rp. 1.166.100.550,-

Tabel 7.

**Alokasi Anggaran Penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang
Kesehatan Kabupaten Bulukumba Tahun 2023**

No.	Indikator	Anggaran (Rp).
1.	Pelayanan kesehatan Ibu Hamil	218.028.000,-
2.	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	116.000.000,-
3.	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	110.000.000,-
4.	Pelayanan kesehatan balita	69.850.300,-
5.	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	58.476.650,-
6.	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	107.229.450,-
7.	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	59.392.400,-
8.	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	105.012.000,-
9.	Pelayanan kesehatan penderita diabetes mellitus (DM)	84.048.750,-
10.	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ)	72.720.300,-
11.	Pelayanan kesehatan orang terduga Tuberculosis	83.901.700,-

**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2023**

No.	Indikator	Anggaran (Rp).
12	Pelayanan Kesehatan orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (HIV)	81.441.000,-

4.4.2.5 Dukungan Personil

Dukungan personil menggambarkan jumlah personil atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba sebanyak 824 orang dengan kualifikasi sebagai berikut:

Tabel 8

Dukungan Personil dalam pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba berdasarkan Pangkat/Golongan, Tahun 2023.

No	Pangkat/Golongan	Jumlah (Orang)
1.	Dokter	62
2.	Dokter Spesialis	23
3.	Bidan	263
4.	Perawat	476
Jumlah		824

Sumber : Data ASN Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba, Tahun 2023.

Berdasarkan tabel tersebut terlihat bahwa kondisi personil pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba memperlihatkan angka yang cukup bervariasi. Dokter yaitu sebanyak 62 orang, Dokter Spesialis sebanyak 23 orang, Bidan sebanyak 263 Orang dan Perawat sebanyak 476 orang. Dengan jumlah personil yang memadai tersebut diharapkan dapat mempercepat pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) khususnya bidang kesehatan.

4.4.2.6 Permasalahan dan Solusi

Target untuk semua indikator adalah 100% namun berdasarkan angka di atas tidak ada indikator yang mencapai target. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut :

**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2023**

1. Masih rendahnya cakupan KIA terutama cakupan K4 pada beberapa puskesmas. Kebutuhan dihitung berdasarkan pagu bukan berdasarkan kebutuhan.
2. Terkendala pada sinkronisasi data laporan LB3 Ibu dan Anak ke PWS KIA. Perencanaan dan penganggaran belum maksimal karena keterbatasan.
3. Keterbatasan tenaga kesehatan puskesmas dan belum maksimalnya koordinasi lintas program dan lintas sector.
4. Masih rendahnya kesadaran masyarakat (respon rate) untuk memeriksakan kesehatannya secara rutin baik di fasyankes maupun posbindu.
5. Bahan habis pakai/strip GCU untuk skrining yang tidak mencukupi untuk melakukan pelayanan kesehatan pada usia lanjut.
6. Penjaringan sasaran yang belum optimal karena sasaran yang sangat besar dimana sasaran hipertensi adalah 33,3% dari penduduk usia > 15 tahun dan sasaran DM adalah 2.2% dari penduduk usia >15 tahun.
7. Pencatatan di poli puskesmas terkait pemeriksaan/screening PTM tidak mencatatkan NIK di register sehingga tidak terinput di aplikasi ASIK.
8. Kurangnya pengetahuan dan peran keluarga dalam merawat pasien, aparat desa dan kecamatan yang kurang berperan aktif dalam penanggulangan ODGJ serta masih adanya pasien yang belum memiliki BPJS dan identitas kependudukan.
9. Masih kurangnya informasi tentang pelayanan orang terduga tuberkulosis, jejaring internal dan eksternal pelayanan kesehatan yang kurang optimal, dan pelayanan kesehatan yang tidak melaporkan pelayanan di luar wilayah serta ketersediaan sumber daya daerah yang terbatas.

**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2023**

Adapun solusi dari permasalahan tersebut adalah :

1. Peningkatan mutu pelayanan kesehatan ibu khususnya pemeriksaan ibu hamil yang melahirkan pada akhir tahun
2. Melakukan pemantauan dan evaluasi secara rutin serta sinkronisasi sistem pelaporan yang terintegrasi
3. Peningkatan kapasitas tenaga kesehatan dan kader serta memaksimalkan koordinasi lintas program dan lintas sector
4. Pelayanan kesehatan pada usia produktif difokuskan pada penyakit menular melalui peningkatan kapasitas dan keaktifan pokja kesehatan dan pemberdayaan masyarakat
5. Peningkatan pelayanan kefarmasian dan ketersediaan alat kesehatan bagi pelayanan kesehatan pada usia lanjut
6. Peningkatan jumlah SDM untuk mengelola masing-masing program
7. Peningkatan kapasitas tenaga kesehatan dan fasilitas IT yang memadai dalam penggunaan sistem pelaporan yang terintegrasi
8. Pengelolaan pelayanan kesehatan ODGJ, TB dan HIV difokuskan pada peningkatan pemahaman masyarakat sejak dini dan dapat disinergikan dengan tindak lanjut PISPK

4.4.3 Bidang Urusan Pekerjaan Umum

Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum yang selanjutnya disingkat SPM Bidang Pekerjaan Umum adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal. Jenis pelayanan dasar SPM Bidang Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten/Kota terdiri dari :

1. Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari
2. Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestic

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Permendagri Nomor 59 tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) serta Berdasarkan Permen PU Nomor 14 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang beserta petunjuk teknisnya untuk kabupaten mencakup ; 1). Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari hari, dan 2). Pelayanan pengolahan air limbah domestik.

4.4.3.1 Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar adalah jenis-jenis pelayanan dasar yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah yang telah ditetapkan SPM nya oleh Pemerintah. Adapun jenis pelayanan dasar dan indikator yang harus dicapai dalam penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum sesuai Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021. Jenis Pelayanan Dasar pada SPM Pendidikan daerah kabupaten/kota terdiri atas:

- Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari hari;
- Pelayanan pengolahan air limbah domestik;

4.4.3.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum

Jenis pelayanan dasar adalah jenis-jenis pelayanan dasar yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah yang telah ditetapkan SPM nya

**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2023**

oleh Pemerintah. Adapun jenis pelayanan dasar dan indikator yang harus dicapai dalam penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum sesuai Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 9.
Target dan Indikator Penerima Layanan Standar Pelayanan Minimal
Bidang Pekerjaan Umum tahun 2023.

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Batas Waktu Pencapaian
1.	Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari.	Jumlah warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari.	100 %	Setiap Tahun
2.	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestic	Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestic	100 %	Setiap Tahun

Sumber : Permendagri Nomor 59 Tahun 2021

4.4.3.3 Realisasi

Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang pada hakikatnya merupakan cermin pemenuhan hak-hak dasar masyarakat sebagai warga Negara maka ke depan Pemerintah daerah akan didorong untuk melakukan penganggaran tanpa batas atau *unconstrained budgeting* bagi program dan kegiatan yang ditujukan untuk memenuhi SPM. Apabila masih terdapat kekurangan pendanaan, maka pemerintah pusat wajib untuk memberikan bantuan kepada pemerintah daerah melalui mekanisme yang diatur oleh peraturan perundangan, misalnya dana transfer dan lain sebagainya, sehingga target Standar Pelayanan Minimal dapat segera dicapai.

Berdasarkan beberapa batasan maupun kriteria di atas, maka konsep SPM bidang Pekerjaan Umum di daerah di masa yang akan datang mengerucut pada :

**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2023**

1. Layanan air minum dengan indikator Jumlah warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari hari.
2. Layanan air limbah domestik setempat dengan indikator jumlah warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik.

Untuk melihat Realisasi capaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum Kabupaten Bulukumba Tahun 2023, dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 10.
Realisasi Capaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum
Kabupaten Bulukumba Tahun 2023.

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Capaian		
			Jumlah Rumah tangga yang berhak mendapatkan layanan	Jumlah yang terlayani	Capaian = $(4):(3) \times 100\%$
1.	Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Jumlah warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	118,252	101,464	85,80
2.	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik	Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	118.252	98,637	83,41

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, tahun 2023.

Realisasi capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pekerjaan Umum dari 2 (dua) jenis pelayanan dasar adalah sebagai berikut :

a. Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari.

Untuk menyediakan pelayanan Air Minum dalam rangka menjamin hak rakyat atas Air Minum, terwujudnya pengelolaan dan pelayanan air minum yang berkualitas dengan harga yang terjangkau, tercapainya kepentingan yang seimbang antara Pelanggan dan Penyelenggara, tercapainya penyelenggaraan Air Minum yang efektif dan efisien untuk

**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2023**

memperluas cakupan pelayanan air minum. Sehingga pelayanan untuk indikator Jumlah warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari di kabupaten Bulukumba bisa dicapai sebesar 85,80 % dari jumlah sasaran yang berhak mendapatkan layanan yaitu 118,252 Rumah tangga dan yang dilayani sebanyak 101,464 Rumah tangga.

b. Penyediaan Pelayanan pengolahan air limbah domestik.

Untuk menyediakan pelayanan pengolahan air limbah domestik melalui Dinas Perumahan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bulukumba telah dilaksanakan dengan melibatkan masyarakat (pemberdayaan masyarakat) dalam hal system pengelolaan limbah domestik di 10 Kecamatan, ada beberapa pelayanan pengelolaan air limbah domestik di Kabupaten Bulukumba diantaranya : IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah), SPALD (Sistem pengolahan air limbah domestik) dan IPLT (Instalasi pengolahan lumpur tinja) dengan tujuan terwujudnya pengelolaan air limbah domestik yang baik dengan melibatkan masyarakat dalam pengelolaan limbah cair domestik sehingga Kabupaten Bulukumba akan memperluas cakupan pelayanan dalam pengolahan limbah cair domestik. Untuk capaian pelayanan pengelolaan air limbah domestik di Kabupaten Bulukumba sebesar 83,41 % dari jumlah sasaran yang berhak mendapatkan layanan yaitu 118.252 Rumah tangga dan yang dilayani sebanyak 98,637 Rumah tangga.

4.4.3.4 Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran tahun 2022 di Dinas Perumahan, Permukiman Kabupaten Bulukumba dalam rangka pencapaian target Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat di Kabupaten Bulukumba bersumber dari dana ; DAU (Dana Alokasi Umum), DAK (Dana Alokasi Khusus), dan DID (Dana Insentif Daerah) sebanyak Rp. 3.392.769,989, dengan uraian kegiatan sebagai berikut :

Tabel 11.

Alokasi Anggaran Penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang
Pekerjaan Umum Kabupaten Bulukumba Tahun 2023.

No.	Program	Anggaran
1	Peningkatan SPAM Jaringan Perpiaan Kawasan Perdesaan	2.432.204,989,-
2	Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Kota	960.565.000,-

4.4.3.5 Dukungan Personil

Dukungan personil menggambarkan jumlah personil atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pekerjaan Umum pada Dinas Perumahan, Permukiman dan pertanahan Kabupaten Bulukumba sebanyak 93 orang dengan kualifikasi berdasarkan Golongan sebagai berikut:

Tabel 12.

Dukungan Personil dalam pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Bulukumba berdasarkan Pangkat (Golongan), Tahun 2023.

No	Pangkat/Golongan	Jumlah (Orang)
1.	Golongan IV	13
2.	Golongan III	61
3.	Golongan II	18
4.	Golongan I	1
Jumlah		93

Sumber : Dinas Perumahan, Permukiman dan pertanahan Kabupaten Bulukumba, Tahun 2023.

Berdasarkan tabel tersebut, terlihat bahwa tingkat kepangkatan/golongan personil pada Dinas Perumahan, Permukiman dan pertanahan Kabupaten Kabupaten Bulukumba memperlihatkan

**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2023**

angka yang cukup bervariasi. Dari 93 orang personil terdapat Golongan IV sebanyak 13 orang, Golongan III sebanyak 61 orang, Golongan II sebanyak 18 orang dan Golongan I sebanyak 1 orang. Dengan tingkat pengalaman yang memadai tersebut diharapkan dapat mempercepat pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) khususnya bidang Pekerjaan Umum.

4.4.3.6 Permasalahan dan Solusi

Permasalahan yang dihadapi saat ini dalam pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Pekerjaan Umum adalah :

1. Masih sangat minimnya alokasi anggaran untuk air minum dan air limbah
2. Sumber daya manusia masih belum memenuhi standarisasi pelayanan.
3. Kurangnya tenaga personil.
4. Kurangnya pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan spam dan air limbah kepada masyarakat terkait pengelolaan air minum dan air limbah
5. Masih kurangnya kepedulian masyarakat terkait penyehatan lingkungan permukiman

Adapun solusi dari permasalahan tersebut adalah :

1. Mengusulkan penambahan anggaran untuk dialokasikan dalam pencapaian SPM
2. Mengikuti pelatihan-pelatihan/diklat standarisasi/ bimbingan teknis pelayanan dalam pekerjaan.
3. Mengusulkan agar diadakan perbaikan struktur organisasi serta kewenangannya.
4. Serta mengusulkan tambahan personal/pegawai ke Badan Kepegawaian Daerah.
5. Diperlukan sosialisasi terkait pemahaman masyarakat terhadap penyehatan lingkungan

4.4.4 Bidang Urusan Perumahan Rakyat

Berdasarkan uraian PP No. 2 Tahun 2018 dapat kita pahami bahwa standar pelayanan minimal adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintah wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal untuk bidang

**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2023**

perumahan rakyat, yaitu; penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana provinsi/kabupaten kota; fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah provinsi/kabupaten kota.

4.4.4.1 Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar adalah jenis-jenis pelayanan dasar yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah yang telah ditetapkan SPM nya oleh Pemerintah. Adapun jenis pelayanan dasar dan indikator yang harus dicapai dalam penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat sesuai Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021. Jenis Pelayanan Dasar pada SPM Bidang Perumahan Rakyat daerah kabupaten/kota terdiri atas:

1. Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana provinsi/kabupaten kota; dengan indikator kinerja Jumlah warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni.
2. Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah provinsi/kabupaten kota ; dengan indikator jumlah warga Negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah yang layak huni.

4.4.4.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat

Jenis pelayanan dasar adalah jenis-jenis pelayanan dasar yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah yang telah ditetapkan SPM nya oleh Pemerintah. Adapun jenis pelayanan dasar dan indikator yang harus dicapai dalam penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan sesuai Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 13.

Target dan Indikator Penerima Layanan Standar Pelayanan Minimal
Bidang Perumahan Rakyat menurut Permendagri 59 tahun 2021.

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Batas Waktu Pencapaian
1.	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota;	Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100 %	Setiap Tahun
2.	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/ kota	Jumlah Warga Negara yang relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah yang layak huni.	100 %	Setiap Tahun

Sumber : Permendagri Nomor 59 Tahun 2021

4.4.4.3 Realisasi

Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR Nomor 29/PRT/M/2018 tentang standar teknis pelayanan minimal pekerjaan umum dan perumahan rakyat maka Karena setiap warga berhak hidup sejahtera lahir dan batin, termasuk memiliki tempat tinggal (rumah) dan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Untuk melihat Realisasi capaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat Kabupaten Bulukumba Tahun 2023 untuk indikator ;

1. Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni, dan

**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2023**

2. Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni ,

Dari hasil pengumpulan data SPM Bidang Perumahan Rakyat di Kabupaten Bulukumba terlihat bahwa realisasi capaian terhadap target yang ditetapkan dengan sumber data dari beberapa OPD terkait diantaranya ; Badan Penanggulangan Bencana Daerah kabupaten Bulukumba, Dinas Sosial dan Dinas Perumahan, permukiman dan Pertanahan kabupaten Bulukumba dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 14.
Realisasi Capaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat di Kabupaten Bulukumba Tahun 2023.

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Capaian		
			Jumlah penduduk yang berhak terlayani (Orang)	Jumlah penduduk yang mendapatkan pelayanan (Orang)	Capaian = (4):(3)X100%
1.	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota;	Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni.	29	29	100
2.	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/ kota	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni.	21	21	100

Sumber : Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan, tahun 2023

Realisasi capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Perumahan Rakyat dari 2 (dua) jenis pelayanan dasar adalah sebagai berikut :

1. Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni dengan hasil capaian 100% dengan jumlah orang yang berhak mendapatkan layanan sebanyak 29 orang dan terlayani sebanyak 29 orang.

**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2023**

2. Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni dengan hasil capaian 100 % dengan jumlah orang yang berhak mendapatkan layanan sebanyak 21 orang dan terlayani sebanyak 21 orang.

4.4.4.4 Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran tahun 2023 di Dinas Perumahan, Permukiman Kabupaten Bulukumba dalam rangka pencapaian target Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat di Kabupaten Bulukumba bersumber dari dana APBD sebanyak Rp. 273.000.000,- anggaran tersebut melekat pada Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bulukumba karena tupoksi terkait penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana dilaksanakan oleh Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan dengan uraian kegiatan sebagai berikut :

Tabel 15.
Alokasi Anggaran Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat di Kabupaten Bulukumba Tahun 2023.

No.	Program	Anggaran
1	Rehabilitasi Rumah Bagi Korban Bencana	48.000.000,-
2	Pembangunan Hunian Sementara Kel. Bintarore	175.000.000,-
3.	Pembangunan MCK Hunian Sementara Kel. Bintarore (Fisik)	50.000.000,-

4.4.4.5 Dukungan Personil

Dukungan personil menggambarkan jumlah personil atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Perumahan Rakyat pada Dinas Perumahan, Permukiman dan pertanahan Kabupaten Bulukumba

**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2023**

sebanyak 30 orang dengan kualifikasi berdasarkan Golongan sebagai berikut:

Tabel 16.

Dukungan Personil dalam pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat pada Dinas Perumahan, Permukiman dan pertanahan Kabupaten Bulukumba berdasarkan Pangkat (Golongan), Tahun 2023.

No	Pangkat/Golongan	Jumlah (Orang)
1.	Golongan IV	5
2.	Golongan III	21
3.	Golongan II	4
Jumlah		30

Sumber : Dinas Perumahan, Permukiman dan pertanahan Kabupaten Bulukumba, Tahun 2023.

Berdasarkan tabel tersebut, terlihat bahwa tingkat kepangkatan/golongan personil pada Dinas Perumahan, Permukiman dan pertanahan Kabupaten Bulukumba memperlihatkan angka yang cukup bervariasi. Dari 30 orang personil terdapat Golongan IV sebanyak 5 orang, Golongan III sebanyak 21 orang dan Golongan II sebanyak 4 orang. Dengan tingkat pengalaman yang memadai tersebut diharapkan dapat mempercepat pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) khususnya bidang perumahan rakyat.

4.4.4.6 Permasalahan dan Solusi

Permasalahan dan Solusi menggambarkan permasalahan yang dihadapi dalam Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM), baik permasalahan eksternal maupun internal, langkah-langkah penyelesaian permasalahan yang di tempuh.

1. Penanganan rumah layak huni bagi korban bencana tidak dilakukan pada tahun kejadian dan harus menunggu penganggaran tahun berikutnya
2. Alokasi anggaran untuk rumah layak huni bagi korban bencana tidak mencakup jumlah sasaran sehingga terselesaikan secara swadaya masyarakat

**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2023**

3. Data korban bencana yang diterima tidak memberikan gambaran kerusakan rumah sehingga memerlukan proses pendataan lanjutan sebelum penentuan calon penerima
4. Adapun solusi dari permasalahan tersebut adalah :
5. Melakukan verifikasi lapangan dan memberikan bantuan dengan skala prioritas
6. Memastikan penerima bantuan adalah korban bencana yang sangat membutuhkan
7. Melakukan survei lapangan untuk mendapatkan data yang sesuai dengan yang di lapangan.

4.4.5 Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 pada Pasal 9 ayat (2) tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 tahun 2018 tentang Standar teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kab/Kota dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kab/Kota. dijelaskan bahwa Jenis pelayanan dasar pada SPM Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat kabupaten/Kota terdiri atas :

1. Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum
2. Pelayanan informasi rawan bencana
3. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana
4. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana; dan
5. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran

4.4.5.1 Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar adalah jenis-jenis pelayanan dasar yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah yang telah ditetapkan SPM nya

**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2023**

oleh Pemerintah. Adapun jenis pelayanan dasar dan indikator yang harus dicapai dalam penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat sesuai Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021. Jenis Pelayanan Dasar pada SPM Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat kabupaten/kota beserta indikator pencapaiannya terdiri yaitu:

- a. Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum ; dengan indikator Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkara.
- b. Pelayanan informasi rawan bencana ; dengan indikator Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana.
- c. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana ; dengan indikator Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana.
- d. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana; dengan indikator Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana.
- e. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran; dengan indikator Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran.

4.4.5.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Jenis pelayanan dasar adalah jenis-jenis pelayanan dasar yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah yang telah ditetapkan SPM nya oleh Pemerintah. Adapun jenis pelayanan dasar dan indikator yang harus dicapai dalam penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat sesuai Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 capaiannya ditargetkan 100 % pada setiap indikator sebagai berikut :

Tabel 17.

Target dan Indikator Penerima Layanan Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat menurut Permendagri 59 tahun 2021.

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Batas Waktu Pencapaian
1.	Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkara	100 %	Setiap Tahun
2.	Pelayanan informasi rawan bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100 %	Setiap Tahun
3.	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100 %	Setiap Tahun
4	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100 %	Setiap Tahun
5	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran	100 %	Setiap Tahun

Sumber : Permendagri Nomor 59 Tahun 2021.

4.4.5.3 Realisasi

Dalam pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, maka Satuan Polisi pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Bulukumba memiliki tanggung jawab dalam pencapaian target yang telah ditetapkan. Untuk melihat Realisasi capaian Standar Pelayanan

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2023

Minimal bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Bulukumba Tahun 2023, dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 18.
 Realisasi Capaian Standar Pelayanan Minimal Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Bulukumba Tahun 2023.

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Capaian		
			Jumlah orang yang berhak mendapat layanan (Orang)	Jumlah yang terlayani (Orang)	Capaian (%)
1.	Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkara	65	65	100
2.	Pelayanan informasi rawan bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	236.309	236.309	100
3.	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	236.309	236.309	100
4.	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi	1984	1984	100

**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2023**

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Capaian		
			Jumlah orang yang berhak mendapat layanan (Orang)	Jumlah yang terlayani (Orang)	Capaian (%)
		korban bencana			
5.	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran	190	190	100

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, tahun 2023.

Peran dan posisi strategis tersebut sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa Satpol PP dibentuk dalam rangka menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat dan regulasi SPM yang telah ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 merupakan pencerminan hak konstitusional bagi warga negara untuk mendapat pelayanan dasar sehingga dalam pencapaian target SPM cukup signifikan yang diuraikan sebagai berikut :

1. Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum dengan indikator pencapaian jumlah warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada dilihat dari jumlah orang yang berhak mendapat pelayanan sebanyak 65 orang dapat dilayani sebanyak 65 orang atau sebesar 100 %.
2. Pelayanan informasi rawan bencana dengan indikator capaian jumlah warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana dilihat dari jumlah orang yang berhak mendapat layanan sebanyak 236.309 orang

**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2023**

semuanya dapat terlayani dengan baik dengan capaian sebesar 100 %.

3. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana dengan indicator capaian jumlah warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana sebanyak 236.309 orang semuanya dapat terlayani dengan baik dengan capaian sebesar 100 %.
4. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana dengan indicator capaian jumlah warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana dimana jumlah warga yang berhak mendapatkan layanan sebanyak 1984 orang semuanya dapat terlayani dengan baik dengan capaian sebesar 100 %.
5. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dengan indicator capaian jumlah warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran terlihat sebanyak 190 orang yang berhak mendapatkan layanan semuanya dapat terlayani dengan baik dengan capaian sebesar 100 %.

4.4.5.4 Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran tahun 2023 dalam pelaksanaan SPM Dalam pelaksanaan SPM Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, terdiri dari 3 Program dan 6 kegiatan dan 10 Sub Kegiatan dengan pagu Anggaran sebesar Rp.7.373.766.750,-dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 7.371.841.722, atau 99,39% dan adapun 2 Program ,3 kegiatan , 5 Sub Kegiatan yang melekat pada SatPol.PP dan 1 Program, 3 Kegiatan dan 5 Sub Kegiatan yang berasal dari OPD BPBD dan untuk rinciannya sebagai berikut :

**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2023**

Tabel 19.

Alokasi Anggaran Penerapan Standar Pelayanan Minimal Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Bulukumba Tahun 2023.

No.	Program/Keg./Sub Keg.	Anggaran (Rp.)	Keterangan
1	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	3.100.149.000,-	Satpol
2	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	3.259.330.000,-	Satpol
3.	Program Penanggulangan Bencana	1.014.287.750,-	BPBD

4.4.5.5 Dukungan Personil

Dukungan personil menggambarkan jumlah personil atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat di Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bulukumba sebanyak 539 orang dengan kualifikasi sebagai berikut:

Tabel 20.

Dukungan Personil dalam pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat di Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Bulukumba, Tahun 2023.

No	Tenaga	Jumlah (Orang)
1.	Aparatur Sipil Negara (ASN) Satpol	55
2.	Tenaga Non ASN Satpol PP	241
3.	Non PNS Pemadam Kebakaran	171
4.	Aparatur Sipil Negara (ASN) BPBD	12
5.	Tenaga Non ASN BPBD	47
<i>Jumlah</i>		526

Sumber : Data pegawai Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Bulukumba, Tahun 2023.

**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2023**

Berdasarkan tabel tersebut terlihat bahwa kondisi personil pada Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bulukumba memperlihatkan angka yang cukup bervariasi.

Dengan jumlah personil yang memadai tersebut diharapkan dapat mempercepat pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) khususnya Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.

4.4.5.6 Permasalahan dan Solusi

Walaupun pencapaian SPM Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat pada Tahun 2023 mencapai 100% namun terdapat beberapa permasalahan yang perlu ditindaklanjuti. Adapun beberapa permasalahan adalah sebagai berikut:

1. Kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) Anggota Satuan Polisi Pamong Praja dan Damkar yang belum cukup memadai dikaitkan dengan tugas pokok dan fungsi Polisi Pamong Praja dan Damkar.
2. Dukungan Anggaran yang belum memadai akibat kemampuan keuangan daerah yang terbatas, sehingga pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja belum maksimal.
3. Disiplin dan Profesionalisme Anggota Satuan Polisi Pamong Praja dan Damkar yang masih kurang karena minimnya Diklat Profesi dan Bimbingan Tehnis serta Sarana dan Prasarana Pendukung.
4. Hingga saat ini Badan Penanggulangan Bencana Daerah belum memiliki gedung kantor yang memadai untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi secara maksimal. Jumlah ruangan kerja yang tersedia saat ini sangat terbatas, begitu juga dengan ruangan posko untuk Tim Reaksi Cepat (TRC) yang tidak tersedia
5. Masih rendahnya kapasitas pemerintah, masyarakat dan stake holder yang terkait dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana
6. Masih kurangnya jumlah PNS, yang saat ini hanya diisi oleh 14 orang yang seharusnya sebanyak 22 orang jika disesuaikan

**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2023**

dengan analisis beban kerja

7. Masih Kurangnya Sarana Prasarana
8. Adapun solusi dari permasalahan tersebut adalah :
9. Perlunya Bimbingan Tekhnis dalam rangka peningkatan Sumber Daya Aparatur Anggota Satpol.PP dan Damkar.
10. Perlunya Tambahan Anggaran dalam menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Damkar.
11. Perlunya Diklat terkait tugas dan fungsi Satpol.PP dan Pemadam dalam menunjang Penegakan Peraturan Daerah.
12. Peningkatan Kelembagaan
13. Peningkatan kapasitas pemerintah, masyarakat dan stake holder yang terkait dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana melalui sosialisasi bagi masyarakat terkait mitigasi bencana, bimbingan teknis serta Pendidikan dan pelatihan bagi petugas dan aparat penyelenggara penanggulangan bencana
14. Peningkatan Kelembagaan dan pengisian jabatan lowong
15. Penambahan Sarana dan Prasarana dan Penambahan Anggaran

4.4.6 Bidang Urusan Sosial

Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Kabupaten/kota harus ada untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (6) Peraturan Pemerintah 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2) dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/kota. Dari hal tersebut maka Kabupaten Bulukumba khususnya Dinas Sosial Kabupaten Bulukumba telah menerapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

4.4.6.1 Jenis Pelayanan Dasar

Jenis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal bidang sosial di daerah kabupaten/kota terdiri atas:

1. Rehabilitasi Sosial dasar Penyandang Disabilitas Telantar di luar Panti;
2. Rehabilitasi Sosial dasar Anak Telantar di luar Panti;
3. Rehabilitasi Sosial dasar Lanjut Usia Telantar di luar Panti;
4. Rehabilitasi Sosial dasar Gelandangan dan Pengemis di luar Panti;
5. Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana daerah kabupaten/kota.

4.4.6.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar

Jenis pelayanan dasar adalah jenis-jenis pelayanan dasar yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah yang telah ditetapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) nya oleh Pemerintah melalui Permendagri 59 tahun 2021. Adapun jenis pelayanan dasar dan indikator yang harus dicapai dalam penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial adalah sebagai berikut :

Tabel 21.

Target dan Indikator Penerima Layanan Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial menurut Permendagri 59 tahun 2021.

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Batas Waktu Pencapaian
1.	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantardiluar panti	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100 %	Setiap Tahun
2.	Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti	Jumlah anak telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100 %	Setiap Tahun

**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2023**

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Batas Waktu Pencapaian
3.	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlanjar diluar panti	Jumlah Warga Negara lanjut usia terlanjar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100 %	Setiap Tahun
4	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	Jumlah Warga Negara/ gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasartuna sosial diluar panti	100 %	Setiap Tahun
5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap & paska bencana bagi korban bencana kab/kota	Jumlah Warga Negara korban bencana kab/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan social	100 %	Setiap Tahun

Sumber : Permendagri Nomor 59 Tahun 2021

4.4.6.3 Realisasi

Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial selanjutnya merupakan tolak ukur kinerja pelayanan Dasar melalui jalur yang diselenggarakan Dinas Sosial Kabupaten Bulukumba. Untuk melihat Realisasi capaian Standar Pelayanan Minimal Dinas Sosial Kabupaten Bulukumba Tahun 2023, dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2023

Tabel 22.
 Realisasi Capaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Dinas
 Sosial Kabupaten Bulukumba Tahun 2023.

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Capaian		
			Jumlah penduduk yang berhak dilayani (Orang)	Jumlah penduduk yang mendapatkan pelayanan (Orang)	Capaian (%)
1.	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar diluar panti	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	133	133	100
2.	Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti	Jumlah anak telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	92	92	100
3.	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar diluar panti	Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	89	89	100
4	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	Jumlah Warga Negara/ gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti	39	39	100
5.	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap & paska bencana bagi	Jumlah Warga Negara korban bencana kab/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan social	101	101	100

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2023

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Capaian		
			Jumlah penduduk yang berhak dilayani (Orang)	Jumlah penduduk yang mendapatkan pelayanan (Orang)	Capaian (%)
	korban bencana kab/kota				

Sumber : Data Capaian SPM Dinas Dinas Sosial kabupaten bulukumba, tahun 2023

Dalam pencapaian indikator Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial memperlihatkan hasil yang cukup bervariasi yang terlihat dari 5 (lima) jenis pelayanan dasar yang masing masing mempunyai indikator capaian yang diurai sebagai berikut :

- Jumlah warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti dengan hasil capaian 100% dengan jumlah yang berhak mendapatkan layanan sebanyak 133 orang target dapat terlayani secara maksimal.
- Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti tidak memperlihatkan capaian 100% dengan jumlah yang berhak mendapatkan layanan sebanyak 92 orang target dapat terlayani secara maksimal.
- Jumlah warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti dengan hasil capaian 100 % dengan jumlah orang yang berhak mendapatkan layanan sebanyak 89 orang target dapat terlayani secara maksimal.
- Jumlah warga Negara gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti memperlihatkan capaian 100 % dengan jumlah orang yang berhak mendapatkan layanan sebanyak 39 orang target dapat terlayani secara maksimal.

**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2023**

- e. Jumlah warga Negara korban bencana yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial dengan hasil capaian 100 % terlihat dari 101 orang target dapat terlayani secara maksimal.

4.4.6.4 Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran tahun 2023 di Dinas Sosial Kabupaten Bulukumba dalam rangka pencapaian target Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Kabupaten Bulukumba berdasarkan program dan kegiatan yang mendukung pencapaian SPM adalah sebagai berikut :

Tabel 23.

Alokasi Anggaran Penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial
Dinas Sosial Kabupaten Bulukumba Tahun 2023.

No.	Program	Kegiatan	Anggaran (Rp.)
1.	Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis di luar panti sosial	155.949.675,-
2.	Perlindungan dan Jaminan Sosial	Pemeliharaan Anak-anak terlantar	11.999.750,-
3.	Program Penanganan Bencana	Perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial kabupaten/kota	20.805.150,-
		Penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana kabupaten/kota	514.635.220,-

4.4.6.5 Dukungan Personil

Dukungan personil menggambarkan jumlah personil atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada Dinas Sosial Kabupaten Bulukumba sebanyak 100 orang dengan kualifikasi sebagai berikut:

Tabel 24.

Dukungan Personil dalam pencapaian Standar Pelayanan Minimal Dinas Sosial Kabupaten Bulukumba, Tahun 2023.

No	Personil/tenaga	Jumlah (Orang)
1.	Gol. IV	3
2.	Gol. III	13
3.	Gol. II	5
4.	TAGANA	77
5.	Sakti Peksos Anak	1
6.	Pendamping Disabilitas	1
<i>Jumlah</i>		100

Sumber : Data personil pendukung SPM Dinas Sosial Kabupaten Bulukumba, Tahun 2023.

Dinas Sosial Kabupaten Bulukumba sebagai organisasi perangkat pemerintah daerah yang bertanggung jawab memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan pembangunan bidang kesejahteraan sosial di Kabupaten Bulukumba sehingga dalam melaksanakan tugas dan fungsinya perlu mengoptimalkan sumber daya manusia yang baik maupun sarana penunjang.

Dari tabel diatas terlihat bahwa kondisi sumber daya manusia khususnya personil/tenaga pendukung dalam pencapaian SPM pada Dinas Sosial Kabupaten Bulukumba dinilai masih kurang yaitu sebanyak 100 orang yang terdiri dari Taruna siaga bencana, Sakti peksos, Pendamping lansia dan Pendamping disabilitas. Dari jumlah tersebut dinilai masih kurang adalah pada Pendamping disabilitas hanya 1 orang, dan Sakti peksos hanya 1 orang Sehingga dalam teknis pelaksanaan kegiatan masih mengandalkan tenaga Non PNS atau tenaga Outsorching.

4.4.6.6 Permasalahan dan Solusi

Permasalahan yang dihadapi saat ini dalam pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial Kabupaten Bulukumba adalah :

1. Belum tersedianya data akurat dan valid yang menjadi indikator pencapaian Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)
 - a. Adapun solusi dari permasalahan tersebut adalah :

Melakukan koordinasi dengan pihak terkait dalam rangka pelaksanaan kegiatan pendataan

4.4.7 Program Dan Kegiatan

Dalam penerapan SPM tahun 2023 di Kabupaten Bulukumba, harus ditunjang dengan program/kegiatan dan terintegrasi dengan dokumen perencanaan. Adapun program/kegiatan yang terkait dengan penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk setiap Bidang/Urusan adalah sebagai berikut

a. Program/Kegiatan Bidang Urusan Pendidikan

Program/kegiatan yang terkait dengan penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan adalah :

Program Pengelolaan Pendidikan

1. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar
2. Pengelolaan Sekolah Menengah Pertama
3. Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
4. Pengelolaan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan

b. Program/Kegiatan Bidang Urusan Kesehatan

Program/kegiatan yang terkait dengan penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan sebagai berikut :

1. Pelayanan Ibu Hamil
2. Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
3. Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir
4. Pelayanan Kesehatan Balita
5. Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar
6. Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif
7. Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut
8. Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi
9. Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Mellitus (DM)

**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2023**

- 10 Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat
- 11 Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkolosis
- 12 Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi Virus yang melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (HIV)
- 13 Pemenuhan upaya kesehatan perorangan masyarakat

c. Program/Kegiatan Bidang Urusan Pekerjaan Umum

Program/kegiatan yang terkait dengan penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pekerjaan Umum adalah :

1. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
 - a. Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan Kawasan Perdesaan
2. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah
 - a. Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Kota

d. Program/Kegiatan Bidang Urusan Perumahan Rakyat

Program/kegiatan yang terkait dengan penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Perumahan Rakyat adalah :

1. Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana
 - a. Kegiatan pengawasan rehabilitasi rumah korban bencana
 - b. Kegiatan perencanaan rehabilitasi rumah korban bencana
 - c. Kegiatan rehabilitasi rumah bagi korban bencana
2. Pembangunan Hunian Sementara
 - a. Rehabilitasi rumah bagi korban bencana
 - b. Perencanaan Pembangunan Hunian Sementara
 - c. Pembangunan Hunian Sementara
3. Pembangunan MCK Hunian Sementara
 - a. Pembangunan MCK Hunian Sementara
 - b. Pengawasan Pembangunan MCK Hunian Sementara

- c. Perencanaan Pembangunan MCK Hunian Sementara

e. Program/Kegiatan Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Program/kegiatan yang terkait dengan penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Urusan Ketentraman, Ktertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat adalah :

- a. Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum
- b. Kegiatan Penanngan gangguan ketentraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten Bulukumba
- c. Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan

Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran

- a. Kegiatan pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelematan dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam daerah Kabupaten/Kota

Program Penanggulangan Bencana

- a. Kegiatan pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana
- b. Kegiatan pelayanan informasi rawan bencana kab/kota
- c. Pelayanan penyelamatan dan evaluasi korban bencana

f. Program/Kegiatan Bidang Urusan Sosial

Program/kegiatan yang terkait dengan penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang urusan sosial adalah :

- a. Program Rehabilitasi Sosial
- b. Kegiatan Rehabilitasi sosial dasar anak penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis di luar panti sosial

**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2023**

- c. Kegiatan Rehabilitasi sosial penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA di luar panti sosial

Program Perlindungan dan Jaminan Sosial

- a. Kegiatan Pemeliharaan anak-anak terlantar

Program Penanganan Bencana

- a. Kegiatan Perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial kabupaten/kota
- b. Kegiatan penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana kabupaten/kota

**BAB V
PENUTUP**

Demikian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Bulukumba Tahun 2023 ini disusun sebagai dasar evaluasi pemerintah pusat untuk menilai kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam upaya peningkatan kinerja guna mendukung pencapaian tujuan penyelenggaraan otonomi daerah berdasarkan prinsip tata pemerintahan yang baik.

Melalui Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Bulukumba Tahun 2023 ini diharapkan dapat laporan pelaksanaan dan gambaran pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Bulukumba Tahun 2023, karena di dalamnya juga memuat Laporan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP).

Demikian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Bulukumba Tahun 2023 ini disampaikan. Kami sampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Bulukumba Tahun 2023. Semoga Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Bulukumba Tahun 2023 ini dapat bermanfaat dan dapat ditindaklanjuti sebagaimana semestinya.